

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN SINTANG

2016 – 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dan sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 dalam poin kedua yang menginstruksikan agar Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

d. bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 1 PEBRUARI 2017

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 1 PEBRUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 7

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;

c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

9. Peraturan...

9. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sintang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, antara lain unsur DPRD, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), tokoh masyarakat, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

9. Pembangunan...

9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sintang, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat serta memperhatikan RPJMN.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
14. Rencana Stategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk Periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

19. Anggaran...

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati oleh DPRD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
24. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
25. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
26. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menyeluruh serta menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

31. Program...

31. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
32. Kegiatan prioritas adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan dan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau keseluruhan dari sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) atau menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
33. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang disetujui untuk setiap program kegiatan.
34. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
35. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran kuantitas dan kualitas yang terukur.
36. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
37. Potensi lokal adalah kemampuan/kekuatan/daya yang dimiliki oleh suatu daerah/tempat yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat/keuntungan bagi daerah tersebut.
38. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah bentuk usaha kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat baik berupa perdagangan, kerajinan, dan lain-lain.
39. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
40. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
41. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

42. Hasil...

42. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
43. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.
44. Forum SKPD Kabupaten adalah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten.
45. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan pemanfaatan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
46. Provinsi adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
47. Kabupaten adalah kabupaten yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
48. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Sintang hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan langsung pada tahun 2015.

(2) RPJMD Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:

a. Unit Kerja dalam menyusun Renstra SKPD;

b. Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun RKPD;

c. Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun KUA.

Pasal 3...

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a. menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati dengan memperhatikan arah RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sintang;

b. sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun Renstra SKPD, RKPD, serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam musrenbang daerah secara berjenjang.

Pasal 4

Penetapan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, bertujuan untuk:

a. terjabarnya visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;

b. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan dana yang bersumber baik dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun Sumber dana lainnya;

c. mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pembangunan, baik antar SKPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat;

d. tersedianya tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

e. terciptanya iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

f. mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Sintang, swasta, dan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN SISTEMATIKA

Pasal 5

Ruang lingkup dari RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, meliputi:

a. visi, misi, dan program kepala daerah;
b. arah kebijakan keuangan daerah;
c. strategi pembangunan daerah;
d. kebijakan umum;
e. program SKPD;
f. program lintas SKPD;
g. program kewilayahan;
h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif;
i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 6

(1) Visi, misi, dan program kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah terpilih.

(2) Arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

(3) Strategi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

(4) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.

(5) Program...

(5) Program SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.

(6) Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.

(7) Program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/antar kawasan dalam kecamatan di wilayah kabupaten atau antar kabupaten di wilayah provinsi atau dengan provinsi lainnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

(8) Rencana kerja dalam kerangka regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

(9) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

Pasal 7

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dirumuskan secara:

a. transparan;
b. responsif;
c. efisien;
d. efektif;
e. akuntabel;
f. partisipatif;
g. terukur;
h. berkeadilan; dan
i. berwawasan lingkungan.

Pasal 8...

Pasal 8

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, dirumuskan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional;
b. dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Sintang, sesuai dinamika perkembangan Kabupaten Sintang dan Nasional.

Pasal 9

(1) RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2 Neraca Daerah
- 3.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI...

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan
6.2 Penggerak Utama Pembangunan Daerah

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1 Kebijakan Umum
7.2 Program Prioritas
7.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
10.1 Pedoman Transisi
10.2 Kaidah Pelaksanaan

BAB XI PENUTUP

(2) RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang bertujuan untuk mewujudkan:

a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
e. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

(2) Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 12...

Pasal 12

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
c. evaluasi terhadap hasil RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

BAB V
INDIKATOR KINERJA DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS

Pasal 13

Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah:

a. Indikator Cerdas, yang memprioritaskan pada peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, dan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan;
b. Indikator Sehat, memprioritaskan pada revitalisasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan peningkatan kemitraan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan;
c. Indikator Maju, memprioritaskan pada peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup;
d. Indikator Religius, memprioritaskan pada peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat, peningkatan toleransi antar umat beragama, dan pembangunan dan/atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama;
e. Indikator Sejahtera, memprioritaskan pada pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar; dan
f. Indikator Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, memprioritaskan pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan penyederhanaan berbagai peraturan daerah serta reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 14...

Pasal 14

(1) Indikator Kinerja Daerah merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

(2) Penetapan Indikator Kinerja Daerah dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dengan memperhitungkan pendanaan dan waktu pencapaian.

Pasal 15

(1) Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SASARAN CAPAIAN KINERJA	
		Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021
1	2	3	4
1.	**CERDAS**		
	a. Rata-rata lama sekolah	6,63	8,00
	b. Tingkat partisipasi sekolah	97,35	99,15
2.	**SEHAT**		
	a. Angka harapan hidup	70,95	72,45
	b. Angka kelangsungan hidup bayi	970	980
	c. Proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk	109,49	118,00
	d. Angka gizi buruk (%)	2,96	2,00
	e. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan	5,05	5,33
3.	**MAJU**		
	a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90	100
	b. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (PDAM)	4,5	6,6
	c. Persentase penanganan sampah (%)	60	85
	d. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	25,92	60,18
	e. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	48,67	50,89
4.	**RELIGIUS**		
	a. Pemahaman agama pada pemeluk agama	Baik	Baik
	b. Toleransi antar pemeluk agama	Baik	Baik
	c. Rasio rumah ibadah per 1.000 penduduk	1 : 4,00	1 : 4,25

5. SEJAHTERA...

5.	**SEJAHTERA**		
	a. Pertumbuhan ekonomi	5,6	6,9
	b. Pertumbuhan PDRB	5,30	6,04
	c. Laju Inflasi Kabupaten	6,95	6,80
	d. PDRB Perkapita	28 Jt	37,8 Jt
	e. Persentase Koperasi dan UMKM Aktif	67,35	68,10
	f. Ketersediaan pangan utama	97	100
	g. Indeks gini	0,32	0,30
	h. Persentase Jumlah Penduduk Miskin	9,11	7,21
	i. Tingkat pengangguran terbuka	3,06	2,99
	j. Nilai IPM	64,00	69,00
6.	**TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**		
	a. Penetapan APBD tepat waktu	Ya	Ya
	b. Opini WTP dari BPK	Ya	Ya
	c. Penegakan Perda	44	56
	d. Tingkat penyelesaian pelanggaran keamanan dan ketertiban	70%	85%

(2) Uraian lebih lanjut dan rinci mengenai Indikator Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17...

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 10 Agustus 2016

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (/2016)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 4 TAHUN 2016
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2016
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3. Hubungan antar Dokumen I-5
1.4. Sistematika Penulisan I-6
1.5. Maksud dan Tujuan I-7
1.5.1. Maksud I-7
1.5.2. Tujuan I-8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1. Karakter Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi II-1
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis II-2
2.1.1.3. Tofografi II-2
2.1.1.4. Geologi II-3
2.1.1.5. Hidrologi II-4
2.1.1.6. Klimatologi II-7
2.1.1.7. Penggunaan Lahan II-10
2.1.2. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah II-11
2.1.3. Demografi II-16
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-16
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-17
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB II-17
2.2.1.2. PDRB Perkapita II-20
2.2.1.3. Laju Inflasi Kabupaten II-21
2.2.1.4. Pemerataan II-22
2.2.1.5 Kemiskinan II-23
2.2.1.6. Kriminalitas II-24
2.2.2. Kesejahteraan Sosial II-25
2.2.2.1. Pendidikan II-25
2.2.2.2. Kesehatan II-30
2.2.2.3. Kesempatan Kerja II-32
2.2.3. Seni Budaya dan Olah Raga II-32
2.3. Aspek Pelayanan Umum II-32
2.3.1. Layanan Urusan Wajib II-32
2.3.1.1. Pendidikan II-32
2.3.1.1.1. Pendidikan Dasar II-32
2.3.1.2. Kesehatan II-35
2.3.1.3. Lingkungan Hidup II-39
2.3.1.4. Sarana dan Prasarana Umum II-42
2.3.1.5. Penataan Ruang II-53
2.3.1.6. Perhubungan II-54
2.3.2. Layanan Urusan Pilihan II-66

2.3.2.1. Pertanian dan Perkebunan II-55
2.3.2.2. Peternakan II-57
2.3.2.3. Kehutanan II-58
2.3.2.4. Perikanan II-64
2.3.2.5. Perdagangan II-66
2.3.2.6. Perindustrian II-68
2.3.2.7. Penanaman Modal II-71
2.3.2.8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) II-75
2.3.2.9. Kependudukan II-79
2.3.2.10. Ketenagakerjaan II-82
2.3.2.11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera II-82
2.3.2.12. Pemberdayaan masyarakat dan desa II-83
2.3.2.13. Perpustakaan II-84
2.3.2.14. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat II-85
2.3.2.15. Pemuda dan Olah Raga II-87
2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-87
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah II-87
2.4.2. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur II-88
2.4.2.1. Aksesibilitas daerah II-88
2.4.2.2. Fasilitas bank dan non bank II-89
2.4.2.3. Ketersediaan Air Bersih II-90
2.4.2.4. Fasilitas Listrik II-91
2.4.2.5. Ketersediaan restoran II-92
2.4.2.6. Ketersediaan penginapan II-93
2.4.3. Iklim Berinvestasi II-94
2.4.3.1. Keamanan dan ketertiban II-94
2.4.3.2. Kemudahan perijinan II-95
2.4.4. Sumber Daya Manusia II-95

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD III-1
3.1.2. Neraca Daerah III-2
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-4
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran III-4
3.2.2. Analisis Pembiayan Daerah III-8
3.3. Kerangka Pendanaan III-9
3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama III-9
3.3.2. Pendapatan Masa Lalu (2011-2015) III-10
3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan III-11

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan IV-1
4.1.1. Permasalahan bidang ekonomi IV-1
4.1.2. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah IV-1
4.1.3. Permasalahan Infrastruktur Transportasi IV-2
4.1.4. Permasalahan Bidang Cipta Karya IV-2
4.1.5. Permasalahan Bidang Perumahan dan Tata Ruang IV-2
4.1.6. Permasalahan Bidang Perhubungan IV-3
4.1.7. Permasalahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral IV-3
4.1.8. Permasalahan Bidang Sumber Daya Air IV-3
4.1.9. Permasalahan Bidang Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam IV-4

4.1.10.Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup IV-6
4.1.11.Permasalahan Bidang Pendidikan..... IV-6
4.1.12.Permasalahan Bidang Kesehatan..... IV-7
4.1.13.Permasalahan Kemiskinan dan Pengangguran..... IV-7
4.1.14.Permasalahan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Ham..... IV-7
4.2. Penentuan Isu-Isu strategis..... IV-8
4.2.1. Isu Strategis Bidang Ekonomi..... IV-8
4.2.2. Isu Strategis Pengelolaan Keuangan Daerah..... IV-8
4.2.3. Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup IV-9
4.2.4. Isu Strategis Bidang Pengelolaan Sumber Daya Pertanian IV-9
4.2.5. Isu Strategis Bidang Infrastruktur IV-11
4.2.6. Isu Strategis Bidang Kesejahteraan Sosial..... IV-12
4.2.7. Isu Strategis Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM..... IV-12

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN V-1
5.1. Visi V-1
5.2. Misi V-3
5.3. Tujuan dan Sasaran V-4

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... VI-1
6.1. Strategi dan arah Kebijakan VI-1
6.2. Penggerak Utama Pembangunan Daerah VI-11

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-1
7.1. Kebijakan Umum..... VII-1
7.2. Program Prioritas..... VII-4
7.3. Arah kebijakn Pembangunan Kewilayahan..... VII-38
7.3.1. Arah Kebijakan Pembentukan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten VII-38
7.3.2. Pembentukan Pola Ruang Wilayah Kabupaten..... VII-47
7.3.3. Pembentukan Kawasan -Kawasan Strategis Kabupaten VII-60

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KABUTUHAN PENDANAAN..... VIII-1

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX-1

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN..... X-1
10.1. Pedoman Transisi X-1
10.2. Kaidah Pelaksanaan X-1

BAB XI. PENUTUP XI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Luas wilayah Kabupaten Sintang Per Kecamatan..... II-1
Gambar 2.2. Grafik pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Tahun 2011-2014..... II-18
Gambar 2.3. Grafik Persentase Keluarga Diperiksa, Keluarga Memiliki jamban dan keluarga dengan jamban sehat menurut pusekesmas Kabupaten Sintang Tahun 2013..... II-49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Sintang Menurut Ketinggiannya II-3
Tabel 2.2
Cakupan Wilayah dan Luasan DAS Kabupaten Sintang II-5
Tabel 2.3
Profil Sungai di Kabupaten Sintang II-6
Tabel 2.4
Profil Danau di Kabupaten Sintang II-7
Tabel 2.5
Keadaan Iklim Wilayah Kabupaten Sintang II-8
Tabel 2.6
Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Bulanan Di Stasiun Meteorologi Susilo Sintang II-8
Tabel 2.7
Kecepatan Angin Dan Temperatur Bulanan Pada Stasiun Meteorologi Susilo Sintang Tahun 2015 ... II-9
Tabel 2.8
Rata-Rata Lembab Nisbi Di Stasiun Meteorologi Susilo Sintang Tahun 2015 ..... II-9
Tabel 2.9
Rata-Rata Tekanan Udara Di Stasiun Meteorologi Susilo Sintang Tahun 2015 ..... II-10
Tabel 2.10
Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Sintang II-11
Tabel 2.11
Potensi Investasi Sektor Perkebunan II-11
Tabel 2.12
Potensi Investasi Sektor Kehutanan II-12
Tabel 2.13
Potensi Investasi Sektor Pertanian II-13
Tabel 2.14
Potensi Investasi Sektor Perikanan Tahun 2014 ..... II-13
Tabel 2.15
Potensi Investasi Sektor Peternakan di Kabupaten Sintang II-14
Tabel 2.16
Potensi Bahan Galian Pertambangan di Kabupaten Sintang II-14
Tabel 2.17
Potensi Obyek Pariwisata di Kabupaten Sintang II-15
Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Sintang II-16
Tabel 2.19
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha % di Kabupaten Sintang 2011-2014 ..... II-17
Tabel 2.20
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sintang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2010-2014 ..... II-18
Tabel 2.21
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sintang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2010-2014 ..... II-19
Tabel 2.22
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) di kabupaten Sintang, 2010-2014 ..... II-20
Tabel 2.23
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp) di kabupaten Sintang, 2010-2014 ..... II-21
Tabel 2.24
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2010-2014 Kabupaten Sintang II-22
Tabel 2.25
Indeks Gini kabupaten Kota di Kalimantan Barat Tahun 2008-2013..... II-22
Tabel 2.26
Perkembangan IPM Kabupaten Sintang Tahun 2010-2014 ..... II-23
Tabel 2.28.
Angka Kriminalitas Kabupaten Sintang Tahun 2014 ..... II-2

Tabel 2.29
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Sintang II-25
Tabel 2.30
Perkembangan APM, AMH dan Rata-rata Lama Sekolah 2011 s.d 2015 Kabupaten Sintang II-26
Tabel 2.31
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Sintang II-27
Tabel 2.32
Angka Partisipasi Murni Tahun 2015 menurut Kecamatan Kabupaten Sintang II-27
Tabel 2.33
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Sintang..... II-28
Tabel 2.34
Angka Partisipasi Kasar Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kabupaten Sintang II-29
Tabel 2.35
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2014 Kabupaten Sintang II-30
Tabel 2.36
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Sintang Tahun 2015 ..... II-31
Tabel 2.37
Angkatan Kerja yang Bekerja dan Mencari Pekerjaan Menurut Golongan Umur di Kabupaten Sintang Tahun 2014 ..... II-32
Tabel 2.38
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2014 Kabupaten Sintang II-32
Tabel 2.39
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Sintang II-33
Tabel 2.40
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah menurut kecamatan Kabupaten Sintang Tahun 2015 ..... II-34
Tabel 2.41
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Sintang II-34
Tabel 2.42
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Sintang II-36
Tabel 2.43
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Sintang II-36
Tabel 2.44
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Sintang II-37
Tabel 2.45
Jumlah Puskesmas Poliklinik dan Pustu Tahun 2011 s.d 2015 per 1000 penduduk Kabupaten Sintang II-36
Tabel 2.46
Jumlah Puskesmas. Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Sintang (per 100 ribu penduduk) II-37
Tabel 2.47
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Sintang II-37
Tabel 2.48
Jumlah Dokter Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Sintang II-38
Tabel 2.49
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2015 per 100 ribu penduduk Kabupaten Sintang II-38
Tabel 2.50
Jumlah Tenaga Medis Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Sintang..... II-38
Tabel 2.51
Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Sintang II-39
Tabel 2.52
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Sintang II-40
Tabel 2.53
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Sintang II-40

Tabel 2.54
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses PDAM dan Jumlah Penduduk Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Sintang II-41
Tabel 2.55
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses PDAM dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Sintang II-41
Tabel 2.56
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan tahun 2014 Kabupaten Sintang ... II-43
Tabel 2.57
Rasio Jaringan Irigasi dan Lahan Budaya Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Sintang II-44
Tabel 2.58
Rasio Jaringan Irigasi menurut Kecamatan tahun 2014 Kabupaten Sintang..... II-45
Tabel 2.59
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Sintang II-46
Tabel 2.60
Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Sintang II-46
Tabel 2.61
Rasio Tempat Ibadah Tahun 2014 Kabupaten Sintang II-47
Tabel 2.62
Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Sintang II-48
Tabel 2.63
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2014 ..... II-50
Tabel 2.64
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Sintang II-51
Tabel 2.65
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2015 .. II-51
Tabel 2.66
Prosentase Penanganan Sampah Per Kecamatan Tahun 2014 ..... II-52
Tabel 2.67
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Sintang II-53
Tabel 2.68
Banyaknya Kendaraan Wajib Uji Yang Terdata Kabupaten Sintang Tahun 2014 ..... II-54
Tabel 2.69
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2010 - 2014 Kabupaten Sintang II-55
Tabel 2.70
Produksi Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2014 Kabupaten Sintang II-56
Tabel 2.71
Produksi dan Nilai Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2015 Kabupaten Sintang II-57
Tabel 2.72
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Di Kabupaten Sintang Tahun 2014 (Ekor)..... II-57
Tabel 2.73
Luas Kawasan Hutan (Ha) di Kabupaten Sintang Tahun 2015 ..... II-60
Tabel 2.74
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang..... II-61
Tabel 2.75
Luas Lahan Kritis Tahun 2010 s/d 2014 Kabupaten Sintang II-63
Tabel 2.76
Luas Kawasan Hutan Tahun 2010 s/d 2014 Kabupaten Sintang II-63
Tabel 2.77
Luas Lahan Kritis di Kabupaten Sintang Tahun 2010 (Ha) II-64
Tabel 2.78
Produksi Perikanan Menurut Sektor Perikanan 2010-2014 (Ton) II-64
Tabel 2.79
Produksi Perikanan Di Perairan Umum Menurut Jenis Ikan Tahun 2010-2014 (Ton) II-65
Tabel 2.80
Jumlah Sarana Produksi Perikanan Di Kabupaten Sintang Tahun 2010-2014 ..... II-65

Tabel 2.81
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sintang Tahun 2010-2014 ..... II-66
Tabel 2.82
Perkembangan Pembangunan Pasar dan Jumlah Pedagang di Kabupaten Sintang Tahun 2010-2014 ..... II-67
Tabel 2.83
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Sintang Tahun 2010-2014 ..... II-68
Tabel 2.84
Perkembangan jumlah IKM aktif Kabupaten Sintang Tahun 2010-2014 ..... II-70
Tabel 2.85
Perkembangan jumlah Perusahaan Industri Besar aktif Kabupaten Sintang Tahun 2010-2014 ..... II-71
Tabel 2.86
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2010-2014 Kabupaten Sintang II-71
Tabel 2.87
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Sintang II-73
Tabel 2.88
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Sintang II-74
Tabel 2.89
Jumlah Koperasi Aktif per Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2014 ..... II-75
Tabel 2.90
Modal, Volume Usaha, SHU, dan Aset Koperasi per Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2014 .. II-77
Tabel 2.91
Jumlah UKM per Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2014 ..... II-78
Tabel 2.92
Jumlah BPR/LKM Tahun 2010 s.d 2013 Kabupaten Sintang II-79
Tabel 2.93
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sintang Tahun 2014 ..... II-79
Tabel 2.94
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sintang II-80
Tabel 2.95
Proyeksi Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Sintang II-80
Tabel 2.96
Proyeksi Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Sintang II-81
Tabel 2.97
Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Tahun 2014 Kabupaten Sintang II-81
Tabel 2.98
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2013 Kabupaten Sintang II-82
Tabel 2.99
Rasio Akseptor KB Tahun Tahun 2010 s.d 2015 Kabupaten Sintang..... II-82
Tabel 2.100
Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Sintang..... II-83
Tabel 2.101
Jumlah LSM aktif Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Sintang II-83
Tabel 2.102
Jumlah Perpustakaan Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Sintang II-84
Tabel 2.103
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Sintang II-85
Tabel 2.104
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Sintang..... II-86
Tabel 2.105
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Sintang..... II-86
Tabel 2.106
Nilai Tukar Petani Tahun 2010-2014 Kabupaten Sintang II-88
Tabel 2.107
Arus Kendaran dan Penumpang Darat Tahun 2014 ..... II-89
Tabel 2.108
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Kabupaten Sintang II-89
Tabel 2.109

Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih PDAM Kabupaten Sintang II-91
Tabel 2.110
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Sintang II-92
Tabel 2.111
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Sintang II-93
Tabel 2.112
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Sintang II-94
Tabel 2.113
Angka Kriminalitas Kabupaten Sintang II-94
Tabel 2.114
Lama Proses Perijinan Kabupaten Sintang II-95
Tabel 2.115
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Sintang II-96
Tabel 2.116
Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Sintang II-96
Tabel 3.1
Komposisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Sintang Tahun 2011 – 2015 (Rp Juta) III-2
Tabel 3.2
Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 – 2015 (Rp Juta) III-2
Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Kabupaten Sintang Tahun 2011 – 2015 (Rp Juta) III-5
Tabel 3.3
Realisasi Belanja Kabupaten Sintang Tahun 2011 – 2015 (Rp Juta) III-7
Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Sintang Tahun 2011 – 2015 (Rp Juta) III-8
Tabel 3.6
Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Sintang Tahun 2011 – 2015 (Rp Juta) III-10
Tabel 3.7
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Sintang Tahun 2011 – 2015 (Rp Juta) III-11
Tabel 3.8
Prediksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (dalam Juta Rupiah) III-12
Tabel 3.9
Prediksi Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (dalam Juta Rupiah) III-12
Tabel 3.10
Prediksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (dalam Juta Rupiah) III-13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sintang memiliki luas wilayah sekitar 21.635 Km^2 dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang (31.241 Km^2) dan Kabupaten Kapuas Hulu (29.842 Km^2). Disamping memiliki wilayah yang relatif luas, Kabupaten Sintang juga memiliki posisi geografis sangat strategis karena wilayahnya yang berbatasan dengan Negara Bagian Serawak di Malaysia dan letaknya yang berada persis di tengah-tengah kabupaten lain yang ada di kawasan timur Kalimantan Barat. Artinya, dengan posisi geografis yang demikian, daerah ini sangat potensial digunakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah di kawasan timur Kalimantan Barat, sekaligus sebagai gerbang ekonomi keluar melalui perbatasan darat dengan Negara Bagian Sarawak di Malaysia. Sudah barang tentu, upaya pemanfaatan posisi geografis ini membutuhkan proses perencanaan yang lebih terarah, terpadu, menyeluruh, sinergis, dan harmonis antar sektor, antar waktu, antar kecamatan, dan antar level pemerintahan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini juga mengatur bahwa setiap daerah wajib memiliki dokumen perencanaan dalam jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Merujuk kepada peraturan tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Dengan demikian RPJMD ini merupakan dokumen strategis dan langkah awal untuk merealisasikan janji-janji yang telah disampaikan pasangan terpilih dr. H. Jarot Winarno, M.Med. PH dan Drs. ASKIMAN, MM, kepada publik sebelum pemilihan. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Untuk itu, maka proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di daerah seperti RTRW dan RPJPD, juga dengan dokumen perencanaan pada level pemerintahan yang lebih tinggi seperti RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 dan RPJMN tahun 2015-2019. Rancangan semacam ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Berbagai program itu diupayakan bisa saling mendukung dan terhindar dari tumpang tindih. Pada akhirnya, berbagai program pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat mempercepat Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada tahun 2021.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional, yang ditegaskan di dalam pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di daerah terintegrasi dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini juga didasarkan pada perangkat hukum (dokumen-dokumen) yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61-400 dan Nomor 132-61-401 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)D Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnnya adalah sebagai berikut:

(1) RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sintang

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan RPJMD Ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sintang masa bakti tahun 2016-2021, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025.

(2) RPJMD dan RTRW Kabupaten Sintang

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sintang sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sintang.

(3) RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sintang.

(4) RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan pokok bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sintang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab: Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan Antar Dokumen RPJM dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya; Sistematika Penulisan Dokumen; dan Maksud dan Tujuan.

II. Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini terdiri dari sub bab Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Pelayanan Umum; dan Aspek Daya Saing Daerah.

III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Beserta Kerangka Pendanaan. Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan dalam tahap perumusan ke dalam sub bab Kinerja Keuangan Masa Lalu; KebijakanPengelolaan Keuangan Masa Lalu; dan Kerangka Pendanaan;

IV. Analisis Isu-Isu Strategis. Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah, dengan memperhatikan dinamika kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Kabupaten Sintang.

V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisikan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD atau kepala daerah terpilih dan jangka waktunya.

VI. Strategi dan Arah Kebijakan. Pada bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan. Dalam bab ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.

VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan. Dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintahan dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini juga disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah, bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun.

X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. Bab ini menguraikan tentang RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama kepemimpinan Bupati periode berikutnya, dan kaidah pelaksanaan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dalam dokumen RPJMD.

XI. Penutup. Pada bab ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sintang dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sintang.

RPJMD Kabupaten Sintang juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan

Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Sintang secara berjenjang.

1.5.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

(1) Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati dan Wakil Bupati Sintang ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;

(2) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Sintang, APBD Provinsi Kalimantan Barat, APBN, dan sumber dana lainnya;

(3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dengan Pemerintah Provinsi, dan dengan Pemerintah Pusat;

(4) Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

(5) Menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

(6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

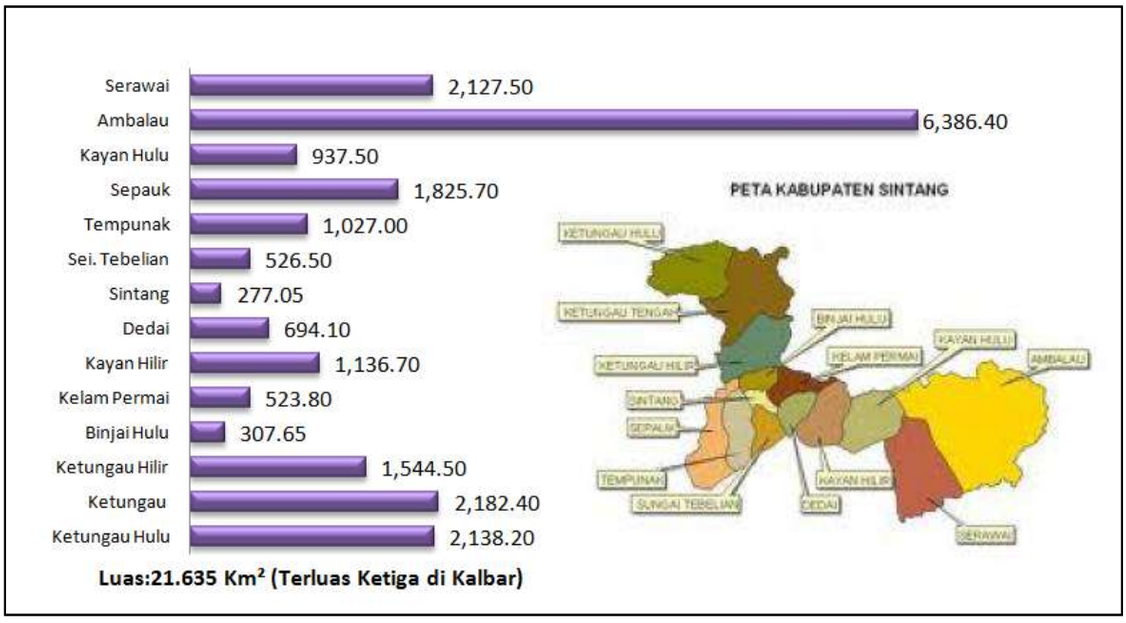
2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakter Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas Wilayah dan Batas Administrasi

Kabupaten Sintang merupakan Kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km². Jarak antara Kabupaten Sintang dengan Ibukota Provinsi yaitu 395 km². Secara administratif, wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 391 Desa. Kecamatan-Kecamatannya adalah: Ambalau, Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, Sepauk, Serawai, Tempunak dan Kecamatan Sintang. Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 6.386,40 Km² (29,52%) dari luas Kabupaten Sintang. Sedangkan luas masing–masing Kecamatan lainnya hanya berkisar 1–29 persen dari luas Kabupaten Sintang. Adapun Kecamatan terkecil wilayahnya adalah Sintang, seluas 277,05 Km² (1,28%). Gambaran luas wilayah di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Gambar 2.1. di bawah ini. Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam hal pemetaan luas wilayah Kecamatan, pertama ketimpangan luas wilayah, meskipun sebagian besar wilayah Kecamatan memiliki luas yang relatif seimbang, namun terdapat satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Ambalau yang memiliki area yang terlalu luas.



Gambar 2.1. Luas wilayah Kabupaten Sintang Per Kecamatan

Keadaan ini relatif menyulitkan masyarakatnya untuk mendapatkan akses pembangunan yang lebih mudah dan murah. Kedua, masalah perbatasan antar negara, di mana terdapat dua Kecamatan yaitu Kecamatan Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu, yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia. Terdapat dua tantangan yang kadang-kadang dilematis untuk disikapi. Tantangan pertama dalam bentuk peluang pengembangan ekonomi masyarakat. Tantangan kedua dalam bentuk dampak letak akses perbatasan yang cenderung menyajikan kegiatan ekonomi yang bersifat illegal, serta memporakporandakan budaya masyarakat tradisional.

2.1.1.2. Letak dan kondisi geografis

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur di Provinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan Ibukotanya Sintang terletak di antara 1˚ 05′ Lintang Utara dan 0˚ 46´ Lintang Selatan serta 110˚ 50´ Bujur Timur dan 113˚ 20´ Bujur Timur. Secara geografis batas administrasi Kabupaten Sintang berbatasan dengan wilayah Kabupaten, Propinsi dan Negara Lain, yaitu :
Letak geografisnya adalah :

- Utara berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Selatan berbatasan dengan kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi serta Kabupaten Ketapang.
- Timur berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Sanggau dan Sekadau.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, khususnya negara bagian Serawak. Wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia adalah Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.

2.1.1.3. Tofografi

Wilayah Kabupaten Sintang merupakan daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km²). Sebagai daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, Sintang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Intensitas curah hujan di daerah ini sebesar 249,08 milimeter perbulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari perbulan, tantangan berat dari kondisi topografi ini adalah bagaimana meningkatkan upaya-upaya pemanfaatan lahan hendaknya disinkronisasikan antara komoditas yang akan ditanam dengan kondisi lahan agar ekosistemnya terjaga dan produktivitasnya optimal. Kabupaten Sintang dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi, yaitu: Gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan Serawai, Gunung Batu Maherabut (tinggi 1.270 m), Gunung Batu

Baluran (tinggi 1.556 m), dan Gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau.

Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata, namun hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan masyarakat di luar wilayah Kabupaten Sintang dan warga Sintang sendiri masih banyak yang belum mengetahui potensi alam tersebut.

Potensi alam tersebut berupa air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 7 Kecamatan, yaitu Sepauk, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Serawai, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki 4 gunung yang terdapat di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau. Kondisi tofografi wilayah Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kabupaten Sintang Menurut Ketinggiannya

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Wilayah Datar (Ha)	Wilayah Bukit dan Gunung / (Ha)
1.	S e r a w a i	212.750	-	212.750
2.	A m b a l a u	638.640	-	638.640
3.	Kayan Hulu	93.750	29.573	64.177
4.	S e p a u k	182.570	71.936	110.634
5.	Tempunak	102.700	58.632	44.068
6.	Sungai Tebelian	52.650	49.850	2.800
7.	S i n t a n g	27.705	27.705	-
8.	D e d a i	69.410	57.792	11.618
9.	Kayan Hilir	113.670	88.838	24.832
10.	Kelam Permai	52.380	49.780	2.600
11.	Binjai Hulu	30.765	30.021	744
12.	Ketungau Hilir	154.450	127.954	26.496
13.	Ketungau Tengah	218.240	121.116	97.124
14.	Ketungau Hulu	213.820	92.928	120.892
Kabupaten Sintang		2.163.500	806.125	1.357.375

Sumber : *Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang*

2.1.1.4. Geologi

Berdasarkan peta geologi, Kabupaten Sintang meliputi formasi Alat Sandstone, Alluvial Deposits, Betung Volcanics, Dangkan Sandstone, Disected Alluvial Deposits, Haloq Sandstone, Ingar Formation, Kantu Formation, Ketungau Formation, Mensibau Granodiorite, Payak Formation, Pinoh Metamorphics, Reef Limestone, Sekayam Sandstone, Selangkai Group, Semitau Complex, Sepauk Tonalite, Silat Shale, Sintang Intrusives, Sukadana

Granite, Talus Deposit, Tebidah Formation, Tutoop Sandstone, dan Undiff Melawi Group. Berbagai lapisan batuan yang tersebut terdapat di seluruh lapisan di wilayah Kabupaten Sintang.

Jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten Sintang adalah Tebidah Formation seluas 410.448,58 Ha atau mencapai 18,61% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di kecamatan-kecamatan Ambalau, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Sepauk, Serawai, Sintang, Sui Tebelian,dan Tempunak. Selanjutnya batuan dominan berikutnya adalah Mensibau Granodiorite yang mencapai 10,70% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sepauk, Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai.

Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99 % dari luas daerah yaitu 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 % yang terhampar hampir di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol hanya sekitar 0,05 juta hektar atau sebesar 2,08 %.

2.1.1.5. Hidrologi

Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta dua sungai kecil yaitu Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.

Sistem hidrologi wilayah Kabupaten Sintang memiliki 8 buah DAS yang meliputi DAS Ambalau, DAS Hulu Melawi,DAS Jungkit, DAS Kayan, DAS Ketungau, DAS Lebang dan Kebiyau, DAS Melawi dan DAS Tempunak. DAS terluas adalah DAS Melawi, sedangkan DAS Jungkit merupakan DAS dengan wilayah tersempit di Kabupaten Sintang.

Luasan dan wilayah cakupan dari delapan DAS tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Cakupan Wilayah dan Luasan DAS Kabupaten Sintang

No	DAS	Kecamatan	Luas (Ha)	Luas DAS (Ha)
1	DAS Ambalau	Serawai	2.798,69	
		Ambalau	238.524,80	241.323,49
2	DAS Hulu Melawi	Serawai	1.992,94	
		Ambalau	364.471,12	
		Kayan Hulu	6.437,75	372.901,81
3	DAS Jungkit	Ketungau Tengah	18.416,01	
		Sintang	75,57	
		Sepauk	13.776,68	
		Tempunak	241,02	
		Ketungau Hilir	65.058,76	
		Binjai Hulu	7.719,03	105.287,06
4	DAS Kayan	Dedai	3.433,54	
		Serawai	995,20	
		Ambalau	1.385,36	
		Kayan Hulu	166.504,84	
		Kayan Hilir	102.545,74	
		Kelam Permai	2.647,54	277.512,22
5	DAS Ketungau	Ketungau Hulu	196.185,57	
		Ketungau Tengah	182.717,42	
		Ketungau Hilir	76.841,96	455.744,95
6	DAS Lebang dan Kebiyau	Sintang	7.735,69	
		Dedai	686,71	
		Kelam Permai	59.369,24	
		Binjai Hulu	22.658,62	
		Ketungau Hilir	20.420,40	110.870,66
7	DAS Melawi	Dedai	56.587,24	
		Kayan Hilir	3.217,63	
		Kelam Permai	4.988,02	
		Sintang	14.616,07	
		Sui Tebelian	15.913,23	
		Sepauk	126.753,14	
		Tempunak	1.602,41	
		Serawai	249.060,02	
		Ambalau	11.092,33	
		Kayan Hulu	1.726,59	485.556,68
8	DAS Tempunak	Sui Tebelian	41.579,56	
		Tempunak	78.581,70	
		Sintang	10.846,72	
		Sepauk	15.818,77	
		Binjai Hulu	10.970,93	157.797,68

Sumber : *Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang*

Kondisi hidrologi secara khusus di Kabupaten Sintang adalah dilaluinya wilayah ini oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta dua sungai kecil yaitu Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.

Beberapa sungai yang mengalir di seluruh wilayah Kabupaten Sintang memberikan jaminan ketersediaan air yang menunjang kehidupan masyarakat Kabupaten Sintang. Selain ketersediaan air permukaan yang cukup, kualitas air sungainya juga menunjukkan tidak adanya zat berbahaya, meskipun bukan merupakan kualitas yang layak dikonsumsi. Secara umum sebaran potensi hidrologis (sungai, danau, dan embung) utama di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Profil Sungai di Kabupaten Sintang

No	Nama Sungai	Anak Sungai	Lokasi Kecamatan
1	Sungai Kapuas	Sungai Ketungau	1. Ketungau Hilir, 2. Kelam Permai, 3. Binjai Hulu, 4. Sintang, 5. Tempunak 6. Sepauk.
2	Sungai Melawi	Sungai Kayan	1. Ambalau, 2. Serawai, 3. Dedai 4. Sintang
3	Sungai Kayan		1. Kayan Hulu 2. Kayan Hilir
4	Sungai Ketungau		1. Ketungau Hulu, 2. Ketungau Tengah 3. Ketungau Hilir

Sumber : *Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang*

Tabel 2.4.
Profil Danau di Kabupaten Sintang

No	Nama Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Sungai Inlet/ Outlet
1	D. Liot	Ketungau Tengah	52,28	Sungai Ketungau
2	D. Ubar	Ketungau Tengah	41,52	Sungai Ketungau
3	D. Jentawang	Ketungau Hilir	158,87	Sungai Ketungau
4	D. Jemut	Ketungau Hilir	40,44	Sungai Jemud
5	D. Tebing Raya	Sintang	159,91	
6	D. Balai Angin	Sintang	106,06	
7	D. Tempunak	Tempunak	41,64	
8	D. Mensiku	Binjai Hulu	77,32	
9	D. Semetung	Ketungau Hilir	49,70	
10	D. Aji	Ketungau Tengah	7,07	

Sumber : *Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang*

2.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Sintang dikenal sebagai daerah penghujan dengan intensitas yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Sintang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perbukitan yaitu sebesar 53,50 persen. Sepanjang tahun 2015, rata-rata curah hujan di Kabupaten Sintang sebesar 249,08 milimeter per bulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari per bulan. Menurut Stasiun Meteorologi Susilo Sintang, intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini, terutama dipengaruhi oleh keadaan daerah yang berhutan tropis dan disertai dengan kelembaban udara yang cukup tinggi.

Rata-rata bulanan curah hujan tertinggi tahun 2015 terjadi pada bulan November, yaitu mencapai 388,8 milimeter dengan hari hujan sebanyak 26 hari, sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu mencapai 55,8 milimeter dengan hari hujan sebanyak 7 hari. Intensitas hujan yang tinggi biasanya mempengaruhi kecepatan angin. Faktor angin ini sangat mempengaruhi kegiatan penerbangan serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Pada tahun 2015 temperatur udara di Kabupaten Sintang setiap bulannya rata-rata berkisar antara 26,4°C sampai dengan 27,7°C di mana temperatur udara terendah sebesar 23°C dan temperatur udara tertinggi sebesar 33,4°C.

Penyinaran matahari yang dicatat dari Stasiun Meteorologi Susilo Sintang berkisar antara 45,16 persen sampai dengan 84,77 persen dengan rata-rata penyinaran matahari sebesar 61,02 persen.

Tabel 2.5.
Keadaan Iklim Wilayah Kabupaten Sintang

Keadaan Iklim Rata-Rata	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1). Suhu						
1. Suhu Terendah	21,0	21,5	22,3	22,4	22,3	°C
2. Suhu Tertinggi	35,2	35	3,2	35,1	34,6	°C
2). Kelembaban Udara						
1. Kelembaban Udara Terendah	53	51	46	43	50	%
2. Kelembaban Udara Tertinggi	100	100	98	100	100	%
3). Curah Hujan						
1. Curah Hujan Terendah	78,1	62,9	78,1	26,4	55,8	mm/th
2. Curah Hujan Tertinggi	375,8	431,7	633,5	324,8	388,8	mm/th
4). Kecepatan Angin						
1. Kecepatan Angin Terendah	10	10	10	8	10	Knot
2. Kecepatan Angin Tertinggi	22	45	20	28	18	Knot

Tabel 2.6.
Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Bulanan
Di Stasiun Meteorologi Susilo Sintang Tahun 2015

Bulan	Susilo Sintang	
	MM	HH
Januari	257,7	28
Pebruari	211,9	16
Maret	339,7	23
April	322,9	21
Mei	203,5	15
Juni	263,8	15
Juli	230,5	10
Agustus	55,8	7
September	119,4	7
Oktober	242,3	13
Nopember	388,8	26
Desember	352,7	20
Total:		
2 0 1 5	2.989,0	201
2 0 1 4	2.225,6	194
2 0 1 3	3.059,9	237
2 0 1 2	3.181,6	231

Sumber: *Stasiun Meteorologi Susilo Sintang*

Tabel 2.7.
Kecepatan Angin Dan Temperatur Bulanan
Pada Stasiun Meteorologi Susilo Sintang
Tahun 2015

Bulan	Kecepatan Angin (Knots / Jam)		Temperatur Udara (^{0}C)		
	Maksimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata
Januari	15	2	32,8	21,7	25,6
Pebruari	11	1	34,2	22,4	26,6
Maret	11	1	34,2	22,6	27,0
April	16	2	35,0	22,65	27,0
Mei	14	1	35,2	22,8	27,5
Juni	11	2	35,0	24,2	27,6
Juli	11	2	35,6	22,2	27,7
Agustus	15	2	35,0	21,4	27,6
September	10	2	35,0	21,0	27,8
Oktober	11	5	34,4	22,4	25,4
Nopember	15	1	34,4	22,4	24,9
Desember	18	1	34,7	22,2	27,0
Rata-rata :					
2 0 1 5	18	1,8	34,6	22,3	26,8
2 0 1 4	28	2,2	35,1	22,4	27,4
2 0 1 3	20	1,9	35,2	22,3	27,2
2 0 1 2	45	2,2	35,0	21,5	27,0

Sumber: *Stasiun Meteorologi Susilo Sintang*

Tabel 2.8.
Rata-Rata Lembab Nisbi Di Stasiun Meteorologi Susilo Sintang
Tahun 2015

Bulan	Rata-rata Lembab Nisbi
Januari	87
Pebruari	89
Maret	89
April	90
Mei	86
Juni	88
Juli	84
Agustus	84
September	85
Oktober	95
Nopember	90
Desember	89
Rata-rata:	
2 0 1 5	88
2 0 1 4	84
2 0 1 3	83
2 0 1 2	85

Sumber: *Stasiun Meteorologi Susilo Sintang*

Tabel 2.9.
Rata-Rata Tekanan Udara Di Stasiun Meteorologi Susilo Sintang
Tahun 2015

B u l a n	Rata-rata Tekanan Udara (Milibar)
Januari	1012,4
Pebruari	1012,5
Maret	1012,8
April	1011,6
Mei	1012,1
Juni	1011,5
Juli	1011,9
Agustus	1012,3
September	1012,6
Oktober	1013,2
Nopember	1010,0
Desember	1012,5
Rata-rata :	
2 0 1 5	1012,1
2 0 1 4	1011,5
2 0 1 3	1009,8
2 0 1 2	1009,5

Sumber: *Stasiun Meteorologi Susilo Sintang*

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Hingga tahun 2013, luas lahan yang ada di Kabupaten Sintang sebesar 2.163.500 Ha dimana luas lahan pertanian sebanyak 1.055.237 Ha dan lahan Non Pertanian sebanyak 1.108.263 Ha.

Tabel 2.10.
Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Sintang

Jenis Data	Geografi					
Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	Sat.
I. Luas Wilayah	21.635	21.635	21.635	21.635	21.635	Km^2
1). Daratan						Km^2
II. Luas Lahan						
1). Luas Lahan Hutan						Ha
1. Hutan Produksi Tetap	51.540.200	51.540.200	51.540.200	51.540.200	51.540.200	Ha
2. Hutan Produksi Terbatas	62.350.510	62.350.510	62.350.510	62.350.510	62.350.510	Ha
2). Jumlah Lahan Persawahan						Ha
1. Sawah Irigasi	10.142	11.862	11.501	11.145	8.326	Ha
2. Sawah Tadah Hujan/Non Irigasi	10.474	7.846	8.440	8.985	12.177	Ha
3. Sawah Pasang Surut	1.256	711	745	1.259	5.840	Ha
4. Sawah Lainnya	203	203	32	32	-	Ha
3). Jumlah Lahan Kering	-	-	-	-	-	Ha
1. Rawa-Rawa	26.690	69.776	69.776	69.776	26.343	Ha
2. Ladang (Tegalan)	90.396	188.866	188.866	207.000	142.994	Ha

3. Perkebunan	285.584	298.665	298.665	308.431	447.218	Ha
4. Usaha Lain	25.493	63.575	63.575	64.032	208.716	Ha
5. Belum / Tidak Diusahakan	194.357	138.473	138.473	138.473	140.931	Ha
4). Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah						Ha
1. Hutan	1.063.498	763.039	763.039			Ha
2. Perumahan dan Permukiman	16.823	107.816	107.816	124.213		Ha
3. Lainnya	252.756	386.914	386.914	381.291		Ha

Sumber : *sipd.bangda.kemendagri.go.id*

2.1.2. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi secara riil yang diikuti dengan perubahan harga yang cepat pada setiap sektor ekonomi mengakibatkan struktur perekonomian mengalami perubahan. Struktur perekonomian Kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir masih didominasi oleh tiga sektor ekonomi yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri.
Potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Sintang dari berbagai sektor adalah sebagai berikut :

a. Potensi Perkebunan

Produksi tanaman karet dan kelapa sawit cenderung mengalami peningkatan, demikian juga dengan produksi tanaman perkebunan lainnya juga mengalami peningkatan meski tidak terlalu besar. Saat ini ada dua komoditi utama yang dikembangkan yaitu kelapa sawit dan karet. Mengigat kondisi lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sintang semakin terbatas, maka ijin pembukaan areal perkebunan khususnya areal pengembangan kelapa sawit tidak diberikan lagi. Untuk Kecamatan Dedai tepatnya di Nanga Jetak, terdapat pabrik karet yang dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan karet dan industri pengolahan karet (*Crum Rubber*) yang menghasilkan SIR 20. Hasil produksi dari PTP.XIII tersebut telah diekspor ke luar negeri antara lain Negara Pakistan (Karachi), Cina, India, Turki, Argentina, USA dan Singapura.

Tabel 2.11.
Potensi Investasi Sektor Perkebunan

NO	KOMODITI	LUAS AREAL YG ADA (HA)	LUAS AREAL YG SUDAH DI USAHAKAN (HA)	PRODUKSI (TON/TH)	LUAS LAHAN YG AKAN DI KEMBANG-KAN (HA)	KET.
1.	Karet	235.754.30	81.635.00	34.719.64	15.000.00	Pengembangan melalui Anggaran Pemerintah
2.	Sawit	598.957.00	74.673.61	511.189.29	352.019.39	Pengembangan melalui Anggaran PBSN
3.	Kelapa Dalam	-	708.00	147.28	-	

NO	KOMODITI	LUAS AREAL YG ADA (HA)	LUAS AREAL YG SUDAH DI USAHAKAN (HA)	PRODUKSI (TON/TH)	LUAS LAHAN YG AKAN DI KEMBANG-KAN (HA)	KET.
4.	Kelapa Hibrida	-	855.00	234.42	-	
5.	Lada	-	1.040.00	677.31	-	
6.	Kopi	-	354.00	97.63	-	
7.	Kakau	-	125.00	4.75	-	
8.	Kapok/ Randu	-	553.00	8.09	-	
9.	Aren	-	502.00	20.91	-	
10.	Pinang	-	503.00	10.38	-	
11.	Cengkeh	-	132.00	1.92	-	
12.	Tebu	-	3.00	0.96	-	

Sumber : *Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Sintang*

b. Potensi Kehutanan

Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu 21,99 % dari luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat. Luas kawasan hutan Kabupaten Sintang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2015 seluas 1.282.835,94 Ha.

Tabel 2.12.
Potensi Investasi Sektor Kehutanan

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HASIL HUTAN	VOLUME (TON)	LOKASI
1.	• CV. Inti Wana Lestari • CV. Makmur	Gaharu Buaya	20	• Kecamatan Ketungau Hilir (Dusun Ketungau Indah) • Kecamatan Ketungau Tengah
2.	• CV. Rotelsada Borneo Raya • Perorangan	Rotan Sega	20	• Kecamatan Serawai • Kecamatan Ambalau
3.	HPH HTI	Kayu Bulat	125.646 (M^3) 57.648.109 (M^3)	

Sumber : *Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Sintang*

c. Potensi Pertanian

Potensi Pertanian terutama sub sektor tanaman pangan yang potensial di Kab. Sintang terdiri dari Padi, Palawija, Sayur–sayuran, dan buah-buahan. Padi sebagai penghasil beras merupakan makanan pokok. Peluang investasi yang dapat diusahakan adalah : Budi daya padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran serta pada penyediaan dan pengolahan pupuk organik maupun anorganik. Pengembangan usaha tanaman pangan dilakukan dengan pola kemitraan dengan petani.

Tabel 2.13.
Potensi Investasi Sektor Pertanian

NO	JENIS KOMODITI	LUAS AREAL YANG ADA (HA)	LUAS AREAL YANG SUDAH DIUSA-HAKAN (HA)	PRODUKSI (TON/ TH)	LUAS AREAL YANG AKAN DIKEM-BANGKAN	KETERANGAN
1	Padi	362.162	40.012	91.679	322.150	Untuk padi sawah dan padi ladang dikembangkan di 14 Kecamatan di Sintang
2	Palawija	205.837	112.239	18.541	93.598	Untuk jenis komoditi; jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu,ubi jalar, dan talas yang dikembangkan di 14 Kecamatan di Sintang

Sumber : *Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan Kab. Sintang*

d. Potensi Perikanan

Potensi Perikanan yang Sangat Potensial di Kabupaten Sintang adalah Usaha Perikanan Keramba dan Budi daya Kolam Serta Perikanan Umum. Produksi Ikan Terbesar yang terdapat di kab. Sintang adalah jenis ikan Jelawat, Tengadak/Lampan, Gurami, Semah dan Paten/Juara. Peluang investasi yang ditawarkan pada sektor perikanan adalah : Usaha Budi daya ikan Keramba dan Budi daya Ikan Kolam, penangkaran bibit ikan yang dapat dilakukan dengan pola kemitraan dengan petani.

Tabel 2.14.
Potensi Investasi Sektor Perikanan Tahun 2014

No	Jenis Ikan	Produksi Sub Sektor Perikanan (Ton)		
		Perairan Umum	Budidaya Keramba	Budidaya Kolam
1	Jelawat	41,55	-	-
2	Lampan	37,70	-	-
3	Jambal	73,50	-	-
4	Gabus	22,00	-	-
5	Lais	70,70	-	-
6	Toman	36,00	9,75	-
7	Tambakan	87,60	-	-
8	Belida	39,50	-	-
9	Sepat Siam	4,65	-	-
10	Udang Sungai	13,92	-	-
11	Sepat Rawa	4,85	-	-
12	Baung	139,90	-	-
13	Sili	41,40	-	-
14	Mas	-	174,70	152,43
15	Gurami	-	23,55	39,25
16	Lele	-	77,13	242,93
17	Patin	-	19,00	72,50
18	Ikan Lainnya	174,12	62,00	165,50
Jumlah		**786,39**	**366,13**	**672,10**

Sumber : *Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2015, BPS*

e. Potensi Peternakan

Pada bidang peternakan peluang investasi yang dapat diusahakan cukup potensial meliputi: peternakan babi, sapi, kerbau, kambing, unggas yang terdiri dari itik dan ayam yang dapat dilakukan dengan pola kemitraan dan budidaya tanaman untuk pakan ternak.

Tabel 2.15.
Potensi Sektor Peternakan Kabupaten Sintang
Tahun 2014

No	Jenis Ternak	Populasi (ekor)	Produksi (Ton)	Potensi Investasi
1.	Sapi	7.741	230	3.150
2.	Kerbau	194	-	-
3.	Ternak Kambing	2.765	13,52	2.000
4.	Ternak Babi	88.376	773,3	4.550
5.	Itik	16.801	8,5	4.500
6.	Ayam Broiler	482.727	3037,6	600.000
7.	Ayam Buras	482.727	214,4	-
8.	Ayam Ras Petelur	5.300	56	100.000

Sumber : *Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang*

Potensi Pertambangan

Kabupaten Sintang memiliki potensi bahan tambang yang sangat banyak antara lain: Batu Bara, Tembaga, Zikon,Emas, Batu Pecah dan lain-lain, namun belum dieksploitasi secara maksimal.

Tabel 2.16.
Potensi Bahan Galian Pertambangan di Kabupaten Sintang

NO	JENIS BAHAN GALIAN	LOKASI	STATUS IZIN	KETERANGAN
1.	Batubara	Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah	- IUP Eksplorasi, Eksploitasi	PT.Yamabhumi Persada, PT. Wahana Bumi Persada, PT.Ketungau Nusa Raya, PT.The Grand LJ Fullerton Succesful,PT FET Mining Indonesia dll
2.	Tembaga. DMP	Ketungau Hulu,Tempunak dan Sei.Tebelian	- IUP Eksplorasi, Eksploitasi	PT.Yamabhumi Pratama, PT.The Grand LJ Fullerton Succesful, PT.Barito Raya Energi, PT.Kalimantan Raya Resources.
3.	• Zikon • Zikon .dmp	Sepauk dan Tempunak,	- IUP Operasi Produksi, IUP Eksplorasi	PT. Sinar Kapuas Mining,PT. Arum Persada Khatulistiwa, PT. Dinamika Arum Khatulistiwa dll
4.	• Emas • Emas.dmp	Sepauk, Rawak, Ambalau dan Serawai	- IUP Eksplorasi (SK.Gub.Kal-Bar), IUP Eksplorasi	PT. Arum Khatulistiwa, Inti Kreasi Abadi, PT. Sinar Tempunak Mining,PT. Segoro Global Mandiri
5.	• Batu Pecah (Adesit) • Batu Pecah (Daisit) • Batu Pecah (Riolit)	Kec. Dedai, Kec. Sei. Tebelian, Kec. Kayan Hilir, Kec. Ket.Hilir, Kec.Kelam Permai	-	- Milik Perorangan

Sumber : *Dinas Pertambangan Kabupaten Sintang*

f. Potensi Pariwisata

Sektor pariwisata Bukit Kelam memiliki Peluang Investasi yang dapat kembangkan menjadi investasi yang menguntungkan dari segi ekonomi hal ini terlihat dari banyaknya pengunjung objek wisata tersebut pada setiap harinya terutama pada hari-hari libur. Peluang investasi yang dapat ditawarkan pada sektor pariwisata adalah bidang perhotelan, wisata kuliner serta pengembangan industri kain tenun ikat yang ada di kaki Bukit Kelam.

Tabel 2.17.
Potensi Obyek Pariwisata di Kabupaten Sintang

NO	NAMA OBYEK WISATA	LOKASI	JARAK TEMPUH KE LOKASI (KM)	KET.
1.	Kebudayaan			
	a. Rumah Adat	Desa Ensaid Pendek	43	Jalan Darat
	b. Industri			
	• Kain tenun ikat, lagu-lagu daerah	Desa Ensaid Pendek / Umin	43	Jalan Darat
	• Souvenir, kuliner	Sintang	6	Dalam Kota
	c. Benda Cagar Alam			
	• Batu kundur,Keraton Sintang, Masjid Jami'Sultan Nata	Dara Juanti	6	Dalam Kota
	• Makam Djubair, Ade Irawan II, Penembahan Ade Muhamad Djoen	Dara Juanti	6	Dalam Kota
	• Makam sultan nata muhamad sjamsudin, makam raja-raja	Dara Juanti	6	Dalam Kota
	• Makam aji melayu, Batu lingga yoni dan batu Nandi	Sepauk	50	Jalan Darat
	• Batu lingga yoni dara muning, Rumah betang ensaid panjang	Serawai,Ensaid	180	Jalan Air
	• Makam apang semangai, prasasti batu harimau	Ng. Tebidah	100	Jalan Darat
	• Makam pangeran kuning, Batu lingga Yoni desa Bernayau	Sepauk	75	Jalan Darat
	• Arca gusar putung keempat	Sepauk	120	Jalan Darat
	d. Historis cerita sejarah			
	• Kerajaan Sintang dan Masjid Jami	Dara Juanti	6	Jalan Darat
	e. Museum Sejarah Sintang	Jerora	8	Jalan Darat
2.	Pariwisata			
	a. Wisata Alam			
	• Bukit Kelam(Objek Wisata Unggulan), Hutan Wisata Baning	Kelam/Sintang	18	Jalan Darat
	• Danau Jamelak	Jerora	5	Jalan Darat
	b. Air Terjun Noka Nayan,Air terjun Wong Tungku dan Wong Tapa	Ambalau, Senaning	215	Jalan Air
	c. Wisata Religi/Rohani	Merpak	24	Jalan Darat
	d. Wisata tepian sungai melawi dan Kapuas	Sintang	2	Jalan Darat

Sumber : *Dinas Pariwisata Kabupaten Sintang*

2.1.3. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sintang menurut hasil Sensus Penduduk 2010 sebanyak 363.978 jiwa. Empat tahun kemudian (2014), berdasarkan data Dukcapil, jumlah penduduk bertambah sebanyak 34.584 jiwa menjadi 398.562 jiwa atau rata-rata bertambah 2,38% per tahun. Penduduk ini tersebar di empat belas kecamatan, namun persebarannya tidak merata. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sintang (73.551 jiwa atau 18,45%) dan yang paling sedikit berada di Kecamatan Binjai Hulu yang banyaknya 12.123 jiwa atau 3,04%). Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan (*sex ratio* 108) dan kondisi ini terdapat di semua kecamatan. Kabupaten Sintang dapat dikategorikan pada berpenduduk jarang karena kepadatan penduduknya baru mencapai 27 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sintang (265 jiwa/km^2) dan terendah terendah berada di kecamatan Ambalau (2 jiwa/km^2). Lihat Tabel 2.18.

Tabel 2.18.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Kabupaten Sintang Tahun 2014

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	S e r a w a i	11.348	10.508	21.856	108
2	A m b a l a u	7.452	6.810	14.262	109
3	Kayan Hulu	11.940	11.537	23.477	103
4	S e p a u k	26.655	24.483	51.138	109
5	Tempunak	15.118	13.823	28.941	109
6	Sungai Tebelian	15.847	14.474	30.321	109
7	S i n t a n g	37.896	35.655	73.551	106
8	D e d a i	14.837	13.962	28.799	106
9	KayanHilir	13.478	12.535	26.013	108
10	KelamPermai	8.949	8.305	17.254	108
11	Binjai Hulu	6.293	5.830	12.123	108
12	KetungauHilir	11.315	10.276	21.591	110
13	Ketungau Tengah	14.870	13.601	28.471	109
14	Ketungau Hulu	10.837	9.928	20.765	109
KAB.SINTANG		**206.835**	**191.727**	**398.562**	**108**

Sumber : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sintang, 2015*

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Perkembangan kesejahteraan masyarakat yang menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi Kabupaten Sintang, dapat ditunjukkan dari indikator makro sosial ekonomi sebagaimana tampak pada uraian berikut ini.

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Perkembangan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di kabupaten Sintang akan dijelaskan dengan beberapa indikator, seperti pertumbuhan ekonomi beserta perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), PDRB per kapita, Laju inflasi, kontribusi sektor perdagangan, kontribusi sektor industri, penduduk miskin, tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan lain-lain.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggambarkan besaran perubahan pendapatan daerah (PDRB) dari waktu ke waktu. Berdasarkan data BPS tahun 2015 diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir ini cenderung mengalami kenaikan dari sekitar 4,79% pada tahun 2011 menjadi 5,6% pada tahun 2012 dan kemudian meningkat lagi menjadi sekitar 6,47% pada tahun 2013 lalu kemudian turun pada tahun 2014 menjadi hanya 5,36% sebagaimana tampak pada tabel 2.19. berikut ini.

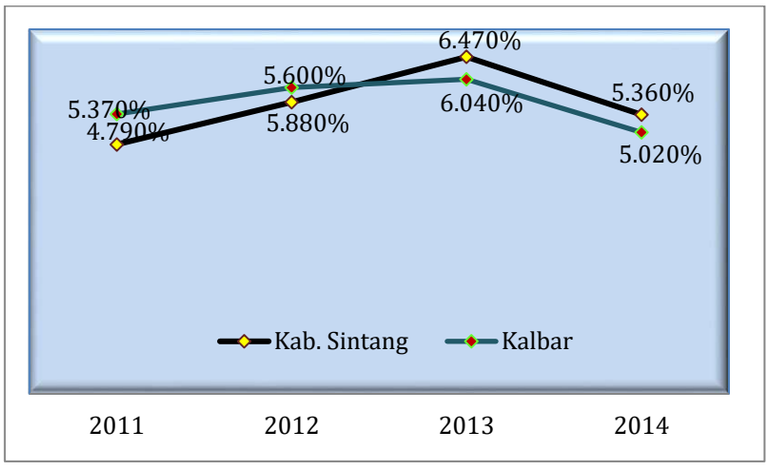
Tabel 2.19.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Sintang Tahun 2011-2014

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,35	2,63	5,19	3,07
B	Pertambangan dan Penggalian	6,84	9	5,6	4,76
C	Industri Pengolahan	4,78	4,06	3,57	2,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,34	10,88	2,07	6,22
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,79	2,45	2,56	3,59
F	Konstruksi	9,08	11,24	11,49	11,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,72	3,42	6,81	5,3
H	Transportasi dan Pergudangan	9,51	8,93	8,21	4,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,94	5,25	5,07	5,19
J	Informasi dan Komunikasi	11,85	11,89	12,35	13,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,97	14,99	13,64	12,85
L	Real Estat	6,67	6,74	6,85	6,55
M,N	Jasa Perusahaan	6,92	7,66	7,16	3,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-9,65	7,57	2,83	2,84
P	Jasa Pendidikan	7,09	7,27	5,27	2,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,42	5,54	5,72	7,11
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,87	6,52	2,74	5,35
Produk Domestik Regional Bruto		4,79	5,6	6,47	5,36

Sumber: *PDRB Kabupaten Sintang Tahun 2014, BPS Sintang, 2015*
*Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang pada tahun 2013 bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat (6,04%) dan pertumbuhan ekonomi nasional (5,76%). Meskipun menurun dari tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2014 ternyata

tetap lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat (5,02%) dan pertumbuhan ekonomi nasional (5,32%).



Gambar 2.2
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Tahun 2011 – 2014

Besaran angka pertumbuhan ekonomi ini dapat dihitung dengan memanfaatkan data perkembangan PDRB berdasarkan harga konstan sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sintang
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
(Juta Rupiah) Tahun 2010-2014

	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.865.089,6	1.890.277,9	1.939.972,6	2.040.677,0	2.103.381,3
B	Pertambangan dan Penggalian	413.179,3	441.455,8	481.175,0	508.115,8	532.288,0
C	Industri Pengolahan	640.312,3	670.940,1	698.196,5	723.089,3	741.727,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.084,8	1.131,9	1.255,0	1.281,0	1.360,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.234,0	4.352,1	4.458,9	4.573,1	4.737,3
F	Konstruksi	530.112,6	578.236,9	643.250,5	717.130,7	800.393,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Re[arasi Mobil dan Sepeda Motor	1.065.127,4	1.147.389,2	1.186.593,0	1.267.428,1	1.334.608,1
H	Transportasi dan Pergudangan	107.784,0	118.035,4	128.580,4	139.131,1	145.464,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	143.623,8	152.149,5	160.141,9	168.264,7	177.005,2
J	Informasi dan Komunikasi	234.601,8	262.406,8	293.609,5	329.856,4	374.016,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	119.755,6	125.706,3	144.549,0	164.269,4	185.378,6
L	Real Estat	161.457,9	172.222,1	183.837,1	196.433,5	209.297,1
M,N	Jasa Perusahaan	25.992,8	27.790,9	29.918,5	32.060,1	33.309,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	234.049,9	211.473,3	227.476,2	233.908,4	240.561,1
P	Jasa Pendidikan	299.656,7	320.898,1	344.235,8	362.386,8	371.598,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139.003,7	146.531,6	154.653,2	163.494,1	175.125,8
R,S,T,U	Jasa Lainnya	46.708,6	49.450,1	52.676,1	54.117,3	57.011,5
Produk Domestik Regional Bruto		6.031.774,8	6.320.448,2	6.674.579,2	7.106.216,7	7.487.265,3

Sumber: *PDRB Kabupaten Sintang Tahun 2014, BPS Sintang, 2015*
*Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

PDRB memang menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menghitung besaran pertumbuhan ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Adapun perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sintang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2010-2014

	Lapangan Usaha / Industry	**2010**	**2011**	**2012**	**2013***	**2014****
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.865.089,6	2.018.244,4	2.122.674,8	2.301.443,2	2.413.968,4
B	Pertambangan dan Penggalian	413.179,3	478.380,2	586.010,7	667.112,7	750.585,7
C	Industri Pengolahan	640.312,3	696.225,1	787.830,4	884.634,5	932.663,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.084,8	1.049,0	1.043,7	1.040,0	1.197,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.234,0	4.407,0	4.580,4	4.747,9	5.160,2
F	Konstruksi	530.112,6	636.624,3	773.701,5	940.191,6	1.124.493,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Re[arasi Mobil dan Sepeda Motor	1.065.127,4	1.212.790,9	1.291.056,8	1.447.296,1	1.635.895,7
H	Transportasi dan Pergudangan	107.784,0	124.911,6	145.155,6	169.083,3	189.171,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	143.623,8	161.830,9	178.901,5	197.901,1	220.106,0
J	Informasi dan Komunikasi / *Information and Communication*	234.601,8	278.390,7	312.886,5	352.827,5	404.569,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	119.755,6	130.731,7	156.426,0	185.149,8	215.793,6
L	Real Estat	161.457,9	183.803,9	205.796,3	239.494,2	265.939,1
M,N	Jasa Perusahaan	25.992,8	29.245,7	33.365,6	37.781,2	41.555,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	234.049,9	215.734,6	265.751,9	303.107,9	347.716,7
P	Jasa Pendidikan	299.656,7	337.033,6	373.283,0	412.798,8	457.858,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139.003,7	154.536,9	171.438,8	191.480,1	219.504,7
R,S,T,U	Jasa Lainnya	46.708,6	52.534,1	56.933,6	62.100,4	69.367,8
Produk Domestik Regional Bruto		6.031.774,8	6.716.474,6	7.456.837,1	8.398.190,4	9.295.547,4

Sumber: *PDRB Kabupaten Sintang Tahun 2014, BPS Sintang, 2015*
*Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan data pada tabel di atas tampak bahwa telah terjadi pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Sintang dalam 4 tahun terakhir, dimana kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung menurun dan sebaliknya kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Konstruksi, sektor Transportasi dan Pergudangan, dan sektor Jasa Keuangan

dan asuransi cenderung mengalami kenaikan. Sebagai contoh, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menurun dari sekitar 30,92% pada tahun 2010 menjadi hanya 25,97% pada tahun 2014, sebaliknya kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian, dan sektor Konstruksi meningkat masing-masing dari sekitar 6,85% dan 8,79% pada tahun 2010 menjadi masing-masing sekitar 8,07% dan 12,10% pada tahun 2013. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22.
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Sintang
Tahun 2010-2014

Lapangan Usaha/Industri		2010	2011	2012	2013*	2014**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,92	30,05	28,33	27,40	25,97
B	Pertambangan dan Penggalian	6,85	7,12	7,86	7,94	8,07
C	Industri Pengolahan	10,62	10,37	10,57	10,53	10,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	8,79	9,48	10,38	11,20	12,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,66	18,06	17,31	17,23	17,60
H	Transportasi dan Pergudangan	1,79	1,86	1,95	2,01	2,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,38	2,41	2,40	2,36	2,37
J	Informasi dan Komunikasi	3,89	4,14	4,20	4,20	4,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,99	1,95	2,10	2,20	2,32
L	Real Estate	2,68	2,74	2,76	2,85	2,86
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,44	0,45	0,45	0,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	3,21	3,56	3,61	3,74
P	Jasa Pendidikan	4,97	5,02	5,01	4,92	4,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,30	2,30	2,30	2,28	2,36
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,77	0,78	0,76	0,74	0,75
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: *PDRB Kabupaten Sintang Tahun 2014, BPS Sintang, 2015*
*Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan studi empiris di berbagai negara diketahui bahwa semakin maju perekonomian suatu daerah maka kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB akan menurun dan sebaliknya kontribusi sektor non pertanian seperti sektor industri, pertambangan, jasa, dan lain-lain akan meningkat. Namun uniknya, perkembangan kontribusi sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Sintang justru menurun. Jika pada tahun 2010 sektor Industri Pengolahan masih menyumbang sekitar 10,62%, maka pada tahun 2014 kontribusi sektor ini justru menurun menjadi hanya sebesar 10,03%.

2.2.1.2. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita adalah pembagian antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Dengan demikian besaran PDRB Perkapita menggambarkan peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah dari waktu ke waktu. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23.
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp) di Kabupaten Sintang
Tahun 2010-2014

Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013*	2014**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,10	5,42	5,58	5,98	6,18
B	Pertambangan dan Penggalian	1,13	1,28	1,55	1,73	1,92
C	Industri Pengolahan	1,75	1,87	2,08	2,30	2,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	1,45	1,71	2,04	2,44	2,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,91	3,26	3,41	3,76	4,19
H	Transportasi dan Pergudangan	0,29	0,34	0,38	0,44	0,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,39	0,43	0,47	0,51	0,56
J	Informasi dan Komunikasi	0,64	0,75	0,83	0,92	1,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,33	0,35	0,41	0,48	0,55
L	Real Estat	0,44	0,49	0,54	0,62	0,68
M,N	Jasa Perusahaan	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,64	0,58	0,70	0,79	0,89
P	Jasa Pendidikan	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Produk Domestik Regional Bruto		19,5	21,5	23,4	25,6	28,0

Sumber: *PDRB Kabupaten Sintang Tahun 2014, BPS Sintang, 2015*
*Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir ini PDRB Perkapita Kabupaten Sintang terus mengalami kenaikan, dari sekitar Rp 19,5 juta pada tahun 2010 menjadi sekitar Rp 28 juta pada tahun 2014. Peningkatan ini sudah barang tentu disebabkan oleh, paling tidak, dua variabel yaitu keberhasilan daerah dalam meningkatkan PDRB dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Besaran PDRB Perkapita Kabupaten Sintang ternyata lebih tinggi dari rata-rata PDRB Perkapita Kabupaten Kota se Kalimantan Barat yang pada tahun 2011 sekitar Rp 15,11 juta yang kemudian meningkat menjadi sekitar Rp 22,70 juta pada tahun 2014.

2.2.1.3. Laju Inflasi Kabupaten

Laju inflasi adalah tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Secara umum, hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK). Besaran laju inflasi sangat menentukan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Pada tingkat inflasi tinggi, maka pertumbuhan PDRB yang tinggi menjadi kurang berarti karena laju inflasi yang tinggi

tersebut menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Perkembangan laju inflasi Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24.
Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Sintang
Tahun 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
Inflasi	6,84	6,80	6,48	6,97	6,85	6,78

Sumber: *PDRB Kabupaten Sintang, BPS, 2014*

Tabel di atas menunjukkan bahwa laju inflasi Kabupaten Sintang relatif terkendali di sekitar angka 6,7% dan lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional tahun 2013 yang mencapai 8,38%, juga jauh lebih rendah dari laju inflasi Kota Pontianak tahun 2013 yang mencapai 9,48%. Artinya secara relatif daya beli masyarakat Kabupaten Sintang lebih terjaga yang mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB Perkapita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1.4. Pemerataan

Ukuran yang umum digunakan untuk mengetahui perkembangan pemerataan pada suatu daerah adalah Indeks Gini. Data BPS menunjukkan bahwa Indeks Gini Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan dari sekitar 0,19 pada tahun 2008 menjadi 0,32 pada tahun 2013 sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.25.
Indeks Gini Kabupaten Kota di Kalimantan Barat
Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	2008	2010	2011	2012	2013
Sambas	0,25	0,31	0,36	0,36	0,37
Bengkayang	0,22	0,30	0,33	0,35	0,34
Landak	0,23	0,20	0,26	0,34	0,31
Mempawah	0,35	0,40	0,31	0,33	0,31
Sanggau	0,31	0,34	0,34	0,32	0,32
Ketapang	0,29	0,41	0,31	0,38	0,32
Sintang	0,19	0,24	0,30	0,30	0,32
Kapuashulu	0,20	0,24	0,35	0,30	0,29
Sekadau	0,21	0,23	0,28	0,30	0,29
Melawi	0,30	0,28	0,27	0,33	0,28
Kayong Utara	-	-	0,34	0,33	0,31
Kuburaya	-	0,29	0,34	0,38	0,38
Pontianak	0,29	0,35	0,35	0,30	0,38
Singkawang	0,28	0,32	0,31	0,34	0,38
Provinsi	**0,30**	**0,37**	**0,36**	**0,36**	**0,37**

Sumber: *BPS, 2014*

Tabel di atas menunjukkan bahwa besaran angka Indeks Gini Kabupaten Sintang berada pada kelompok menengah atau berada di bawah rata-rata Indeks Gini Kalimantan Barat. Namun jika diperhatikan perkembangan peningkatannya tampak bahwa Indeks Gini Kabupaten Sintang meningkat lebih cepat dibanding Indeks Gini Kalimantan Barat. Pada periode 2008-2013 Indeks Gini Kalimantan Barat hanya meningkat sebesar 0,07 dari 0,30 tahun 2008 menjadi 0,37 tahun 2013. Sementara pada periode yang sama, Indeks Gini Kabupaten Sintan meningkat sebesar 0,13 yaitu dari 0,19 tahun 2008 menjadi 0,32 tahun 2013. Semakin besar gini ratio berarti semakin besar ketimpangan pendapatan di daerah ini. Jumlah penduduk yang memiliki pendapatan yang tinggi di Kabupaten Sintang semakin kecil, sedangkan penduduk yang memiliki pendapatan rendah semakin banyak. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menstimulus terjadinya konflik di masyarakat.

- ***Indeks Pembangunan Manusia***

Pembangunan manusia di Kabupaten Sintang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2010-2014, meskipun peningkatan tersebut tergolong lambat. Peningkatan pembangunan manusia dikarenakan adanya peningkatan pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Peningkatan ketiga aspek ini terjadi dalam pembangunan daerah Kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir. Kabupaten Sintang merupakan salah satu dari lima kabupaten (Kab. Sambas, Mempawah, Sekadau, Kapuas Hulu) yang berhasil meningkatkan status pembangunan manusia dari "IPM rendah" (2010) menjadi "IPM sedang" (2014). Perkembangan IPM Kabupaten Sintang 2010-2014 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.26
Perkembangan IPM Kabupaten Sintang
Tahun 2010-2014

Kabupaten/Propvinsi	2010	2011	2012	2013	2014
Kab. Sintang	59,91	60,80	61,66	62,64	63,19
Kalimantan Barat	61,97	62,35	63,41	64,30	64,89

Sumber : *BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2015.*

2.2.1.5. Kemiskinan

Persoalan kemiskinan belum tuntas dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sintang. Jumlah penduduk miskin cenderung bertambah selama periode tahun 2010 – 2014. Jika dibanding Propinsi, proporsi penduduk miskin di Kabupaten Sintang masih lebih besar dari proporsi penduduk miskin di Propinsi Kalmantan Barat. Berdasarkan garis kemiskinan di Kabupaten Sintang sebesar Rp. 389.160 per kapita jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang tahun 2014 sebanyak 35.730 orang atau 9,11 persen dari

total penduduk. Jumlah ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya atau berkurang 3.270 orang dari tahun 2013 (39.000 orang).

Tabel 2.27.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Sintang Tahun 2014

	2011			2012			2013			2014		
	GK Rp./kap/ bln	P0 %	Pddk Miskin 000	GK Rp./kap/ bln	P0 %	Pddk Miskin 000	GK Rp./kap/ bln	P0 %	Pddk Miskin 000	GK Rp./kap/ bln	P0 %	Pddk Miskin 000
Sintang	288.409	9,07	33,356	327.666	8,55	31,589	358.693	10,09	39,0	389.160	9,11	35,73
Kal-Bar	219.636	8,48	376,120	239.162	7,96	355,700	270.305	8,74	407,3	381.920	8,07	381,92

Sumber : *BPS Kalimantan Barat.*

2.2.1.6. Kriminalitas

- ***Angka Kriminalitas yang tertangani***

Secara kuantitas jumlah kasus yang ditangani mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi secara kualitas kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian mengalami peningkatan. Berdasarkan data tahun 2014 seperti yang termuat dalam tabel di bawah ini menunjukkan bahwa kemampuan menangani kasus angka kriminalitas yang bersifat konvensional masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kemampuan penanganan kasus penganiyaan berat dari 52 kasus, yang mampu diselesaikan hanya 39 kasus atau 75% saja. Pencurian dengan kekerasan tingkat kemampuan penyelesaian hanya 40% saja. Kemudian pencurian dan kekerasan, dari 148 kasus, hanya 31 kasus atau 20.94% saja. Begitu juga dengan penyelesaian kasus Ranmor, dari 47 kasus, hanya 16 kasus atau 34.04% saja yang mampu ditangani. Secara keseluruhan, kemampuan dalam menangani kasus angka kriminalitas di Kabupaten Sintang selama tahun 2014 yang berjumlah 254 kasus, hanya 89 kasus atau 35.03% saja yang mampu ditangani.

Tabel 2.28.
Angka Kriminalitas Kabupaten Sintang Tahun 2014

Kasus	Kejadian	Tertangani
Pembunuhan	1	-
Penganiayaan Berat	52	39
Penculikan	1	1
Pencurian dengan Kekerasan	5	2
Pencurian dengan Pemberatan	148	31
Pencurian Ranmor	47	16
Pemerkosaan	1	-
Pembakaran	-	-
Senpi/Handak	-	-
Pemerasan	-	-
Penyelundupan	-	-
Kejahatan Terhadap Kepala Negara	-	-
Jumlah	**254**	**89**

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan menempati peran sangat strategis dalam keseluruhan upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Selain itu, berbagai kesepakatan internasional khususnya *Millenium Development Goals* (MDGs), yang menetapkan bahwa sebelum tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan menyelesaikan pendidikan dasar. Selain itu Deklarasi UNESCO tentang *Education for All* (EFA) telah pula menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pendidikan di seluruh Indonesia. Pendidikan juga merupakan instrumen pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk di antaranya untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta memperkuat nilai-nilai budaya.

- ***Angka melek huruf (AMH)***

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu unsur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan di dunia, termasuk Kabupaten Sintang. Selama periode 2010 s.d. 2014, persentase penduduk usia 15 tahun keatas semakin meningkat, meskipun peningkatannya tergolong lambat. *Trend* peningkatan AMH mengindikasikan keberhasilan pembangunan pendidikan melalui program pemberantasan buta huruf (PBH), Kejar Paket A; Paket B dan Paket C. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak bisa baca dan tulis (buta huruf) semakin berkurang dari 23.413 jiwa tahun 2010 menjadi 22.313 jiwa tahun 2013 atau berkurang sebanyak 1.100 jiwa selama 4 tahun, lihat Tabel 2.26.

Tabel 2.29.
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Sintang
Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis (jiwa)	215.361	218.479	228.331	231.814	241.216
2.	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (jiwa)	247.876	250.144	258.144	261.429	261.952
3.	Angka Melek Huruf (%)	86,88	87,34	88,36	88,67	97,08

Sumber : *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang, Tahun 2015.*

- Angka rata-rata lama sekolah (RLS)

Selain AMH, angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga merupakan bagian dari aspek pendidikan yang digunakan dalam menilai perkembangan pembangunan pendidikan. Angka RLS di Kabupaten Sintang selama periode 2011-2015 menunjukkan peningkatan meskipun peningkatannya relatif

lambat. Tahun 2011 RLS sebesar 6,59 tahun, lima tahun kemudian RLS bertambah menjadi 6,77 tahun. Capaian ini bermakna bahwa hingga tahun 2015 tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sintang rata-rata kelas 1 SMP. Capaian ini masih jauh lebih rendah dibandingkan Kota Pontianak yang sudah mencapai rata 9,8 tahun (rata-rata kelas 1 SMA). Tinggi rendahnya angka RLS sangat ditentukan oleh angka melek huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Semakin tinggi AMH dan APM pada semua jenjang pendidikan, (termasuk APM PT), semakin tinggi angka RLS. Oleh karenanya, untuk meningkatkan RLS harus diupayakan menekan serandah mungkin penduduk buta huruf sekaligus menjalankan dengan konsisten program wajib belajar 12 tahun untuk peningkatan APM pada semua jenjang pendidikan, terutama APM SMA dan Perguruan Tinggi.

Tabel 2.30.
Perkembangan APM, AMH dan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	APM SD/MI	92,42	105,28	95,15	99,69	96,29
	APM SMP/MTs	69,30	76,64	77,40	86,55	74,40
	APM SMA/MA/SMK	29,20	45,50	45,96	82,26	82,26
2.	Angka Melek Huruf (%)	86,88	87,34	88,36	88,67	97,08
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,59	6,65	6,68	6,74	6,77

- ***Angka Partisipasi Murni (APM)***

Capaian APM yang mendekati 100% menyatakan bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Sintang telah berhasil meningkatkan kesadaran penduduk akan manfaat bersekolah (pendidikan). Meskipun demikian, bila dicermati per kecamatan, capaian APM ini belumlah optimal dan merata, terutama pada jenjang sekolah menengah. Tabel 2.29 memperlihatkan bahwa pada jenjang pendidikan SMP/MTs, APM terendah terdapat di Kecamatan Ketungau Tengah (51,78%) dan APM tertinggi berada di Kecamatan Sintang (98,75%). Di Kabupaten Sintang tidak terdapat kecamatan dengan APM SMP/MTs kurang dari 50. Sementara itu pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, APM terendah berada di Kecamatan Tempunak (18,90%) dimana dari 1.445 jiwa penduduk usia 16-18 tahun, hanya 273 orang yang bersekolah. Selebihnya (1.172 jiwa) kemungkinan besar tidak bersekolah dan APM tertinggi berada di Kecamatan Sintang (233,05%).

Capaian APM SMA/SMK/MA kurang dari 50% ada sebanyak 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Ambalau (35,01%), Kayan Hulu (41,03%), Sepauk (37,29%), Tempunak (18,90%), Sungai Tebelian (47,47%), Dedai (22,74%), Kayan Hilir (48,01%), Ketungau Hilir (24,66%), Ketungau Tengah (49,40%) dan Ketungau Hulu (46,40%). Disparitas capaian APM antar kecamatan menandakan bahwa di Kabupaten Sintang ketersediaan sarana/fasilitas dan Guru serta tenaga kependidikan belum merata antar kecamatan.

Tabel 2.31.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Sintang
Tahun 2011-2015

No	JENJANG PENDIDIKAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	**SD/MI**					
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	48.690	51.921	49.164	49.246	46.219
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	52.686	49.319	51.670	49.397	47.999
1.3.	APM SD/MI (%)	92,42	105,28	95,15	99,69	96,29
2	**SMP/MTs**					
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikan SMP/MTs	13.016	15.784	15.942	18.577	18.762
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	18.781	20.596	20.596	21.465	25.219
2.3.	APM SMP/MTs (%)	69,30	76,64	77,40	86,55	74,40
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikan SMA/MA/SMK	7.420	8.949	9.038	16.987	16.987
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	25.570	19.667	19.667	20.650	20.650
3.3.	APM SMA/MA/SMK	29,02	45,50	45,96	82,26	82,26

Tabel 2.32.
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan
Tahun 2015

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APM	jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM	jumlah siswa usia 16-18 th bersekolah di SMA/MA/ SMK	jumlah penduduk usia 16-18th	APM
1	Serawai	3.084	3.214	95,96	1.181	1.614	73,20	610	1.153	52,88
2	Ambalau	2.141	2.262	94,65	630	1.103	57,08	237	678	35,01
3	Kayan Hulu	3.080	3.209	95,98	826	1.505	54,90	453	1.103	41,05
4	Sepauk	5.577	5.699	97,86	1.922	3.054	62,94	903	2.422	37,29
5	Tempunak	3.311	3.439	96,28	1.391	1.746	79,65	273	1.445	18,90
6	Sungai Tebelian	3.348	3.467	96,57	1.476	1.827	80,81	677	1.426	47,47
7	Sintang	6.696	6.830	98,04	4.104	4.156	98,75	9.818	4.213	233,05
8	Dedai	3.002	3.129	95,94	1.245	1.779	69,96	314	1.382	22,74
9	Kayan Hilir	2.995	3.134	95,56	1.041	1.195	87,10	619	1.289	48,01
10	Kelam Permai	1.758	1.885	93,26	1.078	1.094	98,56	1.006	769	130,90
11	Binjai Hulu	1.333	1.464	91,05	565	887	63,75	361	542	66,61
12	Ketungau Hilir	2.840	2.964	95,82	1.139	1.680	67,81	337	1.365	24,66
13	Ketungau Tengah	4.181	4.308	97,05	1.043	2.015	51,78	825	1.670	49,40
14	Ketungau Hulu	2.873	2.995	95,93	1.120	1.565	71,61	555	1.195	46,48

- ***Angka Partisipasi Kasar (APK)***

Berbeda dengan APM, Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah siswa usia sekolah (7-12 tahun; 13-15 tahun; dan 16-18 tahun) yang bersekolah di SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MK dengan jumlah penduduk usia sekolah dan bukan usia sekolah (kurang atau lebih dari usia sekolah) pada periode yang sama. Indikator APK diperlukan untuk mengetahui apakah penduduk usia sekolah dan bukan usia sekolah tersebut sudah pernah atau tidak pernah bersekolah. Capaian APK pada setiap jenjang pendidikan bisa melebihi 100%. Hal ini dikarenakan adanya penduduk yang belum mencapai usia sekolah dan yang melebihi usia sekolah aktif bersekolah. Selain itu, adanya program Kejar Paket A untuk SD, Paket B untuk SMP dan Paket C untuk SMA, juga menyebabkan capaian APK melebihi 100%.

Tabel. 2.30 dan Tabel. 2.31 mengungkapkan bahwa selama periode 2011-2015, pada jenjang pendidikan SD/MI, capaian APK di seluruh kecamatan sudah melebihi 100%. Di jenjang pendidikan SMP/MTs, seluruh kecamatan telah memiliki APK di atas 50%, sementara itu capaian APK SMA/SMK/MA, di antara 14 kecamatan, baru 3 (tiga) kecamatan yang APK-nya mencapai 90% lebih, yaitu kecamatan Sintang (234,76%), Sungai Tebelian (168,59%) dan Kelam Permai (162,69%). Capaian APK sangat rendah (kurang dari 30%) terdapat di tiga kecamatan, yaitu kecamatan Tempunak (21,37%), Dedai (23,30%) dan Ketungau Hilir (27,66%).

Tabel 2.33.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	**SD/MI**					
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	61.496	60.681	58.921	60.301	58.822
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	52.686	49.319	51.670	49.397	47.999
1.3.	APK SD/MI	116,72	123,04	114,03	122,07	122,55
2	**SMP/MTs**					
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikan SMP/MTs	18.062	17.055	18.236	24.653	25.560
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	18.781	20.596	20.596	21.465	25.219
2.3.	APK SMP/MTs	96,17	82,81	88,54	114,85	101,35
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikan SMA/MA/SMK	14.269	10.976	11.666	20.219	20.219
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	25.570	19.667	19.667	20.650	20.650
3.3.	APK SMA/MA/SMK	55,80	55,81	59,32	97,91	97,91

Tabel 2.34.
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan
Tahun 2015

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APK	Total Siswa SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APK	Total Siswa SMA/SMK/MA	Jumlah penduduk usia 16-18 th	APK
1	Serawai	3.940	3.214	122,59	1.448	1.614	89,75	741	1.153	64,27
2	Ambalau	2.758	2.262	121,93	893	1.103	80,93	284	678	41,82
3	Kayan Hulu	4.067	3.209	126,74	1.156	1.505	76,83	536	1.103	48,59
4	Sepauk	6.820	5.699	119,67	2.532	3.054	82,91	1.228	2.422	50,68
5	Tempunak	4.098	3.439	119,16	1.858	1.746	106,39	309	1.445	21,37
6	Sungai Tebelian	4.160	3.467	119.99	1.899	1.827	103,97	2.404	1.426	168,59
7	Sintang	8.354	6.830	122.31	5.625	4.156	135,35	9.890	4.213	234,76
8	Dedai	3.761	3.129	120,20	1.747	1.779	98,17	322	1.382	23,30
9	Kayan Hilir	3.987	3.134	120,20	1.449	1.195	121,25	633	1.289	49,12
10	Kelam Permai	2.259	1.885	119,84	1.207	1.094	110,36	1.250	769	162,69
11	Binjai Hulu	1.690	1.464	115,44	630	887	71,07	471	542	86,89
12	Ketungau Hilir	3.732	2.964	125,91	1.235	1.680	73,53	378	1.365	27,66
13	Ketungau Tengah	5.445	4.308	126,40	1.563	2.015	77,58	1.041	1.670	62,36
14	Ketungau Hulu	3.761	2.995	125,24	1.317	1.565	84,20	733	1.195	61,39

Perlu dikemukakan dalam RPJMD 2016-2021 ini, bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah kewenangan pengelolaan pendidikan sekolah menengah (SMA/SMK/MA) sejak tahun 2016 berada pada pemerintahan provinsi, bukan lagi pada pemerintahan Kabupaten/kota. Dengan adanya perubahan kewenangan ini diharapkan pembangunan pendidikan menengah dapat meningkatkan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA untuk selanjutnya dapat meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah dan pada glirannya meningkatkan IPM Kabupaten Sintang.

- ***Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)***

Telah dikemukan di atas bahwa APM dan APK penduduk di beberapa kecamatan berbeda-beda besarannya dan bervariasi. Perubahan APM dan APK berkaitan erat dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Dalam konsep pembangunan sumberdaya manusia harus diupayakan mengurangi penduduk berpendidikan rendah (SMP ke bawah) dan meningkatkan penduduk berpendidikan tinggi (SMA ke atas). Artinya, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan penambahan angka putus sekolah melalui program bea siswa, melaksanakan program Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Dengan bertambahnya penduduk yang berpendidikan SMA ke atas, ini

akan mendongkrak angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kalau pada tahun 2014 proporsi penduduk berijazah SMP ke bawah sekitar 80% berbanding 20% berijazah SMA ke atas, maka lima tahun ke depan diharapkan terjadi perubahan menjadi 60% berbanding 40%.

Tabel 2.35.
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)
Kabupaten Sintang
Tahun 2014

No	Ijazah Tertinggi	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase
1	SD	119.990	57,94
2	SMP	43.749	21,13
3	SMA	35.074	16,93
4	Perguruan Tinggi	8.279	4,00
5	Jumlah Penduduk	207.092	100,00

2.2.2.2. Kesehatan

- ***Persentase Balita Gizi Buruk***

  Penangan Balita Gizi Buruk semakin membaik. Balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 25 balita, seluruhnya tertangani mendapat perawatan. Ini berarti cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan selama 2014 di Kabupaten Sintang capaiannya sebesar100,00%. Hasil yang sama juga terjadi pada tahun 2013.

- ***Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)***

  Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sintang tergolong tinggi, yakni 30 per 1000 kelahiran hidup. Capaian ini tergolong tiga besar di Kalbar bersama Kabupaten Kayong Utara (38 per 1000 kh), dan Kabupaten Sambas (35 per 1000 kh). Lebih tinggi dibanding AKB Kalimantan Barat yang mencapai 27 per 1000 kh.

  Tabel 2.33 menginformasikan bahwa hingga tahun 2015 ada tiga kecamatan yang perlu mendapat prioritas dalam pembangunan kesehatan karena ditandai dengan jumlah kematian terbanyak usia dibawah 1 tahun. Ketiga Kecamatan itu adalah Kecamatan Sintang, Dedai dan kecamatan Sepauk dengan jumlah kematian bayi usia kurang dari 1 tahun masing masing sebanyak 12, 8 dan 6. AKB tertinggi terdapat di kecamatan Dedai dan kecamatan Binjai Hulu, masing-masing 13,72 dan 11,32 per 1000 kh.

Tabel 2.36.
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Sintang
Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun pada tahun 2015	Jumlah Kelahiran Hidup pada Tahun 2015	AKB (PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP)	AKHB
S e r a w a i	1	443	2,26	998
A m b a l a u	-	289	-	1.000
Kayan Hulu	2	359	5,57	994
S e p a u k	6	1.020	5,88	994
Tempunak	4	561	7,13	993
Sungai Tebelian	5	652	7,67	992
S i n t a n g	12	1.262	9,51	990
D e d a i	8	583	13,72	986
Kayan Hilir	2	344	5,81	994
Kelam Permai	1	352	2,84	997
Binjai Hulu	3	265	11,32	989
Ketungau Hilir	1	408	2,45	998
Ketungau Tengah	1	472	2,12	998
Ketungau Hulu	2	416	4,81	995

Sumber : *Dinas Kesehatan Kab. Sintang.*

- ***Usia Harapan Hidup (UHH)***

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang dipakai representasi aspek kesehatan dalam indikator IPM. Semakin tinggi (UHH) menandakan semakin berkurang AKB. Seiring dengan kemajuan IPTEK disertai dengan perkembangan kualitas alat-alat kesehatan dan tenaga kesehatan diharapkan AKB semakin berkurang sehingga UHH semakin meningkat. Berdasarkan Statistik Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 (BPS), terjadi peningkatan angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Sintang dari tahun 2013 sebesar 69,04 menjadi 70,95 pada tahun 2014.

2.2.2.3. Kesempatan Kerja

- ***Rasio penduduk yang bekerja***

Rasio penduduk yang bekerja dengan total angkatan kerja disebut Tingkat Pemanfaatan Angkatan Kerja. Tingat Pemanfaatan Angkatan Kerja di Kabupaten Sintang berdasarkan SAKERNAS 2013 sudah mencapai 97,76 persen. Ini berarti tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk usia kerja masih ada sebesar 2,24 persen. Setahun berikutnya (2014) TPT meningkat menjadi 3,06%. Peningkatan TPT diikuti dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 77,58% (2013) menjadi 79,04% (2014).

Tabel 2.37.
Angkatan Kerja yang Bekerja dan Mencari Pekerjaan Menurut Golongan Umur di Kabupaten Sintang Tahun 2014

Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Mencari Kerja	
15-24	37.144	5.354	42.498
25-34	59.017	1.209	146.312
35-44	51.075		
45-54	35.011		
55+	25.754	0	25.754
Jumlah	208.001	6.563	214.564

Sumber : *SAKERNAS, 2014.*

2.2.3. Seni Budaya dan Olah Raga

Berdasarkan data pada tahun 2014, perkembangan jumlah group kesenian, budaya dan olah raga di Kabupaten Sintang tidak terlalu berkembang secara signifikan. Sampai saat ini saja misalnya, jumlah group kesenian yang ada di Kabupaten Sintang hanya berjumlah 32 buah, namun belum didukung oleh ketersediaan gedung kesenian yang memadai. Kemudian ketersediaan gedung olah raga yang representatif untuk mendukung kegiatan olah raga di Kabupaten Sintang baru hanya ada satu, yaitu yang berada dikompleks stadion lapangan bola di Sintang. Namun untuk gedung-gedung olah raga sejenis futsal berjumlah 10 buah menyebar di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang.

Tabel 2.38.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Sintang Tahun 2014

No	Capaian Pembangunan	Jumlah
1	Grup kesenian per 10.000 penduduk.	32 buah
2	Gedung kesenian per 10.000 penduduk.	2 buah
3	Klub olahraga per 10.000 penduduk.	-
4	Gedung olahraga per 10.000 penduduk.	10

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

2.3.1.1.1. Pendidikan Dasar

- ***Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah***

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk usia 7-12 tahun selama periode 2011-2015, dalam proses pembangunan pendidikan guna melayani hak masyarakat memperoleh pendidikan, telah dilakukan penambahan gedung baru sebanyak 23 unit dari 397 unit tahun 2011 menjadi 420 unit

tahun 2015. Rasio antara penduduk usia 7-12 tahun dengan gedung sekolah justru berkurang dari 133 tahun 2011 menjadi 114 tahun 2015. Ini berarti pada tahun 2015 tiap sekolah SD/MI rata-rata mempunyai murid sebanyak 114 orang. Jika tiap sekolah memiliki 6 ruang kelas, berarti tiap kelas rata-rata mempunyai murid sebanyak 20 orang. Keadaan ini sebenarnya kurang rasional karena terjadi kelebihan ruang. Idealnya tiap ruang kelas menampung minimal 40 siswa. Berdasar pada rasio tersebut perlu dikaji secara mendalam sebelum membangun gedung SD/MI yang baru.

Berbeda dengan SMP/MTs, rasio antara penduduk usia 13-15 tahun dengan gedung sekolah berfluktuasi di kisaran 190-223. Pada tahun 2015 rasio penduduk usia 13-15 tahun dengan gedung sekolah sebesar 223. Ini berarti tiap 1 unit SMP/MTs menampung 223 penduduk usia 13-15 tahun. Jika diasumsikan tiap gedung sekolah memiliki 6 ruang (tiap kelas masing-masing 2 ruang), maka tiap ruang menampung 30 siswa. Rasio ini relatif baik dan ideal.

Tabel 2.39.
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	397	397	397	431	420
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	52.686	49.319	51.670	49.397	47.999
1.3.	Rasio	133	124	130	115	114
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	99	103	120	119	113
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	18.781	20.596	20.596	21.465	25.219
2.3.	Rasio	190	200	172	180	223

Tabel 2.40.
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan
Kabupaten Sintang Tahun 2015

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Gedung Sekolah SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah Gedung Sekolah SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
1	S e r a w a i	27	3.214	119	7	1.614	231
2	A m b a l a u	29	2.262	78	4	1.103	276
3	Kayan Hulu	33	3.209	97	8	1.505	188
4	S e p a u k	44	5.699	130	13	3.054	235
5	Tempunak	27	3.439	127	8	1.746	218
6	Sungai Tebelian	27	3.467	128	7	1.827	261
7	S i n t a n g	34	6.830	201	17	4.156	245
8	D e d a i	28	3.129	112	7	1.779	254
9	Kayan Hilir	34	3.134	92	8	1.195	149
10	Kelam Permai	17	1.885	111	6	1.094	182
11	Binjai Hulu	11	1.464	133	2	887	444
12	Ketungau Hilir	40	2.964	74	8	1.680	210
13	Ketungau Tengah	40	4.308	108	11	2.015	183
14	Ketungau Hulu	30	2.995	98	7	1.565	224

- ***Rasio guru/murid***

  Jumlah guru SD/MI selama periode 2011 – 2015 bertambah sebanyak 1.190 dari 2.536 orang tahun 2011 menjadi 3.726 orang tahun 2015. Sementara itu jumlah murid mengalami penurunan dari 60.301 menjadi 58.822 siswa (berkurang sebanyak 1.479 siswa) pada periode yang sama. Pertambahan guru yang lebih banyak dari pertambahan murid mengakibatkan rasio guru terhadap murid semakin kecil, berkurang dari 24 tahun 2011 menjadi 16 tahun 2015, (lihat Tabel 2.41). Dengan rasio yang semakin kecil bermakna rekrutmen guru lima tahun mendatang sifatnya untuk mengganti, bukan untuk menambah lagi.

  Keadaan yang sama juga terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs, dimana rasio guru terhadap murid relative konstan pada angka 19, artinya satu orang guru mengajar 19 siswa. Dengan rasio sebesar 19 menandakan ketersediaan guru SMP/MTs sudah mencukupi dan sudah tersebar secara merata di seluruh kecamatan, lihat Tabel 2.42.

Tabel 2.41.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Sintang
Tahun 2011-2015

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	2.536	2.493	3.099	3.276	3.726
1.2.	Jumlah Murid	61.496	60.681	58.921	60.301	58.822
1.3.	Rasio	24	24	19	18	16
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	970	915	966	1.310	1.306
2.2.	Jumlah Murid	18.062	17.055	18.236	24.653	25.560
2.3.	Rasio	19	19	19	19	20

Tabel 2.42.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Sintang menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	S e r a w a i	333	3.940	8	68	1.448	5
2	A m b a l a u	635	2.758	23	39	893	4
3	Kayan Hulu	281	4.067	7	67	1.156	6
4	S e p a u k	214	6.820	3	123	2.532	5
5	Tempunak	164	4.098	4	101	1.858	5
6	Sungai Tebelian	240	4.160	6	101	1.899	5
7	S i n t a n g	182	8.354	6	299	6.625	5
8	D e d a i	156	3.761	4	100	1.747	6
9	Kayan Hilir	126	3.987	3	75	1.449	5
10	Kelam Permai	238	2.259	11	77	1.207	6
11	Binjai Hulu	290	1.680	17	30	630	5
12	Ketungau Hilir	224	3.732	6	61	1.235	5
13	Ketungau Tengah	250	5.445	5	95	1.563	6
14	Ketungau Hulu	390	3.751	10	70	1.317	5

2.3.1.2. Kesehatan

- ***Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita***

Penambahan Posyandu sebanyak 21 unit diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada balita. Rata-rata Posyandu dapat memberi pelayanan kepada 100 balita. Hingga tahun 2015, persebaran Posyandu di seluruh kecamatan relatif sudah merata. Rasio terendah berada di Kecamatan Sintang dengan jumlah balita sebanyak 7.164 jiwa dan Posyandu sebanyak 41 unit. Rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Ambalau dengan jumlah balita sebanyak 1.514 jiwa dan jumlah Posyandu 19 unit, lihat Tabel 2.43 dan Tabel. 2.44.

Tabel 2.43.
Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Sintang
Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah posyandu	393	393	410	414	414
2	Jumlah balita	39.227	38.642	41.170	41.862	43.256
3	Rasio Per 100 Balita	1,00	1,02	1,00	0,99	0,96

Tabel 2.44.
Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Sintang
Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio Per 100 Penduduk
1	S e r a w a i	24	2.586	0,93
2	A m b a l a u	19	1.514	1,25
3	Kayan Hulu	43	2.575	1,67
4	S e p a u k	45	5.503	0,82
5	Tempunak	33	3.174	1,04
6	Sungai Tebelian	34	3.443	0,99
7	S i n t a n g	41	7.164	0,57
8	D e d a i	32	3.254	0,98
9	Kayan Hilir	32	2.879	1,11
10	Kelam Permai	22	1.803	1,22
11	Binjai Hulu	13	1.347	0,97
12	Ketungau Hilir	29	2.429	1,19
13	Ketungau Tengah	24	3.249	0,74
14	Ketungau Hulu	23	2.336	0,98

- Rasio Puskesmas Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per 1000 penduduk

Tabel 2.45.
Jumlah Puskesmas Poliklinik dan Pustu (Per 1000 penduduk)
Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Puskesmas	20	20	20	20	20
2	Jumlah Poliklinik	14	14	14	17	22
3	Jumlah Pustu	41	41	41	59	64
4	Jumlah Penduduk	363.978	364.529	376.452	383.465	399.911
5	Rasio Puskesmas per 100 ribu penduduk	5,49	5,49	5,31	5,22	5,00
6	Rasio Poliklinik per 100 ribu penduduk	3,85	3,84	3,72	4,43	5,50
7	Rasio Pustu per 100 ribu penduduk	11,26	11,25	10,89	15,39	16,00

Tabel 2.46.
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan
Tahun 2015 (Per 100 ribu penduduk)
Kabupaten Sintang

No	Kecamatan	Jumlah Pendudukan	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	Serawai	23.694	1	4,22	2	8,44	-	-
2	Ambalau	13.864	1	7,21	-	-	4	28,85
3	Kayan Hulu	23.606	1	4,24	-	-	4	16,94
4	Sepauk	50.425	1	1,98	-	-	8	15,87
5	Tempunak	29.094	2	6,87	-	-	3	10,31
6	Sungai Tebelian	31.545	1	3,17	3	9,51	3	9,51
7	S i n t a n g	65.676	3	4,57	5	7,61	1	1,52
8	D e d a i	29.824	2	6,71	1	3,35	3	10,06
9	Kayan Hilir	26.383	1	3,79	-	-	4	15,16
10	Kelam Permai	16.508	2	12,12	1	6,06	-	-
11	Binjai Hulu	12.331	1	8,11	-	-	-	-
12	Ketungau Hilir	22.261	2	8,98	3	13,48	3	13,48
13	Ketungau Tengah	29.773	1	3,36	1	3,36	7	23,51
14	Ketungau Hulu	21.408	1	4,67	1	4,67	1	4,67

- ***Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk***

Tabel 2.47.
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	0	0	0	0	0
2	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
3	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	1	1	2	2	2
4	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
5	Jumlah Slruh Rumah Sakit	2	2	3	3	3
6	Jumlah Penduduk	363.978	364.529	376.452	383.465	399.911
7	Rasio per 100.000 penduduk	0,55	0,55	0,80	0,78	0,75

- Rasio dokter per satuan penduduk

Pertambahan jumlah penduduk jauh lebih banyak dibanding pertambahan dokter, sehingga rasio jumlah dokter terhadap penduduk semakin besar. Rasio meningkat dari 15,09 pada tahun 2011 menjadi 18,42 pada tahun 2015. Persebaran jumlah dokter belum merata ke seluruh kecamatan. Masih ada kecamatan yang hanya memiliki 1 (satu) orang dokter, yaitu Kecamatan

Kayan Hulu. Sementara itu, di kecamatan Sintang ada 45 dokter dengan berbagai kompetensi (kualifikasi). Lihat Tabel 2.48 dan 2.49.

Tabel 2.48.
Jumlah Dokter Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Dokter	55	70	60	61	73
2	Jumlah Penduduk	364.529	376.452	383.465	399.911	396.392
3	Rasio per 100.000 penduduk	15,09	18,59	15,65	15,25	18,42

Tabel 2.49.
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Per 100.000 penduduk
Kabupaten Sintang Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1	S e r a w a i	23.694	2	8,44
2	A m b a l a u	13.864	2	14,43
3	Kayan Hulu	23.606	1	4,24
4	S e p a u k	50.425	3	5,95
5	Tempunak	29.094	2	6,87
6	Sungai Tebelian	31.545	2	6,34
7	S i n t a n g	65.676	45	68,52
8	D e d a i	29.824	3	10,06
9	Kayan Hilir	26.383	2	7,58
10	Kelam Permai	16.508	3	18,17
11	Binjai Hulu	12.331	2	16,22
12	Ketungau Hilir	22.261	2	8,98
13	Ketungau Tengah	29.773	2	6,72
14	Ketungau Hulu	21.408	2	9,34

- ***Rasio tenaga medis per satuan penduduk***

Tabel 2.50.
Jumlah Tenaga Medis Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Sintang

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Tenaga Medis	55	70	60	61	703
2	Jumlah Penduduk	364.529	376.452	383.465	399.911	396.392
3	Rasio per 100.000 penduduk	15,09	18,59	15,65	15,25	177,35

Tabel 2.51.
Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Kabupaten Sintang
Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio per 100.000 pnddk
1	S e r a w a i	23.694	43	181,48
2	A m b a l a u	13.864	26	187,54
3	Kayan Hulu	23.606	45	190,63
4	S e p a u k	50.425	53	105,11
5	Tempunak	29.094	51	175,29
6	Sungai Tebelian	31.545	38	120,46
7	S i n t a n g	65.676	100	152,26
8	D e d a i	29.824	73	244,77
9	Kayan Hilir	26.383	48	181,94
10	Kelam Permai	16.508	49	296,83
11	Binjai Hulu	12.331	23	186,52
12	Ketungau Hilir	22.261	46	206,64
13	Ketungau Tengah	29.773	57	191,45
14	Ketungau Hulu	21.408	51	238,23

2.3.1.3. Lingkungan Hidup

- ***Persentase penanganan sampah***

Jumlah volume sampah dan produksi sampah menunjukkan kenaikan secara kontinu dari tahun ke tahun. Jumlah volume produksi sampah pada tahun 2010 sebanyak 10.924,77 m^3 meningkat menjadi 11.674,71 m^3 di tahun 2014. Tingkat penanganan juga menunjukkan peningkatan dimana persentasenya mencapai kenaikan 10% dari 50% di tahun 2010 meningkat menjadi 60% di tahun 2014. Secara lengkap penangan sampah dari tahun 2010 hingga 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.52.
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Sintang
Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah sampah yang ditangani (m^3)	5.569,83	6.235,10	6.326,20	7.004,83	7.022,63
2	Jumlah volume produksi sampah (m^3)	11139,66	11336,55	11502,18	11674,71	11724,00
3	Persentase	50	55	55	60	60

Dilihat per kecamatan, jumlah produksi sampah tertinggi di Kecamatan Sintang dengan jumlah 2.044 m^3 dengan jumlah sampah yang dapat ditangani sebanyak 91,86% atau 1.877,54 m^3. Sedangkan jumlah produksi sampah paling sedikit di Kecamatan Binjai Hulu sebanyak 366 m^3 dengan tingkat penanganan sebesar 58,74% atau sebanyak 215,00 m^3. Jumlah produksi sampah dan penanganannya per kecamatan secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.53.
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Sintang
Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Sampah Yang ditangani (m^3)	Jumlah volume produksi sampah (m^3)	Persentase
1	S e r a w a i	413,51	689	60,02
2	A m b a l a u	239,67	400	59,92
3	Kayan Hulu	357,30	685	52,16
4	S e p a u k	998,38	1.490	67,01
5	Tempunak	150,00	852	17,61
6	Sungai Tebelian	350,00	922	37,96
7	S i n t a n g	1.877,54	2.044	91,86
8	D e d a i	615,93	869	70,88
9	Kayan Hilir	400,28	766	52,26
10	Kelam Permai	335,30	480	69,80
11	Binjai Hulu	215,00	366	58,74
12	Ketungau Hilir	100,00	650	15,38
13	Ketungau Tengah	478,01	878	54,44
14	Ketungau Hulu	491,71	633	77,68
	TOTAL	7.022,63	11.724,00	59,81

Data : *Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kab. Sintang, 2015*

- ***Persentase penduduk berakses air minum***

Nilai persentase yang dimaksud adalah jumlah penduduk yang mendapat akses air minum PDAM terhadap jumlah penduduk total. Air minum yang dapat diakses adalah air minum yang memenuhi syarat menurut Kementerian Kesehatan yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Demikian pula walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.

Dalam kurun waktu lima tahun (2010 -2015), pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses air minum terus meningkat dari segi jumlah penduduknya. Dari jumlah penduduk sebanyak 24.432 jiwa pada tahun 2010 meningkat menjadi 27.360 jiwa pada tahun 2014. Akan tetapi rasio Proporsi Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses air minum dan jumlah penduduk dari tahun 2010 s.d 2014 di Kabupaten Sintang terjadi penurunan dari 6,7% di tahun 2010 menurun menjadi 6,47% di tahun 2014. Nilai rasio ini turun disebabkan kecepatan peningkatan pelayanan di bawah perkembangan jumlah penduduk yaitu 364.759 jiwa pada tahun 2010 menjadi 422.908 jiwa pada tahun 2014. Perkembangan akses air minum di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54.
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan
Akses PDAM dan Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang
Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	24.432	22.848	24.036	24.852	27.360
2	Jumlah penduduk	364.759	371.322	377.190	393.755	422.908
3	Persentase penduduk berakses airbersih	6,70	6,15	6,37	6,31	6,47

Persebaran akses air minum PDAM di kabupaten Sintang baru tersebar di empat kecamatan yaitu Kecamatan Sepauk, Kecamatan Tempunak, Kecamatan Sintang, dan Kecamatan Ketungau Tengah. Rasio akses terbesar terdapat di Kecamatan Sintang yaitu 33,29% atau sebanyak 23.598 penduduknya mendapatkan akses air minum. Secara lengkap kondisi persebaran akses air minum PDAM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.55.
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses PDAM
dan Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan
Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum PDAM	Jumlah penduduk	Persentase
1	S e r a w a i	-	22.875	-
2	A m b a l a u	-	14.898	-
3	Kayan Hulu	-	24.615	-
4	S e p a u k	1.350	49.719	2,72
5	Tempunak	1.080	28.092	3,84
6	Sungai Tebelian	-	29.153	-
7	S i n t a n g	23.598	70.895	33,29
8	D e d a i	-	27.828	-
9	Kayan Hilir	-	26.944	-
10	Kelam Permai	-	46.174	-
11	Binjai Hulu	-	11.783	-
12	Ketungau Hilir	-	21.240	-
13	Ketungau Tengah	1.350	27.959	4,83
14	Ketungau Hulu	-	20.733	-

2.3.1.4. Sarana dan Prasarana Umum

- ***Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik***

Pembangunan jalan yang dilaksanakan memperhatikan keserasian dengan perkembangan transportasi jalan raya, terutama keserasian antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung jalan, jaringan jalan di pusat pertumbuhan, pusat produksi dan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran. Di samping itu juga dilakukan pembangunan jalan yang membuka daerah terpencil dan mendukung pengembangan pemukiman.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Total panjang jalan Kabupaten Sintang adalah 1.708,02 km. Dalam dua tahun antara tahun 2013 dan 2014, kondisi jalan hampir tidak terjadi perubahan. Berdasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan ≤ 6%, arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Hingga tahun 2014, panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sintang sepanjang 266,59 km atau 15,61%.
b. Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 s/d 10 %). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu – lintas. Hingga tahun 2014, panjang jalan dalam kondisi sedang di Kabupaten Sintang sepanjang 595,68 km atau 34,88% .
c. Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16 s/d 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu - lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan - lahan, mengurangi kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan. Hingga tahun

2014, panjang jalan dalam kondisi rusak di Kabupaten Sintang sepanjang 316,72 km atau 18,54%.

d. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda 4, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah. Hingga tahun 2014, panjang jalan dalam kondisi rusak di Kabupaten Sintang sepanjang 525,87 km atau 30,79%.

Kondisi jalan di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang masih terjadi perbedaan. Di tujuh kecamatan yaitu Kayan Hilir, Kayan Hulu, Serawai, Ambalau, Binjau Hulu, dan Ketungau Hulu masih berupa jalan tanah dalam arti tidak ada ruas jalan dengan permukaan aspal atau kerikil. Dari total panjang 1.708,02 km, sebesar 49,33% dalam kondisi rusak dan rusak berat dan 83,02% berupa jalan tanah.

Tabel 2.56.
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Sintang
Menurut Kecamatan Tahun 2014

No	NAMA KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	LEBAR (KM)	JENIS PERMUKAAN (KM)				KONDISI JALAN (KM)			
				ASPAL	KERIKIL	TANAH	LAIN-LAIN	BAIK	SEDANG	RUSAK	
										RINGAN	BERAT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Sintang	113,68	-	56,75	-	55,31	1,62	40,30	47,06	16,14	6,82
2	Sungai Tebelian	101,30	-	40,80	16,00	44,50	-	9,95	37,71	19,68	33,96
3	Tempunak	54,70	-	3,00	-	51,50	0,20	4,87	20,05	10,35	19,44
4	Sepauk	239,30	-	25,10	-	214,20	-	23,23	86,95	49,90	79,21
5	Kelam Permai	166,80	-	50,80	8,00	108,00	-	28,98	55,57	29,52	52,74
6	Dedai	199,90	-	48,00	23,20	128,70	-	31,98	66,73	36,42	64,77
7	Kayan Hilir	121,00	-	-	-	121,00	-	19,36	40,39	22,05	39,20
8	Kayan Hulu	148,00	-	-	-	148,00	-	15,65	53,21	29,48	49,66
9	Serawai	56,50	-	-	-	56,50	-	8,33	19,00	10,73	18,44
10	Ambalau	62,90	-	-	-	62,90	-	10,06	21,00	11,46	20,38
11	Binjai Hulu	78,54	-	-	-	78,54	-	12,57	26,22	14,31	25,45
12	Ketungau Hilir	141,65	-	10,00	-	131,65	-	22,66	47,28	25,81	45,89
13	Ketungau Tengah	112,28	-	6,00	-	106,28	-	17,96	37,48	20,46	36,38
14	Ketungau Hulu	111,47	-	-	-	111,47	-	20,70	37,04	20,41	33,53
JUMLAH		1.708,02		240,45	47,20	1.418,55	1,82	266,59	595,68	316,72	525,87

- ***Rasio Jaringan Irigasi***

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.

Tabel 2.57.
Rasio Jaringan Irigasi dan Luas Lahan Budaya Kabupaten Sintang
Tahun 2010-2014

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi (Km) dan Luas Lahan Budaya (Ha)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jaringan primer	4,165	4,165	4,165	4,165	6,265
2	Jaringan sekunder	261,988	261,988	264,888	267,358	586,302
3	Jaringan tersier	-	-	-	-	-
4	Luas lahan budidaya	4,453	4,453	4,453	4,453	10,592
5	Rasio	59,77	59,77	60,42	60,98	55,94

Dibandingkan tahun 2013, rasio jaringan irigasi menurun dari 60,98 menjadi 55,94 di tahun 2014. Menurunnya angka rasio ini disebabkan seiring dengan pembangunan jaringan irigasi tersebut, luas lahan budidaya juga diperluas dari 4,453 Ha menjadi 10,592 Ha atau lebih dari dua kali lipatnya. Akan tetapi sebenarnya panjang jaringan irigasi meningkat lebih dari dua kalinya dibandingkan tahun 2013 yakni dari total panjang 271,523 km menjadi 592,567 km.

Dilihat dari persebarannya untuk setiap Kecamatan, jaringan irigasi terpanjang berada di kecamatan Sepauk yaitu 135,409 km dengan luas lahan budidaya 3,056 Ha atau rasionya 44,31. Di urutan kedua dengan panjang lebih dari 100,000 km adalah kecamatan Dedai dan Kelam Permai dengan rasio di atas 55%. Untuk selengkapnya persebaran jaringan irigasi untuk setiap kecamatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.58.
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan
Tahun 2014

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas Lahan Budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
1	S e r a w a i	-	2,500	-	2,500	70	35,71
2	A m b a l a u	-	-	-	-	-	-
3	Kayan Hulu	-	49,354	-	49,354	560	88,13
4	S e p a u k	1,700	133,709	-	135,409	3,056	44,31
5	Tempunak	-	59,545	-	59,545	1,070	55,65
6	Sungai Tebelian	265	5,016	-	5,281	90	58,68
7	S i n t a n g	2,100	-	-	-	-	-
8	D e d a i	-	104,787	-	106,887	1,938	55,15
9	Kayan Hilir	2,200	85,574	-	85,574	967	88,49
10	Kelam Permai	-	103,277	-	105,477	1,819	57,99
11	Binjai Hulu	-	8,520	-	8,520	125	68,16
12	Ketungau Hilir	-	12,905	-	12,905	375	34,41
13	Ketungau Tengah	-	10,373	-	10,373	249	41,66
14	Ketungau Hulu	-	10,742	-	10,742	275	39,06
JUMLAH		6,265	586,302	-	592,567	10,594	47,67

Efisiensi pengelolaan jaringan irigasi ditunjukkan oleh nilai koefisien PIA, PIR dan PAR. PIA menunjukkan nisbah antara pasok irigasi dengan luas lahan terairi, dalam hal ini semakin kecil nilai PIA maka efisiensi manajemen akan semakin besar. Sementara itu PIR atau disebut juga *Relative Irrigation Supply (RIS)* menunjukkan nisbah antara pasok irigasi total dengan kebutuhan air tanaman, dan PAR atau *Relative Water Supply* (RWS) merupakan nisbah total pasok air (irigasi ditambah curah hujan efektif) terhadap kebutuhan air tanaman. PIR dan PAR biasa juga dipakai untuk mengukur kemampuan masyarakat mengelola sumberdaya air dalam kegiatan suatu sistem irigasi. Selisih antara PAR dan PIR merupakan curah hujan yang dapat digunakan tanaman. Apabila curah hujan tinggi dan nilai PIR juga tinggi maka fenomena ini menunjukkan bahwa petani belum mampu untuk mengelola sumberdaya secara sepadan. Semakin kecil nilai PIR dan PAR menunjukkan bahwa efisiensi manajemen irigasi semakin bagus.

Tingkat efektivitas akan diukur dari nilai Indek Luas Areal (IA), semakin tinggi nilai IA menunjukkan semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi. Efektifitas pengelolaan jaringan irigasi ditunjukkan oleh nisbah antara luas areal terairi terhadap luas rancangan. Dalam hal ini semakin tinggi nisbah tersebut semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi.

Tabel 2.59.
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Kabupaten Sintang Tahun 2010-2014

No	Pasokan Irigasi	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pasok Irigasi per Area	3,02	2,90	2,79	2,68	1,07
2	Pasok Irigasi Relatif	5,30	5,09	4,89	4,71	1,87
3	Pasok Air Relatif	12,32	11,83	11,37	10,95	4,35
4	Indek Luas Areal	48%	50%	52%	54%	57%
5	Rancangan Luas Areal	4.453	4.453	4.453	4.453	10.594

Dalam lima tahun pembangunan di bidang irigasi, rasio PIA menunjukan perkembangan yang semakin baik, yaitu dari 3,02 di tahun 2010 menjadi 1,07 di tahun 2014. Hal ini menunjukkan efesiensi manajemen besar. Begitu pula dengan rasio PIR dari 5,30 di tahun 2010 menjadi 1,87 di tahun 2014. Hal serupa terjadi pada rasio PAR yang menurun dari 12,32 menjadi 4,35 di tahun 2014. Kedua rasio ini juga menunjukkan efesiensi manajemen yang baik.

Dilihat dari perkembangannya, nilai rasio IA meningkat dari 48% di tahun 2010 menjadi 57% di tahun 2014. Walaupun menunjukkan peningkatan sebesar 9%, akan tetapi bisa dilihat bahwa dari total area rancangan masih terdapat sekitar 43% yang masih belum terairi. Artinya masih cukup luas wilayah rancangan yang belum terairi.

Tingkat efesiensi setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.60.
Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Menurut Kecamatan Kabupaten Sintang Tahun 2010-2014

No	Kecamatan	Luas rencana (Ha)	Luas lahan terairi (Ha)	Kebutuhan air tanaman (Ha)	Pasok air irigasi (lt/dtk)	Total pasok air (lt/dtk)	Pasok air irigasi Total	PIA (lt/dtk/ha)	PIR (lt/dtk/ha)	PAR (lt/dtk/ha)	IA (%)
1	Serawai	70	50	29	42,14	42,14	98,00	0,84	1,48	3,44	0,71
2	Ambalau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kayan Hulu	560	44	251	338,41	338,41	787,00	0,77	1,35	3,14	0,79
4	Sepauk	3.056	1.632	930	1.845,13	1.845,13	4.291,00	1,13	1,98	4,61	0,53
5	Tempunak	1.070	756	431	636,83	636,83	1.481,00	0,84	1,48	3,44	0,71
6	Sungai Tebelian	90	45	26	61,92	61,92	144,00	1,38	2,41	5,61	0,50
7	Sintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dedai	1.938	579	330	1.160,57	1.160,57	2.699,00	2,00	3,52	8,18	0,30
9	Kayan Hilir	967	542	309	701,76	701,76	1.632,00	1,29	2,27	5,28	0,56
10	Kelam Permai	1.819	1.406	801	1.046,19	1.046,19	2.433,00	0,74	1,31	3,04	0,77
11	Binjai Hulu	125	76	43	75,25	75,25	175,00	0,99	1,74	4,04	0,61
12	Ketungau Hilir	375	230	131	225,75	225,75	525,00	0,98	1,72	4,00	0,61
13	Ketungau Tengah	249	154	88	150,07	150,07	349,00	0,97	1,71	3,98	0,62
14	Ketungau Hulu	275	135	77	165,55	165,55	385,00	1,23	2,15	5,00	0,49
JUMLAH		10.594	6.045	3.446	6.450	6.449,57	14.999,00	13,18	23,12	53,76	7,20

- ***Rasio tempat ibadah per satuan penduduk***

Sejalan dengan perkembangan daerah dan pertambahan jumlah penduduk, ketersediaan sarana atau tempat ibadah merupakan suatu hal yang penting dalam upaya menampung masing-masing umat beragama untuk menjalankan aktivitas peribadatannya dan sekaligus melakukan pembinaan rohani kepada para pemeluknya. Terkait dengan upaya pembangunan dibidang spiritual, di Kabupaten Sintang sampai dengan tahun 2014, jumlah gereja Khatolik yang tersebar di 14 keacamatan sebanyak 582 buah, gereja Protestan sebanyak 404 buah, kemudian disusul oleh Mesjid yang berjumlah 217, Pura berjumlah 3, vihara 4 buah dan Kelenteng 3 buah. Dilihat dari segi rasio, ketersediaan tempat ibadah dengan jumlah pemeluk agama di Kabupaten Sintang sudah cukup memadai. Sebagian besar penduduk Kabupaten Sintang memeluk agama Katholik dan Protestan, sedangkan pemeluk agama Islam menempati urutan kedua.

Tabel 2.61.
Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Sintang
Tahun 2014

No	Bangunan tempat ibadah	2014		
		Jumlah unit	Jumlah pemeluk	Rasio per 100 penduduk
1	Mesjid	217	156.042	0,14
2	Gereja Khatolik	582	125.870	0,46
	Gereja Protestan	404	104.742	0,39
3	Pura	3	924	0,32
4	Vihara	4	1.228	0,33
5	Kelenteng	3	642	0,47
6	Lain-lain	-	-	
Jumlah		1.213	389.435	0,31

Berdasarkan data pada Tabel 2.61, terlihat bahwa rasio tempat ibadah yang berada di Kecamatan jika dibandingkan dengan jumlah pemeluknya sudah cukup memadai, karena semakin besar jumlah penduduk yang ada disuatu Kecamatan berkorelasi dengan bertambahnya jumlah tempat ibadah. Di Kecamatan Sintang misalnya, yang merupakan pusat pemerintahan kabupaten, rasio tempat ibadah dengan jumlah penduduknya sudah cukup memadai, walapun memang khusus untuk tempat peribadatan masjid yang cukup besar untuk menampung peribadatan umat Islam masih belum representatif.

Tabel 2.62.
Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Kabupaten Sintang
Tahun 2014

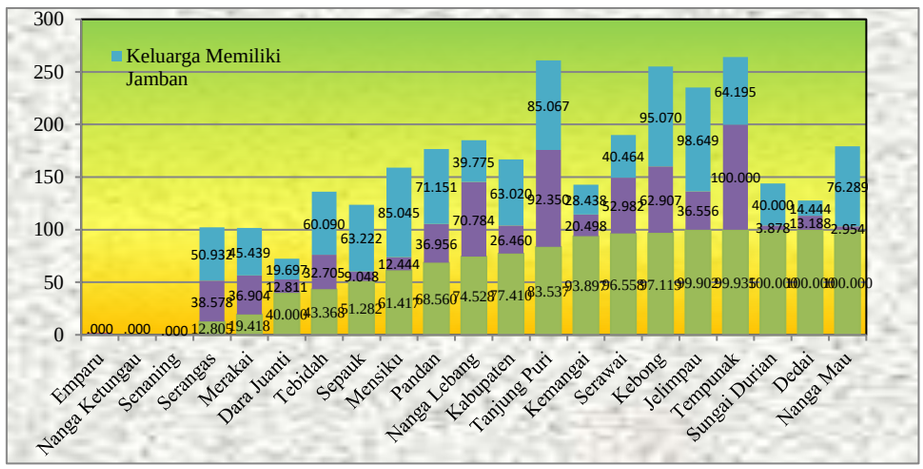
No	Kecamatan	Mesjid			Gereja Khatolik			Gereja Protestan			Pura			Vihara			Kelenteng		
		Jlh (unit)	Jlh pemeluk	rasio	Jlh (unit)	Jlh Peme-luk	rasio	Jlh (unit)	Jlh Pemeluk	rasio	Jlh (unit)	Jlh Peme-luk	Rasio	Jlh (unit)	Jlh Peme-luk	Rasio	Jlh (unit)	Jlh Peme-luk	Rasio
1	S e r a w a i	12	8.041	0,15	29	14.419	0,20	24	4.667	0,51	-	38	0	1	325	O,30	-	-	0
2	A m b a l a u	2	789	0,25	47	10.086	0,47	19	5.554	0,34	-	60	0	-	18	0	-	-	0
3	Kayan Hulu	12	4.029	0,30	43	5.427	0,79	52	12.257	O,42	-	35	0	-	15	0	-	-	0
4	S e p a u k	24	19.177	0,13	86	14.741	0,58	35	12.369	0,27	1	98	1,02	1	210	0,48	-	70	0
5	Tempunak	15	18.663	0,08	47	9.491	0,50	34	5.058	0,67	-	83	0	1	68	1,47	-	10	0
6	Sungai Tebelian	22	19.176	0,11	39	8.735	0,45	26	3.996	0,65	-	48	0	-	45	0	1	60	1,67
7	S i n t a n g	38	39.699	0,10	6	7.022	0,09	25	6.537	0,39	-	236	0	-	395	0	2	500	0,4
8	D e d a i	30	16.523	0,18	41	8.881	0,46	12	2.013	0,60	-	69	0	-	18	0	-	-	0
9	Kayan Hilir	8	2.688	0,30	67	8.661	0,77	50	12.256	0,41	2	38	5,26	-	16	0	-	-	0
10	Kelam Permai	11	4.639	0,24	58	11.989	0,48	17	3.022	0,56	-	15	0	-	17	0	-	-	0
11	Binjai Hulu	16	7.040	0,23	12	4.813	0,25	10	3.375	0,30	-	13	0	-	12	0	-	-	0
12	Ketungau Hilir	8	2.153	0,37	20	7.557	0,26	42	9.657	0,43	-	29	0	-	14	0	-	2	0
13	Ketungau Tengah	3	5.483	0,05	56	8.622	0,65	36	12.239	0,29	-	76	0	-	58	0	-	-	0
14	Ketungau Hulu	6	7.929	0,07	31	5.426	0,57	22	11.742	0,19	-	86	0	1	17	5,88	-	-	0

- ***Persentase rumah tinggal bersanitasi***

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:
a. Fasilitas Air bersih
b. Pembuangan Tinja
c. Pembuangan air limbah (air bekas)
d. Pembuangan sampah

Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan salah satu fondasi inti dari masyarakat yang sehat. Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi ialah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Pengelolaan sanitasi lebih mengutamakan usaha pencegahan terhadap berbagai faktor lingkungan sedemikian rupa, sehingga munculnya penyakit dapat dihindari. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit.Berbagai alasan digunakan oleh masyarakat untuk buang air besar sembarangan, diantaranya adalah anggapan membangun jamban itu mahal, lebih enak buang air besar di sungai, sulitnya air bersih didapat dan lain-lain. Perilaku ini harus diubah karena dapat meningkatkan risiko masyarakat untuk terkena penyakit menular.

Persentase Jamban Sehat di Kabupaten Sintang tahun 2013 sebesar 77,41 % dari rumah yang diperiksa sebesar 25.593 rumah diperiksa (26,46 % dari rumah yang ada) diatas target RPJMD tahun 2013 sebesar 65 %.



Sumber: Seksi Penyehatan Lingkungan 2013

Gambar 2.3 Grafik Persentase Keluarga Diperiksa, Keluarga Memiliki Jamban dan Keluarga Dengan Jamban Sehat Menurut Puskesmas Kabupaten Sintang Tahun 2013

- ***Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk***

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Sedangkan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Selanjutnya Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Jumlah TPU yang ada di Kabupaten Sintang adalah sebanyak 138 buah dengan luas 100,696 Ha dimana berdaya tampung 503,482. Dilihat dari persebarannya per kecamatan, TPU terbanyak terdapat di Kecamatan Sintang yaitu 51 TPU dengan daya tampung 129.440. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63.
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Tempat pemakaman umum (TPU)		Jumlah total		Rasio TPU per satuan penduduk
			Jumlah	Daya tampung	Tempat pemakaman	Daya tampung	
1	S e r a w a i	26.424	6	21,950	6	21,950	0,72
2	A m b a l a u	15.279	3	1,800	3	1,800	2,55
3	Kayan Hulu	23.978	7	12,930	7	12,930	1,30
4	S e p a u k	51.706	5	10,700	5	10,700	2,42
5	Tempunak	30.752	1	5,000	1	5,000	0,16
6	Sungai Tebelian	29.422	4	18,900	4	18,900	0,62
7	S i n t a n g	76.718	51	129,440	51	129,440	0,30
8	D e d a i	26.944	5	13,000	5	13,000	1,04
9	Kayan Hilir	24.572	3	1,500	3	1,500	3,97
10	Kelam Permai	16.256	7	8,750	7	8,750	1,30
11	Binjai Hulu	11.794	4	1,500	4	1,500	3,15
12	Ketungau Hilir	19.870	34	266,800	34	266,800	0,03
13	Ketungau Tengah	27.081	3	8,375	3	8,375	1,97
14	Ketungau Hulu	18.635	5	2,837	5	2,837	3,28

- ***Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk***

Tabel 2.64.
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah TPS (buah)	337	367	397	427	455
2	Daya Tampung TPS (m^3)	1,5	1,5	1,5	1,5	2
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	371.322	377.885	383.406	389.157	390.796
4	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah penduduk	1:735	1:686	1:644	1:608	1:429

Tabel 2.65.
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	TPS		Rasio
			Jumlah (unit)	Daya tampung (M^3)	
1	S e r a w a i	22.976	31	2	1 : 718
2	A m b a l a u	13.317	17	2	1 : 783
3	Kayan Hulu	22.846	32	2	1 : 714
4	S e p a u k	49.679	37	2	1 : 1343
5	Tempunak	28.398	32	2	1 : 887
6	Sungai Tebelian	30.717	32	2	1 : 960
7	S i n t a n g	68.126	77	2	1 : 885
8	D e d a i	28.981	32	2	1 : 906
9	Kayan Hilir	25.541	32	2	1 : 798
10	Kelam Permai	15.995	27	2	1 : 592
11	Binjai Hulu	12.196	14	2	1 : 871
12	Ketungau Hilir	21.674	32	2	1 : 677
13	Ketungau Tengah	29.264	32	2	1 : 915
14	Ketungau Hulu	21.087	27	2	1 : 781

Indikator ini digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Dari volume produksi sampah di Kabupaten Sintang selama tahun 2014 sebesar 812 M^3, volume sampah yang dapat ditangani sebesar 886,1 M^3 atau sebesar 97,16%. Rincian prosentase

penanganan sampah per kecamatan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.66.
Prosentase Penanganan Sampah Per Kecamatan
Kabupaten SintangTahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Timbunan (m^3)	Cara Pembuangan (m^3)		% Penanganan Sampah
				Angkut	Timbun	
1	Serawai	4384	55	22,00	5,50	100
2	Ambalau	2573	32	13,44	3,84	100
3	Kayan Hulu	4370	55	24,75	6,60	100
4	Sepauk	9281	116	54,52	13,92	100
5	Tempunak	5372	67	20,10	3,90	61,34
6	Sei. Tebelian	5828	73	25,55	11,68	100
7	Sintang	11882	149	73,01	31,29	100
8	Dedai	5514	69	24,15	9,66	100
9	Kayan Hilir	4884	61	25,62	6,10	100
10	Kelam Permai	3055	38	15,20	5,70	100
11	Binjai Hulu	2266	28	7,84	4,20	100
12	Ketungau Hilir	4113	51	20,40	7,65	100
13	Ketungau Tengah	5484	69	28,98	10,35	100
14	Ketungaun Hulu	3940	49	21,07	6,37	100
	Jumlah	72.946	912	376,63	126,76	97,16

Sumber : *Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran*

- ***Prosentase Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per 1000 Penduduk***

Realisasi Capaian indikator prosentase tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk tahun 2014 sebesar 71,76%. Kabupaten Sintang telah memiliki 91 buah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang dapat menampung dalam sekali putaran sebesar 286 M^3, jumlah ini masih kurang optimal dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sintang sebanyak 398.562 jiwa dan volume sampah yang tertangani. Adapun target yang ditetapkan Kabupaten Sintang pada tahun 2014 sebesar 10,00%.

- ***Rasio rumah layak huni***

Prosentase rumah layak huni pada tahun 2014 sebesar 26,05%. Prosentase tersebut diperoleh dari perbandingan rumah layak huni sebanyak 19.000 rumah dengan jumlah seluruh rumah yang tercatat sebanyak 72.946 rumah di Kabupaten Sintang.

2.3.1.5. Penataan Ruang

- ***Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB***

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:
a. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
c. didominasi komunitas tumbuhan.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Dalam lima tahun pembangunan di Kabupaten Sintang, luas area Ruang Terbuka Hijau meningkat dari tahun ke tahunnya dengan peningkatan rata-rata sebesar 29,18% per tahun. Pada tahun 2014 luas Ruang Terbuka Hijau sebesar 17.797,26 m^2 meningkat 36,68% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu seluas 13.020,46 m^2. Secara lengkap luas ruang terbuka hijau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.67.
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Tahun 2010 s.d 2014

No	Uraian	2010 M^2	2011 M^2	2012 M^2	2013 M^2	2014 M^2
1	Luas Ruang Terbuka Hijau	6.550,36	9.647,16	11.923,66	13.020,46	17.797,26
2	Luas Wilayah ber HPL/ HGB	-	-	-	-	-
3	Luas Wilayah	-	-	-	-	-
4	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	-	-	-	-	-

2.3.1.6. Perhubungan

- ***Jumlah uji kir angkutan umum***

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

a. uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
b. uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Banyaknya kendaraan yang harus melakukan uji kir baru terdata pada tahun 2014 seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.68.
Banyaknya Kendaraan Wajib Uji Yang Terdata
Kabupaten Sintang Tahun 2014

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Oplet / Umum	105
2.	Bus	16
3.	Pick Up	1.034
4.	Box	37
5.	Truck	884
6.	Truck III sumbu	1
7.	Tangki	39
8.	Tangki III sumbu	12
2 0 1 4		2.128
2 0 1 3		3.347
2 0 1 2		3.347
2 0 1 1		3.347

Sumber: *Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2015, BPS Sintang*

- ***Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis***

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan Udara/Bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan

memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Di Kabupaten Sintang terdapat 1 buah Pelabuhan Udara dan 2 buah terminal Bis. Dalam lima tahun terakhir ini tidak terjadi penambahan jumlah Pelabuhan Udara dan terminal Bis.

Tabel 2.69.
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Sintang
Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah pelabuhan laut	-	-	-	-	-
2.	Jumlah pelabuhan udara	1	1	1	1	1
3.	Jumlah terminal bis	2	2	2	2	2
Jumlah		3	3	3	3	3

2.3.2. Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian dan Perkebunan

- ***Tanaman Pangan***

Produksi sektor pertanian terutama sub sektor tanaman bahan makanan perlu terus dipacu dengan tujuan untuk memantapkan swasem-bada pangan dan penganekaragaman jenis bahan makanan.

Sub sektor tanaman pangan terdiri dari padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Padi sebagai penghasil beras merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk, oleh sebab itu padi merupakan komoditi strategis dalam konteks pembangunan terutama pembangunan sektor pertanian.

Pada tahun 2014 produksi padi di Kabupaten Sintang sebesar 97.526 ton dengan luas panen sebesar 36.437 Ha dan rata-rata produktivitas sebesar 2,72 ton/Ha. Produksi padi terbesar yaitu padi sawah sebesar 38.319 ton dengan luas panen sebesar 17.115 Ha dan rata-rata produktivitas sebesar 3,45 ton/Ha. Sedangkan sisanya adalah padi ladang dengan produksi sebesar 25.073 ton dengan luas panen sebesar 19.322 Ha dan rata-rata produktivitas sebesar 1,99 ton/Ha

Kalau dibandingkan tahun 2014 dan tahun 2013 produksi padi kabupaten sintang mengalami peningkatan sebesar 3,92 persen, hal ini

disebabkan adanya peningkatan luas panen padi dari 35.096 Ha menjadi 36.437 Ha atau terjadi peningkatan sebesar 3,68 persen.

Untuk tanaman palawija tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 yang mengalami peningkatan produksi adalah jagung sebesar 5,82 persen, ubi kayu sebesar 7,43 persen, kacang tanah sebesar 9,68 persen dan kacang hijau sebesar 71,43 persen. Sedangkan yang mengalami penurunan yaitu ubi jalar sebesar 5,88 persen dan kedelai sebesar 237,5 persen.

Tabel 2.70.
Produksi Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan
Kabupaten Sintang Tahun 2014

No	Tanaman	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (ton/Ha)
1	Padi Sawah	14.308	17.115	58.952	3,45
2	Padi Ladang	19.376	19.322	38.574	1,99
3	Jagung	1.750	1.780	5.499	3,09
4	Kacang Kedelai	23	21	24	2,20
5	Kacang Hijau	26	24	21	8,58
6	Kacang Tanah	186	165	217	1,3
7	Ubi Kayu	867	1.034	22.452	2,17
8	Ubi Jalar	245	354	4.018	10,72

- ***Perkebunan***

Hasil perkebunan yang diutamakan untuk menunjang keperluan industri yaitu tanaman karet dan kelapa sawit. Peningkatan produksi tanaman karet diusahakan melalui pola tanaman pengembangan Perkebunan Inti Rakyat dan Swadaya.

Pada tahun 2013 produksi tanaman karet mengalami penurunan sebesar 1,10 persen yaitu dari 37.867,75 ton menjadi 37.449,50 ton. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan iklim dimana terjadi kemarau yang panjang di tahun 2013.

Untuk tanaman perkebuanan kelapa sawit masih tetap menjadi andalan Kabupaten Sintang dimana di tahun 2013 produksinya mencapai 739.119,92 ton, dengan luas area tanaman menghasilkan 51.734,21 Ha dan tanaman belum menghasilkan 66.414,68 Ha.

Selain dua komoditi utama di atas, produksi tanaman perkebunan lainnya mengalami peningkatan walaupun sumbangannya sangat kecil.

Tabel 2.71.
Produksi dan Nilai Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Sintang
Tahun 2015

No	Jenis Tanaman	Jumlah Produksi (Ton)	Harga Rata-Rata (Rp)	Nilai Produksi (Rp)
1	Karet	47.129,36	5.000	235.646.802.500
2	Kelapa Dalam	149,84	5.000	749.200.000
3	Kelapa Hibrida	216,80	5.000	1.084.000.000
4	Kelapa Sawit	193.226,22	1.065	205.785.924.300
5	Lada	506,86	135.000	68.426.100.000
6	Kopi	96,60	25.000	2.415.000.000
7	Kakao	8,30	15.000	124.500.000
8	Aren	33,00	6.500	214.500.000

Data: *Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2015, Sintang*

2.3.2.2. Peternakan

Populasi ternak dibedakan menurut jenis ternaknya yaitu ternak besar, ternak kecil dan unggas. Populasi ternak terbesar pada tahun 2014 yaitu babi berjumlah 78.310 ekor, setelah itu sapi berjumlah 7.480 ekor.

Untuk ternak besar selain babi dan sapi ada kambing yang populasinya 2.839 ekor dan kerbau yang populasinya 241 ekor. Sedangkan unggas terdiri dari ayam dan itik. Ternak ayam terdiri dari ayam ras dan ayam buras masing-masing populasinya sebesar 257.366 ekor dan 444.745 ekor, sedangkan itik populasinya sebesar 16.957 ekor.

Untuk ternak besar dan kecil yang dipotong pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 ada yang mengalami peningkatan yaitu ternak kambing, sedangkan ternak sapi, babi dan kerbau mengalami penurunan. Untuk pemotongan unggas yaitu ayam ras dan ayam buras mengalami kenaikan sedangkan itik pemotonganya mengalami penurunan.

Tabel 2.72.
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Di Kabupaten Sintang
Tahun 2014 (Ekor)

No.	Kecamatan	Ternak Besar		Ternak Kecil	
		Sapi	Kerbau	Babi	Kambing
1.	S e r a w a i	984	4	8.645	153
2.	A m b a l a u	221	-	1.788	176
3.	Kayan Hulu	274	-	1.726	433
4.	S e p a u k	1.046	78	11.852	287
5.	Tempunak	565	47	2.586	287
6.	Sei Tebelian	1.213	27	7.870	618
7.	S i n t a n g	468	-	1.995	146
8.	Dedai	1.072	3	1.932	158
9.	Kayan Hilir	146	4	1.660	48
10.	Kelam Permai	153	-	4.878	149
11.	Binjai Hulu	1.005	37	4.548	376
12.	Ketungau Hilir	174	37	10.110	94
13.	Ketungau Tengah	124	-	2.965	85
14.	Ketungau Hulu	35	4	2.655	40
Jumlah		7.480	241	78.310	2.839

Sumber : *Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang*

2.3.2.3. Kehutanan

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu sekitar 21,99 persen dari luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat.

Luas kawasan hutan Kabupaten Sintang berdasarkan SK Menhut No: 733/Menhut-II/2014 yaitu Taman Nasional 65.609,12 Ha, Hutan Lindung 465.817,57 Ha, Hutan Produksi Terbatas 597.047,10 Ha, Hutan Produksi Biasa 135.435,34 Ha dan Hutan Wisata 1.339,35 Ha.

Dari area yang ada di Kabupaten sintang pemanfaatan terbesar yaitu untuk pertanian lahan kering dan area penggunaan lain yaitu 40,71 persen, Taman Nasional 3,03 persen, Hutan lindung 21,53 persen, Hutan Produksi Terbatas 27,60 persen, Hutan Produksi Biasa 6,26 persen, dan Hutan Wisata 0,06 persen.

- ***Produksi Komoditas Kehutanan dan Perkebunan***

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu mencapai 2.163.500 ha atau 21,99% dari luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun hasil perkebunan pada tahun 2014 terdiri dari beberapa komoditi sebagai berikut:

a. Karet dengan produksi sebanyak 37.450 ton dari target sebanyak 35.000 atau capaiannya sebesar 107,00%.
b. Kelapa Dalam dengan produksi sebanyak 147 ton dari target 150 ton atau capaiannya sebesar 98,00%.
c. Kelapa Hibrida dengan produksi sebanyak 215 ton dari target 240 ton atau capaiannya sebesar 89,58%.
d. Kelapa Sawit dengan produksi sebanyak 745.316,36 ton dari target 500.000,00 ton atau capaiannya sebesar 149,06%.
e. Lada dengan produksi sebanyak 507 ton dari target 600 ton atau capaiannya sebesar 84,50%.
f. Kopi dengan produksi sebanyak 99,00 ton dari target 100,00 ton atau capaiannya sebesar 99,00%.
g. Kakao dengan produksi sebanyak 8 ton dari target 6 ton atau capaiannya sebesar 133,33%.
h. Aneka Tanaman dengan produksi sebanyak 44,00 ton dari target 50,00 ton atau capaiannya sebesar 88,00%.

- ***Produktivitas Komoditas Kehutanan dan Perkebunan***

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas komoditas kehutanan dan perkebunan. Capaian indikator produktivitas komoditas kehutanan dan perkebunan di Kabupaten sebagai berikut:

a. Kayu Bulat yang merupakan komoditas kehutanan dengan produksi sebanyak 115 m3/ha dari target sebanyak 150 m3/ha atau capaiannya sebesar 76,67%
b. Karet yang merupakan komoditas perkebunan dengan produksi sebanyak 414,94 kg/ha dari target sebanyak 500 kg/ha atau capaiannya sebesar 82,99%
c. Kelapa Dalam yang merupakan komoditas perkebunan dengan produksi sebanyak 201,70 kg/ha dari target sebanyak 200 kg/ha atau capaiannya sebesar 100,86%.
d. Kelapa Hibrida yang merupakan komoditas perkebunan dengan produksi sebanyak 348,50 kg/ha dari target sebanyak 300 kg/ha atau capaiannya sebesar 100,00%
e. Kelapa Sawit yang merupakan komoditas perkebunan dengan produksi sebanyak 5,86ton/ha dari target sebanyak 8 ton/ha atau capaiannya sebesar 73,26%.
f. Lada yang merupakan komoditas perkebunan dengan produksi sebanyak 479,62 kg/ha dari target sebanyak 500 kg/ha ton atau capaiannya sebesar 95,92%.
g. Kopi yang merupakan komoditas perkebunan dengan produksi sebanyak 288,14 kg/ha dari target sebanyak 300 kg/ha atau capaiannya sebesar 96,05%.
h. Kakao yang merupakan komoditas perkebunan dengan produksi sebanyak 66 kg/ha dari target sebanyak 50 kg/ha atau capaiannya sebesar 132%.
i. Aneka Tanaman yang merupakan komoditas perkebunan dengan produksi sebanyak 50 kg/ha dari target sebanyak 47,96kg/ha atau capaiannya sebesar 95,91%.

- ***Rehabilitasi hutan dan lahan kritis***

Realisasi indikator Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Sintang tahun 2014 sebesar 2.360 Ha. Sementara targetnya sebesar 2.000 Ha.

- ***Kerusakan kawasan hutan***

Realisasi indikator kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Sintang tahun 2014 sebesar 8,38% Ha. Adapun target yang akan dicapai adalah sebesar 20,00%.

- **Luas Lahan yang direboisasi**

Program ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan hutan dan mempertahankan kelestarian hutan sehingga hutan dapat berfungsi

sebagaimana mestinya.Capaian indikator luas lahan yang direboisasi di Kabupaten Sintang dengan tingkat keberhasilan 395 ha dari 500 ha ditargetkan di Tahun 2014.

Tabel 2.73.
Luas Kawasan Hutan (Ha) di Kabupaten Sintang
Tahun 2015

No.	Jenis Hutan	Luas (Ha)
1.	Hutan PPA/Taman Nasional	65.609,12
2.	Hutan Lindung	465.817,57
3.	Hutan Produksi Terbatas	597.047,10
4.	Hutan Produksi Biasa	135.435,34
5.	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversikan	17.587,46
6.	Kawasan Resepan Air	-
7.	Pertanian Lahan Kering /Areal Penggunaan Lain	880.664,06
8.	Hutan Wisata (HW)	1.339,35
Jumlah		2.163.500,00

Sumber : *Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Sintang (berdasarkan SK-Menhut No: 733/Menhut-II/2014)*

Tabel 2. 74.
Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Sintang

Item	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1. Kehutanan								
a. Hasil Hutan Non HPH								
1). Kayu Bulat	4.052,93	0,00	0,00	4.288,18	20.896,60	11.712,00		M3
2). Kayu Gergajian	0,00	87,9396	30,5742	19,4796	48,0016	-		M3
3). Kayu Olahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		M3
b. Hasil Hutan Ikutan								
1). Rotan	0,00	0,00	0,00	0,00	6,528	0,00	0,00	Ton
2). Gaharu	275,50	86,00	211,00	345,00	284,50	273,00	156,00	Ton
c. Luas Lahan Reboisasi								
1). Target	-	-	600	850	350	395		Ha
2). Realisasi	-	-	600	850	350	395		Ha
d. Luas Lahan Penghijauan								
1). Pembuatan Baru	1.900	1.100	700	1.700	550	1.901,00		Ha
e. Karet								
1). Luas Tanam	80.035,00	81.635,00	84.150,00	84.930,00	86.169,00	90.311,00		Ha
2). Jumlah Produksi	34.600,74	34.719,64	35.101,39	37.867,75	37.449,50	46.245,32		Ton
f. Kopi								
1). Luas Tanam	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00		Ha
2). Jumlah Produksi	93,32	97,63	101,29	101,28	98,75	99,00		Ton
g. Kelapa Sawit								
1). Luas Areal	570.440,00	644.257,00	619.688,00	553.743,00	554.753,00	534.186,00	576.729,60	Ha
2). Luas Tanam	61.004,95	74.673,61	78.053,31	101.253,87	118.248,89	126.689,40	137.159,93	Ha
3). Jumlah Produksi	128.765,24	127.836,40	127.031,70	594.614,11	739.119,92	847.051,19		Ton

h. Kakao								
1). Luas Tanam	125,00	125,00	125,00	125,00	145,00	125,00		Ha
2). Jumlah Produksi	5,20	4,75	5,29	7,79	8,20	8,30		Ton
i. Lada								Ton
1). Luas Tanam	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.065,00	1.081,00	1.012,00		Ha
2). Jumlah Produksi	646,70	677,31	707,14	756,21	506,86	506,86		Ton
j. Tebu								Ton
1). Luas Tanam	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	-		Ha
2). Jumlah Produksi	0,96	0,96	0,98	0,98	0,30	-		Ton
k. Kelapa Hibrida								Ton
1). Luas Tanam	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	844,00		Ha
2). Jumlah Produksi	235,74	234,42	234,42	234,42	215,28	216,80		Ton
l. Kelapa Dalam								
1). Luas Tanam	708,00	708,00	708,00	708	708,00	708,00		Ha
2). Jumlah Produksi	144,64	147,28	149,05	150,33	149,84	149,84		Ton
m. Cengkeh								
1). Luas Tanam	132,00	132,00	132,00	57,00	7,00	3,00		Ha
2). Jumlah Produksi	1,92	1,92	1,91	1,92	0,50	0,10		Ton
n. Kapuk								
1). Luas Tanam	553,00	553,00	553,00	553,00	318,00	318,00		Ha
2). Jumlah Produksi	7,39	8,09	8,67	9,33	8,70	9,50		Ton
o. Aren								
1). Luas Tanam	502,00	502,00	502,00	502,00	376,00	376,00		Ha
2). Jumlah Produksi	20,51	20,91	21,87	22,77	33,20	33,00		Ton
p. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan								
1). Jumlah Industri Pengolahan	2	2	2	2	3	6	6	Unit

Tabel 2.75.
Luas Lahan Kritis Tahun 2010 s/d 2014
Kabupaten Sintang

No	URAIAN	LUAS (Ha)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	LUAS LAHAN KRITIS (agak kritis, kritis, dan sangat kritis)	484.761,81	483.661,81	482.961,81	481.351,81	480.901,81
2	LUAS LAHAN YANG DIREHABILITASI	1.100,00	700,00	1.610,00	450,00	275,00
J U M L A H						

Tabel 2.76.
Luas Kawasan Hutan Tahun 2010 s/d 2014
Kabupaten Sintang

No	URAIAN	LUAS (Ha)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	LUAS HUTAN	1.299.624,00	1.299.624,00	1.299.624,00	1.299.624,00	1.299.624,00
2	LUAS KERUSAKAN KAWASAN HUTAN	172.879,92	171.779,92	171.329,92	170.314,92	169.114,92
3	LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIREBOISASI	1.100,00	450,00	1.015,00	1.200,00	1.085,00

Tabel 2.77.
Luas Lahan Kritis di Kabupaten Sintang
Tahun 2010 (Ha)

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas Lahan Kritis		
			Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Jumlah
1.	S e r a w a i	212.750	-	15610,27	15.610,27
2.	A m b a l a u	638.640	-	29.679,24	29.679,24
3.	Kayan Hulu	93.750	-	59.323,22	59.323,22
4.	S e p a u k	182.570	-	56.190,41	56.190,41
5.	Tempunak	102.700	-	69.929,43	69.929,43
6.	Sei Tebelian	52.560	-	57.326,94	57.326,94
7.	S i n t a n g	27.705	-	97.327	97.327
8.	Dedai	69.410	-	84.581,28	84.581,28
9.	Kayan Hilir	113.670	-	59.746,70	59.746,70
10.	Kelam Permai	52.380	-	51.805,64	51.805,64
11.	Binjai Hulu	30.765	-	90.205,68	90.205,68
12.	Ketungau Hilir	154.450	-	22.877,92	22.877,92
13.	Ketungau Tengah	218.240	-	25.775,11	25.775,11
14.	Ketungau Hulu	213.840	-	60.188,47	60.188,47

Sumber : *Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang*
*) Data Tahun 2013 Belum Tersedia

2.3.2.4. Perikanan

- ***Perikanan***

Pada tahun 2013 produksi perikanan mengalami peningkatan sebesar 0,47 persen, di mana produksi yang berasal dari perairan umum dan perikanan tangkap mengalami penurunan yaitu sebesar 0,04 persen, sedangkan dari budidaya kolam dan keramba terjadi peningkatan yaitu sebesar 0,83 persen. Produksi ikan terbesar adalah jenis ikan mas yang terdapat di keramba dengan jumlah produksi sebesar 133,60 ton.

Tabel 2.78.
Produksi Perikanan Menurut Sektor Perikanan 2010 -2014
(Ton)

No.	Tahun	Perairan Umum	Budidaya	Jumlah
1	2010	772,0	1 116,8	1 888,9
2	2011	777,0	654,6	1 431,6
3	2012	776,2	1 118,7	1 894,9
4	2013	775,9	1 128,0	1 903,9
5	2014	786,4	1.038,2	1.824,6

Tabel 2.79.
Produksi Perikanan Di Perairan Umum Menurut Jenis Ikan
Tahun 2010 – 2014 (Ton)

No.	Jenis Ikan	Produksi Pada Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	J e l a w a t	2,00	47,60	48,24	40,80	41,55
2.	Lampan	-	44,40	38,20	41,41	37,70
3.	Jambal	49,14	70,01	70,10	73,10	73,50
4.	G a b u s	141,8	38,50	39,12	18,95	22,00
5.	L a i s	86,60	77,20	80,24	71,25	70,70
6.	T o m a n	123,90	74,90	70,12	36,40	36,00
7.	Tambakan	69,93	46,15	47,15	79,41	87,60
8.	B e l i d a	22,38	47,75	37,30	36,40	39,50
9.	Sepat Siam	7,11	13,60	12,30	4,90	4,65
10.	Udang Sungai	6,22	4,70	4,70	17,65	13,92
11.	Sepat Rawa	5,24	10,90	10,70	4,85	4,85
12.	Baung	-	92,90	90,90	7,20	139,90
13.	Betutu	1,33	6,80	-	-	-
14.	S i l i	107,17	44,90	50,40	42,00	41,40
15.	Ikan Lainnya	150,53	156,60	177,00	171,13	
Jumlah		1 227,30	1.699,70	757,63	776,20	786,39

Sumber : *Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang*

Tabel 2.80.
Jumlah Sarana Produksi Perikanan Di Kabupaten
Sintang Tahun 2010-2014

No.	Sarana Produksi	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Perahu / Kapal Motor					
	a. Jukung	45	31	60	10	24
	b. Kecil	860	71	81	60	92
	c. Sedang	6	129	171	80	180
	d. Besar	60	-	-	-	-
2.	Motor Tempel	171	216	223	115	155
Jumlah / *Total*		1 142	447	535	265	451

Sumber : *Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang*

2.3.2.5. Perdagangan

- ***Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB***

Sektor perdagangan yang terdiri dari dua kategori, yaitu Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya dan Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor mempunyai kontribusi cukup signifikan terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Sintang, yaitu berkontribusi kedua paling besar setelah sektor pertanian. Pada tahun 2010 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Sintang berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 1,065,127.4 juta. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Sintang tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 6,031,774.8 juta. Dengan demikian dapat diketahui bahwa berdasarkan harga berlaku prosentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sintang tahun 2010 sebesar 17,66%. Prosentase kontribusi ini sempat meningkat hingga menjadi sekitar 18,06% pada tahun 2011, namun kemudian turun sedikit di tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar 17,31% dan 17,23% untuk kemudian meningkat lagi menjadi 17,60%, sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 2.81.
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sintang
Tahun 2010-2014

No.	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	6,69	7,09	7,01	7,33	7,61
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	10,97	10,97	10,31	9,91	9,99
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		17,66	18,06	17,31	17,23	17,60

Sumber: *PDRB Kabupaten Sintang Tahun 2014, BPS Sintang, 2015*
*Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Hal yang sama juga kita temukan pada perhitungan kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berdasarkan harga konstan yang juga terus meningkat, yaitu dari 17,65% pada tahun 2010 menjadi sekitar 17,82% pada tahun 2014. Sebagaimana kita tahu bahwa perhitungan PDRB Berdasarkan Harga Konstan sering dianggap lebih akurat karena telah ditentukan lebih dahulu tahun dasar dari perhitungannya, yaitu tahun dimana perekonomian dalam keadaan stabil. Dengan demikian perhitungan PDRB atas dasar Harga Konstan terlepas dari pengaruh inflasi.

Kedua metode perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan terus meningkat. Artinya, perekonomian daerah ini sebenarnya sudah berada pada arah yang benar (on the right track). Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa secara teoritis daerah yang maju akan ditandai oleh meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Berdasarkan kondisi ini, maka upaya yang perlu dilakukan pada lima tahun ke depan adalah bagaimana meningkatkan kontribusi tersebut agar lebih cepat dari 5 tahun sebelumnya sehingga besaran kontribusi sektor perdagangan bisa mendekati angka 20%.

Untuk mewujudkan hal itu pemerintah Kabupaten Sintang terus menambah sarana perdagangan seperti pasar sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82.
Perkembangan Pembangunan Pasar dan Jumlah Pedagang
di Kabupaten Sintang
Tahun 2010-2014

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	KETERANGAN
1	Pembangunan Saranan danPrasaranaPerdagangan	1	1	1		2	**Tahun 2010** - Pembangunan Pasar Seroja **Tahun 2011** - Pembangunan Kios Pasar Masuka **Tahun 2012** - Pembangunan Kios Pasar Masuka **Tahun 2014** - Pembangunan Pasar Raya Sintang - Pembangunan Pasar Emparu Baru
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pasar Pemerintah		1	1	3	1	**Tahun 2011** - RehabilitasiPasarAmbalau **Tahun 2012** - RehabilitasiPasarBabi **Tahun 2013** - RehabilitasiPasarMerakai - RehabilitasiPasarBurung Kapuas Raya - RehabilitasiPasarBuahTanjungPuri **Tahun 2014** - RehabilitasiPasarBuah Kapuas Kanan Hulu
2	JumlahPedagang yang Menempati Fasilitas Pasar Pemerintah (Orang)	620	520	540	550	659	
3	Jumlah Pedagang Kaki Lima (Orang)	295	235	228	246	720	

Sumber: *Disperindagkop Kabupaten Sintang, 2015*

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Sintang terus mengembangkan sektor perdagangan termasuk membangun baru dan merehabilitasi beberapa pasar tradisional. Hasilnya, jumlah pedagang yang menempati pasar dan jumlah pedagang kaki lima terus meningkat. Sebagai contoh, jumlah pedagang kaki lima pada tahun 2010 hanya sekitar 295 orang dan meningkat cepat menjadi 720 orang pada tahun 2014.

2.3.2.6. Perindustrian

- ***Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB***

Pengelolaan sektor industri pada dasarnya merupakan masalah yang dihadapi semua daerah di Indonesia, baik di Jawa maupun luar Jawa. Walaupun intensitas dari masalah tersebut mungkin sekali berbeda karena adanya perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti laju pertumbuhan ekonomi, teknologi yang dipergunakan dan kebijaksanaan pemerintah daerah. Dilihat dari sudut pandang makro ekonomi, perluasan sektor industri dapat terjadi melalui pertumbuhan ekonomi yaitu melalui proses kenaikan output produksi secara konstan dalam jangka panjang. Untuk itu kontribusi sektor industri sangatlah penting dalam meningkatkan PDRB, dengan peningkatan output dari sektor industri maka tentu saja berdampak postif terhadap PDRB.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir ini cenderung stagnan di sekitar 10%. Pada tahun 2010 kontribusi sektor industri terhadap capaian PDRB Kabupaten Sintang berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 640.312,3 juta. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Sintang tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 6.031.774,8 juta. Dengan demikian dapat diketahui bahwa berdasarkan harga berlaku prosentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Sintang tahun 2010 sebesar 10,62%. Prosentase kontribusi ini sedikit menurun pada tahun 2014 menjadi sekitar 10,03% sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 2.83.
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Kabupaten Sintang Tahun 2010-2014

	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman	5,38	5,21	5,31	5,24	5,09
3	Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1,11	1,1	1,1	1,07	0,98
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,27	0,26	0,23	0,21	0,2
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0	0	0	0	0
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
10	Industri Barang Galian bukan Logam	0,11	0,12	0,12	0,11	0,11
11	Industri Logam Dasar	0,78	0,82	0,87	0,94	0,9
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,81	0,86	0,93	0,97	0,93
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
14	Industri Alat Angkutan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
15	Industri Furnitur	1,37	1,19	1,13	1,17	1,06
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,6	0,63	0,66	0,62	0,58
Industri Pengolahan		10.62	10.37	10.57	10.53	10.03

Sumber: *PDRB Kabupaten Sintang Tahun 2014, BPS Sintang, 2015*
*Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Hal yang berbeda kita temukan pada perhitungan kontribusi sektor industri berdasarkan harga konstan yang menurun lebih cepat, yaitu dari 10,61% pada tahun 2010 menjadi hanya sekitar 9,90% pada tahun 2014. Sebagaimana kita tahu bahwa perhitungan PDRB Berdasarkan Harga Konstan sering dianggap lebih akurat karena telah ditentukan lebih dahulu tahun dasar dari perhitungannya, yaitu tahun dimana perekonomian dalam keadaan stabil. Dengan demikian perhitungan PDB atas dasar Harga Konstan terlepas dari pengaruh inflasi.

Kedua metode perhitungan tersebut menunjukkan hasil yang berbeda namun dengan besaran yang hampir sama mendekati 10%. Artinya, perkembangan sektor industri di kabupaten Sintang relatif lambat dan stagnan. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh minimnya ketersediaan infrastruktur, seperti listrik, air bersih, dan jalan. Akibatnya, daerah ini sangat tergantung pada produksi komoditi primer sektor pertanian dan perkebunan dan tidak mampu menikmati nilai tambah besar dari ketersediaan sektor industri. Berdasarkan kondisi ini, maka upaya yang perlu dilakukan pada lima tahun ke depan adalah bagaimana mempercepat ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan kontribusi sektor industri agar lebih cepat dari 5 tahun sebelumnya sehingga besaran kontribusinya bisa melebihi angka 10%.

- ***Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri***

Sebagian besar perkembangan kontribusi sektor industri di Kabupaten Sintang berasal dari industri rumah tangga yang tergabung dalam Industri Kecil Menengah (IKM) sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.84.
Perkembangan jumlah IKM aktif Kabupaten Sintang
Tahun 2010-2014

NO	URAIAN		2010	2011	2012	2013	2014
	Jenis Usaha	Kecamatan					
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	IKM Tenun Ikat	Sintang	8	8	8	8	8
		KelamPermai	68	68	55	101	112
		Binjai Hulu	3	3	3	3	3
		Dedai	137	124	106	106	343
		Ketungau Tengah	20	11	10	16	16
		Ketungau Hulu	-	2	2	2	2
2	IKM Anyaman Bambu/Rotan	Sintang	20	20	20	37	20
		KelamPermai	5	5	110	167	175
		Binjai Hulu	2	2	2	2	2
		Tempunak	-	-	-	-	5
		Dedai	17	17	13	13	13
		Ketungau Tengah	-	-	-	10	10
		Ketungau Hulu	10	10	10	30	30
		KayanHilir	7	7	7	7	7
		Serawai	22	22	13	4	4
		Ambalau	9	9	3	46	46
3	IKM Pandai Besi	Sintang	5	6	3	3	3
		KelamPermai	-	5	5	29	29
		Dedai	27	27	21	21	21
		Ketungau Tengah	-	-	-	6	6
		Ketungau Hulu	15	15	10	10	10
		Kayan Hulu	10	10	10	10	10
		Serawai	-	-	-	6	6
		Ambalau	-	-	-	25	25
4	IKM Pengolahan Makanan (aneka keripik, aneka kerupuk, kue Tradisional, kue basah, kue kering, Makanan ringan, gula aren, tempe, tahu)	Sintang	45	45	42	41	62
		KelamPermai	5	5	4	23	23
		Binjai Hulu	4	4	4	10	41
		Sungai Tebelian	33	32	12	59	81
		Tempunak	-	-	-	-	20
		Dedai	26	26	26	32	42
		KetungauHilir	-	-	-	16	16
		Ketungau Tengah	-	-	-	15	15
		Ketungau Hulu	29	29	25	25	25
		KayanHilir	10	10	10	10	10
		Kayan Hulu	10	10	10	10	10
		Serawai	14	14	14	24	24
5	IKM Meubel Kayu	Serawai	-	-	-	21	21
		Ambalau	-	-	-	15	15

NO	URAIAN		2010	2011	2012	2013	2014
	Jenis Usaha	Kecamatan					
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
6	IKM Ukiran Kayu	Serawai	-	-	-	8	8
7	IKM Pengolahan Garam Tradisional	Sepauk	-	-	-	10	10
		Kayan Hulu	-	-	-	-	15
8	IKM PengolahanKulitKepuak	Dedai	-	-	-	-	20

Sumber: *Disperindagko Kabupaten Sintang, 2015*

Sementara perkembangan jumlah perusahaan industri besar yang aktif berjalan sangat lambat sebagai tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.85.
Perkembangan jumlah Perusahaan Industri Besar aktif
Kabupaten Sintang Tahun 2010-2014

NO	URAIAN	JUMLAH PABRIK/ PERUSAHAAN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Karet	1	2	2	2	2
2	Sawit	1	1	1	1	4
3	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	3	3	3	3	1

Sumber: *Disperindagko Kabupaten Sintang, 2015*

Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah IKM aktif jauh lebih banyak dibanding perkembangan jumlah perusahaan industri besar aktif. Jumlah pabrik karet aktif hanya bertambah 1 perusahaan.

2.3.2.7. Penanaman Modal

- ***Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)***

Perkembangan jumlah investor dalam lima tahun terakhir ini di kabupaten sintang cukup menggembirakan, yaitu dari hanya 106 investor tahun 2010 meningkat cepat menjadi 195 investor pada tahun 2014, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.86.
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Sintang
Tahun 2010-2014

Tahun	PMDN	PMA	TOTAL
2010	104	2	106
2011	124	3	127
2012	170	10	180
2013	172	10	182
2014	182	13	195

Sumber: *Disperindagkop, 2015*

Sebagian besar dari investor tersebut merupakan investasi dalam rangka PMDN, yaitu sebanyak 182 investor atau sekitar 93% dari total investor pada tahun 2014. Peningkatan jumlah investor terbesar terjadi pada tahun 2012, yaitu dari 127 investor tahun 2011 menjadi 180 investor. Barangkali inilah salah satu faktor yang mendorong tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang pada tahun 2013. Sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya, bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Sintang terjadi pada tahun 2013 (6,47%), jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2011 (4,79%) dan tahun 2012 (5,60%).

- ***Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)***

Pola peningkatan jumlah investor ternyata hampir sama dengan pola peningkatan jumlah nilai investasinya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.87.
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2010 s.d 2014
Kabupaten Sintang

TAHUN	RENCANA						REALISASI					
	PMA		PMDN		JUMLAH		PMA		PMDN		JUMLAH	
	Proyek	Investasi (Rp 000)	Proyek	Investasi (Rp 000)	Proyek	Investasi (Rp 000)	Proyek	Investasi (Rp 000)	Proyek	Investasi (Rp 000)	Proyek	Investasi (Rp 000)
2010	2	43.140.000,00	17	4.103.161,26	19	47.243.161,26	1	548.457.514,00	11	1.607.042,57	12	550.064.556,57
2011	2	43.140.000,00	20	5.253.403,07	22	48.393.403,07	1	404.657.514,00	11	1.671.116,99	12	406.328.630,99
2012	4	836.519.255,80	22	6.941.492,19	26	843.460.747,99	2	872.816.676,60	11	1.781.726,99	13	874.598.403,59
2013	4	836.519.255,80	23	8.736.988,28	27	845.256.244,08	2	1.175.652.286,60	12	2.009.905,18	14	1.177.662.191,78
2014	4	836.519.255,80	24	8.922.808,28	28	845.442.064.08	2	1.345.590.812,60	14	3.544.158,22	16	1.349.134.970,82

Sumber: *BPMTSP Sintang, 2015* Kurs US$ = Rp. 14.380,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah total realisasi nilai investasi meningkat cukup besar pada tahun 2012, yaitu dari hanya sekitar Rp 406 Milyar pada tahun 2011 menjadi sekitar Rp 874 Milyar pada tahun 2012. Sebagaimana kita ketahui bahwa besaran PDRB daerah berdasarkan pendekatan pengeluaran dipengaruhi secara positif oleh empat variable, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Setiap daerah umumnya mengharapkan sumber peningkatan utama berasal dari investasi dan ekspor karena kedua variable ini berpengaruh langsung terhadap penurunan angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan. Dengan demikian, secara teoritis seharusnya pada tahun 2013 angka pengangguran dan angka kemiskinan Kabupaten Sintang menurun relatif besar dibanding kondisi pada tahun-tahun sebelumnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam perkembangan nilai investasi adalah kemana arah alokasi dari investasi tersebut. Sebagaimana umumnya pola investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya sumber daya alam, investasi di kabupaten Sintang pun sebagian besar di sektor primer terutama perkebunan. Dalam lima tahun ke depan sebaiknya upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam harus dilakukan dengan mengalokasikan investasi ke sektor industri pengolahan.

- ***Rasio daya serap tenaga kerja***

Disamping menganalisis dampak peningkatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, maka hal lain yang juga menarik untuk dianalisis adalah besaran kemampuan investasi dalam menyerap tenaga kerja. Hampir sama dengan pola perubahan jumlah investor dan nilai investasi, maka jumlah tenaga kerja yang bisa diserap juga meningkat cukup besar pada tahun 2012 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.88.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2010 s.d 2014
Kabupaten Sintang

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	7230	7951	11707	18514
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	13	18	117	93
3	Rasio daya serap tenaga kerja	556,15	441,72	100,06	199,075

Sumber: *Kabupaten Sintang dalam Angka*

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMDN/PMA pada tahun 2011 sebanyak 7.951 orang dan meningkat cukup besar pada tahun 2012 menjadi 11.707 orang lalu kemudian meningkat lebih besar lagi pada tahun 2013 menjadi 18.514 orang. Besaran peningkatan ini tentu saja sejalan dengan bertambahnya jumlah perusahaan dari hanya 18 PMA/PMDN tahun 2011 menjadi 117 PMA/PMDN tahun 2012.

Meskipun demikian, jika diperhatikan dari rasio daya serap tenaga kerjanya, maka tampak terjadi penurunan dari sekitar 441 tenaga kerja per perusahaan pada tahun 2011 menjadi hanya sekitar 100 tenaga kerja per perusahaan pada tahun 2012 untuk kemudian meningkat lagi menjadi sekitar 199 tenaga kerja per perusahaan pada tahun 2013. Artinya, peningkatan jumlah perusahaan PMA/PMDN pada tahun 2012 sebagian besar merupakan perusahaan yang relatif kecil yang kemampuannya menyerap tenaga kerja juga relatif terbatas.

2.3.2.8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

- ***Persentase koperasi aktif***

Data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah koperasi yang tidak aktif di Kalimantan Barat cukup besar, yaitu sebanyak 1.905 koperasi dari total 4.670 koperasi atau sekitar 40,80%. Dengan kata lain, hanya sekitar 60% koperasi yang aktif di Kalimantan Barat. Apabila dibandingkan dengan data tersebut dapat diketahui bahwa persentase koperasi aktif di Kabupaten Sintang tahun 2014 yang mencapai 67,35% masih lebih tinggi, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.89.
Jumlah Koperasi Aktif per Kecamatan di Kabupaten Sintang
Tahun 2014

No	Kecamatan	Aktif (Unit)	Tidakaktif (Unit)	Total Koperasi
1	Sintang	98	39	137
2	Sungai Tebelian	24	5	29
3	KelamPermai	7	6	13
4	Dedai	8	6	14
5	KayanHilir	7	5	12
6	Kayan Hulu	3	5	8
7	Serawai	10	10	20
8	Ambalau	2	8	10
9	Sepauk	10	9	19
10	Tempunak	10	7	17
11	Binjai Hulu	10	4	14
12	KetungauHilir	15	1	16
13	Ketungau Tengah	8	3	11
14	Ketungau Hulu	15	2	17
	Jumlah	227	110	337

Sumber: *Disperindagkop Kabupaten Sintang, 2015*

Meskipun demikian jumlah koperasi tidak aktif yang mencapai 110 koperasi dirasakan terlalu besar. Ada beberapa faktor yang diduga

sebagai penyebab banyaknya koperasi tidak aktif di Kabupaten Sintang, yaitu antara lain:

a. Perubahan fungsi lahan dari pertanian tanaman pangan dan holtikultura ke perkebunan yang memaksa sebagian koperasi pertanian kehilangan aktivitas.
b. Pembinaaan koperasi yang lebih fokus pada koperasi aktif karena sulitnya berkomunikasi dengan pengurus koperasi yang sudah tidak aktif. Keadaan semakin sulit karena anggota koperasi yang tidak aktif juga merupakan anggota pasif yang tidak mempersoalkan dan tidak responsif terhadap kondisi yang sedang dialami oleh koperasinya.
c. Berpindahnya sebagian pengurus dan anggota koperasi ke aktivitas usaha sendiri yang lebih menjanjikan karena memberikan kebebasan dan lepas dari birokrasi rapat pengurus dan rapat anggota.
d. Kesulitan modal yang menyebabkan koperasi berhenti menjalankan aktivitasnya. Data Bank Indonesia Triwulan 1 tahun 2014 menunjukkan bahwa dari Rp 16.149 triliun jumlah kredit produktif di Kalimantan Barat ternyata hanya sekitar Rp 1,25 trilyun atau sekitar 7,74% yang terdistribusi di Kabupaten Sintang yang sebagian besar juga tidak dinikmati oleh koperasi.
e. Minimnya dukungan infrastruktur yang menyebabkan aktivitas koperasi terganggu perkembangannya sehingga menyebabkan pengurus tidak termotivasi mengembangkan usaha. Hingga saat ini masih sering terjadi pemadaman listrik oleh PLN di Kabupaten Sintang, padahal ketersediaan listrik merupakan faktor utama dalam menjalankan aktivitas usaha. Disamping ketersediaan pasokan listrik, kualitas dan kuantitas jalan juga sangat menentukan. Data Dinas PU Kalimantan Barat yang disampaikan kepala perwakilan BI pada seminar di Kanwil DJPB Kalimantan Barat pada tanggal 25 Mei 2015 menunjukkan bahwa jalan dengan kondisi tidak mantap di Kabupaten Sintang masih cukup panjang, hampir sama dengan panjang jalan dengan kondisi mantap.
f. Efisiensi dan daya saing yang sulit ditingkatkan sehingga koperasi kalah bersaing dengan koperasi lainnya atau bahkan kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang terus menerus meningkatkan kualitas produk.

Keseluruhan koperasi tersebut memiliki asset total sekitar Rp 621 milyar yang sebagian besar berasal dari koperasi yang ada di Kecamatan Sintang (sekitar Rp 254 milyar) dan Kecamatan Sepauk (sekitar Rp227 milyar). Asset koperasi terkecil di Kabupaten Sintang berada di Kecamatan Kayan Hulu yaitu hanya sekitar Rp 169 juta. Besaran jumlah asset koperasi di tiap kecamatan tentu saja berbanding lurus dengan

besaran jumlah modal dan volume usaha, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.90.
Modal, Volume Usaha, SHU, dan Aset Koperasi per Kecamatan
di Kabupaten Sintang Tahun 2014

No	Kecamatan	Modal Sendiri (Rp. 000)	Modal Luar (Rp. 000)	Volume Usaha (Rp. 000)	SHU (Rp. 000)	Asset (Rp. 000)
1	Sintang	94.758,629	189.828,617	339.664,676	2.429,567	254.247,492
2	Sungai Tebelian	25.353,661	2.570,278	13.094,768	5.861,669	27.466,587
3	KelamPermai	4.878,748	28.696,251	22.344,720	660,739	33.575,000
4	Dedai	511,712	66,000	61,603	9,481	577,712
5	KayanHilir	1.633,890	8.291,454	4.443,400	186,213	9.925,344
6	Kayan Hulu	132,936	36,203	19,890	6,167	169,139
7	Serawai	2.308,069	44,439	1.718,743	213,544	2.352,508
8	Ambalau	4.441,235	28.343,360	5.704,824	471,525	32.784,595
9	Sepauk	1.052,780	226.212,966	1.040,430	191,422	227.277,646
10	Tempunak	327,984	48,139	260,369	65,325	393,123
11	Binjai Hulu	1.836,494	28.873,783	1.502,831	195,349	30.710,267
12	KetungauHilir	611,811	129,454	495,941	54,665	733,535
13	Ketungau Tengah	325,986	37,160	45,554	23,449	365,086
14	Ketungau Hulu	140,225	189,311	116,000	37,750	329,536
	Jumlah	138.314,160	513.367,415	390.513,749	10.406,865	620.907,570

Sumber: *Disperindagkop Kabupaten Sintang, 2015*

Satu hal yang agak mengkhawatirkan dari data pada tabel di atas adalah rendahnya SHU di kecamatan yang jumlah assetnya besar, seperti di kecamatan Sintang dengan jumlah asset sebesar lebih dari Rp 254 milyar ternyata hanya menghasilkan SHU sekitar Rp 2,4 milyar jauh lebih rendah dari SHU yang diperoleh koperasi di Kecamatan Sungai Tebelian yang mencapai sekitar Rp 5,8 milyar. Hal yang jauh lebih mengkhawatirkan terjadi di Kecamatan Sepauk dimana jumlah asset sekitar Rp 227 milyar hanya menghasilkan SHU sekitar Rp 191 juta, lebih rendah dari SHU yang diterima koperasi di Kecamatan Serawai yang mencapai Rp 213 juta dengan total asset hanya sekitar Rp 2,3 milyar.

- ***Jumlah UKM non BPR/LKMUKM***

Usaha kecil non BPR/LKM merupakan usaha ekonomi produktif yang bergerak dibidang usaha selain jasa keuangan, berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan yang

masuk kategori usaha menengah non BPR/LKM merupakan usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang usaha selain jasa keuangan, berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Jumlah UKM non BPR/LKM di Kabupaten Sintang cukup besar yaitu sebanyak 191,410 buah. Yang sebagian besar merupakan usaha mikro (181,839 buah) sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.91.
Jumlah UKM per Kecamatan di Kabupaten Sintang
Tahun 2014

No	Kecamatan	2014			
		Mikro	Kecil	Mngh	Jumlah
1	Serawai	11.512	600	6	12.118
2	Ambalau	7.556	394	4	7.953
3	Kayan Hulu	11.794	615	6	12.414
4	Sepauk	22.504	1.173	12	23.689
5	Tempunak	12.964	675	7	13.646
6	Sungai Tebelian	14.046	732	7	14.786
7	Sintang	28.128	1.466	15	29.608
8	Dedai	13.367	696	7	14.070
9	Kayan Hilir	12.451	649	7	13.107
10	Kelam Permai	7.610	397	4	8.010
11	Binjai Hulu	5.796	302	3	6.101
12	Ketungau Hilir	10.330	538	5	10.873
13	Ketungau Tengah	13.885	724	7	14.616
14	Ketungau Hulu	9.897	516	5	10.418
	Jumlah	181.839	9.475	96	191.410

Sumber: *Disperindagkop Kabupaten Sintang, 2015*

Banyaknya jumlah UKM non BPR/LKM ini antara lain disebabkan oleh adanya perubahan pola pikir dalam berusaha yang semakin individualis, terutama pada masyarakat terdidik di Kabupaten Sintang. Menurut masyarakat kelompok ini, membangun usaha sendiri baik perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar memberikan kebebasan. Jika untung dinikmati sendiri, sebaliknya jika rugi ditanggung sendiri. Disamping itu, proses kredit perbankan untuk modal usaha dan investasi juga tidak membedakan antara koperasi dan UKM. Sepanjang proposal usaha dinilai layak, maka perbankan tidak mempersoalkan status UKM tersebut, apakah dimiliki perorangan atau berkelompok.

- ***Jumlah BPR/LKM***

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR, sedangkan yang masuk kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/tabungan, kredit, dan atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil.

Hingga tahun 2013 terdapat sebanyak 38 Bank Umum di Kabupaten Sintang, yang terdiri dari 33 Bank Konvensional dan 5 Bank Syariah. Dengan formasi seperti itu ditambah lagi dengan persebarannya yang sudah menjangkau hampir seluruh kecamatan serta keberadaan 4 BPR/LKM yang ada saat ini menyebabkan ruang untuk mendirikan BPR/LKM baru di Sintang menjadi kecil. Dengan demikian, meskipun pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang memberikan kemudahan bahkan reward terhadap pembentukan BPR/LKM baru tetap sulit direspon oleh pengusaha atau pemilik modal. Hingga tahun 2013 total BPR/LKM di Kabupaten Sintang hanya berjumlah 4 buah.

Tabel 2.92.
Jumlah BPR/LKM Tahun 2010 s.d 2013
Kabupaten Sintang

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah BPR	1	1	1	4
2	Jumlah LKM	0	0	0	0
3	Jumlah BPR dan LKM	1	1	1	4

Sumber: *Disperindagkop Kabupaten Sintang, 2015*

2.3.2.9. Kependudukan

- ***Pertumbuhan Penduduk***

Selama periode 2010 – 2014, penduduk yang memdiami wilayah Kabupaten Sintang bertambah dengan LPP sebesar 2,38% per tahun. Pertambahan penduduk ini dikarenakan jumlah kelahiran kasar (CBR) lebih besar dari jumlah kematian kasar (CDR). Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, Angka Kelahiran KAsar (CBR) = 5,04 per 1000 penduduk dan Angka Kematian Kasar (CDR) = 2,54 per 1000 penduduk (Lihat Tabel 2.93)

Tabel 2.93.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sintang
Tahun 2014

No.	Fertilitas/ Mortalitas	Jumlah
1	Angka kelahiran kasar (CBR)	5,04 per 1000 penduduk
2	Angka kematian kasar (CDR)	2,54 per 1000 penduduk
3	Angka kematian bayi (IMR)	30 per 1000 kelahiran hidup

- ***Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur***

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Dengan sex ratio (SR) sebesar 108 dapat dimaknai bahwa di Kabupaten Sintang tiap 100 penduduk wanita, terdapat 108 orang laki-laki. Keadaan demikian ini terjadi di seluruh kecamatan. SR terbesar (110) terdapat di Kecamatan Ketungau Hulu dan SR terkecil (103) terdapat di Kecamatan Kayan Hulu, lihat Tabel 2.94.

Tabel 2.94.
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sintang

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	S e r a w a i	11.348	10.508	21.856	108
2	A m b a l a u	7.452	6.810	14.262	109
3	Kayan Hulu	11.940	11.537	23.477	103
4	S e p a u k	26.655	24.483	51.138	109
5	Tempunak	15.118	13.823	28.941	109
6	Sungai Tebelian	15.847	14.474	30.321	109
7	S i n t a n g	37.896	35.655	73.551	106
8	D e d a i	14.837	13.962	28.799	106
9	Kayan Hilir	13.478	12.535	26.013	108
10	Kelam Permai	8.949	8.305	17.254	108
11	Binjai Hulu	6.293	5.830	12.123	108
12	Ketungau Hilir	11.315	10.276	21.591	110
13	Ketungau Tengah	14.870	13.601	28.471	109
14	Ketungau Hulu	10.837	9.928	20.765	109
	Kab.Sintang	206.835	191.727	398.562	108

Tabel 2.95.
Proyeksi Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur Kabupaten Sintang
Tahun 2010-2014

Kelompok Umur	2010	2011	2012	2013	2014
0-4	20.114	20.445	20.796	21.800	21.990
5-9	21.770	22.127	22.506	20.427	20.637
10-14	19.528	19.823	20.092	18.896	18.977
15-19	16.623	17.144	17.423	18.116	18.223
20-24	17.068	17.547	17.857	18.696	18.740
25-29	18.055	18.015	18.312	17.960	180.082
30-34	16.780	17.192	17.424	17.280	17.429
35-39	13.937	14.223	14.447	15.031	15.310
40-44	11.848	12.024	12.209	12.942	13.296
45-49	9.424	9.673	9.831	10.494	10.842
50-54	7.563	7.544	7.697	8.377	8.694
55-59	5.559	5.826	5.842	6.615	6.939

Kelompok Umur	2010	2011	2012	2013	2014
60-64	4.142	4.157	4.306	4.803	5.064
65-69	2.895	2.889	2.881	3.147	3.302
70-74	1.610	1.890	1.881	1.960	2.043
75+	1.517	1.305	1.351	1.780	1.853
Jumlah	**188.433**	**191.824**	**194.855**	**198.324**	**201.421**

Tabel 2.96.
Proyeksi Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur
Kabupaten Sintang Tahun 2010-2014

Kelompok Umur	2010	2011	2012	2013	2014
0-4	19.047	19.363	19.646	20.841	21.097
5-9	20.717	21.060	21.367	19.420	19.601
10-14	18.094	18.370	18.708	17.676	17.763
15-19	16.172	16.681	16.933	17.432	17.448
20-24	17.038	17.519	17.757	18.353	18.360
25-29	17.651	17.614	17.876	17.618	17.707
30-34	15.602	15.985	16.272	16.671	16.914
35-39	12.578	12.836	13.041	13.792	14.163
40-44	10.554	10.712	10.884	11.541	11.878
45-49	8.462	8.686	8.819	9.401	9.691
50-54	6.962	6.947	7.026	7.792	8.083
55-59	4.812	5.043	5.199	5.993	6.340
60-64	3.666	3.680	3.665	4.081	4.286
65-69	2.311	2.306	2.391	2.721	2.877
70-74	1.297	1.523	1.578	1.527	1.593
75+	1.363	1.173	1.173	1.509	1.574
Jumlah	**176.326**	**179.498**	**182.335**	**186.368**	**189.375**

- ***Pengelompokkan penduduk berdasarkan persebaran penduduk/geografis***

  Kabupaten Sintang tergolong berpenduduk jarang dengan kepadatan baru mencapai 27 jiwa per km^2. Selain berpenduduk jarang, persebarannya pun tidak merata. Kepadatan tertinggi (266 jiwa per km^2) berada di Kecamatan Sintang dan kepadatan terendah (2 jiwa per km^2) terdapat di Kecamatan Ambalau, lihat Tabel 2.97.

Tabel 2.97.
Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan
Kabupaten Sintang Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas wilayah (km^2)	Kepadatan (%)
1	S e r a w a i	21.856	2.128	10
2	A m b a l a u	14.262	6.386	2
3	Kayan Hulu	23.477	938	25
4	S e p a u k	51.138	1.826	28
5	Tempunak	28.941	1.027	28
6	Sungai Tebelian	30.321	527	58
7	S i n t a n g	73.551	277	266
8	D e d a i	28.799	694	41

9	KayanHilir	26.013	1.137	23
10	KelamPermai	17.254	524	33
11	Binjai Hulu	12.123	308	39
12	KetungauHilir	21.591	1.545	14
13	Ketungau Tengah	28.471	2.182	13
14	Ketungau Hulu	20.765	2.138	10

2.3.2.10. Ketenagakerjaan

- Angkatan Kerja (labour force)

Pada tahun 2013 jumlah penduduk usia kerja (disebut tenaga kerja) sebanyak 249.909. Tenaga kerja terdidi atas Angkatan Kerja (193.887 jiwa) dan Bukan Angkatan Kerja (56.022 jiwa). Tabel 2.98 menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan untuk semua pembagian tenaga kerja (TK, AK dan BAK). Berdasarkan perbedaan tersebut, TPAK laki-laki (88,92) lebih besar dari TPAK perempuan (65,42). Demikian halnya dengan pengangguran, TPT laki-laki (2,35%) lebih besar dari TPT perempuan (2,08%).

Tabel 2.98.
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin
Kabupaten Sintang Tahun 2013

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	**Angkatan Kerja (AK)**			
	Bekerja	112.291	77.246	189.537
	Pengangguran	2.708	1.642	4.350
	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)	**114.999**	**78.888**	**193.887**
2	**Bukan Angkatan Kerja (BAK)**			
	Sekolah	9.318	13.464	22.782
	Mengurus RT	898	23.375	24.273
	Lainnya	4.112	4.855	8.967
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)	**14.328**	**41.694**	**56.022**
	Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii) (TK)	**129.327**	**120.582**	**249.909**
3	**TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) %**	**88.92**	**65.42**	**77.58**
4	**TPT (tingkat pengangguran terbuka) %**	**2.35**	**2.08**	**2.24**

2.3.2.11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- ***Rasio akseptor KB***

Tabel 2.99.
Rasio Akseptor KB Tahun Tahun 2010 s.d 2015
Kabupaten Sintang

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015

1	Jumlah akseptor KB	52.012	47.800	56.228	57.713	54.531	53.392
2	Jumlah pasangan usia subur	70.190	63.934	71.855	73.158	73.336	72.901
3	Rasio akseptor KB	74,10	74,76	78,25	78,89	74,36	73,24

Tabel 2.100.
Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Sintang

	Kecamatan	Jumlah akseptor KB	Jumlah pasangan usia subur	Rasio akseptor KB
1	S e r a w a i	7.496	9.539	78,58
2	A m b a l a u	3.570	5.347	66,77
3	Kayan Hulu	6.262	8.987	69,68
4	S e p a u k	3.431	4.121	83,26
5	Tempunak	5.211	7.013	74,30
6	Sungai Tebelian	2.250	3.363	66,90
7	S i n t a n g	4.118	5.774	71,32
8	D e d a i	3.896	5.291	73,63
9	Kayan Hilir	2.368	3.272	72,37
10	Kelam Permai	3.706	4.436	83,54
11	Binjai Hulu	2.228	3.280	67,93
12	Ketungau Hilir	4.493	6.351	70,74
13	Ketungau Tengah	2.481	3.306	75,05
14	Ketungau Hulu	1.882	2.821	66,71
Jumlah		53.392	72.901	73,24

2.3.2.12. Pemberdayaan masyarakat dan desa

- ***Jumlah LSM yang aktif***

Berdasarkan data sampai dengan tahun 2014, jumlah LSM yang terdafar pada pemerintah daerah Kabupaten Sintang, khususnya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berjumlah 7 LSM saja, dan yang aktif pun hanya 7 LSM yang terdaftar tersebut. Kalau dilihat dari fakta di lapangan, banyak sebenarnya LSM yang dibentuk oleh beberapa kelompok masyarakat, namun keberadaanya tidak didaftarkan secara resmi ke pemerintahan daerah. Sampai saat ini Kesbangpol Kabupaten Sintang terus melakukan pendataan jumlah LSM sesuai dengan amanah UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mewajibkan semua Ormas dan termasuk LSM untuk mendaftarkan diri ke pemerintah daerah di mana keberadaan organisasi tersebut berada dan menjalankan roda organisasinya.

Tabel 2.101.
Jumlah LSM Aktif Kabupaten Sintang
Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah LSM terdaftar	1	-	5	5	7
2	Jumlah LSM tidak aktif	1	-	-	-	-
3	Jumlah LSM aktif (1-2)	-	-	5	5	7

2.3.2.13. Perpustakaan

- ***Jumlah perpustakaan***

Keberadaan Perpustakaan Daerah merupakan salah satu prasarana yang amat penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah. Ketersediaan infrastruktur perpusatakaan yang cukup baik dan didukung oleh ketersediaan buku-buku bacaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, pelajar dan mahasiswa akan mendukung proses belajar mereka. Sampai dengan tahun 2014, jumlah perpustakaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah hanya 1 buah, dan perpustakaan milik non pemerintah daerah berjumlah 13. Dengan demikian sampai saat ini ada 14 buah jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Sintang. Namun yang menarik adalah, sejak dari tahun 2010 pertambahan jumlah perpustakaan milik non pemerintah yang berjumlahi 2 buah kemudian bertambah menjadi 13 buah sampai dengan tahun 2014.

Tabel 2.102.
Jumlah Perpustakaan Kabupaten Sintang
Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1	1	1	1	1
2	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	2	3	6	13	13
3	Total Perpustakaan (1+2)	3	4	7	14	14

- ***Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun***

Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sintang terus berupaya menggenjot minat baca masyarakat Kabupaten Sintang yang terbilang masih cukup rendah. Ini dilihat dari jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan daerah Kabupaten Sintang juga sedikit. Setiap harinya hanya berkisar 15-25 orang saja. Kalau kita lihat data di bawah ini, sejak dari tahun 2010, jumlah pengunjung keperpustakaan daerah terus mengalami penurunan. Sementara untuk pengunjung perpustakaan milik non pemerintah mengalami kenaikan. Faktor ketersediaan buku yang kurang memadai menjadi salah satu faktor terus berkurangnya pengunjung ke perpustakaan milik pemerintah daerah. Berbagai upaya untuk mendorong minat

baca masyarakat telah dilakukan diantaranya dengan jemput bola ke daerah-daerah kecamatan dengan mobil perpustakaan keliling tiga kali dalam seminggu. Perpustakaan Daerah Kabupaten Sintang sendiri memiliki dua mobil perpustakaan keliling. Satu unit bus perpustakaan keliling biasanya mendatangi Kecamatan Kelam Permai, Dedai, Sungai Tebelian, Tempunak dan beberapa kecamatan lainnya yang terjangkau. Bus perpustakaan keliling ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat di desa-desa untuk mendorong mereka gemar membaca, Namun, antusias masyarakat memanfaatkan bus perpustakaan keliling ini masih kurang. Begitu juga dengan mobil perpustakaan keliling yang beroperasi di Kecamatan Sintang.

Tabel 2.103.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2010 s.d 2014
Kabupaten Sintang

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	5.432	2.755	1.841	1.850	1.516
2	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	240	460	600	1.200	1.200
3	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	5.672	3.215	2.441	3.050	2.716

2.3.2.14. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

- ***Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk***

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan juga bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah: (1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah,penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, (2) Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, (3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah, (4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah, (5) Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya, (6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dan (7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan data tabel di bawah ini, jumlah Pol PP yang ada di Kabupaten Sintang sampai dengan tahun 2014 hanya berjumlah 71 orang. Jika jumlah yang seperti itu dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sintang yang sudah di atas empat ratusan ribu tentu masih sangat jauh kekurangannya. Satu orang Pol PP berarti berbanding dengan 7000 penduduk, atau rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk adalah 1,78 orang saja.

Tabel 2.104.
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sintang Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah polisi pamong praja	82	82	82	71	71
2	Jumlah penduduk	364.759	371.322	377.190	384.692	398.562
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,25	2,20	2,17	1,84	1,78

- ***Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk***

Kabupaten Sintang, saat ini sebenarnya masih kekurangan personel anggota perlindungan masyarakat (limnas) untuk 391 desa di 14 kecamatan daerah ini. Idealnya, satu desa yang berpenduduk padat, paling tidak memiliki 16 linmas ditambah kepala desa. Sedangkan desa yang berpenduduk sedikit diperlukan 12 anggota linmas. Namun jumlah anggota linmas di setiap desa di Sintag saat ini paling banyak 2 orang. Tugas utama linmas desa adalah membantu masyarakat, jika terjadi bencana alam, sebelum ada petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) datang ke lokasi. "Keberadaan anggota Linmas di setiap desa sangat penting. Selain bertugas menjaga keamanan dan ketertiban desa, mereka juga membantu masyarakat saat terjadi bencana alam. Sampai dengan tahun 2014, jumlah Linmas yang ada di Kabupaten Sintang hanya berjumlah 4070 orang, artinya setiap 10.000 penduduk hanya ada 102 orang Linmas saja. Jumlah ini tentu masih belum memadai untuk mendukung keberadaan Linmas di daerah.

Tabel 2.105.
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
Kabupaten Sintang Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Linnmas	3.404	3.404	3.404	4.070	4.070
2	Jumlah penduduk	364.759	371.322	377.190	384.692	398.562
3	Rasio jumlah Linnmas per 10.000 penduduk	93,32	91,67	90,24	105,79	102,12

2.3.2.15.Pemuda dan olah raga

- ***Jumlah Organisasi Pemuda***

Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat antara lain ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya. Pengertian lain menyatakan organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Organisasi kepemudaan diharapkan menjadi wadah komunikasi dan pemersatu generasi muda, sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, wadah untuk memberdayakan potensi dan mendukung kepentingan nasional, serta sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Berdasarkan data sampai dengan tahun 2014 jumlah organisasi kepemudaan yang secara resmi terdata dan terdaftar di pemerintahan daerah Kabupaten Sintang hanya berjumlah 7 buah saja, dan itupun semuanya hanya berada di Kecamatan Sintang yang nota bene pusat pemerintahan Kabupaten Sintang. Sedangkan di tiga belas Kecamatan lainnya belum terdata dengan baik.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

- ***Pengeluaran penduduk***

Pola pengeluaran penduduk terhadap kebutuhan pokok (makanan) dan kebutuhan non makanan dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Perbandingan pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan dapat menunjukkan tingkat kemakmuran suatu rumah tangga, jika perbandingan pengeluaran konsumsi makanan dengan konsumsi non makanan semakin kecil maka kondisi rumahtangga semakin makmur. Berdasarkan hasil Susenas Kabupaten Sintang tahun 2013, proporsi

rata-rata pengeluaran per rumahtangga untuk makanan sebesar 56,39 persen dari total pengeluaran per rumahtangga, artinya pengeluaran untuk makanan di Kabupaten Sintang lebih besar dibandingkan pengeluaran non makanan. Perincian pengeluaran makanan yang terbesar di tahun 2013 belum tersedia, data yang tersedia masih menggunakan hasil susenas 2010 dimana pengeluaran terbesar masih terdapat pada komoditi padi-padian. Ketika masyarakat mulai meningkat pendapatannya dan mulai maju maka pengeluaran terbesar nantinya akan bergeser pada pengeluaran barang tahan lama, pendidikan, dan kesehatan serta total pengeluaran non makanan akan lebih besar dari pengeluaran makanan.

- ***Nilai tukar petani***

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dalam persentase. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian, merupakan salah satu Indikator Proxy untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.

Perkembangan dari waktu ke waktu, nilai tukar petani (NTP) semakin membaik. Pada tahun 2010, NTP secara nominal sebesar 1.785.000 dan meningkat menjadi 2.467.500 pada tahun 2012. Peningkatan cukup tinggi terjadi pada tahun 2014, yakni dari 2.386.000 pada tahun 2013 menjadi 3.675.125 pada tahun 2014.

Tabel 2.106.
Nilai Tukar Petani Tahun 2010-2014
Kabupaten Sintang

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Indeks yang diterima petani (It)	1.325.000	12,078,500	15,740,000	15,414,000	20,608,000
2.	Indeks yang di bayar petani (Ib)	4.185.000	4,185,000	5,870,000	5,870,000	5,907,500
3.	NTP	1,785.000	1,973,375	2,467,500	2,386,000	3,675,125

2.4.2. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

2.4.2.1. Aksesibilitas daerah

- ***Prosentase Angkutan darat dibanding jumlah penumpang***

Prosentase angkutan darat dibanding jumlah penumpang pada tahun 2014 sebesar 0,07%. Jumlah angkutan darat dari dan menuju Kabupaten Sintang sebanyak 359 buah, angkutan darat didominasi oleh

perusahaan Damri dan bus antar kota dalam provinsi lainnya. Selain dari bus, transportasi darat lainnya berupa perusahaan travel pribadi dan perusahaan yang menggunakan mobil jenis MPV dan APV. Sedangkan jumlah penumpang angkutan darat sampai dengan tahun 2014 baik penumpang masuk dan penumpang keluar sebanyak 526.972 orang.

Tabel 2.107.
Arus Kendaran dan Penumpang Darat
Tahun 2014

No.	Nama Terminal	Jenis Pelayanan	Kendaraan Keluar/Masuk	Pnp. Masuk	Pnp. Keluar
1	Sei Durian	Ang. Kota	10.513	52.564	52.848
		Ang. Pedesaan	5.840	23.360	22.989
		AKDP	2.922	58.432	58.144
2	Sei Ukoi	Ang. Pedesaan	1.169	5.846	6.756
		AKDP	2.193	43.855	46.373
3	Sepauk	Ang. Pedesaan	1.037	4.148	4.241
		AKDP	-	-	-
4	Tj. Puri	Ang. Kota	13.142	65.711	65.254
		Ang. Pedesaan	1.262	6.312	6.548
5	Nanga Mau	Ang. Pedeesaan	365	1.825	1.766
	Jumlah		38.443	262.053	264.919

2.4.2.2. Fasilitas bank dan non bank

- ***Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya***

Tidak bisa dipungkiri bahwa Kabupaten Sintang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Provinsi Kalimantan Barat yang salah satunya dapat dilihat melalui perkembangan jumlah Bank. Tabel berikut menunjukkan bahwa perekonomian daerah ini terus berkembang, jika pada tahun 2011 jumlah Bank Umum hanya 13 buah, maka pada tahun 2014 jumlah Bank Umum meningkat lebih dari 200% menjadi 38 buah. Sebagian besar dari peningkatan tersebut berasal dari pertambahan jumlah Bank Konvensional yang meningkat sebanyak 23 buah, yakni dari 10 buah pada tahun 2011, menjadi 33 buah pada tahun 2014. BPR juga mengalami peningkatan cukup besar dari hanya 1 buah pada tahun 2011, meningkat menjadi 4 buah pada tahun 2014.

Tabel 2.108.
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
Kabupaten Sintang

No	Sektor	Jumlah

		2011	2012	2013	2014
1	Bank Umum	13	29	38	38
1.1.	Konvensional	10	24	33	33
1.2.	Syariah	3	5	5	5
2	BPR	1	1	4	4
2.1.	Konvensional	1	1	4	4
2.2.	Syariah	0	0	0	0

Sumber: *Kabupaten Sintang dalam Angka, 2014*

Peningkatan jumlah Bank menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi. Suatu Bank tidak akan membuka cabangnya di suatu daerah jika potensi ekonomi di daerah itu kurang berkembang. Perkembangan jumlah Bank ini tentu saja juga sejalan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagaimana uraian sebelumnya, bahwa pada tahun 2013 Kabupaten Sintang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam lima tahun terakhir ini.

2.4.2.3. Ketersediaan Air Bersih

- ***Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih***

Air Bersih *(clean Water) adalah* air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum *(drinking water)* adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas:

a. Air Hujan
b. Air Sungai dan Danau
c. Mata Air
d. Air Sumur Dangkal
e. Air Sumur Dalam

Pada tahun 2014, jumlah Rumah Tangga yang ada di Kabupaten Sintang sebanyak 70.485. Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih sebanyak 3.691, sehinggga persentasenya sebesar 5,24%. Dalam kurun waktu lima tahun, persentase pengguna air bersih ini mengalami peningkatan walaupun tidak besar yaitu pada kisaran rata-rata 0,27%. Secara lengkap data rumah tangga pemakai air bersih dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.109.
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih PDAM Kabupaten Sintang

No	Sumber Air Bersih	2010	2011	2012	2013	2014
1	Leding (Perpipaan)	2.531	3.034	3.251	3.348	3.691
2	Sumur Lindung	-	-	-	-	-
3	Sumur Tidak Terlindung	-	-	-	-	-
4	Mata Air Terlindung	-	-	-	-	-
5	Mata Air Tidak Terlindung	-	-	-	-	-
6	Sungai	-	-	-	-	-
7	Danau/Waduk	-	-	-	-	-
8	Air Hujan	-	-	-	-	-
9	Air Kemasan	-	-	-	-	-
10	Lainnya	-	-	-	-	-
11	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	2.531	3.034	3.251	3.348	3.691
12	Jumlah Rumah Tangga	60.793	61.887	62.865	65.626	70.485
13	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	4,16	4,90	5,17	5,10	5,24

2.4.2.4. Fasilitas Listrik

- ***Rasio ketersediaan daya listrik***

Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan. Perhitungan ketersediaan daya listrik dan kebutuhannya kedepan dapat mengacu pada dokumen Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) atau Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) yang telah disusun.

- ***Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik***

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang

digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga. Pada tahun 2014, persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Sintang sebanyak 73,90% atau sebanyak 52.091 RT dari total jumlah rumah tangga sebanyak 70.485. Dibandingkan tahun 2013, persentase ini meningkat sebesar 5,062%. Dalam tiga tahun antara 2012-2014, rata-rata peningkatan prosentase rumah tangga pengguna listrik adalah sebesar 7,74%. Secara lengkap Rumah Tangga pengguna listrik termasuk tingkat daya yang dipakai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.110.
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Kabupaten Sintang

No	Uraian	2012	2013	2014
1	RT dengan daya 450 watt	10.001	10.520	10.987
2	RT dengan daya 900 watt	21.190	27.275	32.906
3	RT dengan daya 1.300 watt	4.620	5.859	6.412
4	RT dengan daya 2.200 watt	791	1.219	1.417
5	RT dengan daya> 2.200 watt	130	305	369
6	Total Jumlah Rumah Tangga Menggunakan listrik	36.732	45.178	52.091
7	Jumlah Rumah Tangga	62.865	65.626	70.485
8	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	58,43	68,84	73,90

2.4.2.5. Ketersediaan restoran

- ***Jenis, kelas, dan jumlah restoran (Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas)***

Sebagai salah satu Kabupaten yang cukup maju di wilayah Timur Kalimantan Barat, perkembangan usaha di sektor restoran atau rumah makan di Kabupaten Sintang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan ini tentu seirama dengan perkembangan jumlah penduduk, pesatnya pembangunan wilayah dan semakin menggeliatnya aktivitas ekonomi di daerah ini. Sampai dengan tahun 2014, setidaknya ada 86 usaha rumah makan yang terdaftar di Kabupaten Sintang, dengan jumlah kursi sebanyak 1023 buah. Jumlah usaha restoran dan rumah makan dalam tipe yang kecil (C dan D) yang belum terdaftar

secara resmi di berbagai kecamatan yang ada di kabupaten Sintang tentu masih cukup banyak.

Tabel 2.111.
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran
Kabupaten Sintang

NO	Uraian	2010		2014	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1	Usaha restoran golongan tertinggi	-	-	-	-
2	Usaha restoran golongan menengah	-	-	-	-
3	Usaha restoran golongan terendah	-	-	-	-
4	Usaha rumah makan kelas A	-	-	-	-
5	Usaha rumah makan kelas B	-	-	-	-
6	Usaha rumah makan kelas C	-	-	-	-
7	Usaha rumah makan kelas D	-	-	-	-
8	Usaha rumah makan kelas	-	-	-	-
9	Jenis Usaha Restoran				
10	Jenis Usaha Rumah Makan	44	528	86	1023

2.4.2.6. Ketersediaan penginapan

- ***Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel***

Tingkat hunian hotel dan penginapan di Kabupaten Sintang khususnya di Kota Sintang terus mengalami kenaikan. Di Kota Sintang saat ini ada sekitar 10 Hotel dan Penginapan dengan jumlah kamar tidak kurang 300 unit umumnya kelas standard sampai dengan Tingkat Melati, tingkat hunian tidak mengalami penurunan signifikan. Larangan kepada Instansi pemerintah untuk tidak melaksanakan rapat di Hotel dan Penginapan, dengan niatan efisiensi anggaran dapat dimengerti pemilik penginapan dan hotel di Sintang. Sebagai daerah transit, Kota Sintang sangat strategis untuk beristirahat dan melakukan aktifitas usaha. Di berbagai penginapan yang ada di Kota Sintang khususnya, pihak hotel menyediakan berbagai fasilitas untuk kenyaman pelanggan dengan menyediakan berbagai asesori etnik khas Dayak, Melayu, dan Tionghoa serta lukisan, souvenir, dan lainya. Untuk meningkatkan jumlah penginap dan pelanggan pihak pengelola hotel telah mendesain setiap ruangan dan kamar dengan berbagai hiasan khas Sintang dan berbagai hasil produk kerajinan tangan warga masyarakat yang merupakan binaan pemerintah Kabupaten Sintang.

Tabel 2.112.
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel
Kabupaten Sintang

No	Jenis Penginapan/Hotel	Tahun 2010		2014	
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
1	Bintang 5	-	-	-	-
2	Bintang 4	-	-	-	-
3	Bintang 3	-	-	-	-
4	Bintang 2	-	-	-	-
5	Bintang 1	-	-	-	-
6	Hotel non bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	6	233	10	300
Total jmlh penginapan/ hotel		6	233	10	300

2.4.3. Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Keamanan dan ketertiban

- ***Angka kriminalitas***

Dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014), kejahatan konvensional mendominasi kasus di Kabupaten Sintang dari empat golongan kejahatan yang menjadi atensi aparat Kepolisian di Kabupaten Sintang. Meskipun secara kuantitas sampai dengan tahun 2014 kejahatan tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Kalau kita lihat data tabel di bawah ini, jumlah kasus kriminalitas sampai tahun 2014 yang terjadi di Kabupaten Sintang yaitu 253 kasus, dengan kasus kriminalitas tertinggi yaitu kasus pencurian sebanyak 165 kasus. Namun demikian, trend angka kriminalitas kasus narkoba juga cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan kasus narkoba ini tentu harus menjadi perhatian serius dari semua pihak, apalagi narkoba saat ini sudah masuh dalam kejahatan luar biasa.

Tabel 2.113.
Angka Kriminalitas Kabupaten Sintang

No.	Jenis Kriminal	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah kasus Narkoba	14	12	13	0	19
2	Jumlah kasus Pembunuhan	0	1	2	1	4

3	Jumlah Kejahatan Seksual	24	20	7	1	2
4	Jumlah kasus Penganiayaan	54	65	29	52	41
5	Jumlah kasus Pencurian	225	175	108	148	165
6	Jumlah kasus Penipuan	27	40	20	0	22
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	1	1	0	0	0
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	345	314	179	202	253
9	Jumlah Penduduk	377.810	386.724	393.755	396.471	398.562
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	9,13	8,12	4,55	5,09	6,35

2.4.3.2. Kemudahan perijinan

Sejak dibentuk pada tahun 2008, keberadaan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang telah memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan pelayanan publik terutama dalam bentuk dokumen perizinan dan non perizinan, akan tetapi kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinisp pelayanan publik yang tertuang dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kalau dilihat dari aspek SOP dalam hal waktu lama pengurusan perizinan dan jumlah persyaratan yang diperlukan sudah mengalami perubahan yang cukup baik guna memberikan pelayanan yang cepat dan efisien.Namun dalam praktenya proses perizinan yang diajukan oleh masyarakat terkadang masih banyak memerlukan perbaikan. Kondisi ini tentu berdampak terhadap kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku institusi pemerintah di Kabupaten Sintang yang mengedepankan pelayanan prima (*excelent services*). Dilihat dari aspek produktivitas layanan, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan prima dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen perizinan baik untuk membangun rumah dan usaha. Hal ini dapat tercermin dari masih banyak masyarakat Kabupaten Sintang yang membangun rumah tidak mengantongi IMB. Pada aspek kualitas layanan, permasalahan klasik dalam pelayanan public seperti ketepatan waktu pelayanan masih sering terjadi, masyarakat yang mengurus IMB misalnya harus menunggu lebih dari ketentuan waktu yang ditetapkan dalam SOP.

Tabel 2.114.
Lama Proses Perijinan
Kabupaten Sintang

No	Jenis Perizinan	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1	SIUP	5	12	0
2	TDP	5	10	0
3	IUI	14	13	0
4	TDI	5	10	0
5	IMB	21	15	Perda No. 6 Tahun 2012
6	HO	5	11	Perda No. 6 Tahun 2012

2.4.4. Sumber Daya Manusia

- ***Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)***

Berdasarkan perkembangan penduduk lulusan Sarjana (S-1), Magister (S-2) dan Dokter (S-3) yang bertambah setiap tahunnya pertanda adanya peningkatan kualitas tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat perolehan penghasilan yang pada gilirannya meningkatnya kesejahteraan.

Tabel 2.115.

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Sintang

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah lulusan S1	4.732	6.350	6.013	6.362	6.670
2	Jumlah lulusan S2	396	476	469	493	512
3	Jumlah lulusan S3	1	7	10	9	1
4	Julah lulusan S1/S2/S3	5.129	6.833	6.492	6.864	7.183
5	Jumlah penduduk	377.810	386.724	393.755	396.471	398.562
6	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,01	1,77	1,65	1,73	1,80

- ***Tingkat ketergantungan***

Salah satu dampak positip penurunan tingkat kelahiran sebagai akibat program Keluarga Berencana adalah memperoleh “bonus demografi”, yaitu suatu keadaan demografis dimana propporsi penduduk usia produktif lebih besar dari proporsi usia tidak produktif. sehingga angka ketergantungan berada di bawah 50%. Rasio ketergantungan kurang dari 50% tercapai mulai tahun 2013.

Tabel 2.116.
Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s.d 2014
Kabupaten Sintang

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	119.270	119.714	121.619	112.703	113.560
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	11.000	11.002	12.264	13.464	14.710
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	130.270	130.716	133.883	126.167	128.270
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	234.520	256.000	259.872	270.304	270.292
5	Rasio ketergantungan	56	51,06	51,52	46,68	47,46

BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Keuangan daerah diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut harus mengikuti berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu antara lain: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Daerah, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari Undang-undang keuangan negara tersebut, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang implementasinya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pelaksanaan APBD tahun 2010–2014 ditandai dengan perubahan beberapa kebijakan makro ekonomi nasional yang berdampak pada daerah seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM), pelemahan nilai tukar, perlambatan ekonomi global dan nasional. Kondisi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dari tahun 2010–2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Komposisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam
APBD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 (Rp Juta)

Komponen APBD	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan	732.971	808.299	967.601	1.059.329	1.265.831
Belanja	806.255	932.088	1.063.799	1.145.690	1.410.186
Pembiayaan	73.284	123.789	96.198	86.360	144.355

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir APBD Kabupaten Sintang meningkat cukup cepat dari hanya sekitar Rp 732 milyar pada tahun 2011 menjadi sekitar Rp 1,265 trilyun pada tahun 2015. Peningkatan pendapatan cenderung lebih lambat dari peningkatan belanja. Akibatnya, pemerintah daerah harus memperoleh sumber pembiayaan yang cukup untuk menutupi kekurangan pendapatan tersebut (defisit) yang sebagian besar berasal dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya.

3.1.2. Neraca Daerah

Aset lancar pemerintah Kabupaten Sintang mengalami fluktuasi, pada periode 2010 ke 2011 mengalami kenaikan namun turun lagi di tahun berikutnya untuk kemudian naik lagi pada tahun 2013. Fluktuasi ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas di Kas Daerah. Disisi lain investasi jangka panjang dalam bentuk investasi permanen pada PDAM dan pada BPD Bank Kalbar cenderung terus mengalami kenaikan dari hanya sekitar Rp 29,7 milyar tahun 2010 menjadi sekitar Rp 56,7 milyar tahun 2013. Perkembangan neraca daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2012 – 2015 (Rp Juta)

Uraian	2012	2013	2014	2015
TOTAL ASET	**1.676.369**	**1.804.235**	**1.545.734**	**-**
ASET LANCAR	165.983	148.511	179.911	-
ASET LANCAR				-
Kas di Kas Daerah	152.010	136.273	138.371	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	3	49	150	-
Kas di Bendahara Penerimaan	76	187	5.274	**-**
Piutang Pajak	185	407	4.300	-
Piutang Retribusi	1.444	1.849	858	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	596	642	-
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	118	267	-
Piutang Lainnya	6.914	3.134	26.292	**-**
Persediaan	5.351	5.898	9.662	-
Aset Lancar Lainnya	-	-	(5.905)	-

Uraian	2012	2013	2014	2015
INVESTASI JANGKA PANJANG	31.231	21.514	57.360	-
Investasi Nonpermanen	1.458	1.517	592	-
Investasi Nonpermanen Lainnya	1.458	1.517	592	-
Investasi Permanen	29.773	19.997	56.768	-
Penyertaan Modal pada BUMD	29.773	-	56.768	-
Investasi Permanen Lainnya	-	19.997	-	-
ASET TETAP	1.445.013	1.599.475	1.287.848	-
Tanah	95.197	121.744	131.665	1.373.609
Peralatan dan Mesin	194.874	221.956	261.869	291.541
Gedung dan Bangunan	501.103	631.067	746.314	915.160
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	608.224	789.665	746.314	1.065.902
Aset Tetap Lainnya	14.828	18.873	26.894	29.916
Konstruksi dalam Pengerjaan	30.786	78.379	86.735	62.938
Akumulasi Penyusutan	-	(95.022)	(698.943)	(835.463)
ASET LAINNYA	34.142	18.613	7.951	35.297
ASET LAINNYA				
Tagihan Penjualan Angsuran	2.938	2.001	1.647	-
Tuntutan Ganti Rugi	129	-	355	-
Aset Tak Berwujud	2.237	2.352	4.046	8.113
Aset Lain-Lain	28.838	30.384	14.567	52.207
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.676.369**	**1.804.235**	**1.545.734**	-
KEWAJIBAN	7.914	5.865	14.038	-
TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.914	5.865	14.038	-
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	47	5	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.914	5.818	14.033	-
EKUITAS DANA	1.668.455	1.798.370	1.531.697	-
TOTAL EKUITAS DANA LANCAR	158.069	142.646	165.873	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	154.502	137.964	143.645	-
Pendapatan Ditangguhkan	76	187	146	-
Cadangan Piutang	6.054	4.415	26.454	-
Cadangan Persediaan	5.351	5.898	9.662	-
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(7.914)	(5.818)	(14.033)	-
TOTAL EKUITAS DANA INVESTASI	1.510.386	1.655.725	1.365.823	-
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	31.231	21.514	57.360	-
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.445.013	1.599.475	1.287.848	-
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	34.142	34.736	20.616	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015

Aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Pada periode 2013-2014 semua komponen asset tetap daerah mengalami kenaikan, asset tanah meningkat dari hanya sekitar Rp 121 milyar tahun 2013 menjadi sekitar Rp 131 milyar tahun 2014, asset gedung dan bangunan meningkat dari sekitar Rp 631 milyar tahun 2013 menjadi sekitar Rp 746 milyar tahun 2014, asset jalan, irigasi, dan jaringan juga meningkat dari sekitar Rp 789 milyar tahun 2013 menjadi sekitar Rp 871 milyar tahun 2014. Namun karena terjadi akumulasi penyusutan hingga tahun 2014 sekitar Rp 698 milyar, maka total asset tetap daerah menurun dari sekitar Rp 1,79 trilyun tahun 2013 menjadi sekitar Rp 1,43 trilyun tahun 2014.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sintang kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan dari hanya sekitar Rp 1,84 milyar menjadi sekitar Rp 14 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang selama kurun waktu tersebut dalam melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek cukup tinggi.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

A. Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan daerah terdiri dari :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah.
b) Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi hasil Pajak, Dana Bagi hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan ini sebenarnya diluar kendali langsung Pemda Kabupaten Sintang, karena pengalokasiannya mengacu pada formula yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan daerah lain, dana penyesesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini sebagian besar juga di luarkendali langsung Pemerintah Kabupaten Sintang, karena pengalokasiannya tergantung pada Pemerintah Pusat.

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Di samping berasal dari sumber-sumber pendapatan di atas, pembangunan di daerah juga didukung dengan dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang disalurkan melalui Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi.

Kabupaten Sintang mengalami rata–rata pertumbuhan pendapatan sebesar 18,32% per tahun selama periode tahun 2011-2015. Penopang pendapatan daerah terbesar berasal dari dana perimbangan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata bagian dana perimbangan terhadap pendapatan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun selalu lebih dari 90%, kecuali tahun 2015. Besarnya sumbangsih dana perimbangan terhadap pendapatan daerah ini dikarenakan besarnya dana alokasi umum yang diterima Kabupaten Sintang dari tahun ke tahun.

Disisi lain dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dipicu oleh penyerahan pengelolaan beberapa pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta terus dilakukannya intensifikasi dan optimalisasi potensi-potensi pendapatan, khususnya dari sisi pajak daerah.

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Kabupaten Sintang
Tahun 2011-2015 (Rp Juta)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
PENDAPATAN	**732.971**	**808.299**	**967.601**	**1.059.329**	**1.265.831**
PAD	27.700	35.171	45.827	45.841	82.412
1.Pajak daerah	2.243	4.435	6.794	9.841	30.367
2.Retribusi daerah	12.126	15.660	5.234	7.887	3.779
3.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
4.Lain-lain PAD yang sah	10.331	11.676	30.399	24.613	44.766
Share PAD (%)	3,78	4,35	4,74	4,32	6,51
Dana Perimbangan	660.316	759.128	905.773	979.366	1.006.582
1. DBH	29.106	35.106	35.106	29.606	26.606
2. DAU	553.593	646.998	738.622	820.084	868.072
3. DAK	77.617	77.024	132.045	129.676	111.904
Share Dana Perimbangan (%)	90,09	93,92	93,61	92,45	79,52
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	44.955	14.000	16.000	34.123	176.837
1.Hibah	-	-	-	-	-
2.Dana darurat	-	-	-	-	-
3.Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	12.000	14.000	16.000	20.000	28.005
4.Dana penyesuaian dan otonomi khusus	32.955	-	-	3.000	148.831
5.Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	-	-	-	11.123	-
Share Lain-lain Pendapatan Daerah (%)	6,13	1,73	1,65	3,22	13,97

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015

Salah satu aspek yang menarik untuk diperhatikan adalah terus meningkatnya besaran PAD, yaitu dari hanya sekitar Rp 27,70 milyar tahun 2011 menjadi Rp 82,41 milyar tahun 2015 atau meningkat hampir 20,26% per tahun selama periode 2011-2015. Sebagaimana diuraikan sebelumnya peningkatan ini ikut didorong oleh penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengalihkan beberapa pajak pusat menjadi pajak daerah. Peningkatan PAD ini belum mampu secara signifikan meningkatkan share dari PAD terhadap pendapatan daerah, karena pada saat yang sama juga terjadi peningkatan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan. Namun pada tahun 2015, terjadi penurunan share Dana Perimbangan, dan pada saat yang terjadi peningkatan penerimaan PAD sehingga pada 2015 sehingga share PAD mulai menampakkan adanya peningkatan.

B. Belanja Daerah

Perkembangan APBD tidak hanya dilihat dari realisasi pendapatan tapi juga penting diperhatikan dari realisasi belanja. Karena pada dasarnya kualitas belanja daerahlah yang paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin baik alokasi belanja dan semakin tinggi serapannya akan mendorong peningkatan kinerja ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Adapun perkembangan belanja daerah di kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Kabupaten Sintang Tahun 2011 – 2015 (Rp Juta)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
BELANJA	**806.255**	**932.088**	**1.063.799**	**1.145.690**	**1.410.186**
I. Belanja Tidak Langsung	417.956	446.821	502.004	563.747	806.430
1. Belanja Pegawai	335.589	358.166	383.936	431.376	582.319
2. Belanja Bunga	2.970	4.958		2.233	
3. Belanja Subsidi	13.720	10.800	13.103	7.800	11.000
4. Belanja Hibah	12.111	20.041	24.022	33.540	66.373
5. Belanja Bantuan sosial	8.847	730	2.050	2.060	790
6. Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	-	-	-	-	3.411
7. Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	42.719	46.326	75.213	82.139	137.537
8. Belanja tidak terduga	2.000	5.801	3.681	4.600	5.000
Share Belanja Tidak Langsung (%)	51,84	47,94	47,19	49,20	57,19
II. Belanja Langsung	388.299	485.267	561.794	581.942	603.756
1. Belanja Pegawai	29.280	27.344	36.972	40.360	10.555
2. Belanja Barang dan jasa	207.681	270.329	244.933	284.787	306.724
3. Belanja Modal	151.339	187.594	279.890	256.796	286.477
Share Belanja Langsung (%)	48,16	52,06	52,81	50,80	42,81

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015

Tabel di atas menunjukkan kecenderungan yang positif dalam APBD Kabupaten Sintang, dimana share belanja tidak langsung terus menurun selama tahun 2011-2014, namun meningkat kembali pada tahun 2015. Sebaliknya, share belanja langsung terus meningkat selama tahun 2011-2014, namun menurun kembali pada tahun 2015. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau belanja non kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, bunga; subsidi; hibah; bantuan sosial; belanja bagi basil; bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau belanja kegiatan yang terdiri dari: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal.

Belanja tidak langsung menurun dari 51,84% tahun 2011 menjadi hanya 49,20% tahun 2014, sebaliknya Belanja Langsung meningkat dari 48,16% tahun 2011 menjadi 50,80% tahun 2014. Kondisi demikian ini sangat positif pengaruhnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat karena secara teoritis besaran proporsi Belanja Langsunglah yang paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Data pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa Rasio Belanja Pegawai juga belum membaik untuk menuju kondisi ideal (sekitar 35%) dikarenakan penurunannya relatif lamban, yaitu menurun dari 41,62% tahun 2011 menjadi 41,29% tahun 2015. Namun rasio Belanja Pegawai Kabupaten Sintang tahun 2014 (37,65%) jauh lebih rendah dari rata-rata Rasio Belanja Pegawai kabupaten/kota dalam satu provinsi se Indonesia yang pada tahun 2014 mencapai 48,61%.

Aspek lain yang menarik diperhatikan dalam perkembangan belanja daerah adalah besaran belanja modal. Belanja Modal adalah jenis belanja yang secara teoritis diyakini dapat mendorong peningkatan investasi dan kesempatan kerja di suatu daerah. Rasio Belanja Modal dalam APBD Kabupaten Sintang ternyata terus meningkat, yaitu dari hanya 18,77% tahun 2011 menjadi 20,31% tahun 2015. Namun demikian, ternyata capaian belanja modal yang cukup tinggi pada tahun 2014 (22,41%) masih jauh lebih rendah dari rata-rata Rasio Belanja Modal kabupaten/kota se Indonesia pada tahun 2014 yang besarnya mencapai 26,14%.

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan dearah yang dialokasikan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan Anggaran tahun lalu (SILPA), penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Pos pembiayaan ini berkaitan dengan penerapan anggaran kinerja dimana dimungkinkan adanya surplus ataupun defisit dalam penganggaran daerah. Pos pembiayaan ini difungsikan untuk menyeimbangkan komponen belanja dan pendapatan. Sehingga rencana penggunaan anggaran untuk kegiatan dapat dipenuhi seluruhnya. Perkembangan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Sintang Tahun 2011 – 2015 (Rp Juta)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Pembiayaan Netto	73.284	123.789	96.198	86.360	144.355
Penerimaan Pembiayaan	75.071	129.840	111.408	103.236	160.436
SiLPA TA sebelumnya	52.771	90.081	111.108	85.761	160.436
Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	39.459	-	17.175	-
Penerimaan Kembali Pemberian	22.000	300	300	300	-

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Pinjaman					
Pengeluaran Pembiayaan	300	6.051	15.210	16.876	16.081
Pembentukan Dana Cadangan	1.787	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	4.000	8.500	6.375	16.081
Pembayaran Pokok Utang	-	1.751	6.410	10.201	-
Pemberian Pinjaman Daerah	1.487	300	300	300	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	300	-	-	-	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015

Dalam lima tahun terakhir APBD Kabupaten Sintang selalu defisit dimana pendapatan lebih rendah dari belanja. Defisit anggaran merupakan salah satu cara yang dapat dipilih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Negara atau daerah yang menganggarkan belanjanya lebih besar dari pendapatannya pada umumnya akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Barangkali inilah salah satu alasan mengapa desain APBD Kabupaten Sintang selalu direncanakan defisit. Akan tetapi uniknya, defisit tersebut sebagian besar justru ditutup oleh SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun 2011 misalnya, dari defisit sekitar Rp 73,284 milyar ditutup dari SILPA sebesar 72,10%. Dengan demikian berarti defisit APBD Kabupaten Sintang bukanlah riil defisit, melainkan defisit yang disekenariokan untuk bisa memanfaatkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sintang dibutuhkan pendanaan untuk memenuhi belanja daerah. Guna mengetahui perkembangan penggunaan belanja selama 5 (lima) tahun terakhir, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Sintang
Tahun 2011 – 2015 (Rp Juta)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
BELANJA DAERAH	**806.255**	**932.088**	**1.063.799**	**1.145.690**	**1.410.186**	**15,60**
I. Belanja Tidak Langsung	417.956	446.821	502.004	563.747	806.430	7,18
Belanja Pegawai	335.589	358.166	383.936	431.376	582.319	8,12
Belanja Bunga	2.970	4.958	-	2.233		(8,27)
Belanja Subsidi	13.720	10.800	13.103	7.800	11.000	(5,00)
Belanja Hibah	12.111	20.041	24.022	33.540	66.373	(7,99)
Belanja Bantuan sosial	8.847	730	2.050	2.060	790	(16,80)
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	42.719	46.326	75.213	82.139	137.157	22,79
Belanja tidak terduga	2.000	5.801	3.681	4.600	5.000	3,11
II. Belanja Langsung	388.299	485.267	561.794	581.942	603.756	29,39
Belanja Pegawai	29.280	27.344	36.972	40.360	10.555	8,70
Belanja Barang dan jasa	207.681	270.329	244.933	284.787	306.724	19,37
Belanja Modal	151.339	187.594	279.890	256.796	286.477	58,27

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015

Pertumbuhan realisasi belanja pada tabel di atas menunjukkan bahwa postur APBD Kabupaten Sintang terus membaik dimana rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung (7,18%) jauh lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung (29,39%). Disamping itu, rata-rata pertumbuhan Belanja Modal (58,27%) juga jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Belanja Pegawai (8,12%).

Pada lima tahun ke depan diharapkan arah pengelolaan APBD terkait dengan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama tetap harus mempertimbangkan penurunan proporsi Belanja tidak langsung dan sebaliknya meningkatkan proporsi belanja langsung. Sebagian besar dari peningkatan Belanja Langsung tersebut harus diarahkan pada Belanja Modal agar share Belanja Modal terus meningkat mendekati angka minimal 30%.

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu (2011-2015)

Perkembangan pendapatan masa lalu perlu dihitung pertumbuhannya untuk digunakan sebagai salah satu dasar dalam memproyeksi pendapatan daerah dalam lima tahun ke depan. Berikut ini adalah data pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dalam lima tahun terakhir.

Tabel 3.7
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Sintang
Tahun 2011 – 2015 (Rp Juta)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
PENDAPATAN DAERAH	**732.971**	**808.299**	**967.601**	**1.059.329**	**1.265.831**	**18,32**
I. PAD	27.700	35.171	45.827	45.841	82.412	20,26
Pajak daerah	2.243	4.435	6.794	9.841	30.367	87,60
Retribusi daerah	12.126	15.660	5.234	7.887	3.779	(6,69)
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500	4,98
Lain-lain PAD yang sah	10.331	11.676	30.399	24.613	44.766	40,15
II. Dana Perimbangan	660.316	759.128	905.773	979.366	1.006.582	17,62
DBH	29.106	35.106	35.106	29.606	26.606	(0,01)
DAU	553.593	646.998	738.622	820.084	868.072	16,78
DAK	77.617	77.024	132.045	129.676	111.904	36,63
III. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	44.955	14.000	16.000	34.123	176.837	48,69
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	12.000	14.000	16.000	20.000	28.005	18,18
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	32.955	-		3.000	148.831	(22,72)
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	-	-		11.123		-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015

Pertumbuhan realisasi pendapatan pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa postur APBD Kabupaten Sintang seperti halnya dari aspek belanja, dari aspek pendapatan pun terus membaik dimana rata-rata pertumbuhan PAD (20,26%) lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan (17,62%). Disamping itu, rata-rata pertumbuhan PAD juga jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan DAU (16,78%).

Pada lima tahun ke depan diharapkan arah pengelolaan APBD terkait dengan pendapatan tetap harus mempertimbangkan bahwa kenaikan penerimaan PAD diupayakan lebih besar dari Dana Perimbangan agar kemandirian fiskal terus semakin besar. Disamping itu, penerimaan DAK akan tumbuh lebih cepat dari DAU sebagai akibat dialihkannya Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi DAK. Sejalan dengan semakin bertambahnya jenis pajak yang dikelola daerah, maka fenomena lain yang harus juga dipertimbangkan adalah terus berkurangnya penerimaan daerah yang berasal dari retribusi.

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan pada analisis penerimaan APBD tahun sebelumnya perlu dilakukan. Analisis tersebut digunakan sebagai dasar acuan untuk proyeksi penerimaan masing-masing sumber pendapatan. Dari analisis yang telah dilakukan, untuk PAD selama 5 (lima) tahun terakhir naik rata-rata 20,26% per tahun, dana transfer diproyeksikan naik rata-rata 17,62% per tahun, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan naik rata-rata 48,69% per tahun. Dalam membiayai pembangunan yang akan datang, perlu diproyeksikan kerangka pendanaan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta rencana penggunaannya.

Berdasarkan perkembangan pendapatan daerah periode 20011-2015 prediksi kemampuan pendapatan daerah Kabupaten Sintang tahun 2016 sampai tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 3.8
Prediksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2016-2021
(dalam Juta Rupiah)

PENDAPATAN DAERAH	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Pendapatan Asli Daerah	94.000	82.448	86.760	91.560	97.131	102.944
Dana Perimbangan	1.125.847	1.352.012	1.429.785	1.542.184	1.663.674	1.795.012
Lain-lain Pendapatan yang Sah	235.619	277.377	464.462	468.135	471.992	476.041
TOTAL	1.455.467	1.711.837	1.981.007	2.101.879	2.232.796	2.373.997

Sumber: Hasil proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang,

Keseluruhan perkiraan pendapatan daerah Kabupaten Sintang diperuntukkan untuk menunjang belanja daerah. Berdasarkan perkembangan belanja daerah periode 2011-2015, diperkirakan kebutuhan belanja daerah Kabupaten Sintang terus meningkat untuk periode tahun 2016-2021.

Tabel 3.9
Prediksi Belanja Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2016-2021
(Dalam Juta Rupiah)

BELANJA DAERAH	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Belanja Tak Langsung	1.000.620	1.279.997	1.378.201	1.493.805	1.623.426	1.818.533
Belanja Langsung	846.732	817.587	838.790	850.858	864.550	818.902
TOTAL	1.847.352	2.097.584	2.216.991	2.344.663	2.487.977	2.637.436

Sumber: Hasil proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sintang,

Pembiayaan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Berdasarkan perkembangan pendapatan dan belanja daerah periode 2016-2021, diperkirakan kebutuhan pembiayaan Kabupaten Sintang pada periode tahun 2016-2021, pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Prediksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2016-2021
(Dalam Juta Rupiah)

PEMBIAYAAN DAERAH	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Penerimaan Pembiayaan Daerah	141.800	138.964	136.185	133.461	130.792	128.176
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.837	18.076	16.272	16.024	11.000	11.000
TOTAL	159.638	157.040	152.457	149.486	141.792	139.176

Sumber: Hasil proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sintang,

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1.Permasalahan bidang ekonomi

1. Kecenderungan menurunnya pertumbuhan ekonomi dari 6,47% tahun 2013 menjadi hanya 5,36% tahun 2014.
2. Terlalu dominannya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang lebih dari 25% PDRB dan kecenderungan penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dari 10,62% tahun 2010 menjadi hanya 10,03% tahun 2014 serta stagnan-nya kontribusi sektor perdagangan disekitar angka 17,5%.
3. Tingginya ketimpangan pendapatan penduduk yang ditunjukkan oleh tingginya angka Indeks Gini yang sudah melebihi 0,32 pada tahun 2016.
4. Sebagian besar investasi berada pada sektor primer yang bernilai tambah rendah disebabkan oleh kesulitan investor mengembangkan sektor industri pengolahan sebagai akibat minimnya ketersediaan infrastruktur.
5. Banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif, yaitu sekitar 33% dari total 337 jumlah koperasi.
6. Sulitnya akses Koperasi dan UMKM terhadap modal, dimana data Bank Indonesia Triwulan 1 tahun 2014 menunjukkan bahwa dari Rp 16.149 triliun jumlah kredit produktif di Kalimantan Barat ternyata hanya sekitar Rp 1,25 trilyun atau sekitar 7,74% yang terdistribusi di Kabupaten Sintang yang sebagian besar juga tidak dinikmati oleh koperasi dan UKM.
7. Masih rendahnya daya saing daerah yang antara lain ditunjukkan oleh masih tingginya pengeluaran penduduk untuk makanan dibandingkan non makanan serta kecenderungan menurunnya Nilai Tukar Petani.

4.1.2.Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Rendahnya kemandirian fiskal daerah yang ditunjukkan oleh besaran PAD yang hanya sekitar 4%.
2. Meskipun cenderung menurun tetapi besaran Belanja Tidak Langsung yang lebih dari 50% masih terlalu besar selama tahun 2011 hingga 2015.
3. Rendahnya belanja modal daerah yang hanya sekitar 22% tahun 2014 jauh di bawah rata-rata belanja modal kabupaten/kota secara nasional yang sudah lebih dari 26%.

4.1.3.Permasalahan Infrastruktur Transportasi

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Bina Marga, sebagai berikut:

1. Kondisi panjang jalan dengan kondisi baik masih rendah dan sebagian besar permukaan berupa jalan tanah. Hingga tahun 2014, panjang seluruh jalan Kabupaten Sintang sepanjang 1.708,04 km dengan prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 15,61% (266,59 km), kondisi sedang 34,88% (595,68 km), kondisi rusak 18,54% (316,72 km) dan kondisi rusak berat 30,79% (525,87 km). Sedangkan panjang jalan berdasarkan jenis permukaannya yang paling mendominasi di sepanjang jalan Kabupaten Sintang masih berupa tanah sepanjang 1.418,55 km dan panjang jalan aspal hanya sepanjang 240,45 km.

2. Jumlah jembatan dengan kondisi baik pada tahun 2014 baru sebesar 50,34%, kondisi sedang 25,00%, kondisi rusak 20,00%, dan rusak berat 20,00%.

4.1.4.Permasalahan Bidang Cipta Karya

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang cipta karya, sebagai berikut:

1. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman yang disebabkan belum memadainya sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman. Hingga tahun 2014 dari jumlah rumah tangga se-Kabupaten Sintang sebanyak 72.946 kk, jumlah rumah tangga bersanitasi sejumlah 34.829 kk (47,7%), sedangkan sisanya sejumlah 38.054 kk (52,30%) belum bersanitasi.
2. Prosentase rumah tangga pengguna air bersih PDAM masih rendah yaitu 5,24%.
3. Masih adanya lingkungan pemukiman kumuh pada tahun 2014 sebesar sebesar14,00% atau seluas 3.029 km^2 dari luas wilayah kependudukan seluas 21.365 km2.

4.1.5. Permasalahan Bidang Perumahan dan Tata Ruang

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang perumahan dan tata ruang, sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau. Berdasarkan data tahun 2014, dari total jumlah 72.946 unit rumah di Kabupaten Sintang, jumlah rumah yang layak huni sebanyak 19.000 unit rumah atau sebesar 26,05%.

2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang yang disebabkan tidak tersampaikannya informasi tentang peraturan penataan ruang dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang.

4.1.6. Permasalahan Bidang Perhubungan

1. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi seperti sepeda motor telah mengurangi penggunaan terhadap kendaraan umum dalam kota.
2. Sarana dan prasarana pendukung transportasi darat dan sungai masih minim dalam mendukung lancarnya mode transportasi massal yang nyaman dan aman.
3. Masih lemahnya pengawasan terhadap kendaraan truk dengan tonase melebihi kapasitas.
4. Luasnya jangkauan Kabupaten Sintang dan Kondisi geografis yang sulit.

4.1.7.Permasalahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

1. Hingga tahun 2014, masih terdapat sebanyak 26% Rumah Tangga yang belum menggunakan tenaga listrik.
2. Masih maraknya kegiatan PETI terutama di daerah aliran sungai dan kawasan lahan lainnya yang kurang terkendali.

4.1.8.Permasalahan Bidang Sumber Daya Air

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang sumber daya air, sebagai berikut:

1. Wilayah rancangan yang belum terairi masih cukup luas. Hal ini dapat dilihat dari nilai IA (Indeks Luas Areal) per tahun 2014 sebesar 57% yang artinya dari total area rancangan masih terdapat sekitar 43% yang masih belum terairi.

2. Kondisi infrastruktur jaringan irigasi yang rusak cukup banyak. Berdasarkan data tahun 2014, persentase luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 30,00% (3.921 m^2) dari total luas irigasi kabupaten Sintang seluas 10.592 m^2 atau masih 70% dalam kondisi sedang dan rusak. Sedangkan persentase rasio luas areal persawahan yang mendapatkan pengairan dengan memadai/cukup sebesar 63,00%.

4.1.9. Permasalahan Bidang Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

A. Urusan Ketahanan Pangan dan Keamanan Pangan

1. Adanya pergeseran tata guna lahan dan lapangan usaha petani dari petani tanaman pangan ke petani perkebunan sawit dan karet, dimana dari segi ekonomi dirasakan petani lebih menguntungkan

2. Kurangnya ketersediaan pangan menyebabkan Kabupaten Sintang memasukkan beras, daging, telur dan ikan dari luar Kabupaten Sintang

3. Rendahnya efisiensi usahatani padi yang disebabkan masih dikelolala secara konvensional

4. Terbatasnya tenaga penyuluh di lapangan jika dibandingkan dengan jumlah petani.

5. Tingginya biaya produksi pertanian seperti upah kerja, benih, pupuk, dan pestisida.

6. Belum ada jaminan produk pangan yang beredar pada masyarakat bebas dari cemaran bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan.

7. Belum ada jaminan produk pangan asal hewan yang beredar pada masyarakat memenuhi aspek ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

B. Urusan Tanaman Pangan dan Peternakan

1. Rendahnya produktivitas padi di Kabupaten Sintang. Menurut BPS 2014, produktivitas padi Kabupaten Sintang hanya 2,67 ton per hektar, dibawah produktivitas padi provinsi Kalimantan Barat 3,16 ton per hektar dan jauh dibawah produktivitas padi nasional yaitu 5,17 ton per hektar

2. Turunnya luas panen kedelai di Kabupaten Sintang. Menurut BPS 2014 luas panen kedelai di Kabupaten Sintang tinggal 68 Ha, sedangkan luas panen kedelai tahun 2009 seluas 174 Ha, terjadi penurunan luas panen sebesar 62 %.

3. Turunnya luas panen jagung di Kabupaten Sintang. Menurut BPS 2014 luas panen jagung tahun 2013 adalah 1.770 Ha, sedangkan luas panen jagung pada tahun 2009 adalah 2.272 Ha, terjadi penurunan sekitar 28 %.

4. Turunnya populasi sapi di Kabupaten Sintang. Menurut BPS 2014, populasi sapi di Kabupaten Sintang tahun 2013 sebanyak 8.170 ekor, sedangkan populasi sapi tahun 2009 sebanyak 20.577 ekor, terjadi penurunan sebesar 60 %.

5. Terjadi penurunan populasi ayam ras di Kabupaten Sintang. Menurut BPS 2014, populasi ayam ras pada tahun 2013 adalah 232.900 ekor, sedangkan populasi ayam ras pada tahun 2009 adalah 1.307.465 ekor, terjadi penurunan sebesar 82 %.

6. Sarana dan prasarana wilayah kurang memadai seperti jalan, dan jembatan untuk menjangkau daerah pedesaan yang merupakan pusat kegiatan pertanian, sehingga berdampak pada intensitas pembinaan terhadap petani, sulitnya pendistribusian sarana produksi pertanian dan biaya mobilisasi yang lebih tinggi.

7. Sistem pengairan belum bersifat teknis, masih banyak sawah tadah hujan dan ladang.

8. Terbatasnya kualitas dan kuantias SDM aparatur dan petani sebagai pelaku pembangunan dibidang pertanian.

C. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Adanya kecenderungan penurunan produksi ikan di perairan umum. Pada tahun 2008 produksi ikan di perairan umum sebesar 1.568 ton, akan tetapi pada tahun 2013 turun menjadi 775.9 ton.

2. Minimnya sarana dan prasarana perikanan, sehingga mengakibatkan terhambatnya pengiriman hasil perikanan dalam wilayah Kabupaten Sintang.
3. Tingginya biaya sarana dan prasarana produksi perikanan yang tidak diimbangi dengan harga produksi perikanan mengakibatkan minat usaha peeikanan rendah.

4. Kurangnya sosialisasi kepada para pelaku usaha perikanan yang masih berisifat konvensional.

5. Terbatasnya kualitas dan kuantias SDM aparatur dan petani sebagai pelaku pembangunan di bidang perikanan.

D. Urusan Perkebunan dan Kehutanan

1. Rendahnya harga karet di Kabupaten Sintang yang mencapai Rp. 4.000,-per kg sangat mempengaruhi kesejahteraan petani di Kabupaten Sintang.

2. Belum optimalnya industri hilir karet di Kabupaten Sintang

3. Sulitnya mendapatkan bibit sawit bermutu untuk perkebunan sawit rakyat

4. Kurang memadainya sarana dan prasarana di bidang kehutanan serta kelengkapan peralatan bagi anggota, sehingga

mengakibatkan kegiatan Pelayanan Penatausahaan Kayu kurang optimal

5. Bibit tanaman kayu-kayuan untuk bidang kehutanan kurang mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat masih menginginkan mendapatkan bibit untuk dikelola berupa bibit tanaman karet yang merupakan tanaman MPTS dan Gaharu yang merupakan Tanaman Unggulan Lokal.

4.1.10. Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup

1. Kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi di Kabupaten Sintang. Hal ini menyebabkan gangguan kesehatan, terbatasnya jarak pandang, dan rusaknya keseimbangan ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

2. Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan

3. Kurangnya kesadaran masyarakat mengelola lingkungan hidup secara lestari.

4. Banjir hampir setiap tahun masih terjadi di Kabupaten Sintang

5. Rusaknya lingkungan karena adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI).

6. Adanya indikasi tercemarnya air sungai di Kabupaten Sintang

7. Meningkatnya volume sampah terutama di wilayah perkotaan

4.1.11. Permasalahan Bidang Pendidikan

1. Pemberantasan Buta Huruf belum tuntas. Masih ada sekitar 8,40% dari 265.632 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis. Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Sintang masih tergolong rendah, baru mencapai kelas 1 (satu) SMP. (RLS=6,63 tahun).

2. Angka Partisipasi Murni untuk SMA/SMK/MA masih di kisaran 60%, masih jauh dari capaian maksimal (100%). Di sebagian besar kecamatan (10 kecamatan), capaian APM SMA/SMK/MA masih rendah (kurang dari 50%). Hal yang sama juga terjadi pada APK, dimana masih terdapat tiga kecamatan yang capaian APK SMA/SMK/MA kurang dari 30%. Keadaan mengindikasikan pembangunan pendidikan belum merata. Ketersediaan sarana dan prasarana belum lengkap dan persebarannya tidak merata.

4.1.12. Permasalahan Bidang Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sintang tergolong tinggi, yakni 30 per 1000 kelahiran hidup. Terdapat 4 kecamatan yang AKB-nya tergolong tinggi (lebih dari 20 per 1000 kelahiran hidup). Usia harapan hidup bertambah setiap tahunnya tetapi lambat.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan masih kurang, baik kuantitas maupun kualitas. Demikian juga halnya tenaga medis, terutama dokter, jumlahnya masih kurang untuk melayani penduduk.

4.1.13. Permasalahan Kemiskinan dan Pengangguran

1. Persoalan kemiskinan belum tuntas dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sintang. Jumlah penduduk miskin bertambah dari 31.600 orang (2012) menjadi 39.000 orang (2013).
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung meningkat. Peningkatan TPT ditandai dengan bertambah banyaknya pengangguran terdidik (Tamat SMA dan Perguruan Tinggi). Kualitas angkatan yang bekerja sebagian besar berpendidikan SMP ke bawah dan kebanyakan terserap bekerja di sektor pertanian.

4.1.14. Permasalahan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Ham

1. Permasalahan utama dalam pengelolaan Pendapatan Daerah adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada dalam rangka pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah khususnya yang bersumber dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Permasalahan utama dalam pengelolaan belanja daerah adalah rendahnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia yang ada dalam rangka perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pengeluaran belanja daerah. Perencanaan program dan kegiatan yang belum selaras dengan Renstra dan Renja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengelolaan keuangan daerah yang belum sesuai dengan ketentuan dan pertanggungjawaban belanja yang sering terlambat
3. Belum tersedianya data yang akurat tentang jumlah masyarakat yang berolahraga. Hal tersebut disebabkan belum maksimalnya ketersediaan wadah yang dapat menampung minat olahraga serta belum adanya pembinaan yang sangat memadai terhadap prestasi masyarakat yang berolahraga
4. Masih kurangnya fasilitas publik termasuk lapangan terbuka, taman rekreasi yang memberi kesempatan kepada warga masyarakat melakukan aktivitas olahraga. Proses pendidikan olahraga dasar, di semua jenjang yang berorientasi pada peningkatan mutu olahraga belum dimonitor dan dievaluasi secara optimal.

5. Terbatasnya personil satuan polisi pamong praja yang bertugas di lapangan dan masih banyak yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja. Selain itu adanya indikasi kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat masih rendah. Hal ini terlihat masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga berdampak pada tidak kondusif situasi dalam masyarakat
6. Masih kurangnya kegiatan-kegiatan yang berbasis Keagamaan dalam rangka meningkatkan moralitas dan memperkokoh kerukunan beragama di Kabupaten Sintang.
7. Terkait dengan batas yuridis teritorial daerah, sampai saat ini belum adanya ketegasan batas wilayah perbatasan antara Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. Hal tersebut disebabkan kewenangan penyelesaian batas antara Kabupaten diwilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian, terdapat beberapa permasalahan batas, baik antar desa/dusun, antar Kecamatan yang cenderung mengarah pada timbulnya konflik dalam masyarakat terutama masyakarat yang berbatasan langsung
8. Masih rendahnya pemahaman aparatur Desa tentang Tugas Pokok dan Fungsi, sehingga menimbulkan banyak permasalahan/kasus antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD dan Masyarakat.
9. Belum tertatanya obyek wisata budaya sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Sintang. Selain itu juga belum terbentuknya payung hukum dalam pemberian rekomendasi perizinan dan pengawasan usaha bidang kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Sintang.
10. Belum maksimalnya pembinaan pengembangan terhadap potensi seni di Kabupaten Sintang.

4.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

4.2.1. Isu Strategis Bidang Ekonomi

1. Belum berkembangnya investasi sektor sekunder sebagai alternatif pengembangan investasi daerah.
2. Masih relatif tingginya Belanja Tidak Langsung
3. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif.
4. Rendahnya akses Koperasi dan UMKM terhadap modal.
5. Kecenderungan turunnya Nilai Tukar Petani

4.2.2. Isu Strategis Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Rendahnya kemandirian fiskal daerah yang ditunjukkan oleh besaran PAD yang hanya sekitar 4%.
2. Meskipun cenderung menurun tetapi besaran Belanja Tidak Langsung yang lebih dari 50% masih terlalu besar, apalagi sebagian besar merupakan belanja pegawai.

3. Rendahnya belanja modal daerah yang hanya sekitar 22% tahun 2014 jauh di bawah rata-rata belanja modal kabupaten/kota secara nasional yang sudah lebih dari 26%.

4.2.3. Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup

1. Pembukaan lahan perkebunan rakyat dan kegiatan berladang secara tradisional masih dengan membakar

2. Rendahnya kesuburan tanah dan mahalnya pembukaan lahan untuk pertanian menyebabkan masyarakat melakukan pembakaran

3. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan

4. Masih lemahnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan

5. Masih adanya penambangan emas tanpa izin (PETI) menyebabkan berbagai kerusakan dan pencemaran. Perubahan bentang alam, kerusakan hutan, erosi, dan pencemaran air baik oleh merkuri maupun bahan terlarut lainnya.

6. Semakin menurunnya daya dukung lingkungan khususnya resapan air, keanekaragaman hayati, fisik dan biologi tanah.

4.2.4. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Pertanian

A. Urusan Ketahanan Pangan

1. Masih tingginya konsumsi beras per kapita per tahun. Konsumsi beras per kapita per tahun berkisar antara 115 kg - 139 kg.

2. Belum optimalnya sarana irigasi untuk peningkatan produksi dan produktivitas padi

3. Meningkatnya jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan laju peningkatan produksi pangan menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas.

4. Adanya kecenderungan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan tanaman perkebunan.

B. Urusan Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

1. Kurangnya benih padi unggul yang bersertifikat dan belum adanya usaha penangkaran benih padi berbasis masyarakat untuk memenuhi kebutuhan benih padi yang berkualitas.

2. Usaha pertanian dan peternakan rakyat sebagian besar dikelola secara konvesional sehingga kurang efisien dan produktivitasnya relatif rendah.

3. Meningkatnya serangan hama dan penyakit baik terhadap tanaman maupun peternakan dan masih rendahnya upaya pembebasan penyakit tanaman dan hewan.

4. Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian menyebabkan rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, baik untuk tanaman padi maupun jagung.

5. Kurangnya bibit unggul dengan harga yang terjangkau dan rendahnya teknik pengembangan populasi ternak untuk pengembangan bidang peternakan.

6. Belum berkembangnya industri pakan ternak lokal untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pakan ternak untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak di Kabupaten Sintang.

7. Terpencarnya lahan usaha tani padi dan jagung tidak dalam suatu kawasan menyebabkan sulitnya pengelolaan usaha tani secara efisien, baik untuk pengolahan tanah sampai pengendalian hama dan penyakit.

C. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Ketergantungan sumber air dari hujan menyebabkan tidak kontinyunya ketersediaan air untuk budidaya perikanan. Pada musim kemarau persedian air kurang, baik debit air di sungai maupun tempat penampungan air lainnya.

2. Menurunnya kualitas air untuk budidaya perikanan. Berkembangnya perkebunan sawit dan maraknya penambangan emas menyebabkan terjadinya pencemaran air di sungai. Polutan yang mencemari sungai di atas ambang batas menyebabkan gangguan pertumbuhan ikan.

3. Kurang tersedianya pakan ikan lokal yang berkualitas menyebabkan nelayan membeli pakan yang bersasal dari luar daerah dengan harga yang cukup tinggi.

4. Kurang tersedianya bibit unggul ikan, baik kualitas, kuantitas maupun harganya.

5. Kurang optimalnya ketersedian sarana dan prasarana produksi perikanan di Kabupaten Sintang

E. Urusan Perkebunan dan Kehutanan

1. Turunnya minat petani mengembangkan karet. Turunnya harga karet di pasaran dunia berdampak terhadap kesejahteraan petani karet. Rendahnya harga karet juga menyebabkan kurangnya perawatan terhadap tanaman sehingga meningkatkan tanaman yang tua/rusak.

2. Kurangnya industri hilir karet di Kabupaten Sintang. Adanya industri ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk mentah karet.

3. Kurang tersedianya bibit sawit yang berkualitas dan banyaknya kasus bibit sawit palsu pada perkebunan sawit rakyat sangat merugikan petani.

4. Kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun menyebabkan meningkatnya kerusakan hutan.

5. Meingkatnya luas lahan kritis yang disebabkan karena erosi dan kebakaran hutan, sehingga lahan tersebut berkurang fungsinya sebagai sumber unsur hara dan fungsi tata air.

6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian dan fungsi ekositem hutan.

4.2.5. Isu Strategis Bidang Infrastruktur

1. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang di Kabupaten Sintang sudah sangat darurat mengingat rendahnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik serta sebagian besar permukaan jalan masih berupa permukaan tanah (1.418,55 km).

2. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman disebabkan belum memadainya sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman terutama persampahan, air bersih, air limbah, dan sanitasi.

3. Masih rendahnya kualitas dan volume air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya.

4. Belum tersedianya dokumen-dokumen turunan dari RTRW Kabupaten Sintang.

5. Belum memadainya kapasitas pembangkit dan jaringan listrik serta belum optimalnya pemanfaatan potensi energi lokal seperti tenaga air (PLTA dan Mikro Hidro) dan batu bara, maupun pengembangan energi alternatif lainnya.

4.2.6.Isu Strategis Bidang Kesejahteraan Sosial

1. Masih belum tuntasnya pemberantasan buta huruf.
2. Masih rendahnya APK dan APM serta masih banyak sarana dan prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan
3. Belum meratanya pembangunan kesehatan ke seluruh wilayah kecamatan guna mengurangi Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu serta masih rendahnya kesadaran prilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
4. Masih terbatasnya lapangan kerja.

4.2.7. Isu strategis Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM

1. Kemampuan kelembagaan merupakan dimensi penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah seperti, organisasi, kebijakan, manajemen, sistem akuntabilitas dan budaya organisasi masih belum mampu beradaptasi dengan tuntutan, terlebih lagi dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
2. Kemampuan *Sumber Daya Manusia yang terkait dengan* wawasan, *skill* dan profesionalisme, potensi dan motivasi para aparatur birokrasi pemerintahan daerah masih rendah.
3. Masih lemahnya kemampuan mengelola *Jaringan Kerja* ***(****network****)*** dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan di daerahnya, sehingga berimplikasi kepada masih belum dapat memaksimalkan hubungan kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan.
4. Kemampuan mengembangkan potensi daerah masih belum dipacu secara signifikan, sehingga tujuan dari sistem otonomi daerah yaitu kemandirian daerah belum dapat tercapai.
5. Penataan tata peraturan daerah selama lima tahun terakhir belum disusun dalam kerangka berpikir demi kesejahteraan masyarakat, dengan mengedepankan azas responsibilitas, aksesibilitas dan aspiratif.
6. Perlunya pemekaran Provinsi Kapuas Raya dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk di wujudkan. Visi pada umumnya digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi pembangunan dalam dokumen RPJMD ini merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh *stakeholders* di Kabupaten Sintang dalam periode 2016-2021.

Dalam perumusannya, visi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan keinginan luhur rakyat Kabupaten Sintang untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu-isu strategis daerah dalam lima tahun mendatang, serta dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang tahun 2005-2025 dengan Visi "KABUPATEN SINTANG MAJU, MANDIRI, dan SEJAHTERA". Berdasarkan hal itu, maka Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2021"

Cerdas adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, dan Pembangunan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagi upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

Sehat adalah keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan

terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan *stakeholders* dalam pembangunan kesehatan.

Maju adalah keadaan dimana Masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk beraskses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Religius adalah keadaan dimana Masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan di capai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat, (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3) Pembangunan dan atau Rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

Sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata. Beberapa Indikator Kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, Jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, Persentase Koperasi dan UMKM Aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) Per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menegah dan besar.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur, (2) penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

5.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Pernyataan tujuan dan sasaran dipaparkan pada satu matriks berkaitan dengan setiap misi, sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021		
Misi 1	Tujuan	Sasaran
Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal	1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal.	1. Meningkatnya angka melek huruf. 2. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun. 3. Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat. 4. Meningkatnya kualitas materi ajar budaya dan bahasa lokal dalam kurikulum pendidikan dasar. 5. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi.
VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021		
Misi 2	Tujuan	Sasaran
Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak. 2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. 3. Meningkatnya prestasi olahraga untuk mendukung pola hidup sehat.
VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021		
Misi 3	Tujuan	Sasaran
Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. 2. Meningkatkan	1. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang. 2. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan

dan sumber daya daerah	kualitas lingkungan hidup.	rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya. 3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah) 4. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan. 5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 6. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.
VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021		
Misi 4	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial	1. Mewujudkan kualitas kehidupan keagamaan, toleran dalam kemajemukan masyarakat.	1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama. 2. Meningkatnya kerukunan antar ummat beragama.
VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021		
Misi 5	Tujuan	Sasaran
Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. 2. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.	1. Meningkatnya perekonomian daerah. 2. Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan daerah. 3. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah. 4. Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal. 5. Menigkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat. 6. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa.

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021		
Misi 6	Tujuan	Sasaran
Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur. 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. 3. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah. 4. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.	1. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur daerah. 2. Meningkatnya objektivitas penempatan pejabat daerah. 3. Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah. 4. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. 6. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, stabilitas keamanan dan ketertiban umum. 7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa. 8. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD.

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk mewujudkan visi dr. H. Jarot Winarno, M.Med. PH dan Drs. ASKIMAN, MM selaku Bupati dan Wakil Bupati Sintang periode tahun 2016-2021.

Dengan demikian, arah kebijakan akan menjadi penuntun terhadap program-program indikatif yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021			
Misi 1: Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal.	1. Meningkatnya angka melek huruf. 2. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun. 3. Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat. 4. Meningkatnya kualitas materi ajar budaya dan bahasa lokal dalam kurikulum	***Pro Education**:* Strategi yang berorientasi pada pembangunan Pendidikan Formal dan Informal di Masyarakat.	1. Menurunkan angka buta hurup mendekati nol. 2. Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun. 3. Meningkatkan kualitas Pendidikan Menengah. 4. Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Pengembangan Sarana dan

	pendidikan dasar. 5. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi.		Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah. 6. Pengembangan Nilai Budaya dan Pengelolan Keragaman Budaya 7. Pengembangan pendidikan informal.
VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021			
Misi 2: Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak serta penduduk miskin.	***Pro Health**:* Strategi yang berorientasi pada peningkatan Kesehatan Masyarakat secara menyeluruh	1. Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan. 2. Perbaikan gizi Masyarakat. 3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. 4. Peningkatan layanan Kesehatan Penduduk Miskin. 5. Pengadaan Tenaga Kesehatan. 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan.
	2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.		1. Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi. 2. Menurunkan perkawinan remaja.

			3. Peningkatan kualitas program Keluarga Berencana. 4. Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan Perempuan.
	3. Meningkatnya prestasi olahraga untuk mendukung pola hidup sehat.		1. Peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya berolahraga. 2. Peningkatan prestasi atlet. 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan olahraga. 4. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021			
Misi 3: Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur.	1. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang. 2. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi	***Pro Public Good*:** Strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas barang publik	1. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan kebutuhan jalan dan jembatan di pedesaan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar kecamatan dan desa. 2. Mengembangkan sarana dan prasarana

	kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya. 3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah) 4. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.		perhubungan (darat, udara dan sungai) dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa. 3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. 4. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menciptakan hunian yang layak, aman, sehat, nyaman, dan produktif 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman perdesaan. 6. Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan. 7. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi pemakaian energi fosil.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.		1. Peningkatan pengendalian kualitas air dan tanah.

	2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.		2. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. 3. Peningkatan upaya penegakan hukum Lingkungan Hidup. 4. Peningkatan kapasitas SDM dan institusi lembaga Lingkungan Hidup. 5. Mempertahankan kawasan hutan seluas minimal 30% dari luas Kabupaten Sintang sesuai dengan RTRW daerah. 6. Mengarahkan aktivitas pembangunan sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.
VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021			
Misi 4: Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan social			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Mewujudkan kualitas kehidupan keagamaan, toleran dalam kemajemukan masyarakat.	1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.	***Pro Empowering***: Strategi yang berorientasi pada pelibatan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai subyek pembangunan	1. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan 2. Meningkatkan fasilitas (sarana prasarana) keagamaan.

	2. Meningkatnya kerukunan antar ummat beragama.		1. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama. 2. Meningkatkan komunikasi antar organisasi keagamaan. 3. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan harmonisasi masyarakat Kabupaten Sintang.
VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021			
Misi 5: Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan.	1. Meningkatnya perekonomian daerah. 2. Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal. 3. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah. 4. Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis	***Pro Growt**:* Strategi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD. 2. Penyederhanaan regulasi dan tarif pajak daerah agar lebih kompetitif dalam menarik investasi. 3. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi produk unggulan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

	keunggulan lokal.		4. Penetapan sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal serta memfasilitasi pembangunan sentra pertumbuhan ekonomi tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung.
	5. Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat.		1. Meningkatkan jumlah wirausaha baru yang memiliki daya saing, serta pengembangan inkubator bisnis dan UMKM yang dilaksanakan bersama seluruh stakeholders, termasuk perbankan dan lembaga keuangan non bank dan pelaku bisnis. 2. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan permodalan bagi UMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama kolateral perbankan dan lembaga keuangan mikro serta lembaga keuangan non perbankan.

2. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa.		1. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan bermutu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi berbasiskan sumber daya lokal (desa). 2. Meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan. 3. Menetapkan Peraturan Daerah tentang lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan dan asset desa. 5. Melaksanakan pelatihan bagi masyarakat desa dan aparatur pemerintahan desa untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian. 6. Melakukan pendampingan dalam pembangunan masyarakat desa.

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021			
Misi 6**:** Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur.	1. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur daerah. 2. Meningkatnya objektivitas penempatan pejabat daerah.	***Pro Good Gavernance****:* Strategi yang berorientasi pada Peningkatan Kemanpuan Aparatur Birokrasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pendidikan. 2. Mengembangkan SDM aparatur agar lebih kompeten, professional, dan memiliki integritas. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengisian pejabat daerah melalui keterwakilan tokoh masyarakat dalam panitia seleksi jabatan.
2. Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1. Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.		1. Penetapan APBD tepat waktu. 2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, ditandai dengan diperolehnya opini WTP. 3. Pengawasan internal, eksternal, dan fungsional dalam upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan	1. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam		1. Melaksanakan agenda reformasi birokrasi secara konsisten dan

daerah.	penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. 3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, stabilitas keamanan, dan ketertiban umum.		berkelanjutan. 2. Memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati. 3. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. 4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. 5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum. 4. Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa. 2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD.		1. Meningkatkan kapasitas Aparat Desa dan BPD dalam Tata Kelola Pemerintahan desa, seperti kemampuan dalam perumusan peraturan desa, perencanaan desa, penyusunan anggaran desa. 2. Meningkatkan Kapasitas Aparat Desa dan BPD dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset desa, seperti penyusunan

			APBDes, pelaporan keuangan desa, pengakuntasian dana desa. 3. Meningkatkan ketersediaan kantor desa dan sarana pendukung lainnya, seperti perangkat teknologi informasi, jaringan internet desa, dan infrastruktur desa lainnya. 4. Melaksanakan pengelolaan pembangunan desa yang partisipatif dan demokratis.

4.2. Penggerak Utama Pembangunan Daerah

Disamping strategi dan arah kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, upaya mewujudkan visi-misi dr. H. Jarot Winarno, M.Med. PH dan Drs. ASKIMAN, MM selaku Bupati dan Wakil Bupati Sintang periode tahun 2016-2021 juga perlu diperkuat dengan menetapkan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah yang terdiri dari: membangun wilayah dari pinggiran, penataan dan pemekaran wilayah, aksesibilitas terhadap sumber daya listrik dan energi lainnya, hilirisasi produk, kegawatdaruratan infrastruktur transportasi, dan tata kelola pemerintahan. Penjabaran lebih detail tentang penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 6.2. berikut ini.

TABEL 6.2. PRIME OVER (PENGGERAK UTAMA) PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016–2021

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
1	**MEMBANGUN WILAYAH DARI PINGGIRAN**	Mengembangkan Wilayah Perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan sebagai penggerak pembangunan wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas public pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil	Melaksanakan berbagai program pembangunan yang dimulai dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil	• Pada bidang transportasi dan prasarana wilayah lainnya, diarahkan untuk membangun, meningkatkan dan memelihara prasarana transportasi. • Pada bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan. • Pada bidang pendidikan di arahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di kawasan perbatasan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta penyelenggaraaan pendidikan. • Pada bidang aparatur pemerintah di arahkan	• Fungsionalnya sarana dan prasarana transportasi darat dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang. • Tersedianya fasilitas serta prasarana pendidikan padawilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil. • Tersedianya fasilitas serta prasarana kesehatan pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil. • Tersedianya fasilitas serta prasarana pengembangan

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
					pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan aparatur serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. • Pada bidang ekonomi diarahkan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pembinaan, pelatihan dan penyediaan sarana produksi serta pelatihan ekonomi kreatif. • Pada bidang social budaya diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana kehidupan beragama, pengembangan budaya dan kesenian, pembinaan ideologi; memperkuat poleksosbudhankam.	ekonomi pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil. • Tersedianya fasilitas serta prasarana pemerintahan pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil.
2	**PENATAAN DAN PEMEKARAN WILAYAH**	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui	• Membuka isolasi wilayah • Meningkatkan hasil guna dan daya guna	Percepatan penyelesaian sengketa batas wilayah serta percepatan fasilitasi/	• Melaksanakan dan memfasilitasi sengketa batas wilayah baik antara Desa dan antar Kecamatan dan antar Kabupaten	• Penyelesaian 4 segmen batas wilayah (mungguklawang-semitau; bongkongbaru – sunsong; Kapuas kiri

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
		penataan dan pemekaran wilayah	pelayanan umum *(public service)* di Kabupaten Sintang secara optimal. • Terciptanya keseimbangan fungsi dan intensitas penguunaan ruang/wilayah di Kabupaten Sintang. • Terciptanya percepatan pembangunan dan pengaturan perwilayahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang.	pelaksanaan pemekaran wilayah kecamatan, kabupaten dan Provinsi Kapuas Raya.	• Melaksanakan pemekaran wilayah Kecamatan • Memfasilitasi proses pemekaran Kabupaten Baru di Kabupaten Sintang • Memfasilitasi proses pembentukan Provinsi baru di wilayah Timur Kalimantan Barat	hulu – simbak jaya serta merah aria – menukung) • Pembentukan kecamatan baru (15 Kecamatan) • Pembentukan kabupaten Ketungau • Fasilitasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
			• Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Sintang yang diharapkan akan mengeliminir ketimpangan pembangunan perwilayahan. • Terciptanya pemerataan distribusi penduduk pada setiap kawasan/ wilayah di Kabupaten Sintang.			
3	**AKSESBLITAS TERHADAP SUMBER DAYA LISTRIK DAN ENERGI LAINNYA**	Terwujudnya akses masyarakat terhadap sumber daya listrik secara memadai	• Memperbaiki kekurangan tenaga listrik yang ada. • Memperbaiki & meningkatkan system ketenagalistrikan, serta	Pengembangan listrik dan jaringannya	• Penambahan kapasitas pembangkit listrik & penambahan jaringan listrik. • Pemanfaatan potensi energy local seperti tenaga air (PLTA & Mikro Hidro) dan batubara, maupun	• Listrik nyala minimal 12 Jam Sehari • Jumlah desa yang dapat dialiri listrik • Jumlah masyarakat yang menikmati listrik

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
			melakukan efisiensi pembangkit, transmisi dan distribusi mulai dari hulu sampai hilir. • Pengaturan sisi konsumsi/ permintaan tenaga listrik melalui upaya penghematan penggunaan tenaga listrik (demand side management). • Mencari dan memanfaatkan sumber-sumber energi baru yang tersedia di daerah seperti halnya Tenaga Air ataupun Tenaga Uap.		pengembangan energi alternatif lainnya.	

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
4	**HILIRISASI PRODUK**	Meningkatnya kegiatan industri pengolahan berbasis hasil produksi pertanian dan perkebunan, dan berkembangnya kegiatan industri kerajinan/ rumahtangga, serta industri kecil dan menengah disertai pengembangan pasar dan kerjasama pola kemitraan	Terwujudnya keberadaan industri pengolahan berbasis hasil produksi pertanian dan perkebunan, industri kerajinan/ rumahtangga, serta industri kecil dan menengah	• Melaksanakan promosi investasi di bidang industri pengolahan • Perbaikan kualitas dan peningkatan pelayanan perizinan di bidang industri pengolahan. • Melakukan kajian pembentukan BUMD yang bergerak di bidang industri pengolahan.	• Pengembangan industri pengolahan dan industri pendukung lainnya, termasuk pengembangan industri kerajinan/ rumah tangga, industri kecil dan menengah.	• Pabrik pengolahan bahan baku karet • Pabrik pengolahan bahan baku sawit • Terbentuknya BUMD yang bergerak di bidang industri pengolahan. • Industri pengolahan aneka makanan dan minuman, termasuk juga pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan buah-buahan lokal/ musiman. • Industri tenun dan anyaman

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
5	**KEGAWATDARURATAN INFRASTRUKTUR (TRANSPORTASI)**	Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang	Melaksanakan berbagai program dalam rangka penanganan kegawatdaruratan transportasi khususnya dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang.	• Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dari ambalau–sintang • Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dari perbatasan Malaysia-Sintang • Percepatan pembangunan fisik tebelian air port	• Jalan darat dari Ambalau–Sintang fungsional • Jalan darat dari perbatasan Malaysia–Sintang fungsional • Seluruh wilayah kecamatan dapat ditempuh minimal dengan kendaraan minibus • Ruas jalan dalam kondisi rusak berkurang • Operasional bandara tebelian
6.	**TATA KELOLA PEMERINTAHAN**	Menciptakan birokrasi pemerintah Kabupaten Sintang yang professional dengan karakteristik adaptif,	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.	Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik; melakukan penataan dan	• Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi SKPD dengan paradigma dan peran baru.	• Opini BPK (WTP) selama 5 tahun berturut-turut • Semua temuan telah ditindaklanjuti • Semua program selesai dengan baik; • Semua perizinan

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
		berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.		penguatan organisasi tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan public, *mind set* dan *culture set;* mengembangkan mekanisme control yang efektif.		selesai dengan cepat dan tepat; • Komunikasi dengan publik baik; • Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; • Penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan;

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum

1. Bidang Pendidikan:

Kebijakan umum dalam proses pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan secara merata

2. Bidang Kesehatan:

Kebijakan umum dalam proses pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan secara merata

3. Bidang Infrastruktur:

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang diarahkan untuk;

1. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan kebutuhan jalan dan jembatan menuju perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka meningkatkan konektivitas menuju kota Sintang serta meningkatkan konektivitas antar kecamatan dan desa.
2. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik).
3. Mengembangkan sistem transportasi multi moda dengan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan (darat, udara dan sungai) dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa.
4. Meningkatkan kontribusi kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur.

4. Bidang Politik, Ketertiban dan Ketentraman:

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia serta memfungsikan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, pejabat struktural dan fungsional yang terkait dengan penegakan peraturan daerah guna mewujudkan situasi dan kondisi yang tertib dan aman dalam masyarakat.
2. Menyusun sistem pembinaan penegakan peraturan daerah/keputusan bupatiyang efektif dan efisien dalam bentuk petunjuk pelaksanaan/teknis operasional dilapangan.

3. Turut serta menjaga dan melindungi upaya tindakan hukum segenap aparat penegak hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Menindak lanjuti solusi-solusi penegakan peraturan daerah.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, pendidikan dan pelatihan kebencanaan berbasis masyarakat. yang terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
6. Peningkatan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat.
7. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi.
8. Meningkatkan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat dan meminimalisir berbagai bentuk penyakit masyarakat serta konflik sosial.

5. Bidang Sosial

1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berakhlak mulia, melalui kebijakan peningkatan penyelenggaraan pendidikan pendidikan agama, pembinaan dan kerukunan hidup beragama.
2. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka sinergi pembangunan antar pemangku kepentingan pembangunan.
3. Membangun kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran serta dan prestasi pemuda, keolahragaan serta pelestarian seni dan budaya lokal.

6. Bidang Lingkungan Hidup

Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran secara terpadu dengan menata, memanfaatkan, mengembangkan, memelihara, memulihkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

7. Bidang tenaga kerja

Kebijakan umum di bidang ketenagakerjaan adalah perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja

8. Bidang Pengendalian penduduk dan KB

Kebijakan umum di bidang Pengendalian Penduduk adalah Peningkatan Cakupan Pemakaian Kontrasepsi dan Pemerataan Persebaran Penduduk.

9. Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian

Meningkatkan ketahanan pangan dan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan bermutu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi berbasiskan pada IPTEK dan sumber daya lokal.

10.Bidang Ekonomi

Untuk mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat(**Misi-5**), maka peningkatan ekonomi dan investasi difokuskan pada kebijakan sebagai berikut:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
2. Optimalisasi strategi perencanaan dengan mengembangkan kawasan sebagai simpul pertumbuhan.
3. Pengembangan Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif dan kewirausahaan masyarakat.
4. Pemanfaatan keunggulan komparatif dan penciptaan keunggulan kompetitif dalam rangka menghadapi pasar/ persaingan bebas.
5. Peningkatan iklim usaha yang memberi kepastian berusaha dan kesempatan berusaha.
6. Pengembangan dan penguatan sumber daya dalam mendorong pembangunan sektor industri.
7. Peningkatan peran serta industri kecil dan menengah dalam rangka pemberdayaan ekonomi daerah.
8. Pengembangan sistem kota dengan memantapkan fungsi sebagai wilayah pengembangan dan pembangunan.
9. Peningkatan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan potensi ekonomi.
10. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
11. Peningkatan sarana dan prasarana untuk latihan ketrampilan.
12. Revitalisasi jaringan distribusi dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
13. Perluasan jaringan dan penyebaran informasi perdagangan/bisnis.
14. Pengembangan daya saing dan peningkatan iklim investasi yang kondusif.
15. Pengembangan promosi investasi untuk mengoptimalkan potensi sumber daya daerah.

11.Bidang Tata Kelola Pemerintahan

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan efisien.
2. Pelayanan administrasi umum yang prima (berdaya tanggap, kepastian, dapat dipercaya, ramah).
3. Pengawasan aparatur untuk menjamin kepercayaan (*trust*) dunia usaha dan masyarakat.

4. Penegakan kepastian pelaksanaan regulasi daerah.
5. Pengembangan sistem administrasi dan pendataan yang akurat dan akuntabel untuk mendukung perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
6. Pengembangan sistem komunikasi dan informasi pembangunan dan pemerintahan yang transparan, cepat, dan akuntabel.
7. Pengembangan kapasitas SKPD untuk menjalin kerjasama pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kemampuan pembiayaan pelayanan publik.
8. Penguatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

7.2. Program Prioritas

1. Bidang Pendidikan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Manajemen Pelayanan Pendidikan
6. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2. Bidang Kesehatan

1. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
2. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
3. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
4. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

3. Bidang Infrastruktur:

1. Program Pembangunan Jalan danJembatan;
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
3. Program Pengembangandan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
4. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaa n
5. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Talud/Bronjong
6. Program Pembangunan Sarana/Prasarana serta Fasilitas Umum Perumahan

7. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
8. Program Legalitas Tata Ruang;
9. Program Perencanaan Tata Ruang
10. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
11. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
12. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
13. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi;

4. Bidang tenaga kerja:

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2. Program Bursa Kerja Online
3. Peningkatan Kualitas dan Produktibvitas Tenaga Kerja
4. Program Perlindungan Ketenagakerjaan

5. Bidang Pengendalian penduduk dan KB:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
2. Program Keluarga Berencana
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

6. Bidang Lingkungan Hidup:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3. Program Kinerja Pengelolaan Persampahan
4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5. Program Peningkatan Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran

7. Bidang pangan dan pertanian:

1. Program peningkatan ketahanan pangan
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ perkebunan.
3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
4. Program peningkatan ketahanan pangan, pertanian/perkebunan
5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
6. Program Pembangunan Perkebunan

8. Bidang Perencanaan Pembangunan :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

10. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif pada UMKM

11. Bidang Penanaman Modal Daerah:

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

12. Bidang Perdagangan:

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

13. Bidang Perindustrian:

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

14. Program Bidang Sosial Budaya

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Program Penataan Kawasan Budaya
3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
4. Program Pengembangan Nilai Budaya
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga
6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
7. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
9. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

15. Program Bidang Tata Kelola Pemerintahan

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH
5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
7. Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

16. Program Bidang Politik, Ketertiban dan Kententraman:

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Tabel 7.1. Keterkaitan Sasaran, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR CAPAIAN				PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Meningkatnya angka melek huruf.	1 Menurunkan angka buta huruf mendekati nol.	Angka melek huruf	%	88,69	93,92	Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Dikbud
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jiwa	232.337	239.014			
2 Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun.	2 Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun.	APS D/MI	%	97,35	99,15	Pendidikan Dasar 9 Tahun	Pendidikan	Dinas Dikbud
		APS MP/MTs	%	53,84	78,84			
		APK D/MI	%	122,36	122,42			
		APK MP/ MTs	%	101,35	101,41			
		APM D/MI	%	96,29	100			
		APM MP/ MTs	%	74,4	83,58			
		ARLB	Tahun	6,63	8			
		APT	%	4,7	6,2			
		APuS D/MI	%	0,23	0			
		APuS MP/MTs	%	0,41	0,15			
		AL D/MI	%	100	100			
		AL MP/ MTs	%	99.97	100			
		AM D/MI	%	85,93	100			
		AM MP/ MTs	%	74,01	100			
	3 Meningkatkan kualitas Pendidikan Menengah.	APM MA/MA				Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Dikbud
	4 Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jiwa	3.287	6.816		Pendidikan	Dinas Dikbud
	5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah.	Ratio Ketersediaan Sekolah SD	0	0,13	0,13	Pendidikan Dasar 9 Tahun	Pendidikan	Dinas Dikbud
		Ratio Ketersediaan Sekolah SMP	0	0,38	0,25			
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	13,65	75			
		Sekolah pendidikan MP/MTs kondisi bangunan baik	%	22,28	80			
3 Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat.	Peningkatan budaya dan minat baca masyarakat	Jumlah perpustakaan	Unit	66	66	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan / TBM Mobile	Perpustakaan	Kantor Arsip dan Perpustakaan
		Jumlah Pengunjung	Org	1.642	2.751			
		Jumlah Buku Yang Tersedia	Eks	22.023	31.636			
4 Meningkatnya nilai budaya lokal.	6 Pengembangan Nilai Budaya dan Pengelolan Keragaman Budaya	Jumlah grup kesenian	Grup	32	40	Pengembangan Nilai Budaya	Budaya	Dinas Dikbud
		Jumlah gedung kesenian	Unit	2	5	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Budaya	Dinas Dikbud

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	even	2	2	Penataan Kawasan Budaya	Budaya	Dinas Dikbud
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	2	10			
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	15	15			
		Jumlah Organisasi Kebudayaan	buah	7	15			
5 Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi.	7 Pengembangan pendidikan informal.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):	%	49,7	80	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Dikbud
	8 Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin	Beasiswa Siswa Miskin	Siswa			Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Dikbud
6 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak serta penduduk miskin.	9 Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan.	Angka usia harapan hidup	Tahun	70,95	72,45	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Angka kelangsungan hidup bayi	Per 100 kh	970	980	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90,49	95			
		Persentase balita gizi buruk	%	2,96	2	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100			
		Rasio posyandu per satuan balita	Per 100 balita	0, 96	1,25			
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	79,12	100			
		Cakupan kunjungan bayi	%	77,41	90			
	10 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	60,07	90	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11 Peningkatan layanan Kesehatan Penduduk Miskin.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	16,64	30	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	12 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	75,47	85	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	13 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan.	Peningkatan Klasifikasi RSUD Ade M. Djoen	Tipe	Tipe C	Tipe B	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rs/rs Jiwa	Kesehatan	RSUD Ade M. Djoen
		Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen	Tipe	Dasar	Paripurna			
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	19,68	22,7	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	0,76	1,26			
		Cakupan Puskesmas	%	38,34	75			
		Cakupan Puskesmas Pembantu	%	68,83	80			
7 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.	14 Peningkatan Kualitas Program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rata-rata jumlah anak per keluarga	jiwa	2,9	2,5	Program Keluarga Berencana	KB dan KS	BKBPPPA
		Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	% Aseptor KK	73,24 53392 19659	76,1 56392 19119	Program Pelayanan Kontrasepsi	KB dan KS	BKBPPPA
8 Meningkatnya budaya olahraga untuk mendukung pola hidup sehat.	15 Peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya berolahraga.	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	30	50	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	Disporaparekraf
	16 Peningkatan kapasitas kelembagaan olahraga.	Jumlah Klub Olahraga	Klub	408	458	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	Disporaparekraf
		Jumlah organisasi olahraga	organisasi	43	53			
	17 Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana olahraga.	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	18	28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas PU
		Lapangan olahraga	Buah	408	458			
9 Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang.	18 Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar kecamatan dan desa.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	25,92%	60,18%	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Banyaknya Jembatan Rangka Baja	%	9,8	37,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Panjang jalan dilalui Roda 4	%	91,14	100			
		Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	17,32	22,78	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatam	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Proporsi Panjang Jembatan Kayu Dalam Kondisi Baik dan Sedang	%	90,2	62,5			
		Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	4,49	7,96	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	%	91,3		Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
	19 Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan (darat, udara dan sungai) dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Org	526972	593.456	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	Dishubkominfo
		Jumlah Izin Trayek	Trayek	72	75			
		Jumlah Uji KIR Angkutan umum	Unit	83	104			
		Angkutan Darat	Unit	359	374			
		Kepemilikan KIR angkutan umum	%	34	43			
		Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Tahun	0,5	0,5			
		Biaya pengujian kelayakan angkutan umum						
		Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Org	526972	593.456			
		Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	Org	526972	593.456			
		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3;1;5		Pembangunan Sapras Perhubungan	Perhubungan	Dishubkominfo
		Pemasangan Rambu-rambu	%	44,27	95	Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas	Perhubungan	Dishubkominfo

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya.	20 Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air.	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	48,67	50,89	Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik\	Ha	5.156	5.391			
11 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	21 Pengembangan perumahan dan permukiman untuk menciptakan hunian yang layak.	Rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)	%	4,5	6,6	Pembangunan Sarana/Prasarana serta Fasilitas Umum Perumahan Dan Pemukiman	Perumahan	Dinas PU
		Persentase Penduduk berakses air minum = 4,5 %				Penyediaan dan pengelolaan air baku	Perumahan	Dinas PU
		Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0	0,34	0,31	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	DKPPK
		Persentase penanganan sampah	%	60	85			
		Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	M3	910	1.062			
		Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	30	30	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	DKPPK
12 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.	22 Peningkatkan pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.	Rumah tangga pengguna listrik	%	54,16	86,1		Hibah	Belanja Tak Langsung
13 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	23 Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Prushaan	11	46	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BLH
	24 Peningkatan upaya penegakan hukum Lingkungan Hidup.	Penegakan hukum lingkungan	Kasus	20	14	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BLH
		Pencemaran status mutu air (14 Sungai	Status Kondisi	buruk sekali	Baik			
14 Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRWK.	25 Peningkatan aktivitas pembangunan sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.	Ketaatan terhadap RTRW	%	90	100	Legalitas Perda Tata Ruang	Tata Ruang	Dinas PU
		Luas wilayah produktif	Ha	817.018	1.127.018	Perencanaan Tata Ruang	Tata Ruang	Dinas PU
		Luas wilayah industri	Ha	870.664	1.070.664			
		Luas wilayah perkotaan	Ha	136.397	303.397			
15 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.	26 Meningkatkan fasilitas (sarana prasarana) keagamaan.	Rasio tempat ibadah per 100.000 satuan penduduk	Buah	4	4,25		Hibah	SETDA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27 Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan	Pemahaman agama pemeluk agama	Nilai	Baik	Baik			
16 Meningkatnya kerukunan antar ummat beragama.	28 Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama. 29 Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan harmonisasi masyarakat Kabupaten Sintang.	Toleransi antara pemeluk Agama	Nilai	Baik	Baik	Pendidikan Politik Masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik DN	KESBANGPOL
17 Meningkatnya perekonomian daerah.	30 Peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah = 29 jenis	Jenis	29	29	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Otonomi Daerah	Dispenda
18 Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan daerah.	31 Penyederhanaan regulasi dan tarif pajak daerah agar lebih kompetitif dalam menarik investasi.	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha = 1 perda	Perda	1	1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	BPMPTSP
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) = 195 Buah	Buah	195	241			
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) = Rp 1.349,13 M	Milyar Rp	1349,13	1.763,40			
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) =250 M	TK	175	175			
		Jenis dan jumlah bank dan cabang	Unit	41	42	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	BPMPTSP
		Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Unit	6	6			
		Jenis, kelas, dan jumlah	Unit	357	492			
		Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Unit	352	367			
		Jumlah BPR/LKM	Unit	4	5			
		Lama proses perijinan						
		SIUP	Hari	5	5			
		TDP	Hari	5	5			
		IUI	Hari	14	14			
		TDI	Hari	5	5			
		IMB	Hari	21	21			
		HO	hari	5	5			
		Penduduk yg Bekerja	%	66	85	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans
		Angka partisipasi angkatan kerja	%	72,08	95,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	79,04	92,6			
		Rasio daya serap tenaga kerja	TK	175	240			
		Pencari kerja yang ditempatkan	jiwa	124	191	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans
		Tingkat pengangguran terbuka	%	3,06	2,99	Program Bursa Kerja Online	Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans
		Rasio lulusan S1/S2/S3	%	77	98			
		Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	38,21	100	Program Perlindungan Ketengakerjaan	Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans
19 Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah.	32 Peningkatan keunggulan daya tarik dan promosi produk unggulan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	10,03	10,75	Pengembangan Industri Kecil dan menengah	Industri	Disperindagkopukm
		Pertumbuhan Industri	%	2,58	3,15			
		Jumlah industri kecil menengah = 203 Unit	Unit	203	410			
		Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Kelompok	12	136			
20 Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal.	33 Pengembangan kawasan pedesaan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi berbasis unggulan daerah	Jumlah Pasar = 3 Buah	Buah	3	16	Peningkatan Efisensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	Disperindagkopukm
		Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	17,6	18,15			
21 Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat.	34 Meningkatkan jumlah wirausaha baru yang memiliki daya saing	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal = 30 Kelompok	Kelompok	30	55	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Disperindagkopukm
	35 Meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM	Usaha Mikro dan Kecil	Unit	192270	193920	Pencapaian iklim usaha yang kondusif pada UMKM	Koperasi dan UMKM	Disperindagkopukm
		Persentase koperasi aktif	%	69,23	72,37			
22 Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa.	36 Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan perikanan dan perkebunan berbasiskan sumber daya daerah	Nilai tukar petani	Poin	98	103	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Produksi Padi	Ton/Thn	74398	93.608			
		Produksi Jagung	Ton/Thn	2849	3.621			
		Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	26,46	29	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dishutbun
		Produktifitas Karet	Ton/Thn	47129	63.158			
		Produktifitas Kelapa Sawit	Ton/Thn	908654	1.609.735			
		Produktifitas Lada	Ton/Thn	507	1.633			
		Tingkat Penggunaan Benih Unggul Karet	%	60	90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tingkat Penggunaan Benih Unggul Kelapa Sawit	%	20	80			
		Produktifitas Kakao	Ton/Thn	8,3	36			
		Produktifitas Kopi	Ton/Thn	99	120			
		Produksi peternakan (daging)	Ton/Thn	4.333	7.675	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Produksi perikanan	Ton/Thn	1.776	2.119	Program pengembangan budidaya perikanan	Pertanian	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Luas Kebun				Program Pembangunan Perkebunan	Pertanian	Dishutbun
		Luas Kebun Karet	Ha	90.310	96.935			
		Luas Kebun Kelapa Sawit	Ha	144.852	256.614			
		Luas Kebun Lada	Ha	1.012	2.112			
		Luas Kebun Kakao	Ha	125	625			
		Luas Kebun Kopi	Ha	100	600			
		Regulasi ketahanan pangan	Peraturan	1	2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	BP4KKP
		Ketersediaan pangan utama	%	97	100			
		Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	50	100			
		Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari	Desa	55	100			
		Desa Mandiri Pangan (diintervensi bantuan Pemerintah)	Desa	13	16			
		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	75,9	100			
23 Meningkatnya kompetensi SDM aparatur daerah.	37 Mengembangkan SDM aparatur agar lebih kompeten, professional, dan memiliki integritas.	Rasio guru/ murid SD/MI = 1:29	0	1:29	1:20	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Otonomi Daerah	BKD
		Rasio guru/ murid MP/Mts = 1:20	0	1:20	1:15			
		Rasio dokter per satuan penduduk = 7,57 %	Per 100 ribu pddk	18,42	28			
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk = 109,49 /100.000 pddk	Per 100 ribu pddk	177,35	206,01			
24 Meningkatnya onjektivitas penempatan pejabat daeah								
25 Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah	38 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Nilai	Ya	Ya	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Otonomi Daerah	BPKAD
		Opini WTP dari BPK	Nilai	Ya	Ya			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	39 Peningkatan Pengawasan internal.	Prosentase Pengaduan Masyarakt yang ditindaklanjuti pemeriksaan	%	75	95	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Otonomi Daerah	Inspektorat Kabupaten
		Prosentase Temuan Hasil Pemeriksanaan yang selesai ditindaklanjuti	%	31	95			
	40 Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.	Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	M2	4.424.045	5.024.045	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Otonomi Daerah	SETDA
		Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0	34,22	43,6			
		Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	M2	4.424.045	5.024.045			
		Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	M2	18.050.506	20.450.506			
		Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang	Kasus	10	70			
		Penyelesaian izin lokasi baru	Izin lokasi	28	38			
		Penyelesaian izin lokasi perpanjangan	Izin lokasi	4	37			
		Kepemilikan KTP Elektronik	Jiwa	208.237	344.317	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	Disdukcapil
		Kepemilikan Kartu Keluarga	Jiwa	170.688	302.864			
		Kepemilikan Akta Kelahiran	Jiwa	260.735	331.860			
		Kepemilikan Akta Kematian	Jiwa	1.672	6.457			
		Kepemilikan Akta Perkawinan	Jiwa	3.052	13.102			
		Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jiwa	-	20.000			
		Ketersediaan database kependudukan yang akurat dan terintegrasi	Unit	-	1			
		Ketersediaan sarana pelayanan langsung (*direct service*)	Unit	-	2			
		Sosialisasi dan pembinaan masyarakat	Keg	2	15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Orang	2.845	3.943	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan	BKBPPPA
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Orang	188	368			
		Rasio KDRT	Kasus	17	4	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	BKBPPPA
		Partisipasi angkatan kerja Perempuan	Orng	3.816	5.016			
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Kasus	22	4			
		Persentase Jumlah Penduduk miskin	%	9,11	7,21	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Dinsosnakertrans
		Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi	Panti Asuhan	7	9			
		PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jiwa	97	399	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsosnakertrans
		Penanganan masalah kesejahteraan sosial	Jiwa	50	159			
		Jumlah organisasi pemuda	organisasi	43	70	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Olahraga dan Pemuda	Disporaparekraf
		Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	40	70			
		Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Buah	4	10			
		Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah	unit	1	1	Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi	Otonomi Daerah	BPMPTSP
		Penegakan PERDA	Perda	44	58	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik DN	Satpol PP dan Linmas
		Cakupan patroli petugas Satpol PP	Orang	226	439			
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	70	85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	Orang	4070	4150			
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	WMK	1	4	Program Peningkatan Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Linupgkungan Hidup	DKPPK
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	28	15			
		Sistim Informasi Manajemen Pemda	Unit	1	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Otonomi Daerah	BPKAD
		Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan dan Jangka Menengah	Buku	12	20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
		Dokumen Data Neraca Wilayah Kabupaten Sintang	Buku	1	7			
		Pengelolaan arsip secara baku	%	70	95	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Kearsipan	Kantor Arsip dan Perpustakaan
		Peningkatan SDM pengelola Kearsipan	%	95	95			
		Jumlah jaringan komunikasi	Buah	108	131	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo
		Rasio warnet terhadap Penduduk	%	0,001000403	0,0010004			
		Jumlah surat kabar nasional/lokal	Buah	10	20			
		Jumlah penyiaran radio/TV local	Unit	6	11			
		Web site milik pemerintah daerah	ada	17	27			
		Pameran/expo	ada	1	3			
		Jumlah Penertiban PETI	Lokasi	55	46	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Pertambangan	Distamben
		Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	8,38	10,21			
		Kunjungan wisata	Orang	813	5198	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Disporaparekraf

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rp.	200 jt	226 jt			
27 Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.	41 Meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jmlh Ormas	86	130	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik DN	Kesbangpol
		Kegiatan pembinaan politik daerah	Org	1120	2530			
		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	86	107			
28 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, stabilitas keamanan, dan ketertiban umum.	42 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Ratio	0,71	1	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kesatuan Bangsa dan Politik DN	Satpol PP dan Linmas
		Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	40,7	60			
		Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	100	100	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik DN	Satpol PP dan Linmas
29 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.	43 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan daerah	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	65	85		ADD	Belanja Tak Langsung
30 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD.	44 Meningkatkan kapasitas Aparat Desa dan BPD dalam Tata Kelola Pemerintahan desa.	Aparat Desa dan BPD yang telah mengikuti Manajemen Desa	%	75	100	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
	45 Meningkatkan pelaksanakan pembangunan desa yang partisipatif dan demokratis.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Tim Rak	407	407	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
		Jumlah LPM	kelompok	7	9			
		PKK aktif	Tim Rak	407	407			
		Posyandu aktif	bUAH	375	391			

7.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

7.3.1. Arah Kebijakan Pembentukan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pembentukan struktur ruang Kabupaten Sintang diarahkan untuk mewujudan pusat-pusat kegiatan, dan sistem prasarana wilayah yang meliputi; pengembangan pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten, termasuk pengembangan pusat kegiatan dalam sistem nasional, yaitu PKSN, PKW, PKL, dan sistem pusat kegiatan provinsi/metropolitan di wilayah kabupaten.

A. Pengembangan pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten, termasuk perwujudan pusat kegiatan dalam sistem nasional, yaitu PKSN, PKW, PKL, dan sistem pusat kegiatan provinsi/metropolitan di wilayah kabupaten.

A.1. Perwujudan Pusat Kegiatan (PKW, PKSN, PKL& PPK)

Indikasi Program Utama Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan (PKW, PKSN, PKL& PPK) di wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari:

a1. Pemantapan status Sistem Pusat Kegiatan yang terdiri dari PKW, PKSN, PKL dan PPK

a2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Pusat Kegiatan (PKW, PKSN, PKL& PPK), meliputi:

- Kawasan Perkotaan fungsi PKW: Kawasan Perkotaan Sintang;
- Kawasan Perkotaan fungsi PKSN: Kawasan Perkotaan Kota Jasa;
- Kawasan Perkotaan fungsi PKL, pada kawasan-kawasan sebagai berikut:
  1) Nanga Serawai di Kecamatan Serawai,
  2) Nanga Mau di Kecamatan Kayan Hilir,
  3) Nanga Sepauk di Kecamatan Sepauk,
  4) Nanga Merakai di Kecamatan Ketungau Tengah,
  5) Sungai Ringin sebagai PKL industri yang terdapat di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir di Kecamatan Sintang, Desa Nanga Tempunak di Kecamatan Tempunak serta Desa Sungai Ukoi di Kecamatan Sungai Tebelian.
- Kawasan Perkotaan fungsi PPK, pada kawasan-kawasan sebagai berikut:
  1) Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu;
  2) Nanga Ketungau di Kecamatan Ketungau Hilir;
  3) Binjai di Kecamatan Binjai Hulu;
  4) Nanga Tempunak di Kecamatan Tempunak;
  5) Sungai Ukoi di Kecamatan Sei Tebelian;
  6) Dedai di Kecamatan Dedai;
  7) Nanga Tebidah di Kecamatan Kayan Hulu;
  8) Kelam di Kecamatan Kelam Permai; dan
  9) Nanga Kemangai di Kecamatan Ambalau.

a3. Penetapan Status Hukum RTR Kawasan Pusat Kegiatan yang terdiri dari PKW, PKSN, PKL dan PPK, meliputi:

- Peraturan Daerah Kabupaten untuk RTR Kawasan Perkotaan Sintang;
- Peraturan Daerah Kabupatenuntuk RTR Kawasan Perkotaan Kota Jasa
- Peraturan Daerah Kabupatenuntuk RTR PKL pada Kawasan Perkotaan Nanga Serawai, Nanga Mau, Nanga Sepauk, dan Nanga Merakai, serta Sungai Ringin.
- Peraturan Daerah Kabupaten untuk RTR PPK, pada Kawasan Perkotaan Senaning, Nanga Ketungau, Binjai, Nanga Tempunak, Sungai Ukoi, Dedai, Nanga Tebidah, Kelam dan Nanga Kemangai.

a4. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan pendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi:

- Pemantapan dan pengembangan fungsi-fungsi pelayanan kegiatan sosial ekonomi skala wilayah/seluruh kabupaten seperti: pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan.
- Pemantapan pelayanan simpul transportasi skala wilayah kabupaten/beberapa kecamatan: Terminal Type A dan B, serta kelancaran arus lalu lintas penumpang dan barang antar wilayah dalam kabupaten atau dalam propinsi.
- Penguatan identitas kota berfungsi PKW yang berjati diri budaya dayak (Sintang).

a5. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan pendukung Pusat Kegiatan Strategis Nasional(PKSN), meliputi:

- Pemantapan dan pengembangan fungsi-fungsi pelayanan kegiatan sosial ekonomi skala wilayah/seluruh kabupaten seperti: pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan.
- Pemantapan pelayanan simpul transportasi skala wilayah kabupaten/beberapa kecamatan: Terminal Type A dan B, serta kelancaran arus lalu lintas penumpang dan barang antar wilayah dalam kabupaten atau dalam propinsi.
- Penguatan identitas kota berfungsi PKSN yang berjati diri budaya dayak (Sintang).

a6. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan pendukung Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:

- Pemantapan dan pengembangan fungsi-fungsi pelayanan kegiatan sosial ekonomi skala wilayah kabupaten/ beberapa kecamatan seperti: pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan.
- Pemantapan pelayanan simpul transportasi skala wilayah kabupaten/beberapa kecamatan: Terminal Type B, serta kelancaran arus lalu lintas penumpang dan barang antar wilayah dalam kabupaten atau dalam propinsi.
- Penguatan identitas kota berfungsi PKL yang berjati diri budaya dayak (Sintang).

a7. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan pendukung Pusat Pelayanan Kegiatan (PPL) meliputi:

- Pemantapan dan pengembangan fungsi-fungsi pelayanan kegiatan sosial ekonomi skala wilayah kecamatan beberapa desa seperti: pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan.
- Pemantapan pelayanan simpul transportasi skala wilayah kecamatan beberapa desa: Terminal Type C, serta kelancaran arus lalu lintas penumpang dan barang antar wilayah dalam kecamatan atau dalam kabupaten.
- Penguatan identitas kota berfungsi PPK yang berjati diri budaya dayak (Sintang).

a8. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan pendukung Kawasan Agropolitan, sebagai pusat kegiatan di Kawasan Perdesaan yang terintegrasi dengan Kawasan Perkotaan, meliputi:

- Pemantapan dan pengembangan prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan, seperti: jalan, sarana irigasi/ pengairan, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
- Pengembangan sistem perijinan yang mudah, cepat dan murah guna mendukung perkembangan agribisnis berskala nasional bahkan internasional

B. Pengembangan sistem jaringan prasarana kabupaten, yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional di wilayah kabupaten;

1. sistem prasarana jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi sistem prasarana transportasi darat, udara, dan air;
2. sistem jaringan prasarana sumber daya air;
3. sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan;
4. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
5. sistem jaringan persampahan sanitasi dan drainase; dan
6. sistem jaringan prasarana lainnya.

Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan prasarana utama di wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari:

1. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat di wilayah Kabupaten

- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan jaringan jalan nasional dan propinsi yang telah ada.
- Pengembangan jaringan ruas-ruas jalan baru yang berfungsi jalan nasional dan propinsi terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.

- Pengembangan Terminal Type A di S. Ukoi dan penataan sistem pelayanan terminal lainnya.
- Penataan sistem trayek angkutan umum antar kota dan dalam kota.
- Pengembangan angkutan umum massal terdiri dari kegiatan feasibility studi, uji coba, penataan jalur khusus angkutan umum, replikasi pada beberapa trayek.

2. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Sungai di wilayah Kabupaten

- Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan lalu lintas dan angkutan sungaidi Sungai Kapuas;
- Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan lalu lintas dan angkutan sungai di Sungai Melawi;
- Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan lalu lintas dan angkutan sungai di Sungai Ketungau;
- Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan lalu lintas dan angkutan sungai di S. Serawai;
- Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan lalu lintas dan angkutan sungai di S. Kayan; dan
- Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan lalu lintas dan angkutan sungai di S. Ambalau.
- Pemantapan dan pengembangan alur pelayaran transportasi sungai lokal pada alur (1) Sintang – Nanga Pinoh; (2) Nanga Pinoh - Serawai; (3) Serawai – Ambalau; (4) Sintang – Nanga Mau.
- Pengembangan poros utama transportasi sungai terdapat di kota Sintang untuk wilayah Utara dan Nanga Serawai untuk wilayah Selatan Kabupaten Sintang.
- Pemantapan dan pengembangan prasarana transportasi sungai, pada dermaga-dermaga berikut:
  1) Dermaga Sungai Durian di Kota Sintang
  2) Dermaga Sungai Ringin di Kecamatan Sintang
  3) Dermaga Nanga Serawai di Kecamatan Serawai
  4) Dermaga Nanga Kemangai di Kecamatan Ambalau
  5) Dermaga Nanga Merakai di Kecamatan Ketungau Tengah
  6) Dermaga Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu.
- Rencana pengembangan prasarana transportasi sungai terdiri dari:
  1) Dermaga Nanga Mau di Kecamatan Kayan Hilir.
  2) *Steger* Sungai Ana di Kecamatan Sintang.
  3) Pelabuhan khusus angkutan sungai untuk swasta.

3. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapiandi wilayah Kabupaten

- Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan jalur kereta api yang telah ada.
- Pengembangan jaringan ruas-ruas jalur kereta api baru terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan. Jalur yang akan dikembangkan propinsi Kalimantan Barat adalah jalur

yang menghubungkan Pontianak – Ngabang – Sosok – Sanggau – Sekadau – Sintang – Putussibau

- Pemantapan dan pengembangan stasiun kereta api dan penataan pelayanan stasiun. Melalui penyusunan rencana induk pengembangan transportasi perkeretaapian.

4. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Udara di wilayah Kabupaten

- Pengembangan bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunderdi Sungai Tebelian terdiri dari sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan bandar udara baru untuk melayani penerbangan perintis di Kecamatan Serawai (daerah terpencil) dan Kecamatan Ketungau Hulu, (kawasan perbatasan) terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan *Heliport* di Jasa Kecamatan Ketungau Hulu

5. Perwujudan Sistem Jaringan Energi di wilayah Kabupaten

- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Menyurai di Kecamatan Sintang dengan kapasitas 7 MW;
- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTDNanga Tebidah di Kecamatan Kayan Hulu dengan kapasitas 373 kW;
- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Nanga Lebang di Kecamatan Kelam Permai dengan kapasitas 218 kW;
- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTDNanga Ketungau di Kecamatan Ketungau Hilir dengan kapasitas 250 kW
- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Nanga Merakai di Kecamatan Ketungau Tengah dengan kapasitas 786 kW.
- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu dengan kapasitas 415 kW.
- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Sinar Pekayau di Kecamatan Sepauk dengan kapasitas 464 kW.
- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Serawai dan Ambalau dibawah pengelolaan PLN rayon Melawi dengan kapasitas kW.
- Pengembangan PLTU di Kawasan Industri Sungai Ringin dengan kapasitas 21 MW terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.

- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Nokan Nayan di Kecamatan Ambalau dengan kapasitas kurang lebih 15 MWterdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Kayan Hulu terdapat di Air Terjun Sahai Nebias dengan potensi 14,2664 Kw; Air Terjun Pancur Perabung dengan potensi 19,6412 Kw; Air Terjun Cahai Sintot dengan potensi 30,5539 Kw; Air Terjun Cahai Telanjin dengan potensi 18,7630 Kwterdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan PLTMH di Kecamatan Sepauk terdapat di Air Terjun Tuja Plaboh Ayau dengan potensi 13, 1010 Kw; Air Terjun Tuja Tinggi dengan potensi 9, 7273 Kw; Air Terjun Tuja Tiga Tingkat dengan potensi 81, 0587 Kw; Air Terjun Sungai Kenubuh Induk dengan potensi 55, 8334 Kw; Air Terjun Sungai Mengirang dengan potensi 56,5523 Kwterdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan PLTMH di Kecamatan Ketungau Hulu terdapat di Air Terjun Sungai Telaga dengan potensi 13,8188 Kw; Air Terjun Sungai Benyawai dengan potensi 138, 6030 Kw; Air Terjun Sungai Lipat dengan potensi 26,7714 Kw terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan PLTMH di Kecamatan Tempunak terdapat di Air Terjun Sungai Kujau dengan potensi 19,6431 Kw terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan PLTMH di Kecamatan Ambalau terdapat di Air Terjun Noka Nayan dengan potensi 15 MWterdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas kurang lebih bervariasi dari 5 kWP - 1 MWP MW terdapat di Kecamatan Ketungau Hulu pada desa-desa Desa Sebetung Paluk; Sungai Bugau; dan Sungai Seria.
- Pengembangan PLTS di Kecamatan Ketungau Tengah pada desa-desa Panding Jaya; Begelang Jaya; Wirayuda; Wana Bhakti; Semareh; Nanga Kelapan; Raden Jaya.
- Pengembangan PLTS di Kecamatan Ketungau Hilir Nanga Ketungau; Jentawang; Beloh Mulyo; Nanga Sejirak; Sungai Mali; Pampang Dua; Mungguk Kelapa.
- Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri dari:
  1) Isolated kecamatan PLTD kecil di Senaning

2) Gardu Induk (GI) di Sungai Ringin;
3) Gardu Trafo (GT) dengan jumlah 461 buah;
4) Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di kota Sintang;
5) Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan panjang saluran 749,468 kms;
6) Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan panjang saluran 656,89 kms.

6. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi di wilayah Kabupaten

- Pemeliharaan dan perluasan pelayanan jaringan terestrial sistem kabel terutama di pusat-pusat kegiatan baik PKW, PKSN, PKL, PPK, PPL maupun Kawasan Perdesaan.
- Perluasan pelayanan jaringan terestrial nirkabel ke seluruh wilayah Kabupaten Sintang terutama pada kawasan *blankspot*.
- Penataan lokasi menara-menara tower telekomunikasi untuk pelayanan jaringan terestrial.
- Pengembangan jaringan satelit terutama pada kawasan terpencil dan terisolasi.
- Pengembangan jaringan televisi lokal hingga menjangkau siaran ke seluruh wilayah kabupaten.
- Pengembangan jaringan stasiun radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan.

7. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air di wilayah Kabupaten

- Pemeliharaan dan perluasan jaringan irigasi.
- Pengembangan waduk-waduk penampungan air baku baru untuk penyediaan irigasi permukaan dan irigasi rawa lebak dan air minum.
- Peningkatan dan pemerataan pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- Pengembangan sistem penyediaan air minum pada kawasan yang relatif mengalami kesulitan air baku.
- Pemantapandan Pengembangan Wilayah Sungai (WS) berupa Wilayah Sungai Kapuas dan Sungai Melawi dengan sub DAS Kapuas dan DAS Melawi.
- Pemantapandan PengembanganDaerah irigasi meliputi bendung/embung, daerah irigasi dan irigasi desa;
- Pemantapandan Pengembangan Bendung/embung, yang meliputi:
  1) Bendung untuk kebutuhan air baku dan tenaga listrik di Kabupaten Sintang
  2) Embung untuk kebutuhan air baku dan pengairan irigasi di Kabupaten Sintang
- Pemantapan dan Pengembangan Daerah Irigasi (DI) meliputi:
  1) Irigasi Permukaan yang tersebar di Kabupaten Sintang
  2) Irigasi Rawa Lebak yang tersebar di Kabupaten Sintang
- Pemantapan dan Pengembangan Irigasi Desa (ID) meliputi Irigasi Desa yang tersebar di Kabupaten Sintang.

- Pemantapan dan Pengembangan Sistem pengendalian banjir dan pengamanan sungai terdiri atas:
  1) perlindungan daerah tangkapan air (Hulu DAS yang ada di seluruh kecamatan);
  2) normalisasi sungai;
  3) perbaikan drainase;
  4) pembangunan tanggul pada sungai yang rawan banjir dan longsor;
  5) pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir; dan
  6) revitalisasi Sungai atau danau atau mata air.

8. Perwujudan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan di wilayah Kabupaten

Sistem Jaringan Prasarana Persampahan

- Peningkatansistem pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) terdapat di Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir; Nanga SepaukKecamatan Sepauk; Nanga Serawai Kecamatan Serawai; dan Jerora Kecamatan Sintang dengan sistem *controlled landfill*/*sanitary landfill*;
- pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Nanga Kemangaiuntuk melayani Kecamatan Ambalau;Nanga Tebidah untuk melayani Kecamatan Kayan Hulu; Nanga Tempunak untuk melayani Kecamatan Tempunak; Sungai Ukoi untuk melayani Kecamatan Sungai Tebelian; Nanga Dedai untuk melayani Kecamatan Dedai; Kebong untuk melayani Kecamatan Kelam Permai; Binjai untuk melayani Kecamatan Binjai Hulu; Nanga Ketungau untuk melayani Kecamatan Ketungau Hilir; Senaning untuk melayani Kecamatan Ketungau Hulu;dan Merakai untuk melayani Kecamatan Ketungau Tengah.
- pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dengan sistem 3 R (reduce, reuse, dan recycle) di Nanga Serawai Kecamatan Serawai; Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir, Nanga Sepauk Kecamatan Sepauk; Nanga Merakai Kecamatan Ketungau Tengahdan Kecamatan Sintang.

Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah

- pengembangan sistem pembuangan air limbah terpadu antar lingkungan yang dilakukan dengan cara menggunakan sistem pengolahan air limbah sebelum masuk ke badan air penerima;
- pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) regional di Kecamatan Sintang; didorong untuk pengembangan IPLT yang menghasilkan energi alternatif.
- pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada permukiman-permukiman di ibukota-ibukota kecamatan dan fasilitas kesehatan.

Sistem Jaringan Drainase

- pengembangan jaringan drainase primer di kota Sintang sebagai ibukota kabupaten berupa sungai – sungai/saluran air yang bermuara ke sungai Kapuas;
- pengembangan jaringan drainase sekunder berupa sungai-sungai/saluran air yang berada di dalam kota; dan
- pengembangan jaringan drainase tersier berupa sungai-sungai/saluran air yang berada di dalam lingkungan permukiman.
- pengembangan jaringan drainase primer, sekunder dan tersier di ibukota-ibukota kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Sistem Penyediaan Jaringan Air Minum

- Pemantapan Sumber mata air (SMA) di Nanga Merakai dengan debit kurang lebih 5 l/d;
- Pemantapan Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Kapuas dengan debit kurang lebih 80 l/d terdapat di unit PDAM Tanjung Puri dengan debit kurang lebih 55 l/d, Unit PDAM Kapuas Kiri Hilir dengan debit 10 l/d, Unit PDAM Nanga Sepauk dengan debit kurang lebih 5 l/d, Unit PDAM Tempunak dengan debit kurang lebih 10 l/d; dari Sungai Melawi dengan debit kurang lebih 70 l/d terdapat di unit PDAM Sungai Ana dengan debit kurang lebih 40 l/d; unit PDAM Kapuas Kanan Hulu debit kurang lebih 30 l/d.
- Rencana pengembangan jaringan air minum yang meliputi:
  1) Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Kapuas dengan debit kurang lebih 65 l/ddikembangkan di beberapa unit PDAM sebagai berikut:
     a. Unit PDAM Tanjung Puri dengan debit kurang lebih 20 l/d;
     b. Unit PDAM Nanga Sepauk dengan debit kurang lebih 5 l/d;
     c. Unit PDAM Kapuas Kiri Hilir dengan debit kurang lebih 20 l/d; dan
     d. Unit PDAM Binjai dengan debit kurang lebih 20 l/d;
  2) Sumber Air Baku (SAB)dari Sungai Melawi dengan debit kurang lebih 40 l/d dikembangkan di beberapa unit PDAM sebagai berikut:
     a. Unit PDAM Kapuas Kanan Hulu debit kurang lebih 20 l/d;
     b. Unit PDAM Nanga Jetak dengan debit kurang lebih 10 l/d; dan
     c. Unit PDAM Nanga Serawai dengan debit kurang lebih 10 l/d;
  3) Sumber Air Baku (SAB)dari Sungai Ketungau dengan debit kurang lebih 50 l/d dikembangkan di beberapa unit PDAM sebagai berikut:
     a. Unit PDAM Nanga Merakai dengan debit kurang lebih 15 l/d;

b. Unit PDAM Mengkurai dengan debit kurang lebih 25 l/d;
c. Unit PDAM Senaning dengan debit kurang lebih 10 l/d;

4) Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Kayan dikembangkan di unit PDAM Nanga Mau dengan debit kurang lebih 10 l/d; dan
5) Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Tebidah dikembangkan di unit PDAM Nanga Tebidah dengan debit kurang lebih 10 i/d.
6) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Lengkap (IPAL) minum terdapat di Unit PDAM Sungai Ana dengan debit menjadi 120 l/d.

Jalur Evakuasi Bencana

- Pemantapan dan pengembangan jalur evakuasi bencana dengan mengikuti ruas jalan yang ada menuju daerah yang aman.
- Pengembangan sistem pengaman bencana sebagai upaya preventif pemerintah daerah guna mewujudkan rasa aman bagi warganya.

7.3.2. Pembentukan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

A. Perwujudan Kawasan Lindung

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Lindung di wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari:

a1. Perwujudan Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya.

- Kawasan Hutan Lindung
  - Pengukuhan dan penetapan tata batas hutan lindung di beberapa kawasan berikut:
    1) Gunung Rentap terdapat di Kecamatan Kelam Permai;
    2) Bukit Temara Untau terdapat di KecamatanAmbalau;
    3) Bukit Tujun terdapat di Kecamatan Ambalau;
    4) Gunung Kuhjau terdapat di Kecamatan Sepauk dan Tempunak;
    5) Liyang Kukang terdapat di Kecamatan; Ambalau
    6) Gunung Kumaha terdapat di Kecamatan; Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah
    7) Bukit Sasar terdapat di Kecamatan; Serawai dan Ambalau
    8) Bukit Condong terdapat di Kecamatan; Sepauk dan Tempunak
    9) Gunung Betung-Kenapai terdapat di Kecamatan Ketungau Tengah;
    10) Pangihan-Lambuanak terdapat di Kecamatan Ambalau;
    11) Sungai Kiyungkang terdapat di Kecamatan Sepauk dan Tempunak;

12) Kumbu terdapat di Kecamatan Ketungau Hulu;
13) Bukit Perigi terdapat di KecamatanAmbalau dan Kayan Hulu;
14) Bukit Alat-Sungai Demu terdapat di Kecamatan Serawai, Ambalau dan Kayan Hulu
15) Gunung Bang terdapat di KecamatanKayan Hulu dan Kayan Hilir;
16) Nyamban Pangihan terdapat di Kecamatan Ambalau;
17) Bukit Mencaya terdapat di Kecamatan Ambalau;
18) Gunung Luit terdapat di Kecamatan Kelam Permai; DAN
19) Bukit Durian terdapat di Kecamatan Ambalau.

- Konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan lindung.

- Kawasan Resapan Air
  - Penetapan dan pemantapan kawasan resapan air.
  - Perlindungan dan penertiban kawasan resapan air
- Kawasan Bergambut
  - Penetapan dan pemantapan kawasan bergambut.
  - Perlindungan dan penertiban kawasan bergambut.
  - Konservasi dan rehabilitasi kawasan bergambut.

a2. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat

- Kawasan Sempadan Sungai
  - Penetapan sempadan sungai di seluruh Kabupaten Sintang.
  - Penegasan deliniasi dan aturan zonasi sempadan sungai.
  - Penyebaran informasi (sosialisasi) kawasan sempadan sungai.
  - Perlindungan dan penertiban secara bertahap kawasan sempadan sungai.
- Kawasan Sempadan Danau/Embung
  - Penetapan sempadan danau/embung di seluruh Kabupaten Sintang.
  - Penegasan deliniasi dan aturan zonasi sempadan danau/embung.
  - Penyebaran informasi (sosialisasi) kawasan sempadan danau/embung.
  - Perlindungan dan penertiban secara bertahap kawasan sempadan danau/embung.
- Kawasan Sempadan Danau Paparan Banjir
  - Penetapan sempadan danau paparan banjir di seluruh Kabupaten Sintang.
  - Penegasan deliniasi dan aturan zonasi sempadan danau paparan banjir.
  - Penyebaran informasi (sosialisasi) kawasan sempadan danau paparan banjir.
  - Perlindungan dan penertiban secara bertahap kawasan sempadan danau paparan banjir.
- Kawasan Sempadan Mata Air

- Penetapan sempadan mata air di seluruh Kabupaten Sintang.
- Penegasan deliniasi dan aturan zonasi sempadan mata air.
- Penyebaran informasi (sosialisasi) kawasan sempadan mata air.
- Perlindungan dan penertiban secara bertahap kawasan sempadan mata air.

- Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - Pengembangan Masterplan RTHK yang terintegrasi dalam RDTR pada seluruh kawasan perkotaan (PKW, PKSN, PKL, PPK).
  - Pengembangan RTHK minimal 30% pada PKW dan PKSN, 40% pada PKL dan 50% pada PPK dari total luasan wilayah.

a3. Perwujudan Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya

- Penegasan batas Kawasan, Zonasi blok inti, blok rimba atau blok pemanfaatan untuk Kawasan Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya, Taman Wisata Alam Bukit Kelam dan Taman Wisata Alam Baning.
- Pengembangan Peraturan Zonasi Kawasan.
- Konservasi dan rehabilitasi kawasan.
- Studi dan Inventarisasi Ekosistem pada Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya, Taman Wisata Alam Bukit Kelam dan Taman Wisata Alam Baning.
- Perlindungan terhadap potensi sumber daya hayati, nilai arkeologi historis khusus dan nilai spiritual adat lokal.
- Inventarisasi, Pemetaan kondisi, konservasi dan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

a4. Perwujudan Kawasan Rawan Bencana Alam

- Pengembangan peraturan zonasi.
- Identifikasi kawasan rawan bencana alam.
- Pengembangan pengaturan pemanfaatan air tanah.
- Penyebaran informasi (sosialisasi) kawasan rawan bencana alam.
- Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana.
- Peningkatan kapasitas adaptasi kawasan melalui kearifan lokal.

a5. PerwujudanKawasan Lindung Geologi

- Identifikasi kawasan lindung geologi yang merupakan cekungan air tanah.
- Pengembangan pengaturan pemanfaatan air tanah.
- Penyebaran informasi (sosialisasi) kawasan lindung geologi.
- Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan lindung geologi.
- Peningkatan kapasitas adaptasi kawasan melalui kearifan lokal.

a6. Perwujudan Kawasan Lindung Lainnya

- Identifikasi kondisi plasma nutfah pada kawasan lindung.
- Penetapan dan penegasan batas kawasan koridor satwa di Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai.
- Pengembangan RTR Kawasan Koridor Satwa.
- Perlindungan flora dan fauna khas wilayah.

B. Perwujudan Kawasan Budidaya

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Budidaya di wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari:

b1. Perwujudan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

- Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT)
  - Pemetaan luas dan kondisi kawasan hutan produksi terbatas yang terdapat di beberapa kawasan berikut:
    1) HPT Kainjal terletak di Kecamatan Tempunak
    2) HPT Sungai Ketungau Hulu terletak di Kecamatan Ketungau Hulu;
    3) HPT Sungai Serawai terletak di Kecamatan Serawai; dan
    4) HPT Uluk Ubur terletak di Kecamatan Kelam Permai dan Kayan Hilir
  - Pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang industri kerajinan dan industri lainnya.
  - Rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan.
- Kawasan Hutan Produksi (HP)
  - Pemetaan luas dan kondisi kawasan hutan produksi yang terdapat di beberapa kawasan berikut:
    1) HP Dinding Raja, terletak di Kecamatan Dedai, Kayan Hilir dan Kayan Hulu
    2) HP Keninjal, terletak di Kecamatan Tempunak dan Sui Tebelian
    3) HP Nanga Mengkilau, terletak di Kecamatan Serawai
    4) HP Sungai Kembayan-Sungai Mengkiang, terletak di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah
    5) HP Sungai Sekapak-Kenapai, terletak di Kecamatan Ketungau Tengah
    6) HP Bukit Condong, terletak di Kecamatan Ketungau Hilir
    7) HP Bukit Pelantar, terletak di Kecamatan Kayan Hilir
    8) HP Ginsar, terletak di Kecamatan Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah
    9) HP Keruab Melawi, terletak di Kecamatan Serawai
    10) HP Sungai Jungkit, terletak di Kecamatan Ketungau Hilir, Binjai Hulu dan Sepauk
  - Pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang industri kerajinan dan industri lainnya.
  - Rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan.
- Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK)

- Pemetaan luas dan kondisi kawasan hutan produksi konversiyang terdapat di HPK Gunung Kemuha terletak di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah
- Pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang industri kerajinan dan industri lainnya.
- Rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan.

b2. Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian

- Kawasan Pertanian Tanaman Pangan
  - Pemetaan lokasi dan luasan pertanian tanaman pangan
  - Penyepakatan pengembangan lahan pertanian abadi berkelanjutan yang potensinya terdapat di Kecamatan Sepauk dan KecamatanTempunak.
  - Intensifikasi lahan pertanian
  - Pengembangan secara bertahap pertanian organik.
  - Pengembangan kawasan-kawasan agribisnis
- Kawasan Pertanian Hortikultura
  - Pemetaan lokasi dan luasan pertanian hortikultura
  - Pengembangan komoditas hortikultura produktif dan unggulan.
  - Intensifikasi lahan pertanian
  - Pengembangan secara bertahap pertanian organik.
  - Pengembangan kawasan-kawasan agribisnis dan terminal agribisnis
- Kawasan Perkebunan
  - Pemetaan lokasi dan luasan kawasan peruntukan perkebunan
  - Pemetaan komoditas perkebunan produktif dan unggulan
  - Pengembangan indikasi geografis bagi komoditas khas
  - Intensifikasi lahan pertanian
  - Pengembangan secara bertahap pertanian organik.
  - Pengembangan kawasan-kawasan agribisnis dan terminal agribisnis
  - Pengembangan kemitraan dengan industri
- Kawasan Peternakan
  - Pemantapan pasar-pasar khusus peternakan/Pasar Hewan Wilayah
  - Mengintegrasikan kegiatan peternakan dengan pertanian dan permukiman.
  - Penetapan klasifikasi jenis ternak yang sesuai potensi wilayah adalah sebagai berikut:
    1) Jenis Ternak Besar terdapat di kecamatan-kecamatan berikut:
       a) Kecamatan Binjai Hulu;
       b) Kecamatan Tempunak;
       c) Kecamatan Sungai Tebelian; dan
       d) Kecamatan Ketungau Hulu.
    2) Jenis Ternak Kecil terdapat di kecamatan-kecamatan berikut:
       a) Kecamatan Ketungau Hilir;
       b) Kecamatan Serawai;

c) Kecamatan Kayan Hulu;
d) Kecamatan Binjai Hulu;
e) Kecamatan Tempunak; dan
f) Kecamatan Sungai Tebelian

3) Jenis Ternak Unggas terdapat di kecamatan-kecamatan berikut:
a) Kecamatan Sungai Tebelian;
b) Kecamatan Sintang;
c) Kecamatan Kelam Permai;
d) Kecamatan Binjai Hulu; dan
e) Kecamatan Tempunak.

b3. Perwujudan Kawasan Peruntukan Perikanan

- Pemetaan lokasi kegiatan perikanan darat, yang meliputi perikanan tangkap, budidaya perikanan dan pengolahan ikan.

1) Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Sintang terdapat di beberapa sungai, sebagai berikut:

a) Sungai Kapuas di Kecamatan Sepauk, Kecamatan Tempunak, Kecamatan Sintang, Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Ketungau Hilir
b) Sungai Melawi di Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai dan Kecamatan Kayan Hilir
c) Sungai Ketungau di Kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu
d) Sungai Kayan di Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu
e) Sungai Serawai di Kecamatan Serawai
f) Sungai Ambalau di Kecamatan Ambalau

2) Potensi budidaya perikanan, terdapat tiga kategori yaitu budidaya perikanan umum daratan di sungai; di danau dan di kolam budidaya. Secera rinci penetapan potensi tersebut meliputi:

Budidaya perikanan umum daratan di sungai-sungai terdapat di:

a) Sungai Kapuas;
b) Sungai Melawi;
c) Sungai Ketungau;
d) Sungai Kayan;
e) Sungai Serawai; dan
f) Sungai Ambalau.

Budidaya perikanan umum daratan di danau-danau terdapat di:

a) Danau Guci - Balai Angin di Kecamatan Sintang;
b) Danau Semetung di Kecamatan Ketungau Hilir;
c) Danau Jemut di Kecamatan Ketungau Hilir;
d) Danau Mensiku di Kecamatan Binjai;
e) Danau Jentawang di Kecamatan Ketungau Hilir;
f) Danau Ubar di Kecamatan Ketungau Tengah;
g) Danau Liot di Kecamatan Ketungau Tengah;
h) Danau Tebing Raya di Kecamatan Sintang;

i) Danau Tempunak di Kecamatan Tempunak dan
j) Danau Aji di Kecamatan Ketungau Hulu;

Budidaya perikanan umum daratan di kolam budidaya terdapat di:

a) Kecamatan Ketungau Hilir;
b) Kecamatan Kayan Hilir;
c) Kecamatan Dedai;
d) Kecamatan Sintang; dan
e) Kecamatan Tempunak.

3) Potensi kawasan pengolahan ikan, meliputi kawasan-kawasan berikut:

Pengolahan hasil perikanan tangkap berupa Unit Pendaratan, Pemasaran dan Pelelangan Ikanditetapkan di:

a) Kecamatan Ketungau Tengah;
b) Kecamatan Ketungau Hilir; dan
c) Kecamatan Sintang

Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di:

a) Danau Guci - Balai Angin di Kecamatan Sintang;
b) Danau Semetung di Kecamatan Ketungau Hilir;
c) Danau Jemut di Kecamatan Ketungau Hilir;
d) Danau Mensiku di Kecamatan Binjai Hulu;
e) Danau Jentawang di Kecamatan Ketungau Hilir;
f) Danau Ubar di Kecamatan Ketungau Tengah;
g) Danau Liot di Kecamatan Ketungau Tengah;
h) Danau Tebing Raya di Kecamatan Sintang;
i) Danau Tempunak di Kecamatan Tempunak dan
j) Danau Aji di Kecamatan Ketungau Hulu

- Rencana pengembangan Sentra Produk Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap & Perikanan Budidaya di:

1) Kecamatan Ketungau Tengah;
2) Kecamatan Ketungau Hilir; dan
3) Kecamatan Sintang.

- Pengaturan zonasi kawasan perikanan tradisional, perikanan tangkap dan lokasi pengolahan hasil perikanan.
- Pemantapan fasilitas pendukung: Pelabuhan/Dermaga ikan, PPI dan TPI

b4. Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan

- Pemetaan potensi bahan tambang
- Pengembangan Peraturan Zonasi Kawasan yang memiliki Potensi Galian
- Pengendalian pemanfaatan ruang
- Konservasi dan rehabilitasi kawasan pasca penambangan
- Penetapan kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari: Wilayah Pencadangan Negara (WPN); Kawasan Peruntukan Pertambangan Batubara; Kawasan Peruntukan Pertambangan Logam; Kawasan Peruntukan Pertambangan Non logam; Kawasan Peruntukan

Pertambangan Radio aktif; Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.

1) Kawasan Wilayah Pencadangan Negara (WPN), meliputi:
   a) Kecamatan Serawai; dan
   b) Kecamatan Ambalau.
2) Kawasan Peruntukan Pertambangan Batubara, meliputi:
   a) Kecamatan Ketungau Hulu;
   b) Kecamatan Ketungau Hilir;
   c) Kecamatan Ketungau Tengah;
   d) Kecamatan Kayan Hilir;
   e) Kecamatan Kayan Hulu;
   f) Kecamatan Serawai; dan
   g) Kecamatan Ambalau.
3) Kawasan Peruntukan Pertambangan Logam, meliputi:
   a) Kecamatan Ketungau Tengah;
   b) Kecamatan Ketungau Hilir;
   c) Kecamatan Binjai;
   d) Kecamatan Sepauk;
   e) Kecamatan Tempunak;
   f) Kecamatan Sungai Tebelian;
   g) Kecamatan Sintang;
   h) Kecamatan Kelam Permai;
   i) Kecamatan Dedai;
   j) Kecamatan Kayan Hilir;
   k) Kecamatan Kayan Hulu;
   l) Kecamatan Serawai; dan
   m) Kecamatan Ambalau.
4) Kawasan Peruntukan Pertambangan Non logam, meliputi: Kecamatan Ambalau.
5) Kawasan Peruntukan Pertambangan Radio aktif, meliputi:
   a) Kecamatan Ketungau hilir;
   b) Kecamatan Binjai Hulu;
   c) Kecamatan Sepauk;
   d) Kecamatan Kelam Permai;
   e) Kecamatan Kayan Hilir;
   f) Kecamatan Kayan Hulu;
   g) Kecamatan Serawai; dan
   h) Kecamatan Ambalau.
6) Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, meliputi:
   a) Kecamatan Dedai;
   b) Kecamatan Sei Tebelian;
   c) Kecamatan Ketungau Hilir;
   d) Kecamatan Kelam Permai;
   e) Kecamatan Binjai Hulu;
   f) Kecamatan Sintang;
   g) Kecamatan Tempunak;
   h) Kecamatan Sepauk; dan

i) Kecamatan Serawai.

b5. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri

- Pengembangan Rencana Induk Kegiatan Perindustrian Daerah
- Integrasi kegiatan industri kecil bercampur secara sinergi dengan permukiman.
- Pengendalian Kegiatan Usaha Perindustrian
- Perlindungan kawasan sekitas kegiatan perindustrian.
- Penetapan peruntukan kawasan industri terdiri atas: peruntukan industri besar, sedang dan rumah tangga.
  1) Kawasan peruntukan industri besar antara lain meliputi:
     a) Industri Pengolahan Karet, terdapat di Kecamatan
     b) Industri Pengolahan Tandan Buah Segar (TBS), terdapat di Kecamatan
     c) Industri crumb rubber, terdapat di Kecamatan
     d) Industri CPO, terdapat di Kecamatan
     e) Industri Kernel (Inti Sawit), terdapat di Kecamatan
  2) Kawasan peruntukan industri sedang meliputi: Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri Sungai Ringin, yang meliputi kegiatan:
     a) Pengembangan dan penetapan RTR Kawasan Industri Sungai Ringin.
     b) Pengembangan infrastruktur penunjang.
     c) Pengembangan insentif
     d) Pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat dan disinsentif.
  3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga antara lain meliputi:
     a) Industri Kecil Menengah (IKM) **pangan** berpotensi ditempatkan di kecamatan-kecamatan berikut:
        (1) Kecamatan Sintang;
        (2) Kecamatan Tempunak;
        (3) Kecamatan Sungai Tebelian;
        (4) Kecamatan Kelam Permai;
        (5) Kecamatan Ketungau Tengah;
        (6) Kecamatan Ambalau;
        (7) Kecamatan Kayan Hilir;
        (8) Kecamatan Ketungau Hulu; dan
        (9) Kecamatan Binjai Hulu.
     b) IndustriKecil Menengah (IKM) **sandang**berpotensi ditempatkan di kecamatan-kecamatan berikut:
        (1) Kecamatan Sintang;
        (2) Kecamatan Dedai; dan
        (3) Kecamatan Kelam Permai;
     c) Industri Kecil Menengah (IKM) kimia dan bahan bangunan di Kecamatan Sintang;
     d) Industri Kecil Menengah (IKM) **logam dan elektronika**berpotensi ditempatkan di kecamatan-kecamatan berikut:
        (1) Kecamatan Sintang;
        (2) Kecamatan Serawai;
        (3) Kecamatan Ambalau;
        (4) Kecamatan Tempunak;

(5) Kecamatan Dedai; dan
(6) Kecamatan Kelam Permai.

e) Industri Kecil Menengah (IKM) kerajinan berpotensi ditempatkan di kecamatan-kecamatan berikut:
(1) Kecamatan Sintang;
(2) Kecamatan Kelam Permai;
(3) Kecamatan Tempunak;
(4) Kecamatan Kayan Hulu;
(5) Kecamatan Sepauk;
(6) Kecamatan Ketungau Hilir;
(7) Kecamatan Ketungau Tengah; dan
(8) Kecamatan Ketungau Hulu.

- Penetapan pengembangan kawasan industri berciri khusus yang potensinya terdapat beberapa komoditi, dikembangkan di kecamatan-kecamatan berikut:

1) Tenun Ikat, dikembangkan di:

a) DesaEnsaid Panjang Kecamatan Kelam Permai;
b) DesaUmin di Kecamatan Dedai;
c) DesaSungai Buaya di Kecamatan Kayan Hilir.

2) Rotan, dikembangkan di:

a) Desa-desa Mentajoi (pusat), Merako, Riyoi, Tangoi, Ruhan, Sawang Sengiang diKecamatan Serawai; dan
b) Desa-desa Sake, Kesange, Menantak, Menakon, Buntut Sabun (sentra/pusat), Buntut Purun (dengan kelompok pengrajin) diKecamatan Ambalau.

3) Industri Komoditi Lainnya.

b6. Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata

- Pengembangan/pemantapan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.
- Perwujudan Kawasan Pariwisata
  - ✓ Pengembangan dan penetapan RTR Kawasan Pariwisata
  - ✓ Penetapan Peraturan Zonasi
  - ✓ Pembangunan infrastruktur penunjang sesuai RTR
  - ✓ Pengembangan kriteria akomodasi untuk kawasan pariwisata.
  - ✓ Pengembangan insentif dan disinsentif.
  - ✓ Pengelolaan lahan terlantar / lahan tidur.
  - ✓ Pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat.
- Perwujudan Daerah Tujuan Wisata Kabupaten
  - ✓ Identifikasi potensi dan luasan efektif dan peraturan zonasi.
  - ✓ Pengembangan pariwisata kerakyatan dan ekowisata.
- Penetapan kawasan peruntukan pariwisata meliputi: wisata budaya; wisata religi; pariwisata alam dan pariwisata buatan.
  - ✓ Kawasan peruntukan pariwisata budaya, antara lain terdiri atas:
    1) Rumah Adat Betang di desa Ensaid Panjang di Kecamatan Kelam Permai;
    2) Rumah Adat Betang Panjang di desa Kayu Duyung Kecamatan Ketungau Tengah.

3) Museum Keraton Al Mukoromah di kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang;
4) Museum Kapuas Raya di desa Jerora Kecamatan Sintang;
5) Makam Pahlawan Syuhada Pertiwi di Kecamatan Sintang.

- ✓ Kawasan peruntukan pariwisata religi, terdiri atas: Goa Maria di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai.
- ✓ Kawasan peruntukan pariwisata alam, terdiri atas:
  1) Wisata Hutan, meliputi:
     a) Wisata Baning di Kecamatan Sintang;
     b) Taman Wisata Bukit Kelam di Kecamatan Kelam Permai; dan
     c) Hutan Tawang Mersibung di Kecamatan Kelam Permai.
  2) Wisata Bukit, antara lain terdapat di:
     a) Bukit Luit di Kecamatan Kelam Permai;
     b) Bukit Kujau di Kecamatan Sepauk dan Tempunak;
     c) Bukit Saran di Kecamatan Sepauk;
     d) Bukit Bang di Kecamatan Kayan Hilir;
     e) Bukit Ruyung di Kecamatan Kayan Hilir;
     f) Bukit Gonik di Kecamatan Kayan Hilir;
     g) Bukit Bungau di Kecamatan Ketungau Hulu;
     h) Bukit Bejaku di Kecamatan Ketungau Hulu;
     i) Bukit Sahai Keladan di Kecamatan Kayan Hulu; dan
     j) Bukit Rentapdi Kecamatan Kelam Permai.
  3) Wisata Danau Dan Telaga, antara lain terdapat di:
     a) Danau Jemelak di Kecamatan Sintang;
     b) Telaga Rendang di Kecamatan Kelam Permai;
     c) Telaga Telaga Surat di Kecamatan Kelam Permai; dan
     d) Telaga Kumangdi Kecamatan Ketungau Hulu;
  4) Kawasan Wisata Sungai Dan Riam antara lain terdapat di;
     a) Sungai Silitdi Kecamatan Sepauk;
     b) Sungai Kiara di Kecamatan Sepauk;
     c) Sungai Lubuk Kembang di Kecamatan Sepauk;
     d) Sungai Kura di Kecamatan Kayan Hilir;
     e) Sungai Beribijit di Kecamatan Kayan Hilir;
     f) Sungai Kelampai di Kecamatan Kayan Hilir;
     g) Sungai Kujau di Kecamatan Tempunak;
     h) Sungai Senirah di Kecamatan Tempunak;
     i) Riam Capat Cunai di Kecamatan Tempunak;
     j) Riam Setungkup di Kecamatan Ketungau Hilir;
     k) Riam Pengundang di Kecamatan Serawai; dan
     l) Riam Mensabu di Kecamatan Kayan Hulu.
  5) Wisata Air Terjun antara lain terdapat di:
     a) Air Terjun Nokan Nayan di Kecamatan Ambalau;
     b) Air Terjun Nokan Cecak di Kecamatan Ambalau;
     c) Air Terjun Nokan Undak di Kecamatan Ambalau;
     d) Air Terjun Nokan Jenggonoi di Kecamatan Ambalau;
     e) Air Terjun Sentarum di Kecamatan Sepauk;

f) Air Terjun Tuja Pamak di Kecamatan Sepauk;
g) Air Terjun anak Sungai Sentarum di Kecamatan Sepauk;
h) Air Terjun Tuja Supit di Kecamatan Sepauk;
i) Air Terjun Tuja Tapang Tuai di Kecamatan Sepauk;
j) Air Terjun Sarai Entemu di Kecamatan Kayan Hilir;
k) Air Terjun Sarai Nantai Bulung di Kecamatan Kayan Hilir;
l) Air Terjun Bukit Kujau di Kecamatan Tempunak;
m) Air Terjun Gurung Jatuk di Kecamatan Tempunak;
n) Air Terjun Sungai Jerup di Kecamatan Ketungau Hulu;
o) Air Terjun Sungai Udang di Kecamatan Ketungau Hulu;
p) Air Terjun Wong Sepakat di Kecamatan Ketungau Tengah;
q) Air Terjun Wong Tapah di Kecamatan Ketungau Tengah;
r) Air Terjun Tekop di Kecamatan Ketungau Tengah; dan
s) Air Terjun Wong Tungku di KecamatanKetungau Tengah.

6) Wisata Gua antara lain terdapat di:
a) Gua Paleh Beranidi Kecamatan Kayan Hilir;
b) Gua Paleh Pengolak di Kecamatan Kayan Hilir;
c) Gua Antu Simpak di Kecamatan Kelam Permai;
d) Gua Gemelat di Kecamatan Kelam Permai; dan
e) Gurung Jeruk di Kecamatan Tempunak.

✓ Kawasan peruntukan pariwisata buatan, terdiri atas:
1) kawasan wisata Galery Motor Bandong di Desa Jerora Kecamatan Sintang.
2) Kawasan Wisata Kolam Renang antara lain terdapat di:
a) Kolam Renang Serantung Waterparkdi Kecamatan Sintang;
b) Kolam Renang Balioboro di Kecamatan Sintang;
c) Kolam Renang Tebelian Indah di Kecamatan Sei Tebelian; dan
d) Kolam Renang Tirta Wisata Kelam di Kecamatan Kelam permai;
3) Kawasan Wisata Out Bond Sake di Kecamatan Sintang;
4) Kawasan Wisata Paralayang, Panjat Tebing, Sepeda Gunung di Bukit Kelam di Kecamatan Kelam Permai.

b7. Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman

- Pengembangan dan penetapan RTR pada berbagai tingkatan RTR Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota beserta Peraturan Zonasi.

- ✓ Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan di semua ibu kota Kecamatan.
- ✓ Pengembangan dan pemerataan pelayanan sistem jaringan prasarana permukiman (jalan, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, drainase) di semua ibu kota Kecamatan.
- ✓ Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana permukiman (fasilitas perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, dan kebudayaan) di semua ibu kota Kecamatan.
- ✓ Pengembangan prasarana perlindungan dari bencana: pengendalian banjir, pengamanan bantaran sungai dan lain-lain di semua ibu kota Kecamatan.
- ✓ Perwujudan ruang terbuka hijau 30% dari wilayah kota di semua ibu kota Kecamatan.
- ✓ Perwujudan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki dan jalur atau ruang evakuasi bencana di semua ibu kota Kecamatan.

- Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
  - ✓ Pengembangan agropolitan yang meliputi kecamatan-kecamatan:
    1) Kecamatan Kayan Hilir,
    2) Kecamatan Dedai, dan
    3) Kecamatan Sungai Tebelian
  - ✓ Penetapan dan pemantapan status permukiman perdesaan pada desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan.
  - ✓ Pengembangan dan pemerataan pelayanan sistem jaringan prasarana permukiman skala perdesaan (jalan, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, drainase) di seluruh Kecamatan.
  - ✓ Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana permukiman pada skala perdesaan (fasilitas perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, dan kebudayaan) di seluruh Kecamatan.
  - ✓ Pengembangan prasarana perlindungan dari bencana: pengendalian banjir, pengamanan bantaran sungai dan lain-lain di seluruh Kecamatan.
  - ✓ Perlindungan terhadap sawah beririgasi di seluruh Kecamatan.

b8. Perwujudan Kawasan Peruntukan Lainnya

- Penetapan fungsi-fungsi peruntukan lain, yang meliputi:
  - ✓ Polres dan Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Sintang;
  - ✓ Pelsek dan Kawasan Komando Rayon Militer (KORAMIL) di 13 Kecamatan selain Kecamatan Sintang.
- Pemetaan lokasi fungsi peruntukan lain
- Pengembangan prasarana pendukung fungsi peruntukan lain.

- Pengembangan saranapendukung fungsi peruntukan lain.

7.3.3. Pembentukan Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten

Perwujudan rencana kawasan strategis di Kabupaten Sintang, terdiri atas : kawasan strategis nasional, propinsi dan kabupaten.

A. Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Nasional, meliputi :
   1. Kawasanstrategis dari sudut kepentingan ekonomi dan perbatasan terdapat di Kawasan Jasa Kecamatan Ketungau Hulu;
   2. Kawasan Jantung Kalimantan merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdapat di kecamatan-kecamatan :
      a. Kecamatan Serawai
      b. Kecamatan Ambalau

B. Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Propinsi dengan sektor unggulan batu bara, terdapat di kecamatan-kecamatan :
   1. Kecamatan Ketungau Hulu;
   2. Kecamatan Ketungau Hilir;
   3. Kecamatan Ketungau Tengah;
   4. Kecamatan Kayan Hilir;
   5. Kecamatan Kayan Hulu;
   6. Kecamatan Serawai; dan
   7. Kecamatan Ambalau.

C. Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi kawasan strategis dengan berbagai sudut kepentingan sebagai berikut :
   1. Sudut Kepentingan Ekonomi; ditetapkan sebagai berikut :
      a. Pengembangan pertanian dan perkebunan di Kecamatan Sepauk;
      b. Pengembangan pertanian dan perkebunan di Kecamatan Tempunak
      c. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kayan Hilir;
      d. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Dedai, dan
      e. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Sungai Tebelian.
   2. Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditetapkan pada kawasan Ekosistem Muller sebagai zona perlindungan utama yang mencakup wilayah kecamatan sebagai berikut :
      a. Kecamatan Ambalau; dan
      b. Kecamatan Serawai
   3. Sudut Kepentingan Pariwisata, meliputi :
      a. Kawasan Sintang – Baning terdapat di Kecamatan Sintang;
      b. Kawasan Klutap (Bukit Kelam, Bukit Luit dan Bukit Rentap) terdapat di Kecamatan Kelam Permai;
      c. Kawasan Penyangga Serawai – Jelundung sebagai kawasan desa wisata TN Bukit Baka Bukit Raya terdapat di Kecamatan Serawai.

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
TAHUN 2016

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
						2016		
						TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(19)
			URUSAN WAJIB					
			PELAYANAN DASAR					
			PENDIDIKAN				65.452.327.168	
			Program Pendidikan Anak Usia Dini				573.674.040	DINAS PENDIDIKAN
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				39.577.245.730	DINAS PENDIDIKAN
			Program Pendidikan Menengah				9.719.621.565	DINAS PENDIDIKAN
			Program Pendidikan Non Formal				981.472.860	DINAS PENDIDIKAN
			Program Pendidikan Luar Biasa				-	DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				13.806.120.524	DINAS PENDIDIKAN
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan / TBM Mobile				116.779.989	DINAS PENDIDIKAN
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				677.412.461	DINAS PENDIDIKAN
			KESEHATAN				166.632.575.376,00	
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				11.398.810.000,00	DINAS KESEHATAN
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				27.046.645.000,00	DINAS KESEHATAN
			Program Pengawasan Obat dan Makanan				40.160.000,00	DINAS KESEHATAN
			Program Pengembangan Obat Asli Indonesia				10.962.000,00	DINAS KESEHATAN
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat				354.749.000,00	DINAS KESEHATAN
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat				880.781.900,00	DINAS KESEHATAN
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat				364.262.590	DINAS KESEHATAN
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				4.468.778.600,00	DINAS KESEHATAN
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				3.013.947.500,00	DINAS KESEHATAN
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				426.042.000,00	RSUD ADE.M.DJOEN
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				-	DINAS KESEHATAN
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				3.010.429.241	RSUD ADE.M.DJOEN
			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya				43.983.190.000,00	DINAS KESEHATAN
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				-	DINAS KESEHATAN
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				30.272.606.000	RSUD ADE.M.DJOEN
			Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				-	DINAS KESEHATAN
			Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				118.029.000,00	DINAS KESEHATAN
			Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita				57.269.000,00	DINAS KESEHATAN
			Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia				-	DINAS KESEHATAN
			Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan				80.146.000,00	DINAS KESEHATAN
			Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak				4.705.539.000,00	DINAS KESEHATAN
			Program Pelayanan Rumah Sakit				2.153.500.000	RSUD ADE.M.DJOEN
			Program Badan Layanan Umum Daerah				33.852.201.955	RSUD ADE. M. DJOEN
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)				30.264.000,00	DINAS KESEHATAN
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah				-	DINAS KESEHATAN
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat				364.262.590,00	DINAS KESEHATAN
			PEKERJAAN UMUM				326.004.828.296	DINAS PU
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				115.193.800.070	DINAS PU
			Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				23.307.331.378	DINAS PU
			Program Pembangunan turap/talud/brojong				726.350.000	DINAS PU
			Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan				14.465.845.296	DINAS PU

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
						2016		
						TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(19)
			Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan				115.000.000	BPBD
			Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan				500.000.000	DINAS PU
			Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan				-	BPBD
			Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan				150.000.000,00	DINAS PU
			Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan				14.876.530.616	DINAS PU
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya				13.743.745.430	DINAS PU
			Program penyediaan dan pengolahan air baku				-	DINAS PU
			Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya				-	DINAS PU
			Program pengendalian banjir				2.325.000.000	
			Program pembangunan infrastruktur perdesaaan				50.750.527.117	DINAS PU
							62.278.663.059	DINAS PU
			Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan				3.074.830.000	DINAS PU
			Program Pengawasan Jasa Konstruksi					DINAS PU
			Pembangunan Fasilitas Umum				20.726.150.000,00	DINAS PU
			Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				667.078.940,00	DINAS PU
			Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				407.786.731,00	DINAS PU
			Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				285.619.658,50	DINAS PU
			Program Pembangunan Sistem informasi/Data base Jalan dan Jembatan lokasi prioritas perbatasan				100.000.000	BPP
			Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Abrasi Pantai				290.000.000	BPBD
			Program Pembangunan Sarana/Prasarana serta Fasilitas Umum Perumahan Dan Pemukiman				2.020.570.000,00	DINAS PU
			PERUMAHAN				18.582.579.661	
			Program Pengembangan Perumahan					
			Program Lingkungan Sehat Perumahan				16.210.450.361	DINAS PU
			Program pengelolaan areal pemakaman				2.372.129.300	DKPPK
			PENATAAN RUANG				2.690.853.078	
			Program Perencanaan Tata Ruang				1.600.854.696	DINAS PU
			Program Pemanfaatan Ruang					DINAS PU
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				1.089.998.382	DINAS PU
			Program Perencanaan Tata Letak Bangunan dan Lingkungan				-	DINAS PU
			Program Perencanaan Infrastruktur Kota				-	DINAS PU
			Program Pengembangan Wilayah dan Arsitektur Kota				-	DINAS PU
			PERENCANAAN PEMBANGUNAN				62.014.050.254	
			Program Pengembangan data/informasi				110.349.165	BAPPEDA
			Program Pengembangan data/informasi				50.761.999.950	DINAS PU
			Program Kerjasama Pembangunan				212.383.770	BAPPEDA
			Program Pengembangan Wilayah Perbatasan				1.566.195.930	BPP
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh				280.501.215	DINAS PU
			Program perencanaan pembangunan daerah				5.530.849.526	BAPPEDA
			Program perencanaan pembangunan ekonomi				772.000.000	BAPPEDA
			Program perencanaan sosial budaya				1.564.996.991	BAPPEDA
			Program Peningkatan Wawasan dan Keterampilan				319.470.374	BPP
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Wilayah Perbatasan				147.557.626	BPP
			Program Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan				747.745.707	BPP
			PERHUBUNGAN				11.621.872.870	
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				1.810.000.000	DISHUBKOMINFO
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				204.490.000	DISHUBKOMINFO
			Program peningkatan pelayanan angkutan				464.415.220	DISHUBKOMINFO

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
						2016		
						TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(19)
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				7.943.139.650	DISHUBKOMINFO
			Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas					DISHUBKOMINFO
			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor					DISHUBKOMINFO
			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				1.199.828.000	DISHUBKOMINFO
			LINGKUNGAN HIDUP				13.053.935.777	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				2.540.694.484	BLH
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				4.963.790.990	DKPPK
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				1.421.279.439	BLH
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				-	DKPPK
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				819.299.250	BLH
			Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					BLH
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				327.414.111	BLH
			Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				1.399.298.600	DKPPK
			Program Peningkatan Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran				1.292.930.000	DKPPK
			Program Penegakan Hukum Lingkungan				-	DKPPK
			Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi				89.228.928	BLH
			Program Pengembangan Sistem Penataan dan Penegakan Hukum				199.999.976	BLH
			PERTANAHAN				4.413.644.986	
			Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				4.109.615.430	SETDA
			Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan				129.416.085	SETDA
			Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan				174.613.471	SETDA
			KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				1.209.748.570	
			Program Penataan Administrasi Kependudukan				1.209.748.570	DISDUKCAPIL
			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				1.440.297.567	BKBPP & PA
			Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan				543.713.687	BKBPP & PA
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				99.999.920	BKBPP & PA
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				796.583.960	BKBPP & PA
			KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				2.250.878.881	
			Program Keluarga Berencana				755.107.260	BKBPP & PA
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja				155.661.380	BKBPP & PA
			Program pelayanan kontrasepsi				938.150.860	BKBPP & PA
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri				289.802.201	BKBPP & PA
			Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				74.657.750	BKBPP & PA
			Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga				29.168.880	BKBPP & PA
			Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU				8.330.550	BKBPP & PA
			SOSIAL				**1.825.280.650**	
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				497.490.000	DINSOSNAKERTRAN
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				205.169.800	DINSOSNAKERTRAN
			Program Pembinaan Anak Terlantar					DINSOSNAKERTRAN
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				81.879.000	DINSOSNAKERTRAN
			Program Penanggulangan Bencana				53.000.000	DINSOSNAKERTRAN
			Program Pembinaan penyandang penyakit sosial				403.515.000	DINSOSNAKERTRAN
			Program Kesejahteraan Masyarakat					BPP

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
						2016		
						TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(19)
			Program Pembinaan Penyandang Disabilitas				109.196.850	DINSOSNAKERTRAN
			Program Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN				475.030.000	DINSOSNAKERTRAN
			TENAGA KERJA				2.165.534.872	
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				1.545.560.100	DINSOSNAKERTRAN
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja				78.500.000	DINSOSNAKERTRAN
			Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				294.319.772	DINSOSNAKERTRAN
			Pengembangan Wilayah Transmigrasi				75.000.000	DINSOSNAKERTRAN
			Program Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)				33.455.000	DINSOSNAKERTRAN
			Program Bursa Kerja Online				88.500.000	DINSOSNAKERTRAN
			Program Pelayanan Administrasi Retribusi dan Perpanjangan IMTA				50.200.000	DINSOSNAKERTRAN
			KOPERASI DAN USAHA MENENGAH				1.137.700.000	
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				587.000.000	DISPERINDAGKOP
			Program Pencapaian iklim usaha yang kondusif pada UMKM				550.700.000	DISPERINDAGKOP
			PENANAMAN MODAL DAERAH				1.542.665.917	BPMPTSP
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				727.605.850	BPMPTSP
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				435.295.172	BPMPTSP
			Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi				379.764.895	BPMPTSP
			Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana				-	BPMPTSP
			KEBUDAYAAN				2.871.869.403	
			Program Pengembangan Nilai Budaya				1.210.305.957	DINAS PENDIDIKAN
			Program Pengembangan Nilai Budaya				140.208.975	DISPORAPAREK
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				321.699.818	DINAS PENDIDIKAN
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				1.388.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				140.208.975	DISPORAPAREK
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya				213.752.900	DISPORAPAREK
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya				149.999.260	DINAS PENDIDIKAN
			Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya					DINAS PENDIDIKAN
			Program Penataan Kawasan Budaya dan Permukiman				200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Program Penataan Kawasan Budaya dan Permukiman				200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
			Program Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Kreatif				-	DISPORAPAREK
			Program Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Kreatif				117.999.475	DISPORAPAREK
			PEMUDA DAN OLAHRAGA				6.232.606.515	
			Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				255.607.500	DISPORAPAREK
			Program peningkatan peran serta kepemudaan				110.549.915	DINAS PENDIDIKAN
			Program peningkatan peran serta kepemudaan				1.075.569.600	DISPORAPAREK
			Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba				22.141.500	DISPORAPAREK
			Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga				44.968.000	DISPORAPAREK
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				403.598.600	DINAS PENDIDIKAN
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				1.094.677.500	DISPORAPAREK
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				-	DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				795.600.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				210.956.900	DISPORAPAREK
			Peringatan Hari Sumpah Pemuda				121.372.000	DISPORAPAREK
			Peringatan Hari Olahraga Nasional				890.730.600	DISPORAPAREK
			Training Center (TC) dan Try Out Atlet				72.455.000	DISPORAPAREK
			Pengembangan Olahraga Rekreasi				923.422.500	DISPORAPAREK
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				210.956.900	DISPORAPAREK
			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				2.174.290.114	
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				50.450.000	POLPP

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
						2016		
						TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(19)
			Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				46.759.000	KESBANGPOL
			Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				264.600.000	POLPP
			Program pengembangan wawasan kebangsaan				109.147.938	KESBANGPOL
			Program pengembangan wawasan kebangsaan				201.986.000	POLPP
			Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan				169.004.425	KESBANGPOL
			Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				174.999.830	POLPP
			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)				54.276.600	KESBANGPOL
			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)				231.036.000	POLPP
			Program pendidikan politik masyarakat				227.289.812	KESBANGPOL
			Program Fasilitasi peningkatan demokrasi dan pemilu				-	KESBANGPOL
			Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam				550.796.119	BPBD
			Pelakasanaan Koordinasi Intelijen Daerah				54.699.390	KESBANGPOL
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah				39.245.000	POLPP
			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN				28.104.767.954	
			Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				8.443.968.981	SEKWAN
			Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				7.009.512.287	BPKAD
			Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				7.985.148.379	DISPENDA
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				3.457.664.760	INSPEKTORAT
			Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan				566.868.864	INSPEKTORAT
			Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan				4.277.213	INSPEKTORAT
			Program Mengintensifkan penanganan pengaduan dan Informasi Pelayanan Publik				178.619.300	BPMPTSP
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				201.380.000	BPMPTSP
			Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan				18.666.750	SEKWAN
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia				198.884.266	BPP
			Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi					DISHUBKOMINFO
			Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat				39.777.154	SEKWAN
			KETAHANAN PANGAN				676.172.900	
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan				676.172.900	BP4KKP
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				2.133.878.050	
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					
			Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan				205.852.510	BPMPD
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa				689.898.565	BPMPD
			Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				769.591.475	BPMPD
			Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan				468.535.500	BPMPD
			STATISTIK				624.999.538	
			Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				624.999.538	BAPPEDA
			KEARSIPAN				269.147.500	
			Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				132.093.500	ARPUSDA
			Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan				91.264.000	ARPUSDA
			Program peningkatan kualitas pelayanan informasi				45.790.000	ARPUSDA
			Program Arsip Masuk Desa					

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
						2016		
						TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(19)
			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2.699.155.150	
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				248.745.000	DISHUBKOMINFO
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				928.690.000	SEKWAN
			Program kerjasama informsi dan media massa				1.416.341.250	SEKDA
			Program Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika				105.378.900	DISHUBKOMINFO
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					DISHUBKOMINFO
			PERPUSTAKAAN				403.834.700	
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				403.834.700	ARPUSDA
			PERTANIAN				5.931.691.252	
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				80.011.607	DISHUTBUN
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				894.822.325	BP4KKP
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan				34.381.536	DPPP
			Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan				68.572.600	DPPP
			Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan				240.420.500	BP4KKP
			Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				870.446.665	DISHUTBUN
			Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan				1.099.280.000	BP4KKP
			Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				538.911.755	DPPP
			Program peningkatan produksi hasil peternakan				747.744.676	DPPP
			Program peningkatan penerapan teknologi petemakan				97.099.588	DPPP
			Program Bina Usaha dan Produksi Peternakan					DPPP
			Program peningkatan keamanan pangan produk hewan				1.260.000.000	DPPP
			Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan					DISHUTBUN
			Program Perlindungan Tanaman Perkebunan					DISHUTBUN
			KEHUTANAN				15.037.700.887	
			Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan				450.461.917	DISHUTBUN
			Program rehabilitasi hutan dan lahan				12.585.142.960	DISHUTBUN
			Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan				180.638.523	DISHUTBUN
			Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan				114.223.350	DISHUTBUN
			Program Pengembangan Rehabilitas Hutan dan Lahan				1.207.234.138	DISHUTBUN
			Program Pembangunan perkebunan				500.000.000	DISHUTBUN
			ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				1.133.807.380	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
			Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan				752.218.030	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
			Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan				132.759.000	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
			Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan				100.000.000	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
			Program Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral					DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
			Program Pembinaan Bidang Miyak Bumi dan Gas				148.830.350	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
			PARIWISATA				1.304.225.550	DISPORAPAREK
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				411.805.000	DISPORAPAREK
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				576.206.900	DISPORAPAREK
			Pengembangan Daerah Tujuan Wisata				246.206.900	DISPORAPAREK
			Program Pengembangan Kemitraan				33.726.750	DISPORAPAREK
			Monitoring Evaluasi danPelaporan				36.280.000	DISPORAPAREK
			KELAUTAN DAN PERIKANAN				11.052.906.200	
			Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan					DPPP

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
						2016		
						TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(19)
			Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan				62.964.500	BP4KKP
			Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan				145.381.100	DPPP
			Program pengelolaan dan pengembangan sumber daya perikanan budidaya				10.844.560.600	DPPP
			PERDAGANGAN				10.087.946.050	
			Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan				295.908.250	DISPERINDAGKOP
			Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional				-	DISPERINDAGKOP
			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor					DISPERINDAGKOP
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri				8.542.665.900	DISPERINDAGKOP
			Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan				194.370.000	DISPERINDAGKOP
			Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				1.055.001.900	DISPERINDAGKOP
			PERINDUSTRIAN				856.734.750	
			Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				-	DISPERINDAGKOP
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				735.877.000	DISPERINDAGKOP
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				-	DISPERINDAGKOP
			Program Penataan Struktur Industri				120.857.750	DISPERINDAGKOP
			Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial				-	DISPERINDAGKOP
			TRANSMIGRASI				150.000.000	
			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				75.000.000	DINSOSNAKERTRAN
			Program Transmigrasi Lokal				75.000.000	DINSOSNAKERTRAN
			Program Transmigrasi Regional					
			SKPD					
			DINAS PENDIDIKAN				4.821.075.645	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.839.027.315	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				775.969.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				120.920.000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				85.159.330	
			DINAS KESEHATAN				26.170.280.000,00	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				7.623.390.000,00	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				17.885.400.000,00	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur				73.830.000,00	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				587.660.000,00	
			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE M. DJOEN				3.599.101.897	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				184.400.000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				3.215.001.897	
			Program peningkatan disiplin aparatur				199.700.000	
			DINAS PEKERJAAN UMUM				49.372.734.440	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.995.515.128	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				36.044.282.500	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				255.140.000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				77.426.812	
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				10.000.370.000	
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				3.338.906.861	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.825.858.206	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
						2016		
						TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(19)
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				946.534.500	
			Program peningkatan disiplin aparatur				101.750.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				416.195.000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				48.569.155	
			DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3.037.053.220	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.555.454.220	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.132.225.000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur				56.250.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				282.080.000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				11.044.000	
			BADAN LINGKUNGAN HIDUP				2.060.663.683	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.312.254.083	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				501.039.600	
			Program peningkatan disiplin aparatur				28.200.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				219.170.000	
			DINAS KEBERSIHAN, KEBAKARAN DAN PERTAMANAN				2.502.256.370	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.755.175.630	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				455.873.900	
			Program peningkatan disiplin aparatur				22.950.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				227.935.000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				40.321.840	
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				1.550.242.470	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				912.112.735	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				344.128.550	
			Program peningkatan disiplin aparatur				30.550.000	
			Program fasilitas pindah/purna tugas PNS					
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				214.680.000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				48.771.185	
			BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.559.103.552	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.152.908.186	
			Program peningkatan disiplin aparatur				64.310.500	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				180.950.000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				160.934.866	
			DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				1.374.744.478	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran				650.022.978	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				429.327.000	
			Program Peningkatan Displin Aparatur				33.000.000	
			Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur				230.980.000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan				31.414.500	
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				1.044.173.681	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				741.291.251	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				117.400.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				24.870.000	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
						2016		
						TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(19)
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				156.605.000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4.007.430	9.000
			DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				2.012.689.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.064.096.450	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				681.814.910	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur				47.500.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				180.150.000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				39.127.640	
			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				1.338.822.835	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				658.000.784	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				594.142.051	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				86.680.000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan.					
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				2.428.923.170	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				833.289.248	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				628.730.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				121.485.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				828.856.536	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				16.562.386	
			SEKRETARIAT DAERAH				57.389.268.231	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				33.372.017.801	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				21.638.561.930	
			Program peningkatan disiplin aparatur				506.348.500	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				1.872.340.000	
			SEKRETARIAT DPRD				10.924.616.164	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.470.219.816	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				5.093.364.900	
			Program peningkatan disiplin aparatur				355.230.145	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				990.847.750	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				14.953.553	
			BPKAD				3.203.825.240	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.772.963.329	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				709.170.988	
			Program peningkatan disiplin aparatur				30.600.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				603.860.000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				87.230.923	
			INSPEKTORAT KABUPATEN				1.638.169.131	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.063.663.875	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				366.535.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				45.500.000	
			Program fasilitas pindah/purna tugas PNS					
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				148.817.000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				13.653.256	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
						2016		
						TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(19)
			BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				12.098.381.265	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.068.912.591	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				783.891.550	
			Program peningkatan disiplin aparatur				39.900.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				4.484.438.145	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				120.690.880	
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				148.665.000	
			Program Pembangunan Fasilitas Kantor				200.000.000	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				5.251.883.099	
			BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				1.887.334.742	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				745.895.046	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				455.821.732	
			Program peningkatan disiplin aparatur				55.500.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				228.108.600	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				22.009.514	
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				379.999.850	
			BADAN PENGELOLA PERBATASAN				2.115.703.703	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				645.633.280	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				1.072.385.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				29.950.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				155.445.000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				212.290.423	
			DINAS PENDAPATAN DAERAH				3.113.125.919	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.248.007.510	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				1.682.466.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				149.875.000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				32.777.409	
			BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA				1.619.072.780	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				977.856.780	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				385.296.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				26.000.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				229.920.000	
			DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN				1.244.134.845	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				984.765.000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				68.000.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				179.370.000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				11.999.845	
			BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN				2.853.739.395	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.216.939.530	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				1.361.337.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				112.800.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				135.260.000	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
						2016		
						TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(19)
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				27.402.865	
			DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN				1.268.842.217	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				905.848.413	
			Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur				215.100.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				127.155.000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				20.738.804	
			DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI				908.776.170	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				620.790.645	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				93.400.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				20.700.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				169.305.525	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4.580.000	
			DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				1.725.435.900	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.135.519.750	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				198.661.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				66.720.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				321.995.000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				2.540.150	
			KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH				1.240.767.800	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				582.600.150	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				258.900.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				14.950.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				373.817.650	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				10.500.000	
			KECAMATAN SEI. TEBELIAN				897.750.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.800.000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.260.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				700.000.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.260.000	
			Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.260.000	
			Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.170.000	
			KECAMATAN KELAM PERMAI				797.750.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.800.000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.260.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				600.000.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.260.000	
			Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.260.000	
			Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.170.000	
			KECAMATAN BINJAI HULU				797.750.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.800.000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.260.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				600.000.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.260.000	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
						2016		
						TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(19)
			Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.260.000	
			Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.170.000	
			KECAMATAN TEMPUNAK				797.750.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.800.000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.260.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				600.000.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.260.000	
			Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.260.000	
			Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.170.000	
			KECAMATAN DEDAI				797.750.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.800.000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.260.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				600.000.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.260.000	
			Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.260.000	
			Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.170.000	
			KECAMATAN SEPAUK				797.750.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.800.000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.260.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				600.000.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.260.000	
			Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.260.000	
			Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.170.000	
			KECAMATAN KETUNGAU HILIR				797.750.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.800.000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.260.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				600.000.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.260.000	
			Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.260.000	
			Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.170.000	
			KECAMATAN KETUNGAU TENGAH				797.750.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.800.000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.260.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				600.000.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.260.000	
			Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.260.000	
			Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.170.000	
			KECAMATAN KETUNGAU HULU				1.075.000.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				435.338.000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				268.737.500	
			Program peningkatan disiplin aparatur				17.850.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				119.500.000	
			Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				233.574.500	
			KECAMATAN KAYAN HILIR				797.750.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.800.000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.260.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				600.000.000	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
						2016		
						TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(19)
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.260.000	
			Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.260.000	
			Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.170.000	
			KECAMATAN KAYAN HULU				797.750.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.800.000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.260.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				600.000.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.260.000	
			Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.260.000	
			Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.170.000	
			KECAMATAN SERAWAI				797.750.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.800.000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.260.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				600.000.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.260.000	
			Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.260.000	
			Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.170.000	
			KECAMATAN AMBALAU				797.750.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.800.000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.260.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				600.000.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.260.000	
			Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.260.000	
			Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.170.000	
			KECAMATAN SINTANG				797.750.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.800.000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.260.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				600.000.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.260.000	
			Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.260.000	
			Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.170.000	
			KELURAHAN TANJUNGPURI				205.781.233	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				86.401.033	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				59.205.200	
			Program peningkatan disiplin aparatur				4.530.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				55.645.000	
			KELURAHAN KAPUAS KIRI HULU				205.781.233	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				86.401.033	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				59.205.200	
			Program peningkatan disiplin aparatur				4.530.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				55.645.000	
			KELURAHAN KAPUAS KIRI HILIR				205.781.233	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				86.401.033	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				59.205.200	
			Program peningkatan disiplin aparatur				4.530.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				55.645.000	
			KELURAHAN KAPUAS KANAN HILIR				205.781.233	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				86.401.033	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
						2016		
						TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(19)
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				59.205.200	
			Program peningkatan disiplin aparatur				4.530.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				55.645.000	
			KELURAHAN LADANG				205.781.233	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				86.401.033	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				59.205.200	
			Program peningkatan disiplin aparatur				4.530.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				55.645.000	
			KELURAHAN KANAN HULU				205.781.233	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				86.401.033	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				59.205.200	
			Program peningkatan disiplin aparatur				4.530.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				55.645.000	
			KELURAHAN AKCAYA				205.781.233	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				86.401.033	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				59.205.200	
			Program peningkatan disiplin aparatur				4.530.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				55.645.000	
			KELURAHAN ALAI				205.781.233	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				86.401.033	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				59.205.200	
			Program peningkatan disiplin aparatur				4.530.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				55.645.000	
			KELURAHAN KEDABANG				205.781.233	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				86.401.033	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				59.205.200	
			Program peningkatan disiplin aparatur				4.530.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				55.645.000	
			KELURAHAN MENYUMNBUNG TENGAH				205.781.233	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				86.401.033	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				59.205.200	
			Program peningkatan disiplin aparatur				4.530.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				55.645.000	
			KELURAHAN ULAK JAYA				205.781.233	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				86.401.033	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				59.205.200	
			Program peningkatan disiplin aparatur				4.530.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				55.645.000	
			KELURAHAN SENGKUANG				205.781.233	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				86.401.033	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				59.205.200	
			Program peningkatan disiplin aparatur				4.530.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				55.645.000	
			KELURAHAN RAWA MAMBOK				165.573.500	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				72.434.800	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				55.658.700	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
						2016		
						TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(19)
			Program peningkatan disiplin aparatur				7.200.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				30.280.000	
			KELURAHAN BATU LALAU				189.971.524	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				59.720.000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				46.291.524	
			Program peningkatan disiplin aparatur				10.800.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				73.160.000	
			KELURAHAN MEKAR JAYA				116.515.075	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				77.763.075	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				26.692.000	
			Program peningkatan disiplin aparatur				12.060.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					
TOTAL							**846.732.156.876,00**	

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

TAHUN 2017 - 2021

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
	URUSAN WAJIB													
	PELAYANAN DASAR													
	PENDIDIKAN				**174.952.244.894**		**176.011.888.592**		**212.436.479.623**		**232.454.435.709**		**254.473.926.468**	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini				3.891.041.444		4.041.266.273		4.194.192.900		4.362.412.190		4.547.453.409	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				127.924.769.542		141.202.285.952		154.836.024.004		169.757.235.862		186.170.568.904	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Pendidikan Menengah				25.736.889.704		28.075.056.874		30.647.040.761		33.476.223.037		36.588.323.541	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Pendidikan Non Formal				1.424.238.834		1.566.662.716		1.723.328.988		1.895.661.887		2.085.228.076	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				15.053.989.563		18.169.388		19.830.327.372		21.656.860.109		23.665.546.120	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan / TBM Mobile				118.435.721		130.279.293		143.307.222		157.637.944		173.401.739	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				802.880.087		978.168.096		1.062.258.376		1.148.404.679		1.243.404.679	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	KESEHATAN				**140.367.219.261,00**		**172.659.522.954,76**		**194.787.931.471,38**		**221.471.359.351,59**		**194.160.552.677,49**	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				8.751.637.000,00		9.626.800.700,00		10.589.480.770,00		11.648.428.847,00		12.813.271.731,00	DINAS KESEHATAN
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				15.591.187.577,00		17.124.486.035,00		18.836.934.638,00		20.720.628.102,00		22.792.690.912,00	DINAS KESEHATAN
	Program Pengawasan Obat dan Makanan				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	am Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD				240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00	DINAS KESEHATAN
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat				745.180.100,00		819.698.110,00		901.667.921,00		991.834.713,00		1.091.018.184,00	DINAS KESEHATAN
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				968.860.090,00		1.065.746.099,00		1.172.320.708,00		1.289.552.779,00		1.418.508.057,00	DINAS KESEHATAN
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				412.124.120		453.336.532		498.670.185		548.537.203		603.390.924	DINAS KESEHATAN
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				3.219.366.995,00		3.541.303.695,00		3.895.434.064,00		4.284.977.471,00		4.713.475.218,00	DINAS KESEHATAN
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				1.364.980.000,00		1.501.478.000,00		1.900.643.921,00		1.816.788.380,00		1.998.467.218,00	DINAS KESEHATAN
	Program Pengadaan Tenaga Kesehatan													
	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin				210.000.000		188.000.000		245.300.000		228.030.000		326.833.000	DINAS KESEHATAN
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya				38.236.753.920,00		20.407.451.242,00		21.447.940.016,00		23.873.686.697,00		26.220.222.631,00	DINAS KESEHATAN
	Program pengadaan, peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				-		33.650.000		37.015.000		40.716.500		111.381.500	DINAS KESEHATAN
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				329.831.900,00		362.815.090,00		399.096.599,00		439.006.258,00		482.906.884,00	DINAS KESEHATAN
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita				276.694.385,00		304.363.823,00		334.800.205,00		368.280.226,00		405.108.249,00	DINAS KESEHATAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia				210.309.000,00		231.339.900,00		254.473.890,00		279.921.279,00		307.913.406,00	DINAS KESEHATAN
	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan				180.000.000,00		198.000.000,00		217.800.000,00		239.580.000,00		263.538.000,00	DINAS KESEHATAN
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak				4.088.229.271,00		4.497.052.198,00		4.946.757.418,00		5.441.433.160,00		5.985.576.476,00	DINAS KESEHATAN
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)				262.064.000,00		288.270.400,00		317.097.440,00		348.807.184,00		383.687.902,00	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah				605.043.800,00		665.548.180,00		732.102.998,00		805.313.297,00		885.844.627,00	DINAS KESEHATAN
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				30.540.838.000		67.840.034.072		72.171.077.156		76.199.157.526		20.521.265.828	RSUD ADE.M.DJOEN
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				465.000.000		1.393.750.000		1.742.187.500		2.177.734.375		2.722.167.969	RSUD ADE.M.DJOEN
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00	RSUD ADE.M.DJOEN
	Program Pelayanan Rumah Sakit				2.193.500.000		2.741.875.000		3.290.250.000		3.948.300.000		4.935.375.000	RSUD ADE.M.DJOEN
	Program Badan Layanan Umum Daerah				30.575.619.103		38.219.523.879		49.685.381.042		64.590.995.355		83.968.293.962	RSUD ADE. M. DJOEN
	PEKERJAAN UMUM				**320.206.159.243**		**392.602.364.664**		**471.610.450.326**		**525.171.316.575**		**759.262.658.753**	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				155.291.156.404		186.970.272.044		140.577.494.238		171.741.370.662		177.623.174.939	DINAS PU
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				5.946.000.000		6.842.000.000		7.441.500.000		8.185.650.000		5.406.993.000	DINAS PU
	Program Pembangunan turap/talud/brojong				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	DINAS PU
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan				30.000.000.000		60.000.000.000		90.340.000.000		104.340.000.000		110.000.000.000	DINAS PU
	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan				625.000.000		815.000.000		990.000.000		1.100.000.000		1.205.000.000	BPBD
	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan				165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		241.576.500,00	DINAS PU
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan				8.500.000.000		5.630.000.000		1.763.000.000		899.300.000		939.230.000	DINAS PU
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya				17.383.000.000		14.773.000.000		54.943.000.000		45.937.000.000		168.563.000.000	DINAS PU
	Program penyediaan dan pengolahan air baku				3.300.000.000		6.600.000.000		9.900.000.000		9.900.000.000		33.000.000.000	DINAS PU
	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya				6.500.000.000		13.000.000.000		19.500.000.000		19.500.000.000		66.000.000.000	DINAS PU
	Program pengendalian banjir				5.100.000.000		4.400.000.000		4.400.000.000		8.000.000.000		27.000.000.000	DINAS PU
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan				23.787.679.839		25.640.447.822		26.362.447.822		27.256.834.322		29.092.517.755	DINAS PU
	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan				4.047.150.000		4.451.865.000		4.451.865.000		4.897.051.500		5.386.756.650	DINAS PU
	Program Pengawasan Jasa Konstruksi				1.300.000.000		1.430.000.000		1.573.000.000		1.730.300.000		1.903.330.000	DINAS PU
	Pembangunan Fasilitas Umum				653.000.000,00		718.300.000,00		1.371.300.000,00		1.508.430.000,00		1.659.273.000,00	DINAS PRKP
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				491.189.966,00		540.308.962,00		1.031.498.928,00		1.134.648.821,00		1.248.113.703,00	DINAS PRKP
	Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Abrasi Pantai				550.000.000		835.000.000		1.120.000.000		1.325.000.000		1.575.000.000	BPBD
	Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00	SEKDA
	PERUMAHAN				**29.957.066.517**		**31.753.267.918**		**54.677.779.669**		**60.813.483.885**		**66.506.314.928**	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan				20.894.294.000		22.983.723.400		43.878.017.400		48.265.819.140		53.092.401.054	DINAS PRKP

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				450.052.517		450.052.518		495.057.569		544.563.125		599.019.237	SATPOL PP
	Program pengelolaan areal pemakaman				2.395.000.000		1.495.000.000		3.062.950.000		4.038.671.450		4.056.821.450	DLH
	Program penataan makam sebagai fungsi RTH				150.000.000		150.000.000		345.000.000		378.000.000		413.000.000	DLH
	Program Pembangunan Sarana/Prasarana serta Fasilitas Umum Perumahan Dan Pemukiman				2.020.570.000,00		2.222.627.000,00		2.444.889.700,00		2.689.378.670,00		2.958.316.537,00	DINAS PRKP
	Program Sarana dan Prasarana Air Minum Perdesaan				4.047.150.000		4.451.865.000		4.451.865.000		4.897.051.500		5.386.756.650	DINAS PRKP
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				-		44.000.358		48.400.393		53.240.433		58.564.476	SEKDA
	PENATAAN RUANG				**6.500.000.000**		**14.500.000.000**		**15.950.000.000**		**17.545.000.000**		**20.176.750.000**	
	Program Perencanaan Tata Ruang				3.550.000.000		11.550.000.000		12.705.000.000		13.975.500.000		16.071.825.000	DPRP
	Program Pemanfaatan Ruang				2.150.000.000		2.150.000.000		2.365.000.000		2.601.500.000		2.991.725.000	DPRP
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				800.000.000		800.000.000		880.000.000		968.000.000		1.113.200.000	DPRP
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				**8.951.948.619**		**10.612.609.544**		**11.865.870.838**		**13.062.457.650**		**14.397.985.507**	
	Program Pengembangan data/informasi				244.287.791		256.502.181		282.152.399		310.367.368		341.404.402	BAPPEDA
	Program Pengembangan data/informasi				150.000.000		219.010.343		275.911.377		318.502.514		362.852.766	SEKDA
	Program Kerjasama Pembangunan				844.823.628		929.305.991		1.022.236.590		1.124.460.249		1.236.906.274	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh				256.028.940		261.631.524		309.795.017		340.774.519		374.651.971	DINAS PU
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh				150.000.000		150.000.000		300.000.000		325.000.000		375.000.000	SEKDA
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar				60.000.000,00		66.000.000,00		72.600.000,00		79.860.000,00		87.000.000,00	
	Program perencanaan pembangunan daerah				1.905.998.365		2.096.598.202		2.306.258.022		2.536.883.824		2.790.900.000	BAPPEDA
	Program perencanaan pembangunan daerah				300.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000		805.255.000	SEKDA
	Program perencanaan pembangunan ekonomi				570.711.100		627.782.210		690.560.431		759.616.474		835.578.122	BAPPEDA
	Program Perencanaan Perekonomian				-		483.670.418		532.037.460		585.241.206		643.765.326	SEKDA
	Program perencanaan sosial budaya				1.118.348.795		1.230.183.675		1.353.202.042		1.488.522.246		1.637.374.471	BAPPEDA
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan				287.087.000		315.795.700		347.375.270		382.112.797		420.324.077	SEKDA
	Program Peningkatan Wawasan dan Keterampilan				632.913.000		696.204.300		765.824.730		842.407.203		926.647.923	SEKDA
	Program Pengelolaan Insfrastruktur Kawasan Perbatasan				1.463.750.000		1.610.125.000		1.771.137.500		1.948.251.250		2.143.076.375	SEKDA
	Program Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan				968.000.000		1.064.800.000		1.171.280.000		1.288.408.000		1.417.248.800	SEKDA
	Program Kerjasama Pembangunan Daerah						824.126.855		1.091.539.540		1.213.193.494		1.344.512.844	SEKDA
	PERHUBUNGAN				**22.943.940.360**		**13.140.604.950**		**14.725.764.195**		**14.815.180.614**		**11.983.938.675**	
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		-		-	DISHUB
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				300.710.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	DISHUB
	Program peningkatan pelayanan angkutan				202.973.360		449.267.450		421.834.195		436.207.614		469.918.375	DISHUB
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				20.054.257.000		7.950.000.000		11.600.000.000		11.600.000.000		8.600.000.000	DISHUB
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				150.000.000		739.037.500		-		-		-	DISHUB

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				2.136.000.000		3.702.300.000		2.403.930.000		2.578.973.000		2.714.020.300	DISHUB
	LINGKUNGAN HIDUP				**16.420.718.572**		**20.129.641.909**		**22.632.403.957**		**14.501.787.032**		**27.174.150.569**	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				4.998.790.990		6.603.500.000		7.307.350.000		8.238.585		9.826.643.500	DLH
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				803.433.505		2.034.575.129		2.290.207.610		2.379.228.371		2.575.837.208	DLH
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				819.299.250		1.279.228.187		1.134.151.006		1.555.966		1.690.939.876	DLH
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				264.697.940		198.523.455		271.312.292		298.443.521		328.287.873	DLH
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				4.653.398.600		5.495.100.000		6.027.700.000		6.594.310.000		7.217.581.000	DLH
	Program Peningkatan Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran				4.050.000.000		2.080.000.000		2.330.000.000		2.440.000.000		2.905.000.000	SATPOLPP
	Program Penegakan Hukum Lingkungan				-		130.000.000		150.000.000		250.000.000		200.000.000	DLH
	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi				89.228.928		142.313.101		538.640.808		491.264.124		555.000.000	DLH
	Program Pengembangan Sistem Penataan dan Penegakan Hukum				741.869.359		2.166.402.037		2.583.042.241		2.038.746.465		1.874.861.112	DLH
	PERTANAHAN				**4.262.691.629**		**5.859.701.760**		**6.428.912.307**		**7.054.205.927**		**8.075.381.834**	
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				3.943.460.595		5.524.509.175		6.076.960.092		6.684.656.101		7.687.354.517	DPRP
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan				135.886.889		142.681.234		149.815.295		157.306.060		165.171.363	DPRP
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan				183.344.145		192.511.352		202.136.919		212.243.765		222.855.954	DPRP
	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				**1.777.376.190**		**2.906.847.250**		**3.110.194.760**		**3.297.464.236**		**3.469.960**	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan				1.777.376.190		2.906.847.250		3.110.194.760		3.297.464.236		3.469.960	DISDUKCAPIL
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				**1.523.581.140**		**1.675.939.254**		**1.843.533.181**		**2.027.886.499**		**2.230.675.147**	
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan				678.581.140		746.439.254		821.083.181		903.191.499		993.510.647	DKBPP & PA
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	DKBPP & PA
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				745.000.000		819.500.000		901.450.000		991.595.000		1.090.754.500	DKBPP & PA
	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				**3.380.086.860**		**2.667.595.557**		**2.937.355.113**		**3.231.090.624**		**3.554.199.686**	
	Program Keluarga Berencana				985.086.860		863.595.557		949.955.113		1.044.950.624		1.149.445.686	DKBPP & PA
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja				155.000.000		170.500.000		187.550.000		206.305.000		226.935.500	DKBPP & PA
	Program pelayanan kontrasepsi				690.000.000		297.000.000		326.700.000		359.370.000		395.307.000	DKBPP & PA
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri				465.000.000		511.500.000		565.650.000		622.215.000		684.436.500	DKBPP & PA
	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				355.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000	DKBPP & PA
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga				700.000.000		770.000.000		847.000.000		931.700.000		1.024.870.000	DKBPP & PA
	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD				30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	DKBPP & PA

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
	SOSIAL				**1.482.285.850**		**1.371.626.860**		**2.762.489.546**		**3.192.738.501**		**3.505.512.351**	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				774.494.000		440.000.000		846.500.000		931.150.000		1.024.265.000	DINAS SOSIAL
	Program Bimbingan, Motivasi, dan Konsolidasi				62.792.900		69.072.190		75.979.409		83.577.350		91.935.085	DINAS SOSIAL
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				280.204.950		314.554.670		565.010.137		760.511.151		764.562.266	DINAS SOSIAL
	Program Pembinaan Anak Terlantar				-		-		60.000.000		66.000.000		72.600.000	DINAS SOSIAL
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				-		170.000.000		472.000.000		538.700.000		692.570.000	DINAS SOSIAL
	Program Penanggulangan Bencana				-		-		100.000.000		110.000.000		121.000.000	DINAS SOSIAL
	Program Pembinaan penyandang penyakit sosial				200.247.500		148.000.000		265.000.000		311.500.000		333.650.000	DINAS SOSIAL
	Program Pembinaan Penyandang Disabilitas				90.600.100		180.000.000		283.000.000		296.300.000		309.930.000	DINAS SOSIAL
	Program Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN				73.946.400		50.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000	DINAS SOSIAL
	TENAGA KERJA				**1.936.796.300**		**1.160.603.370**		**1.203.163.707**		**1.331.980.078**		**1.480.110.000**	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				1.495.560.000		638.183.370		656.601.707		706.585.000		730.000.000	DINAKERTRAN
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				78.500.000		81.850.000		85.535.000		100.000.000		120.000.000	DINAKERTRAN
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				166.390.000		248.000.000		253.200.000		296.785.378		360.110.000	DINAKERTRAN
	Program Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)				-		-		-		-		-	DINAKERTRAN
	Program Bursa Kerja Online				88.500.000		97.350.000		107.085.000		117.793.500		130.000.000	DINAKERTRAN
	Program Pelayanan Administrasi Retribusi dan Perpanjangan IMTA				107.846.300		95.220.000		100.742.000		110.816.200		140.000.000	DINAKERTRAN
	KOPERASI DAN USAHA MENENGAH				**6.761.700.000**		**6.906.700.000**		**6.996.700.000**		**7.096.700.000**		**7.211.700.000**	
	Program penciptaan iklim Usaha yang kondusif pada UMKM				700.000.000		725.000.000		730.000.000		740.000.000		750.000.000	DISPERINDAGKOP & UKM
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif pada UMKM				1.095.000.000		1.115.000.000		1.125.000.000		1.145.000.000		1.150.000.000	DISPERINDAGKOP & UKM
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				1.590.400.000		1.645.400.000		1.700.400.000		1.745.400.000		1.810.400.000	DISPERINDAGKOP & UKM
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				3.376.300.000		3.421.300.000		3.441.300.000		3.466.300.000		3.501.300.000	DISPERINDAGKOP & UKM
	PENANAMAN MODAL DAERAH				**1.342.740.196**		**1.274.569.531**		**1.538.323.400**		**1.613.995.158**		**1.586.094.674**	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				760.000.000		465.000.000		873.000.000		838.000.000		704.500.000	DPMPTSP
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				100.680.496		191.739.846		121.823.400,16		371.645.158,18		408.809.673,99	DPMPTSP
	Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi				355.000.000		385.000.000,00		408.500.000,00		284.350.000,00		472.785.000,00	DPMPTSP
	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana				127.059.700		232.829.685		135.000.000		120.000.000			DPMPTSP
	KEBUDAYAAN				**15.443.326.412**		**16.967.659.053**		**24.398.274.959**		**28.373.002.455**		**29.479.912.700**	
	Program Pengembangan Nilai Budaya				3.126.062.250		3.737.918.475		4.053.660.323		4.398.976.355		4.776.823.990	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Nilai Budaya				145.000.000		159.500.000		175.450.000		192.995.000		212.294.500	DISPORAPAR
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				198.000.000		217.800.000		239.580.000		263.538.000		289.891.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				6.465.000.000		7.111.500.000		13.576.500.000		14.934.150.000		16.427.565.000	DINAS PRKP
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000		322.102.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				961.726.990		1.057.899.689		1.163.689.658		1.280.058.624		1.408.064.486	DISPORAPAR
	Program Penataan Kawasan Budaya dan Permukiman				7.468.800.000		8.195.680.000		8.995.248.000		9.874.772.800		10.842.250.080	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif				129.799.422		142.779.364		157.057.301		1.727.663.031		190.039.334	DISPORAPAR
	PEMUDA DAN OLAHRAGA				**348.144.646.602**		**5.227.224.013**		**5.986.201.156**		**6.645.928.508**		**7.307.598.563**	
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				267.823.050		294.605.355		324.065.891		356.472.480		392.119.728	DISPORAPAR
	Program peningkatan peran serta kepemudaan				121.606.144		133.036.058		144.878.265		157.173.994		169.968.597	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program peningkatan peran serta kepemudaan				1.329.469.010		1.462.415.911		1.608.657.502		1.769.523.252		1.946.475.578	DISPORAPAR
	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba				62.591.750		68.850.925		7.536.018		83.309.619		91.640.581	DISPORAPAR
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga				44.968.000		49.464.800		54.411.280		59.852.408		65.837.649	DISPORAPAR
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				1.083.010.649		1.191.311.713		1.310.442.885		1.441.487.173		1.585.635.890	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				1.370.678.000		1.497.090.650		1.646.799.715		1.799.759.022		1.979.734.924	DISPORAPAR
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.243.500		56.367.850	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				343.726.000.000		378.098.600		721.824.600		794.007.060		873.407.766	DINAS PRKP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	DISPORAPAR
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				**2.092.481.480**		**6.888.459.473**		**5.503.339.889**		**5.783.873.878**		**6.464.611.268**	
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				55.495.000		61.044.500		67.148.950		73.863.845		81.250.230	POLPP
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				315.275.000		346.802.500		381.482.750		419.631.025		461.594.128	POLPP
	Program pengembangan wawasan kebangsaan				26.721.150		100.000.000		1.045.000.000		1.115.000.000		1.185.000.000	KESBANGPOL
	Program pengembangan wawasan kebangsaan				222.184.600		244.403.060		268.843.366		295.727.703		325.300.473	POLPP
	Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan				140.389.500		395.000.000		1.370.000.000		1.450.000.000		1.530.000.000	KESBANGPOL
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				250.749.830		4.374.824.813		275.824.813		303.407.294		333.748.024	POLPP
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)				231.036.000		254.139.600		279.553.560		307.508.916		338.259.808	POLPP
	Program pendidikan politik masyarakat				218.215.900		170.000.000		1.015.000.000		1.095.000.000		1.175.000.000	KESBANGPOL
	Program Fasilitasi peningkatan demokrasi dan pemilu				-		350.000.000		5.500.000		11.000.000		16.500.000	KESBANGPOL
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam				510.000.000		483.000.000		682.500.000		590.500.000		885.500.000	BPBD
	Pelakasanaan Koordinasi Intelijen Daerah				83.169.500		70.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000	KESBANGPOL
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah				39.245.000		39.245.000		47.486.450		52.235.095		57.458.605	POLPP

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
						2017		2018		2019		2020		2021		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN				**46.735.785.151**		**53.444.780.615**		**466.973.499.085**		**64.884.907.327**		**71.313.676.677**	
			Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				6.124.758.270		6.613.550.097		7.274.905.107		8.002.395.617		8.802.635.179	SEKWAN
			Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah				5.528.945.500		6.081.840.050		414.711.724.055		7.477.690.460		8.696.913.106	SEKDA
			Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				5.884.669.087		6.304.943.987		6.888.105.827		7.558.950.186		8.371.278.250	BPKAD
			Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				3.339.148.314		4.953.674.365		5.800.656.196		6.320.222.482		7.018.794.730	BAPPENDA
			Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				366.473.953		403.121.348		443.433.483		487.776.831		536.554.514	SEKDA
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				3.364.960.385		4.587.786.855		4.858.860.350		5.188.736.894		5.456.422.442	INSPEKTORAT
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				690.000.000		759.000.000		834.900.000		918.390.000		1.010.229.000	SEKDA
			Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan				643.653.550		697.679.602		685.911.327		754.502.459		816.407.498	INSPEKTORAT
			Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan				6.914.710		6.914.713		7.606.184		7.606.184		7.606.184	INSPEKTORAT
			Program Mengintensifkan penanganan pengaduan Masyarakat				539.822.378		539.822.378		658.804.615		727.185.077		806.403.584	SEKDA
			Program Mengintensifkan penanganan pengaduan dan Informasi Pelayanan Publik				178.619.300		167.359.600		240.095.560		264.105.116		2.901.568	DPMPTSP
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				90.000.000		374.000.000		468.900.000		519.790.000		574.769.000	SEKDA
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				1.725.000.000		1.985.000.000		2.187.500.000		2.528.250.000		2.718.075.000	SEKDA
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				251.411.400		248.539.200		273.393.120		300.732.432		330.805.675	DPMPTSP
			Program Penataan Daerah Otonomi Baru				445.000.650		364.500.000		400.950.000		430.045.000		465.499.500	SEKDA
			Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama				692.183.650		761.402.015		837.542.217		921.296.438		1.013.426.082	SEKDA
			Program pemerintah di bidang Kesejahteraan Rakyat				214.919.700		236.411.670		260.052.837		286.058.121		314.663.933	SEKDA
			Program kerja sama pemerintah daerah dengan Universitas				79.613.500		87.574.850		96.332.335		105.965.569		116.562.125	SEKDA
			Program Penataan Kelembagaan Daerah				119.948.020		131.942.822		145.137.104		159.650.815		175.615.896	SEKDA
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah				115.689.000		127.257.900		139.983.690		153.982.059		169.380.265	SEKDA
			Program Bantuan Hukum				550.000.000		625.000.000		652.500.000		732.750.000		766.025.000	SEKDA
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah				110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		161.051.000	SEKDA
			Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan				108.789.100		144.668.010		159.134.811		175.048.292		192.553.121	SEKWAN
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				4.948.469.845		5.443.316.829	-	5.967.648.512	-	6.586.413.363		7.245.054.700	BKPSDM
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				10.577.017.685		11.634.719.454		12.798.191.399		14.078.010.539		15.485.811.593	BKPSDM
			Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat				39.777.154		43.754.869		48.130.356		52.943.392		58.237.731	SEKWAN
			Program Pembakuan Nama Rupabumi				170.000.000		187.000.000		205.700.000		226.270.000		248.897.000	SEKDA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
						2017		2018		2019		2020		2021		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
			KETAHANAN PANGAN				**932.000.000**		**1.697.000.000**		**1.797.000.000**		**1.637.000.000**		**1.600.000.000**	
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan				932.000.000		1.697.000.000		1.797.000.000		1.637.000.000		1.600.000.000	DKPP
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**2.266.180.809**		**12.579.539.102**		**13.877.493.014**		**15.275.242.315**		**15.297.629.438**	
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				100.000.000		100.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000	SEKDA
			Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan				299.998.254		5.174.640.333		5.692.104.367		6.261.314.803		5.374.640.333	DPMPD
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa				584.531.850		2.917.129.071		3.208.841.977		3.529.726.176		3.883.065.636	DPMPD
			Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				902.037.805		2.726.884.093		2.999.572.504		3.299.529.753		3.629.284.729	DPMPD
			Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan				379.612.900		1.660.885.605		1.826.974.166		2.009.671.583		2.210.638.740	DPMPD
			Program Kesahteraan Masyarakat				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	SETDA
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Sumber Daya Manusia				150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000	SEKDA
			STATISTIK				**498.749.686**		**524.687.170**		**753.021.529**		**633.982.605**		**717.822.736**	
			Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				498.749.686		524.687.170		753.021.529		633.982.605		717.822.736	BAPPEDA
			Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	SETDA
			KEARSIPAN				**779.039.900**		**911.343.890**		**1.002.478.289**		**1.102.726.107**		**1.212.998.717**	
			Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan				108.789.100		144.668.010		159.134.811		175.048.292		192.553.121	ARPUSDA
			Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				224.567.500		276.424.250		304.066.675		334.473.343		367.920.677	ARPUSDA
			Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan				125.334.000		137.867.400		151.654.140		166.819.554		183.501.509	ARPUSDA
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				320.349.300		352.384.230		387.622.663		426.384.918		469.023.410	ARPUSDA
			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**3.193.800.600**		**4.437.693.870**		**4.385.562.610**		**5.021.217.653**		**5.323.077.957**	
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				836.669.900		1.004.003.880		1.204.804.656		1.445.765.587		1.734.918.705	DISKOMINFO
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				67.459.050		611.704.955		131.625.451		120.787.996		98.766.795	SEKDA
			Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi				169.379.200		203.255.040		243.906.048		292.687.258		351.224.709	DISKOMINFO
			Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				68.620.000		73.504.000		78.854.400		84.739.840		91.213.824	SEKDA
			Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				146.373.000		175.647.600		210.777.120		252.932.544		303.519.053	DISKOMINFO
			Program kerjasama informasi dan media massa				1.857.416.450		2.041.995.395		2.243.094.935		2.462.304.428		2.681.434.871	SEKDA
			Program Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat				47.883.000		127.583.000		57.500.000		62.000.000		62.000.000	SEKDA
			Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi				-		200.000.000		215.000.000		300.000.000		-	SEKDA
			PERPUSTAKAAN				**320.349.300**		**352.384.230**		**387.622.653**		**426.384.918**		**469.023.410**	
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				320.349.300		352384230		387622653		426384918,3		469023410,1	ARPUSDA

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
	PERTANIAN				**22.283.467.375**		**31.595.124.778**		**35.501.137.256**		**38.567.274.981**		**42.271.660.909**	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				448.707.800		493.578.580		542.936.438		597.230.082		656.953.090	DISTANBUN
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan				14.290.000.000		15.944.000.000		17.958.400.000		19.754.240.000		21.729.664.000	DISTANBUN
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan				100.800.000		70.000.000		477.000.000		504.700.000		533.170.000	DISTANBUN
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				7.443.959.575		11.090.855.533		12.169.941.086		12.982.959.194		14.271.255.114	DISTANBUN
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan						1.381.690.665		1.459.859.732		1.545.845.705		1.580.088.705	DISTANBUN
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak						2.415.000.000		2.673.000.000		2.940.300.000		3.234.330.000	DISTANBUN
	Program peningkatan produksi hasil peternakan						200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000	DISTANBUN
	Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan				365.000.000		555.000.000		555.000.000		555.000.000		555.000.000	DKPP
	Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan				50.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000	DKPP
	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan				280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000	DKPP
	Program Pengembangan Otoritas Keamanan Pangan Daerah				150.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000	DKPP
	Program Percepatan Diversifikasi Kosumsi Pangan				320.000.000		490.000.000		490.000.000		450.000.000		450.000.000	DKPP
	KEHUTANAN				**66.245.000**		**72.869.500**		**80.156.450**		**88.172.095**		**96.989.305**	
	Program rehabilitasi hutan dan lahan				66.245.000		72.869.500		80.156.450		88.172.095		96.989.305	SEKDA
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				**233.755.000**		**257.130.500**		**282.843.550**		**311.127.905**		**342.240.695**	
	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan				77.004.000		84.704.400		93.174.840		102.492.324		112.741.556	SEKDA
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan				100.400.000		110.440.000		121.484.000		133.632.400		146.995.640	SEKDA
	Program Pembinaan Bidang Miyak Bumi dan Gas				56.351.000		61.986.100		68.184.710		75.003.181		82.503.499	SEKDA
	PARIWISATA				**2.765.995.213**		**2.565.008.699**		**2.937.258.169**		**3.230.983.986**		**3.616.122.384**	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				715.766.750		787.343.425		866.077.768		952.685.544		1.047.954.099	DISPORAPAR
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				1.697.475.463		1.389.636.974		1.644.349.271		1.808.784.199		2.051.702.618	DISPORAPAR
	Program Pengembangan Kemitraan				352.753.000		388.028.300		426.831.130		469.514.243		516.465.667	DISPORAPAR
	KELAUTAN DAN PERIKANAN				**4.707.000.000**		**6.437.000.000**		**6.287.000.000**		**6.287.000.000**		**6.237.000.000**	
	Program pengembangan budidaya perikanan				3.700.000.000		3.900.000.000,00		3.900.000.000,00		3.900.000.000,00		3.900.000.000,00	DKPP
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				462.000.000,00		1.212.000.000,00		1.112.000.000,00		1.112.000.000,00		1.112.000.000,00	DKPP
	Program Pengembangan Usaha Perikanan				-		780.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		680.000.000,00	DKPP
	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	DKPP
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan				245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000	DKPP
	PERDAGANGAN				**23.613.713.870**		**13.637.973.788**		**13.133.471.169**		**9.688.010.289**		**11.385.040.620**	
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan				1.057.569.880		1.000.815.399		1.100.896.941		121.098.638		1.282.085.304	DISPERINDAGKOP & UKM

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
						2017		2018		2019		2020		2021		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
			Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00	DISPERINDAGKOP & UKM
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				22.365.336.990		12.427.270.689		11.801.697.758		9.312.947.534		9.739.741.787	DISPERINDAGKOP & UKM
			Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan				140.807.000		154.887.700		170.376.470		187.414.117		290.008.529	DISPERINDAGKOP & UKM
			PERINDUSTRIAN				**4.370.424.400**		**24.762.224.400**		**43.361.564.400**		**25.037.884.450**		**25.160.575.050**	
			Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				150.000.000		350.000.000		500.000.000		505.000.000		505.000.000	DISPERINDAGKOP & UKM
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				819.384.400		1.573.984.400		1.667.544.400		1.680.152.450		1.782.860.050	DISPERINDAGKOP & UKM
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				2.793.000.000		1.666.500.000		2.914.100.000		2.004.910.000		1.950.191.000	DISPERINDAGKOP & UKM
			Program Penataan Struktur Industri				533.040.000		21.146.740.000		36.254.920.000		20.822.822.000		20.897.524.000	DISPERINDAGKOP & UKM
			Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial				75.000.000		25.000.000		2.025.000.000		25.000.000		25.000.000	DISPERINDAGKOP & UKM
			TRANSMIGRASI				**138.400.000**		**230.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**242.500.000**	
			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				63.400.000		155.000.000		75.000.000		75.000.000		162.500.000	DINAKERTRAN
			Program Transmigrasi Lokal				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		80.000.000	DINAKERTRAN
			SKPD													
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				**6.246.333.210**		**6.991.939.915**		**7.667.151.801**		**8.402.289.300**		**9.203.344.972**	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.442.930.047		4.700.026.216		5.156.046.733		5.650.073.725		6.185.907.840	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				1.532.715.900		1.991.653.500		2.180.818.850		2.388.900.735		2.617.790.809	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				177.012.000		192.843.750		212.128.125		233.340.938		256.675.031	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				93.675.263		107.416.449		118.158.093		129.973.903		142.971.293	
			DINAS KESEHATAN				**16.634.060.000,00**		**12.919.280.000,00**		**14.923.930.000,00**		**16.419.110.000,00**		**18.061.030.000,00**	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				8.386.860.000,00		9.225.550.000,00		10.148.100.000,00		11.162.910.000,00		12.279.200.000,00	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				7.287.540.000,00		2.638.100.000,00		3.614.640.000,00		3.978.900.000,00		4.376.790.000,00	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur				173.230.000,00		190.560.000,00		209.610.000,00		230.570.000,00		253.630.000,00	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				646.430.000,00		711.070.000,00		782.180.000,00		860.390.000,00		946.430.000,00	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				60.000.000,00		66.000.000,00		72.600.000,00		79.860.000,00		87.850.000,00	
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				80.000.000,00		88.000.000,00		96.800.000,00		106.480.000,00		117.130.000,00	
			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE M. DJOEN				**861.856.750**		**9.197.088.000**		**10.571.079.500**		**10.572.427.388**		**13.008.468.981**	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				861.856.750		1.016.780.000		1.202.729.750		1.418.119.450		1.673.327.559	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				-		3.062.575.000		4.119.568.750		3.767.755.938		5.336.691.422	
			Program peningkatan disiplin aparatur				-		312.500.000		390.625.000		488.281.000		610.351.000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				-		4.805.233.000		4.858.156.000		4.898.271.000		5.388.099.000	
	DINAS PEKERJAAN UMUM				**5.016.803.415**		**4.836.722.456**		**5.096.266.822**		**5.659.728.720**		**6.478.293.316**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.675.714.922		4.017.573.614		3.985.301.096		4.659.661.621		5.176.627.187	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				787.765.000		416.743.000		468.319.300		513.156.030		566.063.953	
	Program peningkatan disiplin aparatur				187.500.000		-		200.000.000		-		200.000.000	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				280.654.000		308.719.400		339.591.340		373.550.474		410.905.521	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				85.169.493		93.686.442		103.055.086		113.360.595		124.696.654	
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**6.627.985.047**		**7.286.383.552**		**13.910.368.599**		**15.301.405.459**		**16.831.546.004**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				85.144.872		93.659.359		178.804.231		196.684.654		216.353.119	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				6.267.690.000		6.894.459.000		13.162.149.000		14.478.363.900		15.926.200.290	
	Program peningkatan disiplin aparatur				84.400.000		88.440.000		168.840.000		185.724.000		204.296.400	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				116.860.000		128.546.000		245.406.000		269.946.600		296.941.260	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				48.890.175		53.779.193		102.669.368		112.936.305		124.229.935	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				25.000.000		27.500.000		52.500.000		57.750.000		63.525.000	
	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN				**717.425.460**		**2.059.263.117**		**2.265.189.428**		**256.337.608.371**		**294.788.249.626**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				702.425.460		1.262.341.184		1.388.575.302		1.527.432.832		1.756.547.757	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				15.000.000		530.500.000		583.550.000		641.905.000		738.190.750	
	Program peningkatan disiplin aparatur				-		70.000.000		77.000.000		84.700.000.000		97.405.000.000	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				-		140.000.000		154.000.000		169.400.000.000		194.810.000.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				-		56.421.933		62.064.126		68.270.539		78.511.119	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				**2.166.175.072**		**2.382.792.579**		**2.621.071.837**		**2.883.179.021**		**3.171.496.924**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.494.221.872		1.643.644.059		1.808.008.465		1.988.809.312		2.187.690.243	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				295.215.000		324.736.500		357.210.150		392.931.165		432.224.282	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				347.270.000		381.997.000		420.196.700		462.216.370		508.438.007	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				29.468.200		32.415.020		35.656.522		39.222.174		43.144.392	
	DINAS PERHUBUNGAN				**86.463.745**		**4.615.149.720**		**1.636.638.169**		**1.749.054.891**		**1.867.278.187**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				11.819.245		1.163.270		1.250.353.074		1.336.241.286		1.424.983.223	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				16.275.000		4.491.780.000		257.658.000		275.123.800		296.836.180	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-		58.000.000		58.000.000		60.000.000		60.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				52.030.000		57.233.000		62.956.300		69.251.930		76.177.123	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				6.339.500		6.973.450		7.670.795		8.437.875		9.281.661	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI				**1.047.577.900**		**1.152.335.690**		**1.396.269.259**		**1.394.326.185**		**1.533.758.803**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				652.367.500,00		717.604.250		789.364.675		868.301.143		955.131.257	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				323.215.400		355.536.940		391.090.634		430.199.697		473.219.667	
	Program peningkatan disiplin aparatur				-		-		128.700.000		-		-	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				68.445.000		75.289.500		82.818.450		91.100.295		100.210.325	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				3.550.000		3.905.000		4.295.500		4.725.050		5.197.555	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				**2.788.373.683**		**2.446.611.726**		**3.370.426.197**		**2.966.106.120**		**3.301.172.318**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.471.914.158		1.234.163.468		1.369.862.114		1.633.450.243		1.849.729.763	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				731.039.600		524.019.940		1.399.592.934		518.557.227		555.934.040	
	Program peningkatan disiplin aparatur				-		-		128.700.000		-		-	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				219.170.000		223.553.400		4.908.740		300.000.000		330.000.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				366.249.925		464.874.918		467.362.409		514.098.650		565.508.515	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				**1.653.653.170**		**1.676.451.800**		**2.086.033.389**		**2.312.966.771**		**2.944.912.177**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.146.783.880		1.134.022.640		1.370.629.289		1.507.950.261		1.658.745.288	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				226.170.000		214.545.000		304.776.900		347.326.590		778.457.977	
	Program peningkatan disiplin aparatur				-		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				244.320.000		235.840.000		295.627.200		325.189.920		357.708.912	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				36.379.290		42.044.160		60.000.000		72.500.000		85.000.000	
	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**2.949.532.000**		**1.170.445.200**		**1.279.248.620**		**1.398.933.392**		**1.535.406.830**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.729.532.000		972.445.200		1.061.448.620		1.159.353.392		1.271.868.830	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur													
	Program peningkatan disiplin aparatur				40.000.000									
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				80.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000		117.128.000	
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				**1.473.229.590**		**1.573.685.109**		**1.726.531.975**		**1.893.045.432**		**2.076.586.092**	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				659.235.090		711.389.159		778.006.075		850.806.682		930.387.352	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				481.600.000		529.760.000		582.736.000		641.009.600		705.110.560	
	Program Peningkatan Displin Aparatur				70.000.000		70.000.000		77.000.000		84.700.000		93.170.000	
	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur				230.980.000		230.980.000		254.078.000		279.485.800		307.434.380	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan				31.414.500		31.555.950		34.711.900		37.043.350		40.483.800	
	DINAS SOSIAL				**791.258.870**		**2.561.280.647**		**1.165.308.712**		**1.280.849.583**		**1.408.934.541**	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				562.863.420		719.149.762		791.964.738		870.171.212		957.188.333	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				97.216.450		1.641.627.385		152.790.124		168.069.136		184.876.049	
	Program Peningkatan Displin Aparatur				0		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000	
	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur				119.185.000		131.103.500		144.213.850		158.635.235		174.498.759	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan				11.994.000		19.400.000		21.340.000		23.474.000		25.821.400	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**1.218.530.000**		**1.320.930.000**		**1.370.630.000**		**1.574.630.000**		**1.715.880.000**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				774.130.000		806.430.000		864.630.000		903.630.000		964.880.000	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				264.900.000		319.000.000		325.500.000		443.500.000		530.500.000	
	Program peningkatan disiplin aparatur				17.000.000		37.000.000		-		47.000.000		40.000.000	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				155.000.000		150.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				7.500.000		8.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000	
	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				**5.298.223.195**		**1.703.044.915**		**1.873.350.187**		**2.123.990.206**		**2.994.162.426**	DISPORAPAR
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.075.950.195		1.183.545.215		1.301.899.736		1.432.089.710		1.575.298.680	DISPORAPAR
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				3.967.296.000		239.025.600		262.928.160		352.525.976		1.018.143.074	DISPORAPAR
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				52.250.000		57.475.000		63.222.500	100,00	69.544.750		76.499.225	DISPORAPAR
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				180.150.000		198.165.000		217.981.500	100,00	239.779.650		263.757.615	DISPORAPAR
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				22.577.000		24.834.100		27.318.291		30.050.120		60.463.832	DISPORAPAR
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				**932.592.937**		**800.003.014**		**1.106.984.093**		**1.180.164.843**		**361.540.768**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				639.504.214		601.503.014		748.355.730		788.716.980		361.540.768	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				184.486.223		158.500.000		283.628.363		311.447.863		-	
	Program peningkatan Disiplin Aparatur				39.562.500		-		75.000.000		80.000.000		-	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				69.040.000		40.000.000		-		-		-	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				**4.384.428.702**		**2.837.479.691**		**3.121.227.660**		**3.433.350.425**		**3.776.685.418**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				844.716.248		929.187.873		1.022.106.660		1.124.317.326		1.236.749.059	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				2.429.923.500		760.763.300		836.839.630		920.523.593		1.012.575.952	
	Program peningkatan disiplin aparatur				267.267.000,00		267.267.000		293.993.700		323.393.070		355.732.327	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				828.856.536		865.229.558		951.752.514		1.046.927.765		1.151.620.542	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				13.665.418		15.031.960		16.535.156		18.188.671		20.007.538	
	SEKRETARIAT DAERAH				**18.016.422.752**		**19.739.588.527**		**21.635.070.880**		**23.720.101.468**		**26.013.635.115**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				14.680.097.752		16.148.107.527		17.762.918.280		19.539.210.108		21.493.131.119	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				2.451.560.000		2.696.716.000		2.966.387.600		3.263.026.360		3.589.328.996	
	Program peningkatan disiplin aparatur				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				784.765.000		784.765.000		784.765.000		784.765.000		784.765.000	
	SEKRETARIAT DPRD				**5.608.117.826**		**6.168.929.609**		**6.785.822.569**		**7.464.404.826**		**8.210.845.309**	SEKRETARIAT DPRD
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.045.812.378		4.450.393.616		4.895.432.977		5.384.976.275		5.923.473.903	SEKRETARIAT DPRD
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				261.254.000		287.379.400		316.117.340		347.729.074		382.501.981	SEKRETARIAT DPRD
	Program peningkatan disiplin aparatur				355.230.145		390.753.160		429.828.475		472.811.323		520.092.455	SEKRETARIAT DPRD
	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS													SEKRETARIAT DPRD
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				930.847.750		1.023.932.525		1.126.325.778		1.238.958.355		1.362.854.191	SEKRETARIAT DPRD
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				14.973.553		16.470.908		18.117.999		19.929.799		21.922.779	SEKRETARIAT DPRD
	BPKAD				**2.615.330.914**		**3.045.056.013**		**3.396.894.173**		**3.700.515.347**		**4.073.571.750**	BPKAD
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.526.654.045		1.726.142.809		1.897.696.972		2.111.138.780		2.383.758.982	BPKAD
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				463.071.430		619.996.766		760.582.118		762.231.967		828.099.591	BPKAD
	Program peningkatan disiplin aparatur				-		-		-		-		-	BPKAD
	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS													BPKAD
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				543.306.262		603.860.000		634.053.000		664.841.892		664.841.892	BPKAD
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				82.299.177		95.056.438		104.562.082		162.302.708		196.871.286	BPKAD
	INSPEKTORAT KABUPATEN				**1.697.328.055**		**1.805.113.626**		**1.872.486.784**		**2.176.333.987**		**2.710.686.429**	INSPEKTORAT KABUPATEN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				937.582.185		1.032.340.405		1.158.947.608		1.277.136.719		1.401.550.391	INSPEKTORAT KABUPATEN
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				599.500.000		545.371.265		464.762.350		626.908.085		1.010.983.262	INSPEKTORAT KABUPATEN
	Program peningkatan disiplin aparatur				149.110.000		213.748.700		235.123.570		258.635.927		284.499.520	INSPEKTORAT KABUPATEN
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				11.135.870		13.653.256		13.653.256		13.653.256		13.653.256	INSPEKTORAT KABUPATEN
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**3.084.123.380**		**3.345.127.717**		**3.823.850.489**		**116.090.445.537**		**4.331.798.088**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.636.952.400		1.773.239.640		1.914.773.604		2.070.460.964		2.083.817.060	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				1.014.713.205		1.116.184.525		1.227.802.978		113.510.583.275		1.485.641.603	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
	Program peningkatan disiplin aparatur				87.780.000		96.558.000		106.213.800		116.835.180		128.516.695	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				144.677.775		159.145.552		175.060.107		192.566.118		233.822.730	
	Program Pembangunan Fasilitas Kantor				200.000.000		200.000.000		400.000.000		200.000.000		400.000.000	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**2.312.212.304**		**1.349.891.560**		**1.495.171.799**		**2.844.202.761**		**3.317.923.037**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				979.058.096,00		10.771.931,00		12.190.207,00		1.338.426.410,00		1.472.269.051,00	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				566.020.000,00		425.272.000,00		481.499.200,00		341.072.220,00		630.479.442,00	
	Program peningkatan disiplin aparatur				31.500.000,00		79.650.000,00		38.115.000,00		105.000.000,00		49.500.000,00	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				280.215.608,00		308.237.168,80		339.060.885,68		372.966.974,25		410.263.671,67	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				30.418.600,00		33.460.460,00		36.806.506,00		40.487.157,00		44.535.872,00	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				425.000.000,00		492.500.000,00		587.500.000,00		646.250.000,00		710.875.000,00	
	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				**2.940.765.676**		**2.418.460.099**		**2.550.306.109**		**2.787.664.730**		**3.075.870.392**	BAPPENDA
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				167.015.000		444.032.335		488.435.569		537.279.125		591.007.038	BAPPENDA
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				960.095.000		278.370.000		251.207.000		276.327.700		293.960.470	BAPPENDA
	Program peningkatan disiplin aparatur				52.650.000		52.650.000		57.915.000		63.706.500		70.077.150	BAPPENDA
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				1.743.630.817		1.625.798.931		1.733.378.824		1.889.044.717		2.097.388.377	BAPPENDA
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				17.374.859		17.608.833		19.369.716		21.306.688		23.437.357	BAPPENDA
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA				**1.455.317.880**		**2.272.974.044**		**2.498.269.250**		**2.798.068.175**		**3.025.325.792**	DPMPD
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				971.692.880		1.089.751.619		1.198.724.582		1.318.597.041		1.450.456.744	DPMPD
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				329.400.000		814.560.800		894.016.880		985.618.568		1.084.180.425	DPMPD
	Program peningkatan disiplin aparatur				31.200.000		52.000.000		57.200.000		62.920.000		69.212.000	DPMPD
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				123.025.000		316.661.625		348.327.788		383.160.566		421.476.623	DPMPD
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				-		-		-		47.772.000		-	DPMPD
	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN				**1.211.143.015**		**1.330.937.317**		**1.967.261.048**		**2.510.462.153**		**2.305.228.368**	DPP
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.161.143.015		1.276.937.317		1.404.311.048		1.544.422.153		1.698.544.368	DPP
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				40.000.000		44.000.000		421.650.000		585.340.000		571.374.000	DPP
	Program peningkatan disiplin aparatur								120.300.000		357.600.000			DPP
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				10.000.000		10.000.000		21.000.000		23.100.000		35.310.000	DPP
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				**2.276.190.775**		**5.345.883.408**		**6.827.876.514**		**6.375.342.950**		**3.268.054.650**	DKPP
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.298.692.325		1.441.508.358		1.585.937.264		1.747.426.000		1.918.063.700	DKPP

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
						2017		2018		2019		2020		2021		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)			(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				574.980.000		1.703.978.000		4.597.875.800		4.131.000.000		816.755.600	DKPP
			Program peningkatan disiplin aparatur				250.000.000		260.000.000		430.300.000		265.150.400		281.665.400	DKPP
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				148.786.000		1.936.664.600		210.031.000		228.034.100		247.837.500	DKPP
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				3.732.450		3.732.450		3.732.450		3.732.450		3.732.450	DKPP
			DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				**3.192.628.170**		**3.502.764.650**		**3.853.041.115**		**4.238.345.226**		**4.662.179.749**	DISPERINDAGKOP UKM
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.530.477.295		1.760.093.120		1.947.020.270		1.972.034.140		1.972.034.140	DISPERINDAGKOP UKM
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				1.090.126.350		1.172.288.168		1.205.911.468		1.566.201.709		1.990.036.232	DISPERINDAGKOP UKM
			Program peningkatan disiplin aparatur				122.269.500		126.798.000		140.625.000		140.625.000		140.625.000	DISPERINDAGKOP UKM
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				444.198.815		438.029.152		553.166.122		553.166.122		553.166.122	DISPERINDAGKOP UKM
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				5.556.210		5.556.210		6.318.255		6.318.255		6.318.255	DISPERINDAGKOP UKM
			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH				**1.295.534.850**		**1.199.331.335**		**1.308.612.469**		**1.390.706.715**		**1.522.936.887**	DINAS ARPUSDA
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				544.716.150		599.187.765		659.106.542		725.017.196		797.518.915	DINAS ARPUSDA
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				351.050.000		205.700.000		226.270.000		248.897.000		273.786.700	DINAS ARPUSDA
			Program peningkatan disiplin aparatur				15.000.000				18.150.000				21.961.500	DINAS ARPUSDA
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				375.768.700		384.543.570		394.195.927		404.813.520		416.492.872	DINAS ARPUSDA
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				9.000.000		9.900.000		10.890.000		11.979.000		13.176.900	DINAS ARPUSDA
			KECAMATAN SEI. TEBELIAN				**900.750.000**		**903.750.000**		**906.750.000**		**909.750.000**		**912.750.000**	KANTOR CAMAT SEI. TEBELIAN
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.300.000		2.800.000		3.300.000		3.800.000		4.300.000	KANTOR CAMAT SEI. TEBELIAN
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT SEI. TEBELIAN
			Program peningkatan disiplin aparatur				700.500.000		701.000.000		701.500.000		702.000.000		702.500.000	KANTOR CAMAT SEI. TEBELIAN
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT SEI. TEBELIAN
			Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT SEI. TEBELIAN
			Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.670.000		43.170.000		43.670.000		44.170.000		44.670.000	KANTOR CAMAT SEI. TEBELIAN
			KECAMATAN KELAM PERMAI				**1.000.750.000**		**1.153.750.000**		**1.206.750.000**		**1.309.750.000**		**1.412.750.000**	KANTOR CAMAT KELAM PERMAI
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.300.000		2.800.000		3.300.000		3.800.000		4.300.000	KANTOR CAMAT KELAM PERMAI
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT KELAM PERMAI
			Program peningkatan disiplin aparatur				800.500.000		951.000.000		1.001.500.000		1.102.000.000		1.202.500.000	KANTOR CAMAT KELAM PERMAI
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT KELAM PERMAI
			Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT KELAM PERMAI
			Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.670.000		43.170.000		43.670.000		44.170.000		44.670.000	KANTOR CAMAT KELAM PERMAI

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
	KECAMATAN BINJAI HULU				**1.000.750.000**		**1.153.750.000**		**1.206.750.000**		**1.309.750.000**		**1.412.750.000**	KANTOR CAMAT BINJAI HULU
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.300.000		2.800.000		3.300.000		3.800.000		4.300.000	KANTOR CAMAT BINJAI HULU
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT BINJAI HULU
	Program peningkatan disiplin aparatur				800.500.000		951.000.000		1.001.500.000		1.102.000.000		1.202.500.000	KANTOR CAMAT BINJAI HULU
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT BINJAI HULU
	Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT BINJAI HULU
	Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.670.000		43.170.000		43.670.000		44.170.000		44.670.000	KANTOR CAMAT BINJAI HULU
	KECAMATAN TEMPUNAK				**1.000.750.000**		**1.153.750.000**		**1.206.750.000**		**1.309.750.000**		**1.412.750.000**	KANTOR CAMAT TEMPUNAK
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.300.000		2.800.000		3.300.000		3.800.000		4.300.000	KANTOR CAMAT TEMPUNAK
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT TEMPUNAK
	Program peningkatan disiplin aparatur				800.500.000		951.000.000		1.001.500.000		1.102.000.000		1.202.500.000	KANTOR CAMAT TEMPUNAK
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT TEMPUNAK
	Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT TEMPUNAK
	Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.670.000		43.170.000		43.670.000		44.170.000		44.670.000	KANTOR CAMAT TEMPUNAK
	KECAMATAN DEDAI				**1.000.750.000**		**1.153.750.000**		**1.206.750.000**		**1.309.750.000**		**1.412.750.000**	KANTOR CAMAT DEDAI
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.300.000		2.800.000		3.300.000		3.800.000		4.300.000	KANTOR CAMAT DEDAI
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT DEDAI
	Program peningkatan disiplin aparatur				800.500.000		951.000.000		1.001.500.000		1.102.000.000		1.202.500.000	KANTOR CAMAT DEDAI
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT DEDAI
	Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT DEDAI
	Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.670.000		43.170.000		43.670.000		44.170.000		44.670.000	KANTOR CAMAT DEDAI
	KECAMATAN SEPAUK				1.000.750.000		1.153.750.000		1.206.750.000		1.309.750.000		1.412.750.000	KANTOR CAMAT SEPAUK
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.300.000		2.800.000		3.300.000		3.800.000		4.300.000	KANTOR CAMAT SEPAUK
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT SEPAUK
	Program peningkatan disiplin aparatur				800.500.000		951.000.000		1.001.500.000		1.102.000.000		1.202.500.000	KANTOR CAMAT SEPAUK
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT SEPAUK
	Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT SEPAUK
	Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.670.000		43.170.000		43.670.000		44.170.000		44.670.000	KANTOR CAMAT SEPAUK
	KECAMATAN KETUNGAU HILIR				**1.000.750.000**		**1.153.750.000**		**1.206.750.000**		**1.309.750.000**		**1.412.750.000**	KANTOR CAMAT KET. HILIR
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.300.000		2.800.000		3.300.000		3.800.000		4.300.000	KANTOR CAMAT KET. HILIR
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT KET. HILIR
	Program peningkatan disiplin aparatur				800.500.000		951.000.000		1.001.500.000		1.102.000.000		1.202.500.000	KANTOR CAMAT KET. HILIR
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT KET. HILIR

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
	Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT KET. HILIR
	Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.670.000		43.170.000		43.670.000		44.170.000		44.670.000	KANTOR CAMAT KET. HILIR
	KECAMATAN KETUNGAU TENGAH				**1.000.750.000**		**1.153.750.000**		**1.206.750.000**		**1.309.750.000**		**1.412.750.000**	KANTOR CAMAT KET. TENGAH
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.300.000		2.800.000		3.300.000		3.800.000		4.300.000	KANTOR CAMAT KET. TENGAH
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT KET. TENGAH
	Program peningkatan disiplin aparatur				800.500.000		951.000.000		1.001.500.000		1.102.000.000		1.202.500.000	KANTOR CAMAT KET. TENGAH
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT KET. TENGAH
	Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT KET. TENGAH
	Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.670.000		43.170.000		43.670.000		44.170.000		44.670.000	KANTOR CAMAT KET. TENGAH
	KECAMATAN KETUNGAU HULU				**1.265.500.000**		**1.392.050.000**		**1.531.255.001**		**1.684.580.500**		**1.789.280.714**	KANTOR CAMAT KET. HULU
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				478.871.800		526.758.980		579.434.878		637.578.366		637.578.366	KANTOR CAMAT KET. HULU
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				295.611.250		325.172.375		357.689.613		393.458.574		432.804.431	KANTOR CAMAT KET. HULU
	Program peningkatan disiplin aparatur				19.635.000		21.598.500		23.758.350		26.134.185		28.747.604	KANTOR CAMAT KET. HULU
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				131.450.000		144.595.000		159.054.500		174.959.950		192.455.945	KANTOR CAMAT KET. HULU
	Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				339.931.950		373.925.145		411.317.660		452.449.425	-	497.694.368	KANTOR CAMAT KET. HULU
	KECAMATAN KAYAN HILIR				**1.000.750.000**		**1.153.750.000**		**1.206.750.000**		**1.309.750.000**		**1.412.750.000**	KANTOR CAMAT KAYAN HILIR
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.300.000		2.800.000		3.300.000		3.800.000		4.300.000	KANTOR CAMAT KAYAN HILIR
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT KAYAN HILIR
	Program peningkatan disiplin aparatur				800.500.000		951.000.000		1.001.500.000		1.102.000.000		1.202.500.000	KANTOR CAMAT KAYAN HILIR
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT KAYAN HILIR
	Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT KAYAN HILIR
	Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.670.000		43.170.000		43.670.000		44.170.000		44.670.000	KANTOR CAMAT KAYAN HILIR
	KECAMATAN KAYAN HULU				**1.000.750.000**		**1.153.750.000**		**1.206.750.000**		**1.309.750.000**		**1.412.750.000**	KANTOR CAMAT KAYAN HULU
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.300.000		2.800.000		3.300.000		3.800.000		4.300.000	KANTOR CAMAT KAYAN HULU
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT KAYAN HULU
	Program peningkatan disiplin aparatur				800.500.000		951.000.000		1.001.500.000		1.102.000.000		1.202.500.000	KANTOR CAMAT KAYAN HULU
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT KAYAN HULU
	Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT KAYAN HULU
	Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.670.000		43.170.000		43.670.000		44.170.000		44.670.000	KANTOR CAMAT KAYAN HULU
	KECAMATAN SERAWAI				**1.000.750.000**		**1.153.750.000**		**1.206.750.000**		**1.309.750.000**		**1.412.750.000**	KANTOR CAMAT SERAWAI
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.300.000		2.800.000		3.300.000		3.800.000		4.300.000	KANTOR CAMAT SERAWAI
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT SERAWAI
	Program peningkatan disiplin aparatur				800.500.000		951.000.000		1.001.500.000		1.102.000.000		1.202.500.000	KANTOR CAMAT SERAWAI

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM *(OUTCOMES)*	KONDISI KINERJA AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT SERAWAI
	Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT SERAWAI
	Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.670.000		43.170.000		43.670.000		44.170.000		44.670.000	KANTOR CAMAT SERAWAI
	KECAMATAN AMBALAU				**1.000.750.000**		**1.153.750.000**		**1.206.750.000**		**1.309.750.000**		**1.412.750.000**	KANTOR CAMAT AMBALAU
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.300.000		2.800.000		3.300.000		3.800.000		4.300.000	KANTOR CAMAT AMBALAU
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT AMBALAU
	Program peningkatan disiplin aparatur				800.500.000		951.000.000		1.001.500.000		1.102.000.000		1.202.500.000	KANTOR CAMAT AMBALAU
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT AMBALAU
	Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				51.760.000		52.260.000		52.760.000		53.260.000		53.760.000	KANTOR CAMAT AMBALAU
	Program Peringatan Hari Besar Nasional				42.670.000		43.170.000		43.670.000		44.170.000		44.670.000	KANTOR CAMAT AMBALAU
	KECAMATAN SINTANG				**3.316.103.933**		**3.571.789.145**		**3.932.162.078**		**4.325.378.286**		**4.757.916.115**	KANTOR CAMAT SINTANG
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.574.858.465		1.744.362.347		1.918.798.581		2.110.678.439		2.321.746.283	KANTOR CAMAT SINTANG
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				376.015.124		360.546.197		396.600.816		436.260.898		479.886.988	KANTOR CAMAT SINTANG
	Program peningkatan disiplin aparatur				91.782.000		66.455.000		73.100.500		80.410.550		88.451.605	KANTOR CAMAT SINTANG
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				618.880.000		546.667.000		601.333.700		661.467.070		727.613.777	KANTOR CAMAT SINTANG
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				7.466.962		6.694.045		10.557.470		11.613.217		12.774.538	KANTOR CAMAT SINTANG
	Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat				558.332.582		807.064.556		887.771.011		976.548.112		1.074.202.924	KANTOR CAMAT SINTANG
	Program Peringatan Hari Besar Nasional				88.768.800		40.000.000		44.000.000		48.400.000		53.240.000	KANTOR CAMAT SINTANG
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah				5.377.200		5.377.200		5.914.920		6.506.412		7.157.053	KANTOR CAMAT SINTANG
TOTAL					**817.587.993.250,00**		**838.790.345.710,00**		**850.858.798.760,00**		**864.551.231.120,00**		**818.903.123.452,00**	

BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Provinsi	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMN
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)	(13)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT												
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi												
1.	Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1.1.	Pertumbuhan PDRB	%	5,30	5,30	5,35	5,41	5,75	5,92	6,04	6,04		8,0
1.2.	Pertumbuhan ekonomi		5,6	5,9	6,1	6,3	6,5	6,7	6,9	6,9	6,54	8,0
1.3.	Laju Inflasi Kabupaten	%	6,95	6,95	6,50	6,75	6,48	6,87	6,80	6,80		3,5
1.4.	PDRB per kapita	Rp. (Juta)	28,0	28,0	29,5	31,3	33,6	35,3	37,8	37,8		72,2
1.5.	Indeks Gini	Unit	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30		0,36
1.6.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	90,89	90,89	91,19	91,29	91,79	92,29	92,79	92,79		93
1.7.	Angka kriminalitas yang tertangani	%	40	40	50	65	70	75	75	75		
1.8.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia	%	64,00	64,50	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	69,00		
Fokus Kesejahteraan Masyarakat												
1.	Pendidikan											
1.1.	Angka melek huruf	%	88,69	89,28	90,19	91,11	92,04	92,98	93,92	93,92	98,5	96,1
1.2.	Angka rata-rata lama belajar	Tahun	6,63	6,83	7,03	7,23	7,43	7,63	8,00	8,00	7,5	8,8
1.3.	Angka partisipasi kasar											
1.3.1.	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	%	122,36	122,37	122,38	122,39	122,40	122,41	122,42	122,42	122	114,1
1.3.2.	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	%	101,35	101,36	101,37	101,38	101,39	101,40	101,41	101,41	95	106,9
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan	%	4,70	4,95	5,20	5,45	5,70	5,95	6,20	6,20		
1.5.	Angka Partisipasi Murni											

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Provinsi	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMN
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2019
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	96,29	96,89	97,49	98,09	98,69	99,29	100.00	100.00	100	94,8
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	74,40	75,93	77,46	78,99	80,52	82,05	83,58	83,58	77	82,0
2.	Kesehatan											
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 100 kh	970	970	972	974	976	978	980	980		
2.2.	Angka usia harapan hidup	Tahun	70,95	70,95	71,25	71,55	71,85	72,15	72,45	72,45	69,3	
2.3.	Persentase balita gizi buruk	%	2,96	2,80	2,60	2,50	2,30	2,20	2,00	2,00		17
3.	Pertanahan											
3.1.	Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	M2	4.424.045	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5.024.045		
4.	Ketenagakerjaan											
4.1.	Penduduk yang bekerja	%	66	69	72	76	79	82	85	85		
Fokus Seni Budaya Dan Olahraga												
1.	Kebudayaan											
1.1.	Jumlah grup kesenian	Grup	32	32	35	35	37	40	40	40		
1.2.	Jumlah gedung	Unit	2	2	3	4	4	5	5	5		
2.	Pemuda dan Olahraga											
2.1.	a. Jumlah klub olahraga	Klub	408	408	418	428	438	448	458	458		
	b. Jumlah gedung olahraga	Unit	18	18	20	22	24	26	28	28		
ASPEK PELAYANAN UMUM												
Fokus Layanan Urusan Wajib												
1.	Pendidikan dasar											
1.1.	Angka partisipasi sekolah	%	97,35	97,65	97,95	98,25	98,55	98,85	99,15	99,15	100	
1.1.1.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13		
1.1.2.	Rasio guru/ murid		1 : 29	1 : 29	1 : 29	1 : 29	1 : 29	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1:16	
1.1.3.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata		0,022	0,022	0,022	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017		
1.2.	Pendidikan menengah											
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	%	53,84	53,84	58,84	63,84	68,84	73,84	78,84	78,84	77	
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah		1 : 493	1 : 493	1:300	1:300	1:300	1:300	1:300	1:300		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Provinsi	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMN
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2019
1.2.3.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jiwa	232.337	233.014	234.218	235.414	236.614	237.814	239.014	239.014	98,5	96,1 %
1.3.	Fasilitas Pendidikan											
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	13,65	24,71	35,77	46,83	57,89	68,95	75,00	75,00		
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik	%	22,28	31,90	41,52	51,14	60,76	70,38	80,00	80,00		
1.4.	Angka Putus Sekolah :											
1.4.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,23	0,23	0,18	0,13	0,8	0,3	0	0		
1.4.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,41	0,41	0,37	0,33	0,28	0,22	0,15	0,15		
1.5.	Angka Kelulusan:											
1.5.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100		
1.5.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99.97	100	100	100	100	100	100	100		
1.5.3.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	85,93	90,93	95,93	100	100	100	100	100		
1.5.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SM	%	74,01	79,01	84,01	89,01	94	96	100	100		
1.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jiwa	3.287	3.875	4.463	5.051	5.639	6.227	6.816	6.816		
2.	Kesehatan											
2.1.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	19,68	20,18	20,69	21,19	21,69	22,20	22,70	22,70	1:19.566	
2.2.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	0,76	0,84	0,93	1,01	1,09	1,18	1,26	1,26	1:122.775	
2.3.	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	18,42	20,02	21,61	23,21	24,81	26,40	28,00	28,00	1:7.363	
2.4.	Rasio paramedis (Perawat dan Bidan) per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	177,35	182,27	187,19	192,11	197,03	201,95	206,87	206,01	1:857	
2.5.	Cakupan komplikasi kebidanan	%	75,47	77,06	78,65	80,24	81,82	83,41	85,00	85,00		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Provinsi	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMN
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2019
	yang ditangani											
2.6.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90,49	91,24	91,99	92,75	93,50	94,25	95,00	95,00		
2.7.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	79,12	82,60	86,08	89,56	93,04	96,52	100,00	100,00		
2.8.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.9.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	60,07	65,06	70,05	75,04	80,02	85,01	90	90		
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.11.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	16,64	18,87	21,09	23,32	25,55	27,77	30,00	30,00		
2.12.	Cakupan kunjungan bayi	%	77,41	79,51	81,61	83,71	85,80	87,90	90,00	90,00		
2.13.	Cakupan puskesmas	%	38,34	44,45	50,56	56,67	62,78	68,89	75,00	75,00	1,41	
2.14.	Cakupan pembantu puskesmas	%	68,83	70,69	72,55	74,42	76,28	78,14	80,00	80,00		
2.15.	Kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen	Tipe	Tipe C	Tipe C	Tipe C	Tipe C	Tipe C	Tipe B	Tipe B	Tipe B		
2.16.	Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen		Dasar	Dasar	Dasar	Madya	Madya	Utama	Paripurna	Paripurna		
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	25,92	32,19	38,37	43,82	49,28	54,74	60,18	60,18		
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik		48,67	49,00	49,47	49,79	50,21	50,53	50,89	50,89		
3.3.	Rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk		1 : 4,00	1 : 4,00	1 : 4,05	1 : 4,10	1 : 4,15	1 : 4,20	1 : 4,25	1 : 4,25		
3.4.	Panjang jalan dilalui Roda 4	%	91,14	93	95	97	99	100	100	100		
3.5.	Jalan Penghubung dari ibukota	%	91,30	95	97	99	100	100	100	100		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Provinsi	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMN
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2019
	kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)											
3.6.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Km	380,90	400,91	420,93	440,94	460,95	460,97	502,96	502,96		
		%	17,32	18,23	19,14	20,05	20,96	21,87	22,87	22,87		
3.7.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	4,49	4,94	5,44	5,98	6,58	7,24	7,96	7,96		
3.8.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	5.156	5.191	5.241	5.275	5.319	5.353	5.391	5.391		
3.9.	Persentase rasio luas areal persawahan yang mendapatkan pengairan dengan memadai/ cukup	%	56,00	57,06	58,00	58,38	58,87	59,24	59,66	59,66		
3.10.	Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	30	30	30	30	30	30	30	30	20	
3.11.	Proporsi Panjang Jembatan Kayu Dalam Kondisi Baik dan Sedang	%	90,2	89,29	83,29	78,58	73,22	67,86	62,50	62,50		
3.12.	Banyaknya Jembatan Rangka Baja dan beton	%	9,8	10,71	16,71	21,42	26,78	32,14	37,50	37,50		
		Unit	27	30	47	60	75	90	105	105		
4.	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman											
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)	%	4,5	4,8	5,1	5,5	5,8	6,2	6,6	6,6	54,69	
4.2.	Rumah tangga bersanitasi	%	23,78	26,50	30,10	32,5	35,10	37,10	40,20	40,20		
4.3.	Rumah tangga pengguna listrik	%	54,16	60,24	65,59	70,48	74,96	79,04	82,75	86,10		
4.4.	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan PLTS	Unit	453	250	250	250	250	250	250	1.500		
c	Perhubungan											
5.1.	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Org	526.972	537.511	548.262	559.227	570.411	581.820	593.456	593.456		
5.2.	Jumlah ijin trayek	Trayek	72	72	72	73	74	74	75	75		
5.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	83	86	88	92	96	100	104	104		
5.4.	Jumlah Pelabuhan											

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Provinsi	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMN
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2019
	Laut/Udara/Terminal Bis											
	a. Pelabuhan Sungai	Unit	3	3	3	3	3	3	3	3		
	b. Pelabuhan Udara	Unit	1	1	2	2	2	2	2	2		
	c. Terminal Bis	Unit	5	5	5	5	5	5	5	5		
5.5.	Angkutan darat	Unit	359	359	361	365	368	370	374	374		
5.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	34	36	37	39	41	41	43	43		
5.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Tahun	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
5.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum											
5.8.1	Pengujian Awal											
	a. JBB s.d. 2.500 kg	Rp.	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000		
	b. JBB 2.501 s.d. 7.500 kg	Rp.	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000		
	c. JBB 7.501 s.d. 14.000 kg	Rp.	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000		
	d. JBB > 14.000 kg	Rp.	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000		
5.8.2.	Pengujian Berkala:											
	JBB s.d. 2.500 kg	Rp.	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000		
	JBB 2.501 s.d. 7.500 kg	Rp.	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000		
	JBB 7.501 s.d. 14.000 kg	Rp.	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000		
	JBB > 14.000 kg	Rp.	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000		
5.8.3.	Pengujian Penghapusan Kendaraan											
	Kendaraan bermotor beroda 2 (dua)	Rp.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	Kendaraan bermotor beroda 4 (empat)	Rp.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Kendaraan bermotor beroda 6 (enam)	Rp.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	Kendaraan bermotor lebih dari 6 (enam) roda	Rp.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
5.9.	Pemasangan Rambu-rambu	%	44,27	59,93	65,76	78,44	85,01	90,10	95	95		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Provinsi	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMN
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2019
6.	Lingkungan Hidup											
6.1.	Persentase penanganan sampah	%	60	60	65	70	75	80	85	85		
6.2.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	M3	910	940	964	988	1.012	1.036	1.062	1.062		
6.3.	Pencemaran status mutu air (14 Sungai)	Status Kondisi	Buruk Sekali	Buruk	Buruk	Buruk	Sedang	Sedang	Baik	Baik		
6.4.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	Prushaan	11	25	30	35	40	42	46	46		
6.5.	Penegakan hukum lingkungan	Kasus	20	9	10	11	12	13	14	14		
7.	Pertanahan											
7.1	Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	M2	18.050.506	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	20.450.506		
7.2.	Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang	Kasus	10	10	10	10	10	10	10	70		
7.3.	Penyelesaian izin lokasi											
7.3.1	Penyelesaian izin lokasi baru	Izin lokasi	28	2	2	2	2	2	0	38		
7.3.2	Penyelesaian izin lokasi perpanjangan	Izin lokasi	4	12	6	9	2	2	2	37		
8.	Administrasi Kependudukan dan catatan sipil											
8.1.	Kepemilikan KTP Elektronik	Jiwa	208.237	228.417	249.517	271.667	294.917	319.017	344.317	344.317		
8.2.	Kepemilikan Kartu Keluarga	Jiwa	170.688	191.639	212.839	234.589	256.889	279.714	302.864	302.864		
8.3.	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jiwa	260.735	270.735	280.735	292.035	304.210	317.360	331.860	331.860		
8.4.	Kepemilikan Akta Kematian	Jiwa	1.672	2.372	3.122	3.897	4.707	5.557	6.457	6.457		
8.5.	Kepemilikan Akta Perkawinan	Jiwa	3.052	3.902	5.002	6.402	8.152	10.202	13.102	13.102		
8.6.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jiwa	-	-	3.000	8.000	12.000	15.000	20.000	20.000		
8.7.	Ketersediaan database kependudukan yang akurat dan terintegrasi	Unit	-	-	1	1	1	1	1	1		
8.8	Ketersediaan sarana pelayanan langsung (*direct service*)	Unit	-	-	1	2	2	2	2	2		
8.9	Sosialisasi dan pembinaan	Keg	2	2	2	5	7	12	15	15		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Provinsi	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMN
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2019
	masyarakat											
9.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
9.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Orang	2.845	3.028	3.211	3.394	3.577	3.760	3.943	3.943		
9.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Orang	188	218	248	278	308	338	368	368		
9.3.	Rasio KDRT	Kasus	17	14	12	10	8	6	4	4		
9.4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Orng	3.816	4.016	4.216	4.216	4.416	4.8.16	5.016	5.016		
9.5.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Kasus	22	18	15	11	8	6	4	4		
10.	Pengendalian Penduduk dan KB											
10.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	jiwa	2,9	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5		
10.2.	Rasio akseptor KB	%	73,24	73,72	74,20	74,60	75,16	75,63	76,10	76,10		
10.3.	Cakupan peserta KB aktif	Aseptor	53.392	53.892	54,492	55.892	55.392	55.892	56.392	56.392		
10.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	KK	19.659	19.569	19.479	19.389	19.299	19.209	19.119	19.119		
11.	Sosial											
11.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi	Panti Asuhan	7	7	7	8	8	9	9	9		
11.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jiwa	97	250	275	300	330	363	399	399		
11.3.	Penanganan masalah kesejahteraan sosial	Jiwa	50	100	110	121	133	146	159	159		
12.	Ketenagakerjaan											
12.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	%	72,08	75,20	78,90	82,70	85,60	87,09	95,03	95,03		
12.2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	79,04	80,04	80,10	81,90	83,15	84,70	92,60	92,60		
12.3.	Pencari kerja yang ditempatkan	jiwa	124	151	165	175	180	185	191	191		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Provinsi	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMN
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2019
12.4.	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,06	3,05	3,04	3,02	3,01	3,00	2,99	2,99	3,01	4,0-5,0
12.5.	Keselamatan dan perlindungan	%	38,21	49,04	59,87	70,70	81,53	92,36	100	100		
12.6	Rasio daya serap tenaga kerja	TK	175	175	199	210	215	230	240	240		
13.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah											
13.1.	Persentase koperasi aktif	%	69,23	69,83	70,41	70,96	71,50	72,02	72,37	72,37		
13.2.	Jumlah BPR/LKM	Unit	4	4	4	4	4	5	5	5		
14.	Penanaman Modal											
14.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Buah	195	195	203	214	227	238	241	241		
14.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rp	1.349,13	1.349,13	1.453,38	1.563,78	1.695,20	1.750,25	1.763,40	1.763,40		933.000,0
14.3.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Milyar Rp	250	250	200	275	325	450	500	500		
14.4.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah	unit	1	1	1	1	1	1	1	1		
15.	Kebudayaan											
15.1.	Penyelenggaraan festival seni dan Budaya	even	2	2	2	2	2	2	2	2		
15.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan Budaya	Unit	2	2	2	2	2	2	2	10		
15.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	15	15	15	15	15	15	15	15		
15.4.	Jumlah organisasi pemuda		7	7	7	10	10	10	15	15		
16.	Kepemudaan dan Olah Raga											
16.1.	Jumlah organisasi pemuda		43	52	60	62	65	67	70	70		
16.2.	Jumlah organisasi olahraga		43	43	45	47	49	51	53	53		
16.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan		40	45	50	55	60	65	70	70		
16.4.	Jumlah kegiatan olahraga		30	31	32	35	40	45	50	50		
16.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)		4	5	6	7	8	9	10	10		
16.6.	Lapangan olahraga		408	408	418	428	438	448	458	458		
17.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat											

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Provinsi	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMN
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2019
17.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jmlh Ormas	86	88	98	118	118	125	130	130		
17.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	Org	1.120	1.820	1.820	1.850	1.850	2.500	2.530	2.530		
17.3.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		0,71	0,71	0,80	0,85	0,90	1	1	1		
17.4.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		40,7	40,7	45	47	50	55	60	60		
17.5.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100		
17.7.	Penegakan PERDA	Perda	44	46	48	50	52	54	56	56		
17.8.	Cakupan patroli petugas Satpol PP		226	248	270	300	330	363	399	439		
17.9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	70	75	80	80	85	85	85	85		
17.10.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	Org	4.070	4.070	4.070	4.080	4.090	4.100	4.120	4.150		
17.11.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	WMK	1	2	3	3	4	4	4	4		
17.12.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	28	26	24	18	17	16	15	15		
17.13.	Prosentase Pengaduan Masyarakt yang ditindaklanjuti pemeriksaan	~~%~~	75	75	82	85	88	90	95	95		
17.14.	Prosentase Temuan Hasil Pemeriksanaan yang selesai ditindaklanjuti	%	31	50	60	70	80	90	95	95		
17.15.	Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan dan Jangka Menengah	Buah	12	14	15	16	17	18	20	20		
17.16.	Sistem Informasi Manajmen Perencanaan dan Pengendalian	Buah	1	1	1	1	1	1	1	1		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Provinsi	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMN
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2019
17.17.	Prosentase Penanganan Pasca Bencana	%	50	55	60	70	80	85	90	90		
17.18.	Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	1	2	2	3	4	4	4		
17.19	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	C	C	C	C	C	B	B	B		
18.	Pangan											
18.1.	Regulasi ketahanan pangan	Peraturan	1	0	0	0	0	0	1	2		
18.2.	Ketersediaan pangan utama	%	97	98	98	99	99	100	100	100		
18.3	Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	50	60	70	80	90	100	100	100		
18.4	Percepatan Penganeka-ragaman Konsumsi Pangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari	Desa	55	65	75	85	95	100	100	100		
18.5	Desa Mandiri Pangan (diintervensi bantuan Pemerintah)	Desa	13	13	15	15	16	16	16	16		
18.6	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	75,9	78,9	84,9	87,9	89,9	91,9	100	100		92,5
19.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
19.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	86	87	89	91	95	100	107	107		
19.2.	Jumlah LPM	kelompok	7	7	7	8	9	9	9	9		
19.3.	PKK aktif	Tim Rak	407	407	407	407	407	407	407	407		
19.4.	Posyandu aktif		375	375	375	391	391	391	391	391		
19.5.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	65	65	65	70	75	80	85	85		
20.	Statistik											
20.1.	Buku 'Kabupaten Dalam Angka'	Buku	16	17	18	19	20	21	22	22		
20.2.	Buku 'PDRB' Kabupaten	Buku	1	1	1	1	1	1	1	1		
21.	Arsip											
21.1.	Pengelolaan arsip secara baku	%	70	75	80	85	90	95	95	95		
21.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	95	95	95	95	95	95	95	95		
22.	Komunikasi dan Informatika											

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Provinsi	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMN
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2019
22.1.	Jumlah jaringan komunikasi		108	111	115	119	123	127	131	131		
22.2.	Rasio warnet terhadap Penduduk	%	0,001000403	0,001000403	0,001000403	0,001000403	0,001000403	0,001000403	0,001000403	0,0010004		
22.3.	Jumlah surat kabar nasional/ lokal		10	10	12	14	16	18	20	20		
22.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal		6	6	7	8	9	10	11	11		
22.5.	Web site milik pemerintah daerah	ada	17	17	19	21	23	25	27	27		
22.6.	Pameran/expo	ada	1	1	2	2	3	3	3	3		
17.14.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1		
23.	Perpustakaan											
23.1.	Jumlah perpustakaan	Unit	66	66	66	66	66	66	66	66		
23.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Org	1.642	1.970	2.265	2.378	2.496	2.620	2.751	2.751		
23.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	22.023	23.627	25.044	26.546	28.138	29.846	31.636	31.636		
Fokus Layanan Urusan Pilihan												
1.	Pertanian											
1.1	Produksi Padi	Ton/Thn	74.398	75.885	78.162	80.898	83.729	87.078	93.608	93.608		82.000.000
1.2.	Produksi Jagung	Ton/Thn	2.849	2.924	3.073	3.158	3.960	3.449	3.621	3.621		
1.3.	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	26,46	26,96	27,45	27,94	28,43	28,93	29,43	29,42		
1.4.	Produksi Karet	Ton/Thn	47.129	49.486	51.960	54.558	57.286	60.150	63.158	63.158		
1.5.	Produksi Kelapa Sawit	Ton/Thn	908.654	999.519	1.099.471	1.209.418	1.330.360	1.463.396	1.609.735	1.609.735		
1.6.	Produksi Lada	Ton/Thn	507	1.014	1.115	1.227	1.350	1.485	1.633	1.633		
1.7.	Tingkat Penggunaan Benih Unggul Karet	%	60	65	70	75	80	85	90	90		
1.8.	Tingkat Penggunaan Benih Unggul Kelapa Sawit rakyat	%	20	30	40	50	60	70	80	80		
1.9.	Produksi Kakao	Ton/Thn	8,30	12,30	16,30	20,30	24,30	28,30	32,30	36,30		
1.10.	Produksi Kopi	Ton/Thn	99	102	106	109	112	116	120	120		
1.11.	Produksi peternakan	Ton/Thn	4.333	4.766	5.243	5.767	6.343	6.977	7.675	7.675		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Provinsi	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMN
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2019
1.12.	Luas Kebun											
1.12.1.	Luas Kebun Karet	Ha	90.310	91.935	92.935	93.935	94.935	95.935	96.935	96.935		
1.12.2.	Luas Kebun Kelapa Sawit	Ha	144.852	159.337	175.271	192.798	212.078	233.286	256.614	256.614		
1.12.3.	Luas Kebun Lada	Ha	1.012	1.112	1.312	1.512	1.712	1.912	2.112	2.112		
1.12.4.	Luas Kebun Kakao	Ha	125	125	225	325	425	525	625	625		
1.12.5.	Luas Kebun Kopi	Ha	100	100	200	300	400	500	600	600		
2.	Kehutanan											
2.1.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	2,09	2,22	2,34	2,46	2,58	2,71	2,83	2,83		
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral											
3.1.	Jumlah Penertiban PETI		55	48	61	50	49	48	46	303 Ha/5 Lokasi		
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	8,38	8,68	8,99	9,29	9,60	9,90	10,21	10,21		
4.	Pariwisata											
4.1.	Kunjungan wisata	Orang	813	1.050	1.110	1.230	1.510	2.280	5.198	5.198		
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rp.	200 jt	220 jt	222 jt	223 jt	224 jt	225 jt	226 jt	226 jt		
5.	Perikanan											
5.1.	Produksi perikanan	Ton/Thn	1.776	1.820	1.847	1.912	1.969	2.037	2.119	2.119	336.380	18,8 jt
6.	Perdagangan											
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	17,60	17,60	17,69	18,17	17,88	17,92	18,15	18,15		
6.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok	30	30	35	40	45	50	55	55		
7.	Perindustrian											
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	10,03	10,03	10,25	10,59	10,73	10,61	10,75	10,75		
7.2.	Pertumbuhan Industri	%	2,58	2,58	2,63	3,22	2,85	3,10	3,15	3,15		
7.3.	Jumlah industri kecil menengah	IKM	203	230	260	300	330	380	410	410		
7.4.	Cakupan bina kelompok pengerajin	Kelompok	12	12	17	20	22	25	28	136		
ASPEK DAYA SAING DAERAH												
1.	Fokus kemampuan Ekonomi Daerah											
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah	Juta Rp	13,33	13,33	13,86	14,39	16,25	17,98	19,37	19,37	1.311	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Provinsi	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMN
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2019
	tangga per kapita											
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan Perkapita	Juta Rp	7,81	7,81	8,41	9,06	10,54	11,30	12,42	12,42		
2.	Pertanian											
2.1.	Nilai Tukar Petani	Poin	98	99	100	101	102	103	103	103	102,95	
Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur												
1.	Perhubungn											
1.1.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Org	526.972	537.511	548.262	559.227	570.411	581.820	593.456	593.456		
1.2.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	Org	526.972	537.511	548.262	559.227	570.411	581.820	593.456	593.456		
2.	Penataan Ruang											
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW	%	90	97,5	99	100	100	100	100	100		
2.2.	Luas wilayah produktif	Ha	817.018,37	817.018,37	837.018,37	867.018,37	907.018,37	1.007.018,37	1.127.018,37	1.127.018,37		
2.3.	Luas wilayah industri	Ha	870.664,06	880.664,06	890.664,06	900.664,06	890.664,06	970.664,06	1.070.664,06	1.070.664,06		
2.4.	Luas wilayah perkotaan	Ha	136.397	136.397	146.397	156.397	161.997	202.197	303.397	303.397		
3.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Unit	41	41	41	42	42	42	42	42		
3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Unit	6	6	6	6	6	6	6	6		
3.3.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	Unit	357	381	404	426	448	470	492	492		
3.4.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Unit	352	354	356	358	362	365	367	367		
4.	Lingkungan Hidup											
4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	4,5	4,8	5,1	5,5	5,8	6,2	6,6	6,6		
5.	Komunikasi dan Informatika											
5.1.	Rasio ketersediaan daya listrik		54,16	60,24	65,59	70,48	74,96	79,04	82,75	86,10		
5.2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	54,16	60,24	65,59	70,48	74,96	79,04	82,75	86,10	86,4	
5.3.	Jumlah Rumah Tangga yang	Unit	453	250	250	250	250	250	250	1.500		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Provinsi	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMN
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2019
	menggunakan PLTS											
Fokus Iklim Berinvestasi												
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1.1.	Angka kriminalitas		11,36	10,75	9,41	8,87	7,21	6,38	5,12	5,12		
1.2.	Lama proses perijinan											
	SIUP	Hari	5	5	5	5	5	5	5	5		
	TDP	Hari	5	5	5	5	5	5	5	5		
	IUI	Hari	14	14	14	14	14	14	14	14		
	TDI	Hari	5	5	5	5	5	5	5	5		
	IMB	Hari	21	21	21	21	21	21	21	21		
	HO	hari	5	5	5	5	5	5	5	5		
1.3.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jenis	29	29	29	29	29	29	29	29		
1.4.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	1	1	1	1	1	1	1	1		
Fokus Sumber Daya Manusia												
1.	Ketenagakerjaan											
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3		77	80	82	89	94	97	98	98		

BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh kepala daerah hasil pemilihan umum kepala daerah Serentak pada tanggal 9 Desember tahun 2015. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Penyusunan dokumen RPJMD ini disamping berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025 juga berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019.

Disamping itu, penyusunan dokumen RPJMD ini juga memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036. Hal ini dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan tahapan ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026. Upaya perwujudan visi RPJMD 2016-2021, akan dilaksanakan melalui 6 (enam) misi, yaitu: (1) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal; (2) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat; (3) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah; (4) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial; (5) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan (6) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Selanjutnya, dokumen RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 akan digunakan sebagai pedoman dalam:

1. Penyusunan RKPD setiap tahun mulai Tahun 2017-2021;
2. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran;

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan provinsi Kalimantan Barat dan perencanaan pembangunan kabupaten yang berbatasan.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tergantung pada kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan di Kabupaten Sintang dalam kurun waktu Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Bupati berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
b. Seluruh SKPD dan pemangku kepentingan di Kabupaten Sintang agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
c. Seluruh SKPD dan pemangku kepentingan di Kabupaten Sintang agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
d. Penyusunan Renstra SKPD di Kabupaten Sintang harus berpedoman pada RPJMD;
e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra SKPD.

BAB XI

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tahap ketiga dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sintang agar proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga visi RPJMD dapat terwujud. Selanjutnya untuk menjabarkan RPJMD Tahun 2016-2021, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang setiap tahunnya.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintahan Kabupaten Sintang serta pemangku kepentingan di Kabupaten Sintang dalam kurun waktu Tahun 2016-2021, oleh karena itu partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Demikian RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini disusun untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sintang 5 (Lima) tahun kedepan.

BUPATI SINTANG

dr. H. Jarot Winarno, M.Med.PH